



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan dan strategi daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
6. Pencapaian TPB/SDGs adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan hukum dan tata kelola.
7. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB/SDGs Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB/SDGs nasional.

BAB II

RAD TPB/SDGs

Pasal 2

RAD TPB/SDGs sebagai dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di daerah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN RAD TPB/SDGs
BAB III	TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN RAD TPB/SDGs
BAB IV	TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD TPB/SDGs
BAB V	PENUTUP

- (2) Sistematika RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD TPB/SDGs ini menjadi pedoman PD untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

Kepala PD dengan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan percepatan pencapaian target TPB/SDGs kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan percepatan pencapaian target TPB/SDGs dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

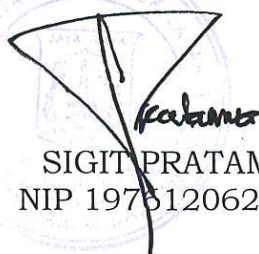
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 31019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sigit Pratama Yudha

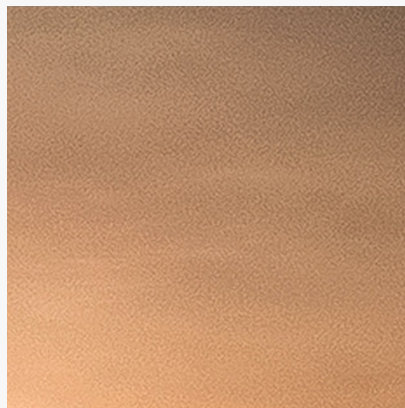
SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197312062002121009

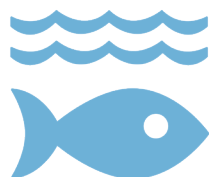
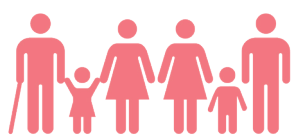
RAD 2023-2026

Provinsi
DKI Jakarta

Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)





KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebelum tahun 2030. Isu TPB sudah diarusutamakan dalam dokumen-dokumen perencanaan yang ada, diantaranya Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (Renstra) setiap perangkat daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 156 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022 yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Saat ini Perpres tersebut sudah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Atas dasar peraturan tersebut, maka perlu dibentuk RAD TPB berikutnya untuk memutakhirkan rencana aksi periode awal yang berakhir di tahun 2022.

Rencana Aksi Daerah TPB 2023-2026 memuat analisis pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB di Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan dokumen ini mempertimbangkan Dokumen RPD tahun 2023-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang memiliki isu relevan. Dokumen RAD memuat mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB 2023-2026 disertai lampiran matriks rencana program kegiatan pemerintah dan nonpemerintah.

Penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah TPB membutuhkan sinergi, kerja sama, dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai enabler untuk mengkoordinasikan partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAD TPB.

Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Kami berharap bahwa dokumen ini dapat menjadi referensi seluruh pemangku kepentingan dalam bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai TPB di Provinsi DKI Jakarta.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR SINGKATAN	7
BAB I PENDAHULUAN	12
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	19
2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	21
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	25
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	28
2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	38
2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	45
2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	51
2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua	57
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Layak untuk Semua	59
2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	66
2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	70
2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	72
2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	83
2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	89
2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	94
2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	98
2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	102
2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	107
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	109
3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	111
3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	146
3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	169
3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	227
3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender	252
3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	272
3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	281
3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	285
3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	304
3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	312
3.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	323
3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	350
3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	358
3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan	369
3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan	377
3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	383
3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	420
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD TPB/SDGs	439
4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	442
BAB V PENUTUP	453
DAFTAR PUSTAKA	456

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2015-2022	21
Gambar 2.1.2	Persentase Penduduk Miskin Kota/Kab di DKI Jakarta Tahun 2015-2022	21
Gambar 2.1.3	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan Tahun 2017-2022	22
Gambar 2.1.4	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Bidang Kesehatan	23
Gambar 2.1.5	Persentase (%) PPKS yang Terpenuhi Hak Dasarnya	24
Gambar 2.1.6	Persentase Capaian Indikator Kesehatan	24
Gambar 2.2.1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Indonesia dan DKI Jakarta Tahun 2017-2022	25
Gambar 2.2.2.	Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022	26
Gambar 2.2.3	Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta	27
Gambar 2.3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2022 di Provinsi DKI Jakarta	28
Gambar 2.3.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi DKI Jakarta	29
Gambar 2.3.3	Capaian Indikator dalam Mengakhiri Epidemik dan Penyakit Menular Tahun 2017-2022 di DKI Jakarta	31
Gambar 2.3.4	Persentase Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta Keluarga Berencana Tahun 2018-2022 di Provinsi DKI Jakarta	33
Gambar 2.3.5	Capaian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta	34
Gambar 2.3.6	Target dan Capaian Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta	34
Gambar 2.3.7	Persentase Penduduk DKI Jakarta yang Memiliki Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	35
Gambar 2.3.8	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta	36 39
Gambar 2.4.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta	
Gambar 2.4.2	Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Kota/Kab Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	39
Gambar 2.4.3	Proporsi Remaja dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2017-2022 di DKI Jakarta	40
Gambar 2.4.4	Proporsi Dewasa dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2019-2022 di DKI Jakarta	41 42
Gambar 2.4.5	Persentase Sekolah Terakreditasi A di DKI Jakarta	43
Gambar 2.4.6	Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang Bersertifikat Pendidik di DKI Jakarta	
Gambar 2.5.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta	45
Gambar 2.5.2	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun	47 47
Gambar 2.5.3	Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15 -19 Tahun di DKI Jakarta selama Tahun 2018-2022	48
Gambar 2.5.4	Proporsi Partisipasi dan Kesempatan Perempuan untuk Memimpin Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta	
Gambar 2.5.5	Persentase Unmet need KB dan Pengetahuan PUS tentang Metode Kontrasepsi Modern di DKI Jakarta	49 51
Gambar 2.6.1	Cakupan Pelayanan Air Bersih	
Gambar 2.6.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan	52 54
Gambar 2.6.3	Indeks Kualitas Air Tahun 2014-2022	55
Gambar 2.6.4	Peta D3TLH Penyedia Air di Wilayah Fungsional Tahun 2019	55
Gambar 2.6.5	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
Gambar 2.6.6	Peta Tutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Untuk Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022	56 57
Gambar 2.7.1.	Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi DKI Jakarta	58
Gambar 2.7.2.	Bauran Energi Terbarukan Provinsi DKI Jakarta	60
Gambar 2.8.1.	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	61
Gambar 2.8.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta	62
Gambar 2.8.3.	Persentase Setengah Pengangguran Jakarta	63
Gambar 2.8.4.	Jumlah Wisatawan Mancanegara ke DKI Jakarta	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.8.6.	Proporsi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jakarta	64
Gambar 2.9.1.	Pertumbuhan Industri Manufaktur di Provinsi DKI Jakarta	66
Gambar 2.9.2.	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	67
Gambar 2.9.3.	Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Provinsi DKI Jakarta	69
Gambar 2.10.1.	Rasio Gini DKI Jakarta dan Nasional	70
Gambar 2.11.1	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	72
Gambar 2.11.2	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum	73
Gambar 2.11.3	Rekap Data Bencana di Jakarta Tahun 2019-2022	75
Gambar 2.11.4	Rekap Data Korban Bencana di Jakarta Tahun 2019-2022	76
Gambar 2.11.5	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah di DKI Jakarta	78
Gambar 2.11.6	Indeks Kualitas Udara di Jakarta Tahun 2013-2022	79
Gambar 2.11.7	Rata-rata Konsentrasi PM2.5 di Jakarta	80
Gambar 2.12.1	Persentase Pengurangan Sampah (%)	83
Gambar 2.12.2	Persentase Penanganan Sampah (%)	83
Gambar 2.13.1.	Capaian Reduksi Emisi GRK dari Perbandingan Tingkat Emisi Baseline dan Inventori di DKI Jakarta Periode 2015-2020	89
Gambar 2.13.2.	Capaian Reduksi Emisi GRK Dibandingkan Target Reduksi Emisi GRK pada Tahun 2030 (Pergub Nomor 90 Tahun 2021)	90
Gambar 2.15.1	Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi DKI Jakarta	98
Gambar 2.15.2	Perdagangan Satwa dan Tumbuhan yang Termasuk Appendix CITES	99
Gambar 2.16.1	Grafik Angka Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk	102
Gambar 2.16.2	Grafik Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM	103
Gambar 2.16.3	Grafik Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta	104
Gambar 2.16.4	Grafik Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	105
Gambar 2.17.1.	Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta	107
Gambar 2.17.2.	Total Pendapatan Daerah Sebagai Proporsi terhadap Belanja Daerah dan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta	108
Gambar 4.1.1	Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD	443
Gambar 4.1.2	Bagan Struktur Organisasi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs	445
Gambar 4.3.1	Keterangan Pencapaian TPB	446

DAFTAR TABEL

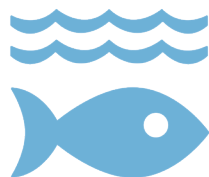
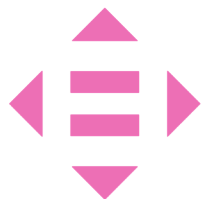
Tabel 1.1	Keselarasan TPB Terhadap Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RPJPD 2005-2025, dan RPD 2023-2026	14
Tabel 2.3.1	Pelayanan Sesuai Standar untuk Ibu dan Cakupan Imunisasi Anak Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta	30
Tabel 2.3.2	Capaian Indikator dalam Mengakhiri Epidemi dan Penyakit Menular Tahun 2017-2022 di DKI Jakarta	31
Tabel 2.3.3	Capaian Indikator dalam Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Mental Tahun 2018-2022 di Provinsi DKI Jakarta	32
Tabel 2.4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK/ sederajat Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta	38
Tabel 2.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta	38
Tabel 2.4.3	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Usia 3-6 Tahun) Tahun 2017-2022 di DKI Jakarta	39
Tabel 2.5.1	Capaian dan Realisasi Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender	45
Tabel 2.5.2	Realisasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Kaum Perempuan Tahun 2021-2022 di DKI Jakarta	46
Tabel 2.6.1	Tingkat Ketersediaan Air di Setiap DAS	53
Tabel 2.7.1.	Capaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	58
Tabel 2.8.1.	Kedaaan Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta	62
Tabel 2.8.2.	Capaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	65
Tabel 2.9.1.	Capaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	69
Tabel 2.10.1.	Capaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	71
Tabel 2.11.1	Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta	77
Tabel 2.11.2	Rencana Aksi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara	81
Tabel 2.12.1	Data Limbah B3 Cair, Padat dan Elektronik (e-waste) yang Dikelola Tahun 2018 sampai 2021	87
Tabel 2.13.1	Aksi dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021	93
Tabel 2.15.1	Persentase Penambahan Rasio RTH Hutan, Taman, dan Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	101
Tabel 2.16.1	Capaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	105
Tabel 2.17.1.	Capaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	108
Tabel 3.1.1	Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	114
Tabel 3.2.1	Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	149
Tabel 3.3.1	Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	173
Tabel 3.4.1	Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	230
Tabel 3.5.1	Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender	256
Tabel 3.6.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak	276
Tabel 3.7.1.	Target dan Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	283
Tabel 3.8.1.	Target dan Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	289
Tabel 3.9.1.	Target dan Indikator Tujuan Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	307
Tabel 3.10.1	Target dan Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	315
Tabel 3.11.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	332
Tabel 3.12.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	354
Tabel 3.13.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	362
Tabel 3.14.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 14 Ekosistem Lautan	373
Tabel 3.15.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 15 Ekosistem Daratan	381
Tabel 3.16.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	388
Tabel 3.17.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	427
Tabel 3.17.2.	Target dan Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	435
Tabel 4.3.1	Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian TPB	446
Tabel 4.3.2	Formulir Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Pemerintah	447
Tabel 4.3.3	Formulir Self Assessments Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Nonpemerintah untuk Organisasi Masyarakat/CSO, Filantropi, dan Akademia	448
Tabel 4.3.4	Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017	449
Tabel 4.3.5	Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	450
Tabel 4.3.6	Format Pelaporan Pembelajaran TPB	450

DAFTAR SINGKATAN

3R	: <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>
ADHB	: <i>Atas Dasar Harga Berlaku</i>
ADHK	: <i>Atas Dasar Harga Konstan</i>
AFOLU	: <i>Agriculture, Forestry, and Other Land Use</i>
AMF	: <i>Asean Mayor Forums</i>
APBD	: <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>
APBN	: <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional</i>
B3	: <i>Bahan Beracun dan Berbahaya</i>
BPBD	: <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i>
BPKD	: <i>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>
BPS	: <i>Badan Pusat Statistik</i>
BRT	: <i>Bus Rapid Transit</i>
BSF	: <i>Black Soldier Fly</i>
BUMD	: <i>Badan Usaha Milik Daerah</i>
CAP	: <i>Community Action Plan</i>
CBD	: <i>Central Business District</i>
COD	: <i>Car Oriented Development</i>
CIP	: <i>Collaborative Implementation Program</i>
CITES	: <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAS	: <i>Daerah Aliran Sungai</i>
DIKPLHD	: <i>Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah</i>
EBT	: <i>Energi Baru Terbarukan</i>
EPR	: <i>Extended Producer Responsibility</i>
FDTJ	: <i>Forum Diskusi Transportasi Jakarta</i>
FPSA	: <i>Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara</i>
GPS	: <i>Global Positioning System</i>
GRK	: <i>Gas Rumah Kaca</i>
IBSAP	: <i>Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan</i>
IKA	: <i>Indeks Kualitas Air</i>
IKL	: <i>Indeks Kualitas Lahan</i>
IKLH	: <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>
IKTL	: <i>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</i>
IKU	: <i>Indeks Kualitas Udara</i>
ITF	: <i>Intermediate Treatment Facility</i>
IUCN	: <i>The International Union for Conservation of Nature</i>
IPA	: <i>Instalasi Pengolahan Air</i>
IPPU	: <i>Industrial Processes and Product Use</i>
ITDP	: <i>Institute for Transport Development Policy</i>
JAKSTRADA	: <i>Kebijakan dan Strategi Daerah</i>
JIF	: <i>Jakarta Investment Forum</i>
JPI	: <i>Jakarta Property Institute</i>
JSS	: <i>Jakarta Sewerage System</i>
KIAT	: <i>Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur</i>

KIAT	: <i>Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur</i>
KJA	: <i>Keramba Jaring Apung</i>
KLHS	: <i>Kajian Lingkungan Hidup Strategis</i>
Kosmik	: <i>Komunitas Sepeda/Motor Listrik</i>
kWh	: <i>Kilowatt-hour</i>
Lazismu	: <i>Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah</i>
Lazisnu	: <i>Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama</i>
LED	: <i>Light-Emitting Diode</i>
LNPRT	: <i>Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga</i>
LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
MGMAC	: <i>Meeting of Governors and Mayors ASEAN Capitals</i>
MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
NBS	: <i>Nature Based Solutions</i>
NEET	: <i>Not in Education, Employment, or Training</i>
NKT	: <i>Nilai Konservasi Tinggi</i>
NRW	: <i>Non-Revenue Water</i>
ODF	: <i>Open Defecation Free</i>
PAD	: <i>Pendapatan Asli Daerah</i>
PCB	: <i>Printed Circuit Board</i>
PD	: <i>Perangkat Daerah</i>
PDRB	: <i>Produk Domestik Regional Bruto</i>
PJU	: <i>Penerangan Jalan Umum</i>
PLTS	: <i>Pembangkit Listrik Tenaga Surya</i>
PLTSa	: <i>Pembangkit Listrik Tenaga Sampah</i>
PM	: <i>Particulate Matter</i>
PRK	: <i>Panduan Rancang Kota</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
POD	: <i>Pedestrian-Oriented Development</i>
RAD	: <i>Rencana Aksi Daerah</i>
RE	: <i>Rasio Elektrifikasi</i>
RDF	: <i>Refuse Derived Fuel</i>
RDTR	: <i>Rencana Desain Tata Ruang</i>
RIP	: <i>Rencana Induk Pengelolaan</i>
RPD	: <i>Rencana Pembangunan Daerah</i>
RPRKD	: <i>Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah</i>
RTH	: <i>Ruang Terbuka Hijau</i>
RTRW	: <i>Rencana Tata Ruang Wilayah</i>
RW	: <i>Rukun Warga</i>
RZWP3K	: <i>Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>
SCP	: <i>Sustainable Consumption and Production</i>
SDKP	: <i>Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</i>
SJUT	: <i>Sarana Jaringan Utilitas Terpadu</i>
SPALD-T	: <i>Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat</i>
SPAM	: <i>Sistem Penyediaan Air Minum</i>
SPKLU	: <i>Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum</i>
SPPU	: <i>Strategi Pengendalian Pencemaran Udara</i>
STBM	: <i>Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</i>
SWRO	: <i>Sea Water Reverse Osmosis</i>
TDM	: <i>Transportation Demand Management</i>
TOD	: <i>Transit-Oriented Development</i>
TPA	: <i>Tempat Pembuangan Akhir</i>
TPB	: <i>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>
TPS	: <i>Tempat Penampungan Sementara</i>
TPST	: <i>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu</i>

TPT : *Tingkat Pengangguran Terbuka*
UCLG-ASPAC : *United Cities and Local Governments Asia-Pacific*
UHI : *Urban Heat Island*
WBTB : *Warisan Budaya Tak Benda*
WD : *Wilayah Daerah*
WHO : *World Health Organization*
WTP : *Wajar Tanpa Pengecualian*



BAB 1

PENDAHULUAN

Secara umum, Bab 1 memberikan telaahan komprehensif mengenai harmonisasi antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dua dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI



Bab ini juga menjelaskan mekanisme pendanaan untuk mewujudkan implementasi TPB dengan menekankan aspek keuangan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Serta, bab ini juga membahas teknis penentuan yang digunakan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi DKI Jakarta.

1.1. Keselarasan TPB Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-

Untuk mencapai negara dengan standar global diperlukan penyelarasan dengan tujuan-tujuan yang tercantum pada TPB. Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, telah merumuskan rencana-rencana strategis untuk mengarahkan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN periode 2020-2024 menetapkan tujuan utama, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tujuan ini ingin dicapai melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Upaya ini harus mendapat dukungan bersama di tingkat daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Provinsi DKI Jakarta memiliki visi menjadi ibu kota yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global yang termaktub dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

Terdapat enam misi pokok dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta. Pertama, meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana sarana wilayah. Kedua, meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas. Ketiga, membangun ketahanan sosial dan budaya. Keempat, meningkatkan daya dukung. Kelima, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Keenam, meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan, serta memperkuat inovasi dan kreativitas daerah. Secara strategis, misi tersebut menyasar transformasi pada tiga hal: daya saing, kesejahteraan, dan pelayanan publik.

Terdapat tiga aspek pembangunan dalam RPD 2023-2026 yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Ketiganya mencakup fokus kerja dan isu yang luas. Di bawah ini dijelaskan lebih lanjut mengenai keselarasan TPB terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RPJPD 2005-2025, dan RPD 2023-2026:

Tabel 1.1 Keselarasan TPB Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RPJPD 2005-2025 dan RPD 2023-2026

RPJMN 2020-2024 (Perpres 18/2020)		RPJPD 2005-2025 (Perda 6/2012)	RPD 2023-2026			TPB
Misi Presiden	7 Agenda Pembangunan	Misi	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah	Ketahanan ekonomi inklusif Pemerataan pembangunan	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja Pengurangan Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Tujuan 8 Tujuan 9 Tujuan 10 Tujuan 1 Tujuan 2
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Membangun ketahanan sosial dan budaya	Manusia sehat, berdaya saing, dan setara	Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender Penguatan Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.	Tujuan 3 Tujuan 4 Tujuan 5 Tujuan 10 Tujuan 16
Penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara persatuan	Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan	Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat Akselerasi Transformasi Digital dan Berkembangnya Ekosistem Kota Cerdas Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Tujuan 16 Tujuan 9 Tujuan 17
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah Meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan SDA	Ketahanan terhadap bencana Kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas	Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota	Tujuan 6 Tujuan 7 Tujuan 9 Tujuan 11 Tujuan 12 Tujuan 13 Tujuan 14 Tujuan 15

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, dan RPD Tahun 2023-2026

Tabel di atas menunjukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 telah sejalan dengan 17 (tujuh belas) tujuan dari TPB. Isu-isu strategis dalam RPD 2023-2026 selaras dengan TPB. Misalnya, isu-isu strategis ketahanan ekonomi inklusif selaras dengan TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), dan TPB 10 (Berkurangnya Ketimpangan). Keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan TPB merupakan hal yang penting untuk merumuskan kebijakan dan rencana aksi yang mendukung visi pembangunan yang berkelanjutan.

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menegaskan komitmennya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebelum tahun 2030. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 1920 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022, Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Tahun 2017-2022 Nomor 156 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan berkelanjutan Tahun 2017-2022, dan Keputusan Gubernur Nomor 426 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026. Regulasi-regulasi ini menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta.

Melalui Rencana Aksi Daerah (RAD), setiap aspek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta diselaraskan dengan target pencapaian TPB. Berbagai program dan kegiatan dari perangkat daerah disinergikan dengan 17 (tujuh belas) Tujuan TPB. Begitu pula dengan upaya yang dilakukan oleh nonpemerintah, seluruh partisipasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian TPB akan dikategorisasikan. Dengan demikian, RAD menjadi dokumen bersama yang menggambarkan sinergi ragam inisiatif dan upaya dalam mendorong pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan.

Provinsi DKI Jakarta memiliki tim yang dibentuk oleh gubernur untuk melaksanakan RAD. Kepala Bappeda menjadi koordinator yang memimpin kerja-kerja harian di Provinsi DKI Jakarta. Sementara, perangkat daerah lain mengisi unsur kelompok kerja di dalamnya. Selain itu, terdapat pula unsur Sekretariat TPB yang membantu kerja harian tim yang diisi oleh kalangan profesional.

Tim tersebut berperan mengoordinasikan berbagai pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mencapai TPB. Selain itu, tim Sekretariat TPB juga menyusun laporan secara berkala setiap semester dan setiap tahun untuk disampaikan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri. Laporan tersebut berisi hasil monitoring, analisis kecenderungan (tren), dan rekomendasi kebijakan dari pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan TPB.

Adanya RAD dan Tim Koordinasi yang mengimplementasikan TPB menjadi penanda kuatnya komitmen Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga didukung dengan berbagai inisiatif maupun terobosan dari berbagai perangkat daerah dalam mengakselerasi pencapaian TPB.

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan

Terdapat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan TPB, yakni universal, integration, dan *no one left behind*. Universal artinya tujuan ini menjadi misi goal yang dilaksanakan di seluruh dunia dengan tujuan dan sasaran tertentu yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Kemudian integrasi yang dimaksud, yakni dalam pelaksanaannya harus mengintegrasikan semua dimensi baik itu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola, yang keempatnya dilihat dalam kerangka yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang dimaksud prinsip *no one left behind* artinya dalam implementasinya dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan kebermanfaatannya bagi semua, khususnya kelompok-kelompok rentan.

Prinsip-prinsip ini juga diupayakan untuk diterapkan dalam seluruh tahapan pelaksanaan TPB di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penerapannya juga disinergikan dengan semua pemangku kepentingan yang meliputi partisipasi dari pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat, dunia usaha, filantropi, dan akademisi. Dalam kemitraan TPB ini, para pemangku kepentingan secara aktif mendorong penanaman kepercayaan, pembentukan kemitraan yang adil, praktik yang akuntabel, keterlibatan partisipatif, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

1.4. Pembiayaan TPB

Untuk menjalankan seluruh program yang mendukung TPB di Provinsi DKI Jakarta, program-program ini pun memerlukan dukungan pembiayaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan program TPB. Adapun skema pembiayaan program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta melibatkan kontribusi dari nonpemerintah, seperti filantropi, dan pelaku usaha melalui sarana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

1.5. Metodologi Penyusunan RAD

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Nomor 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi Daerah TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana TPB Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional. Provinsi DKI Jakarta menyusun RAD TPB 2023-2026 dengan mengacu kepada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun metodologi penyusunan RAD tersebut merujuk kepada Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs Edisi II yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/ Bappenas.

Penyusunan RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksana Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, dengan proses meliputi:

1. Penetapan Tim Pelaksana dan Pokja

Menetapkan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja (Pokja) yang didasarkan pada atas Keputusan Gubernur Nomor 426 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2. Pelaksanaan Rapat Pleno

Melakukan rapat pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB dengan melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan indikator dalam TPB, serta turut mengundang perwakilan Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas/Bappenas RI. Selanjutnya, sidang pleno kedua melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari filantropi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi. Pelaksanaan rapat pleno kedua menekankan keterlibatan aktif dari nonpemerintah dalam penyusunan RAD serta berpartisipasi dalam program dan kegiatan untuk mempercepat pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta;

3. Pembahasan Draf

Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun RAD TPB dengan tahapan:

- Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB
- Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator, serta keluaran (output) terkait dengan pencapaian TPB.
- Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana.

4. Pelaksanaan Rapat Pleno Konsolidasi Lintas Tujuan

Melaksanakan pleno konsolidasi lintas tujuan dan penyempurnaan draf oleh masing-masing pokja berdasar masukan hasil pembahasan dari masing-

5. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Melakukan konsultasi publik atas draf untuk menggali masukan dan penyempurnaan dari publik.

6. Penyempurnaan Draf

Melakukan penyempurnaan draf final RAD TPB oleh Tim Pelaksana TPB

7. Pengesahan

RAD TPB disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggungjawab Dewan Pengarah Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

8. Sosialisasi dan Diseminasi

Melakukan sosialisasi dan diseminasi RAD TPB kepada seluruh pemangku kepentingan

1.4. Teknis Penentuan Indikator RAD TPB Provinsi DKI

Penentuan indikator RAD TPB Provinsi DKI Jakarta merujuk pada Metadata Indikator Edisi II (2020) sebagai referensi untuk menentukan indikator daerah. Teknis penentuan indikator TPB Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Disagregasi data terdapat pada level provinsi;
2. Kesesuaian dengan karakteristik provinsi;
3. Kesesuaian dengan wewenang pemerintah provinsi;
4. Kemungkinan penyediaan data indikator di tingkat

1.5. Sistematika RAD

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB terdiri atas lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan keselarasan TPB terhadap RPD, komitmen pelaksanaan pencapaian TPB, prinsip-prinsip pelaksanaan TPB, pembiayaan TPB, metodologi penyusunan RAD TPB, teknis penentuan indikator RAD TPB, dan sistematika RAD TPB. Bab kedua membahas status capaian dan tantangan dari pelaksanaan TPB di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 pada setiap tujuan dengan membahas indikator yang relevan, sesuai dengan Laporan Pemantauan dan Laporan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta yang dipublikasikan setiap semester dan setiap tahun.

Bab ketiga mengulas target dan arah kebijakan pencapaian TPB pada periode tahun 2023-2026 yang merujuk pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan beberapa dokumen kebijakan lainnya. Berdasarkan target dan arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan program pembangunan untuk pencapaian setiap tujuan TPB yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan. Bab ketiga juga menyertakan matriks target indikator tahun 2023-2026 di setiap tujuan.

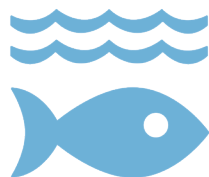
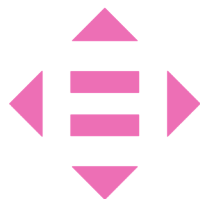
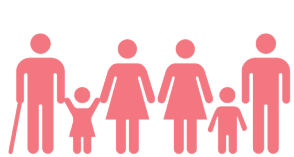
Bab keempat menjelaskan tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari RAD yang telah disusun. Dimulai dari mekanisme pemantauan dan evaluasi, jadwal pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta, dan publikasi hasil pemantauan dan evaluasi. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan voluntary self-assessment. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD TPB. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB, khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

BAB 2 KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN

Bab 2 menguraikan tentang status capaian dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan TPB di Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2017-2022. Penilaian terhadap status capaian dan tantangan ini merujuk pada indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Tahun 2017-2022.





MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANAPUN



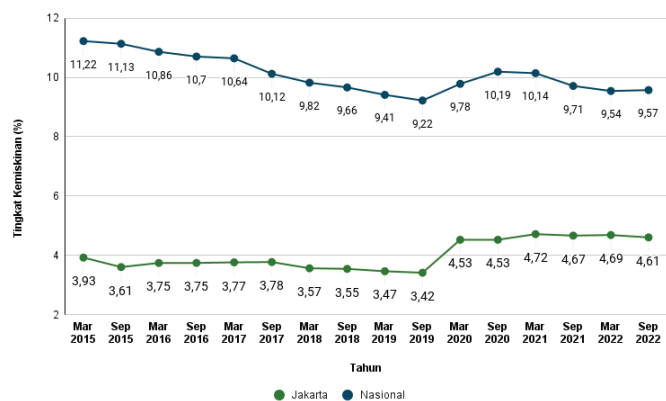
Jakarta Sejahtera dan Pulih Pasca Pandemi

Sejak pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di tingkat nasional maupun di Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, angka kemiskinan cenderung membaik selama periode tahun 2017-2019. Selama periode pandemi, angka kemiskinan mengalami peningkatan yang signifikan, naik sebesar 1,11% (satu koma sebelas persen) dari 3,42% (tiga koma empat puluh dua persen) pada bulan September 2019 menjadi 4,53% (empat koma lima puluh tiga persen) pada bulan Maret 2020.

Angka kemiskinan ini terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 4,72% (empat koma tujuh puluh dua persen) pada bulan Maret 2021 di DKI Jakarta. Tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi selama periode tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada pengukuran terakhir, terjadi penurunan kemiskinan menjadi 4,61% (empat koma enam puluh satu persen) pada bulan September tahun 2022 (BPS, 2023).

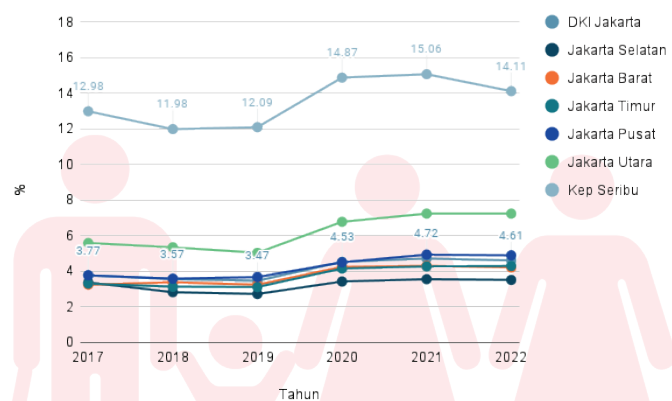
Sementara itu, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan, dari 9,54% (sembilan koma lima puluh empat persen) (September 2022) menjadi 9,57% (sembilan koma lima puluh tujuh persen) (September 2022). Meskipun terjadi penurunan di DKI Jakarta, penting untuk terus meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan agar 502,04 (lima ratus dua koma nol empat) orang miskin dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan kota/kabupaten administrasi selama tahun 2017-2022 mengalami variasi yang signifikan pada setiap wilayah.

Gambar 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2015-2022



Sumber: BPS (2023), diolah

Gambar 2.1.2 Persentase Penduduk Miskin Kota/Kab di DKI Jakarta Tahun 2015-2022



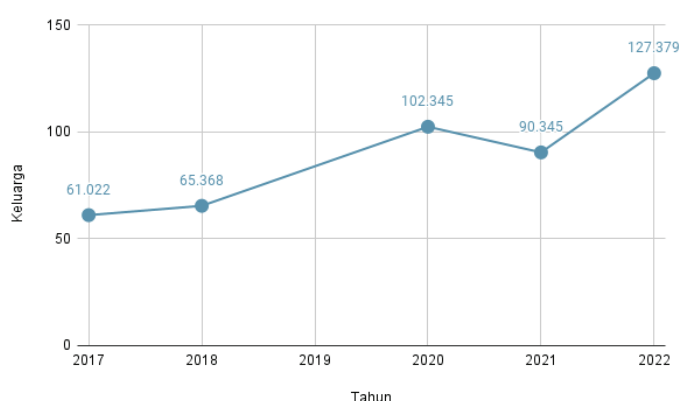
Sumber: BPS (2022), diolah

Angka Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya dengan persentase sebesar 14,11% (empat belas koma sebelas persen), angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) pada bulan Maret 2022.

Upaya perlindungan sosial sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan sosial menjadi solusi untuk menangani krisis yang terjadi pada masyarakat miskin. .

Upaya Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Akses Masyarakat Miskin

Gambar 2.1.3 Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan Tahun 2017 - 2022



Sumber: Dinas Sosial, 2023

Program perlindungan sosial dapat berbentuk bantuan finansial, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada keluarga masyarakat miskin. Bantuan finansial yang diberikan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan, dimana terdapat 127.379 (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) keluarga yang mendapatkan bantuan pada tahun 2022

Bantuan terkait jaminan sosial dan kesehatan juga dapat dilihat berdasarkan proporsi kepesertaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

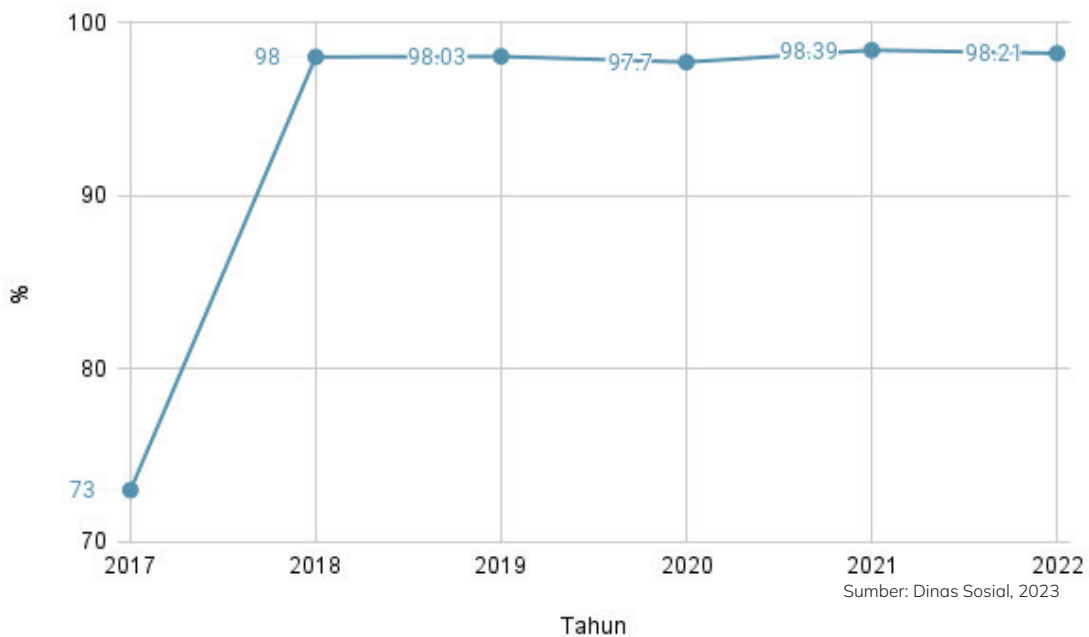
Pada tahun 2022, tingkat kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 98,2% (sembilan puluh delapan koma dua puluh satu persen), menandai peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2017 yang hanya 73% (tujuh puluh tiga persen). Sementara itu, proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan mencapai 112,04% (seratus dua belas koma nol empat persen) pada semester 1 tahun 2021.

Jumlah yang melebihi 100% (seratus persen) tersebut disebabkan oleh tenaga kerja yang berdomisili di luar Jakarta tetapi bekerja di Provinsi DKI Jakarta. Capaian-capaian ini menunjukkan adanya upaya yang positif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perlindungan sosial dan kesehatan.

Upaya dalam memberikan perlindungan sosial juga tercermin dalam pemenuhan hak dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS sebagai pengganti dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemenuhan hak dasar ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara. Hasil dari upaya ini menunjukkan perbaikan signifikan, dengan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PPKS meningkat dari 69,82% (enam puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) pada tahun 2021 menjadi 95,29% (sembilan puluh lima koma dua puluh sembilan persen)

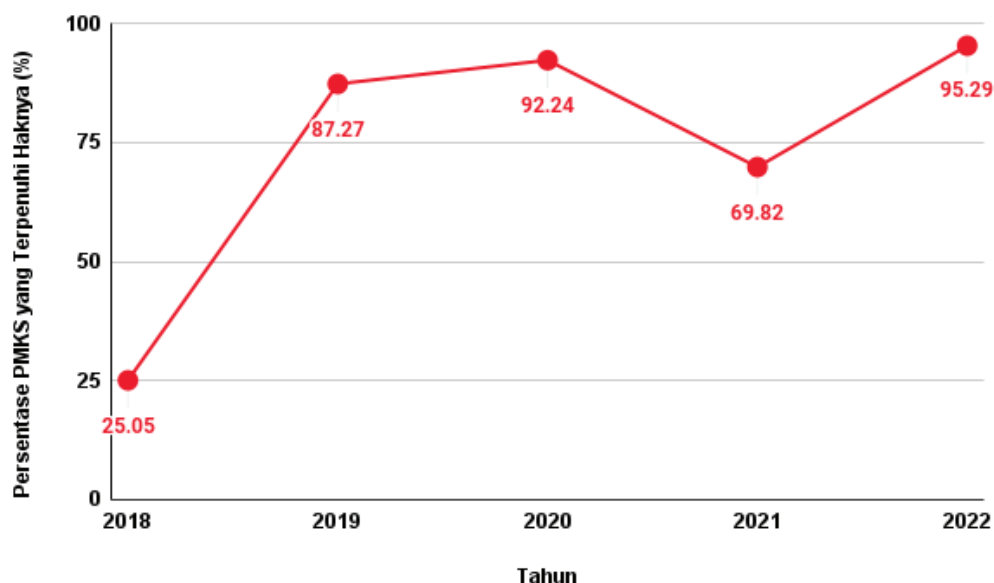
Gambar 2.1.4 Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Bidang Kesehatan



Sejumlah indikator dalam upaya dalam peningkatan perlindungan sosial dalam sektor kesehatan mengalami pencapaian yang berbeda. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan persentase ibu yang mendapatkan layanan persalinan telah mencapai 100% (seratus persen). Cakupan imunisasi lanjutan pada anak usia 12-23 (dua belas hingga dua puluh tiga) bulan juga mengalami peningkatan dari 91,9% (sembilan puluh satu koma sembilan persen) pada tahun 2021 menjadi 97,2% (sembilan puluh tujuh koma dua persen) pada tahun 2022.

Angka ini jauh melampaui target 60% (enam puluh persen) yang ditetapkan dalam RAD TPB Tahun 2017-2022. Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan mencapai 65,41% (enam puluh lima koma empat puluh satu persen) pada tahun 2022, capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya mencapai 60% (enam puluh persen).

Gambar 2.1.5 Persentase (%) PPKS yang Terpenuhi Hak Dasarnya

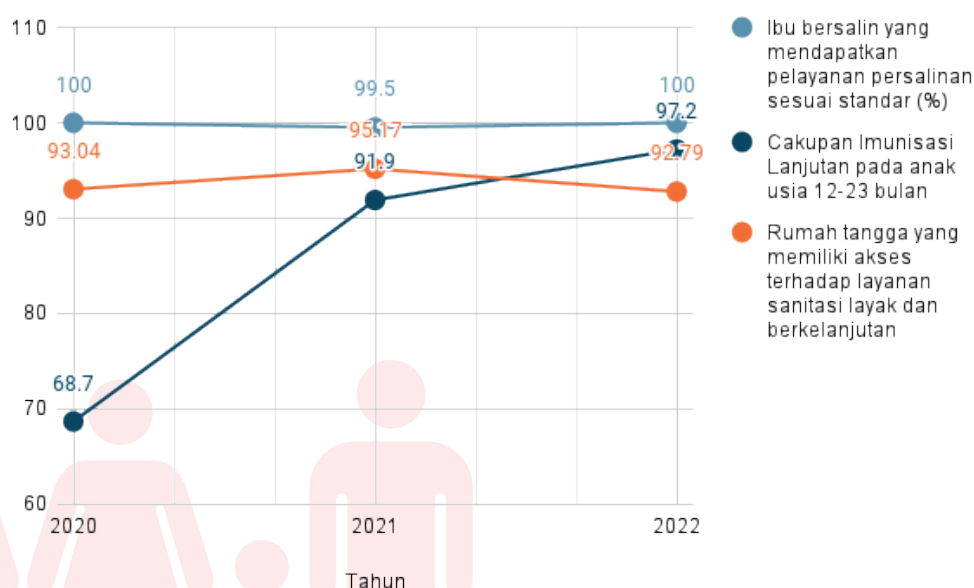


Sumber: Dinas Sosial, 2023

DKI Jakarta dihadapkan sejumlah Tantangan terbesar pada tujuan 1 (satu) pada semester 1 (satu) tahun 2021 ini masih pada pandemi Covid-19. Terlebih setelah sempat dilonggarkan, kemudian terjadi gelombang kedua yang dipicu munculnya varian baru: varian Delta yang memiliki kemampuan penyebaran sangat cepat. Kembali, pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan untuk mencegah semakin tidak terbendungnya penyebaran Covid-19.

Hal ini membuat masyarakat kembali tidak leluasa dalam mencari nafkah, khususnya bagi pekerja informal. Selain itu semakin banyaknya masyarakat lapisan bawah yang mendapatkan penyakit Covid-19 juga menambah beban bagi diri dan keluarganya. Terjadi potensi penambahan kelompok miskin dan rentan baru yaitu kelompok anak-anak yang kedua orang tuanya meninggal atau keluarga yang pencari nafkah utamanya meninggal karena Covid-19.

Gambar 2.1.6 Persentase Capaian Indikator Kesehatan



Sumber: Dinas Kesehatan (2023), diolah

MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN



Menghilangkan Kelaparan dan Menjamin Akses Pangan

Mengakhiri kelaparan dan menjamin ketahanan pangan adalah salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat akses masyarakat terhadap jumlah pangan yang mencukupi adalah Prevalence of Undernourishment (PoU). Semakin tinggi angka PoU, semakin besar proporsi penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif (Metadata TPB Edisi II, 2020).

Angka PoU meningkat bersamaan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem, kenaikan harga minyak goreng serta Bahan Bakar Minyak dan kondisi geopolitik internasional juga memberikan pengaruh terhadap ketersediaan pangan yang berkualitas untuk masyarakat. Pada tahun 2022, angka PoU Provinsi DKI Jakarta mencapai 3,42% (tiga koma empat puluh dua persen). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan PoU nasional, di angka 10,21% (sepuluh koma dua puluh satu persen) pada tahun 2022. Sebelumnya, Angka PoU mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Kenaikan ini menunjukkan bahwa masalah konsumsi dan ketahanan pangan tidak dapat diabaikan. Dibutuhkan upaya lanjutan untuk memastikan akses pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta.

Gambar 2.2.1 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Indonesia dan DKI Jakarta Tahun 2017-2022



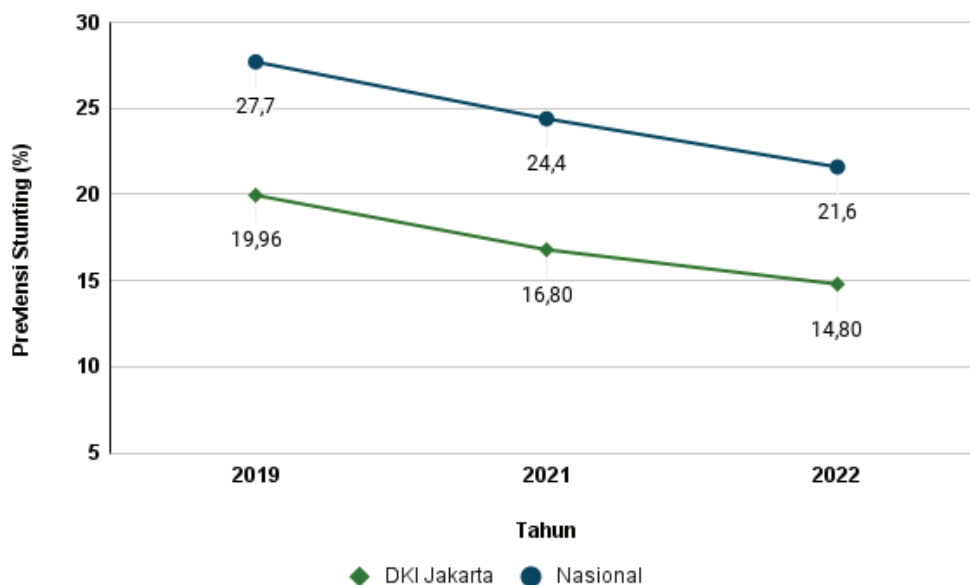
Sumber: BPS (2023), diolah



Percepatan Penurunan Stunting

Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas DKI Jakarta dan telah menunjukkan mengalami penurunan dari 16,8% (enam belas koma delapan persen) pada tahun 2021 menjadi 14,8% (empat belas koma delapan persen) pada tahun 2022 (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Angka ini lebih rendah dibandingkan angka prevalensi stunting nasional dan menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai peringkat kedua terendah di Indonesia. Selain itu, prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) pada anak balita (bawah 5 tahun) juga menurun dari 4% (empat persen) pada tahun 2021 menjadi 2,33 % (dua koma tiga puluh tiga persen) pada tahun 2022.

Gambar 2.2.2. Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

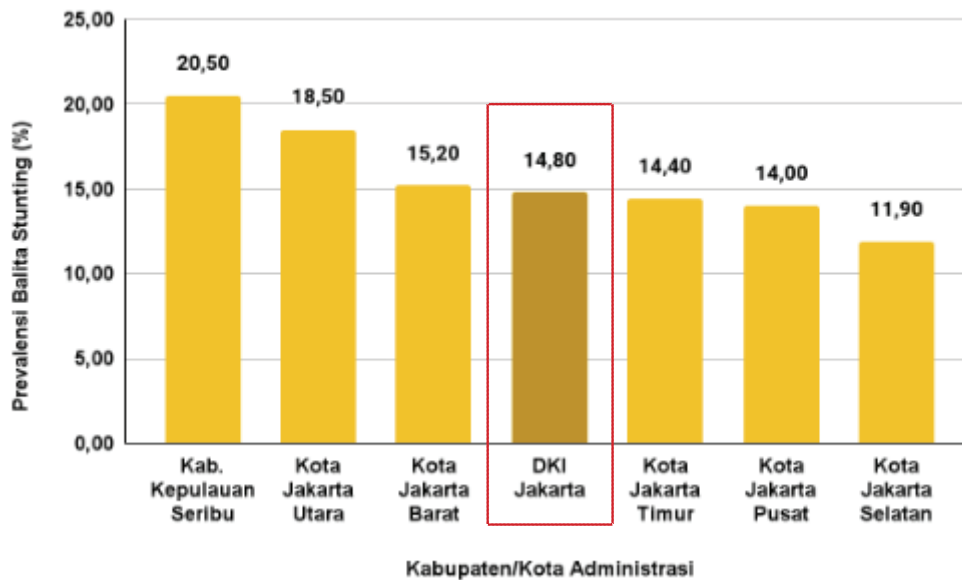


Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Kemenkes, 2022

Data SSGI (2022) menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Kepulauan Seribu lebih tinggi dibandingkan lima kota administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Angka prevalensi stunting Kepulauan Seribu mencapai 20,5% (dua puluh koma lima persen) pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,3% (sembilan belas koma tiga persen). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian lebih lanjut dan tindakan khusus diperlukan untuk mengatasi masalah stunting di wilayah administrasi ini, mengingat angka prevalensi yang masih jauh di atas angka prevalensi provinsi.



Gambar 2.2.3 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Kemenkes, 2022

Sejumlah indikator yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan usia balita menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2022, persentase pelayanan kesehatan yang diberikan untuk anak usia 0-59 (nol hingga lima puluh sembilan) tahun telah mencapai 109,8% (seratus sembilan koma delapan persen) pada tahun 2022. Begitu juga, persentase anak balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan telah mencapai 100% (seratus persen). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap kesehatan dan gizi anak.

Meskipun DKI Jakarta telah menunjukkan perbaikan dan komitmen dalam pemenuhan akses terhadap pangan dan upaya penurunan stunting, berbagai tantangan masih harus diatasi. Permasalahan gizi kronik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi, usia ibu, pendidikan gizi dan pengetahuan pola asuh yang tepat, jarak kehamilan yang dekat, asupan nutrisi di usia subur dan selama kehamilan, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, keamanan pangan, serta kurangnya asupan gizi pada bayi harus diselesaikan untuk mengurangi prevalensi stunting.

Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan sendiri karena menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan penurunan pendapatan secara drastis bagi sebagian warga DKI Jakarta, terutama pekerja lepas dan harian. Pembatasan aktivitas masyarakat juga berdampak pada pemenuhan kualitas pangan dan asupan gizi serta menghambat akses layanan kesehatan, terutama untuk remaja putri, ibu hamil, serta anak-anak di bawah dua tahun.

Tantangan kenaikan harga kebutuhan pokok dan dampak krisis global juga turut dirasakan di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi mereka. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, berbagai upaya harus terus dilakukan, melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat mempercepat penghapusan stunting, malnutrisi, dan kelaparan di DKI Jakarta.

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA



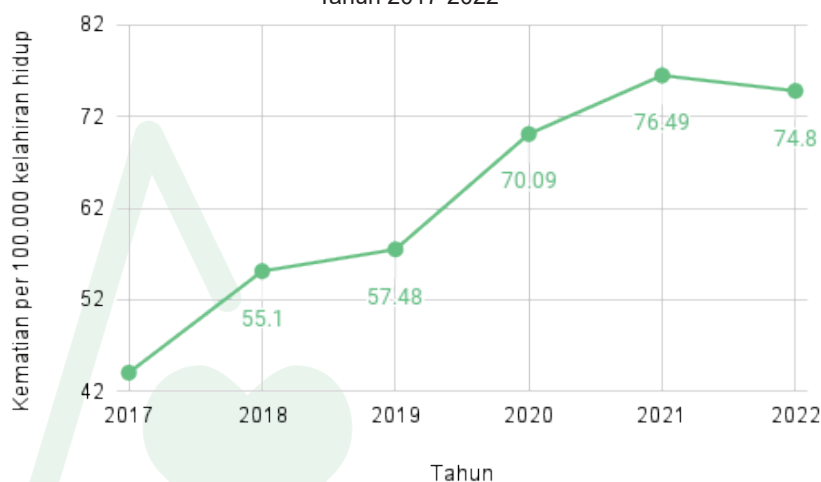
Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak

Upaya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak telah memperoleh hasil yang positif. Hal ini tercermin dari penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 76,49 (tujuh puluh enam koma empat puluh sembilan) pada tahun 2021 menjadi 74,80 (tujuh puluh empat koma delapan puluh) kematian per 100.000 (seratus ribu) kelahiran di tahun 2022. Meski demikian angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 45 (empat puluh lima) kematian per 100.000 (seratus ribu) kelahiran. Hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan pencatatan pelaporan melalui aplikasi MPDN.

Data pada tahun 2017, 2018 dan 2019 masih besar kemungkinan *under-reported* oleh karena keterbatasan pada pencatatan pelaporan kasus kematian. Pada tahun 2020 telah mulai digunakan aplikasi MPDN sebagai platform pencatatan pelaporan kematian ibu di seluruh Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan adanya pertukaran data kematian dari seluruh provinsi, sehingga meskipun terjadi kematian di luar Provinsi DKI Jakarta, maka angka kematian akan tetap masuk ke provinsi DKI Jakarta apabila pasien tersebut berdomisili di Jakarta. Hal ini tentu akan menambah jumlah kematian.

Selain karena pencatatan pelaporan, Pada tahun 2021 terdapat kenaikan angka kematian yang disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Sebanyak 45,4% (empat puluh lima koma empat persen) ibu meninggal oleh karena COVID-19. Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kematian ibu yang disebabkan karena keberhasilan penanganan COVID-19 serta berkurangnya jumlah kematian akibat COVID-19. Beberapa penyebab kematian ibu hamil, bersalin, dan pasca persalinan antara lain adalah perdarahan, hipertensi, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, gangguan metabolik dan lainnya. AKI juga dapat dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Gambar 2.3.1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2022

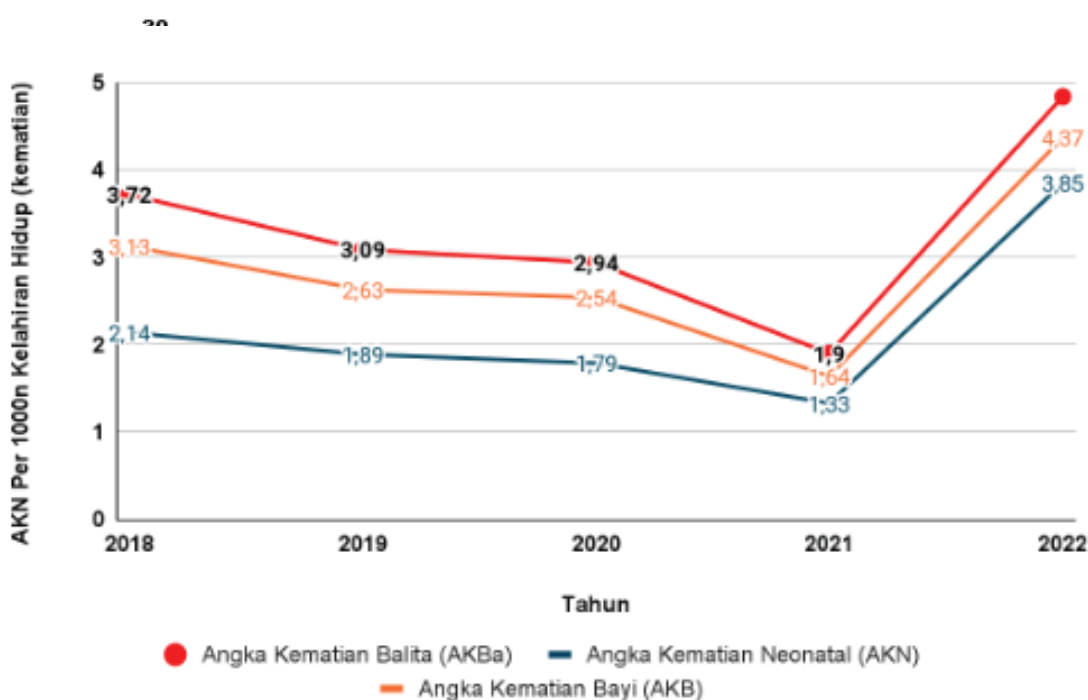


Selama periode 2018 hingga 2021 Angka Kematian Neonatal (AKN) konsisten mengalami penurunan, meskipun demikian di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,84 (empat koma delapan puluh empat) per 1.000 (seribu) kelahiran hidup yang semula di tahun 2021 sebesar 1,9 (satu koma sembilan) per 1.000 (seribu) kelahiran hidup. Hal ini disebabkan karena implementasi pencatatan pelaporan melalui MPDN pada program perinatal berjalan dengan lebih baik. Fasyankes secara aktif memasukkan data kematian Perinatal, Bayi dan Balita.

Sama halnya dengan kematian ibu, penggunaan aplikasi MPDN memungkinkan adanya pertukaran data antar provinsi di seluruh Indonesia. Keaktifan Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta dalam melaporkan kejadian kematian di fasilitas kesehatannya membuat ada penambahan jumlah kematian yang signifikan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana data diperoleh secara manual oleh Puskesmas.

Selain terdapat kenaikan pada jumlah kasus kematian Neonatal, pada tahun 2022 terdapat penurunan jumlah lahir hidup di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu dalam penghitungan AKN, angka yang didapatkan menjadi lebih besar. Sementara itu, indikator lainnya yaitu Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Bayi menunjukkan penurunan pada periode 2018 hingga 2021. Namun, pada tahun 2021 menuju tahun 2022, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angka kematian Balita (AKBa) meningkat dari 1,9 (satu koma sembilan) menjadi 4,84 (empat koma delapan puluh empat) kematian per 1.000 (seribu) kelahiran hidup. Diiringi Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 1,64 (satu koma enam puluh empat) menjadi 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) per 1.000 (seribu) kelahiran hidup.

Gambar 2.3.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Pada pelayanan terkait kesehatan ibu memiliki capaian positif terkait persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan standar yang meningkat dari 98,61% (sembilan puluh delapan koma enam puluh satu) pada tahun 2018 menjadi 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) pada tahun 2022. Sedangkan, cakupan imunisasi menyeluruh untuk bayi dan anak dengan tercapainya 80% (delapan puluh persen) imunisasi dasar lengkap pada bayi, serta persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yang mencapai 100% (seratus persen) dan tersebar di seluruh kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.3.1 Pelayanan Sesuai Standar untuk Ibu dan Cakupan Imunisasi Anak Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	98,77	99,28	100	99,18	99,90
2.	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	98,61	99,49	100	99,5	100
3.	Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar	97,24	97,8	100	99,35	99,90
4.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	100	100	83,33	100	100
5.	Persentase Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	100	100	100	100

Mengakhiri Epidemik dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular

Mengakhiri epidemi dan mengurangi kematian akibat penyakit menular serta penyakit tidak menular (PTM) menjadi upaya memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat. DKI Jakarta telah menunjukkan pencapaian positif melalui penerapan berbagai indikator di seluruh Kota/Kabupaten Administrasi. Pencapaian positif ini terjadi pada indikator API (Annual Parasite Incidence) Kasus malaria indigenous sama dengan 0 (Nol).

Pemerintah telah melakukan eliminasi malaria, eliminasi filariasis dan peningkatan layanan penyakit cacangan di semua wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. Sementara itu, eliminasi kusta hanya dilakukan di 5 (lima) wilayah administrasi saja. Hal ini dikarenakan RSCM yang ada di Jakarta Pusat menjadi rujukan pasien kusta dari luar wilayah DKI Jakarta, sehingga target untuk mencapai eliminasi kasus kusta dengan jumlah kasus kusta < 1/10.000 (satu per sepuluh ribu) penduduk masih sulit tercapai.

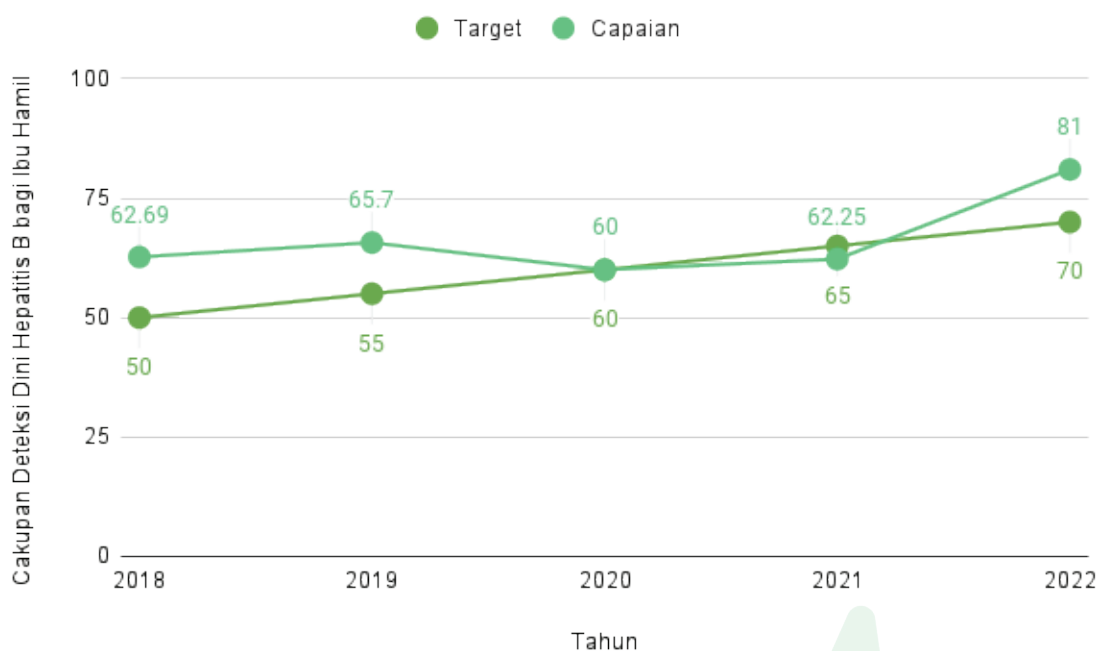
Tabel 2.3.2 Capaian Indikator dalam Mengakhiri Epidemii dan Penyakit Menular Tahun 2017-2022 di DKI Jakarta

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS	94,67	113,07	118,74	105,16	100
2	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria <i>Indigenous</i> Sama Dengan 0 (Nol)	0	0	0	0	0
3	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	N/A	6	6	6	6
4	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B (%)	N/A	100	100	100	100
5	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	NA	6	6	6	5
6	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	NA	6	6	6	6
7	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Peningkatan Layanan Penyakit Kecacingan	50	100	100	100	100

Sumber: Kemenkes dan Dinkes DKI Jakarta (2022), diolah

Berkaitan untuk mencapai indikator dalam mengakhiri epidemi dan penyakit menular di tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 70 (tujuh puluh) dengan pencapaian 81 (delapan puluh satu) cakupan deteksi dini hepatitis B bagi ibu hamil. Meskipun demikian, cakupan deteksi dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil masih belum tercapai 100 (seratus persen) persen perlu ada peningkatan capaian setiap tahunnya.

Gambar 2.3.3 Capaian Indikator dalam Mengakhiri Epidemii dan Penyakit Menular Tahun 2017-2022 di DKI Jakarta



Sumber: Dinkes (2023), diolah

Dalam upaya pengurangan angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, beberapa indikator telah menunjukkan pencapaian 100 (seratus persen) persen. Indikator-indikator tersebut meliputi: (1) persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM), (2) persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, (3) persentase Penduduk Usia 15-59 (lima belas hingga lima puluh sembilan) Tahun yang di Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), (4) jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, serta (5) persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pada indikator dalam pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular dan kesehatan mental di masing-masing tahunnya mencapai tren positif, ditandai adanya peningkatan capaian setiap tahunnya. Beberapa hal yang mempengaruhi kejadian tingginya obesitas di DKI Jakarta diantaranya oleh karakteristik demografi masyarakat perkotaan yang mengalami pergeseran pada pola konsumsi, aktivitas fisik, status sosial-ekonomi, dan faktor psikologis (stress, depresi, dan kecemasan), serta terkait dengan food security terutama ketersediaan pangan sehat dan

Tabel 2.3.3 Capaian Indikator dalam Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Mental Tahun 2018-2022 di Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	100	100	100	96,88	100
2	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18,15	24,46	32,01	107,15	100
3	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	21,87	33,68	28,18	99,15	100
4	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	6	6	6	6	6
5	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	85,95	104,19

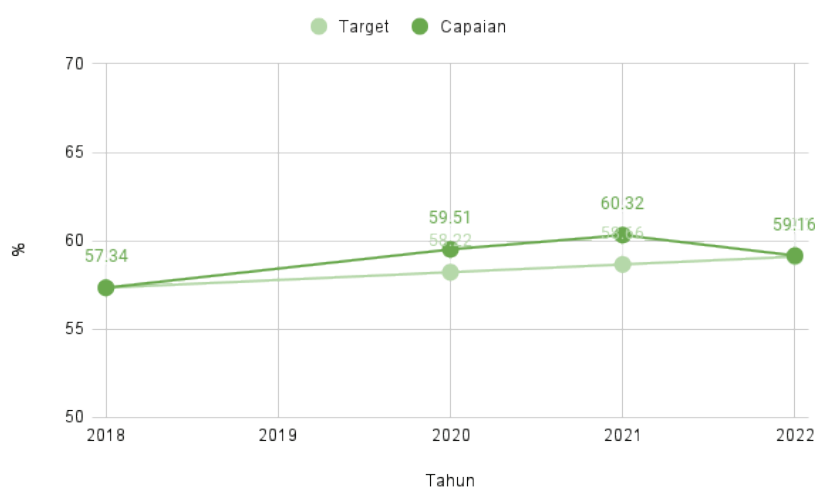
Sumber: Dinkes (2023), diolah

Menjamin Akses Universal terhadap Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi di Provinsi DKI Jakarta terlihat melalui persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta Keluarga Berencana. Cakupan program Keluarga Berencana (KB) di kalangan pasangan usia subur mengalami tren positif dari target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Capaian di tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 59,1% (lima puluh sembilan koma enam belas persen). Cakupan KB ini mencakup penggunaan berbagai alat kontrasepsi, baik itu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang sekali pemakaiannya untuk 3 (tiga) tahun hingga seumur hidup atau metode non MKJP yang pemakaiannya berkisar 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan saja.

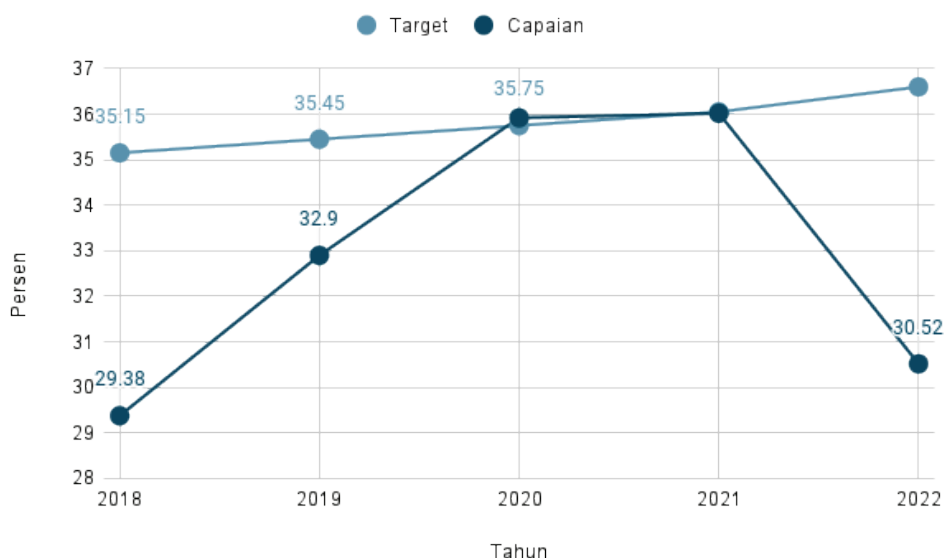
Gambar 2.3.4 Persentase Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta Keluarga Berencana Tahun 2018-2022 di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinkes (2023), diolah

Pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular dan kesehatan mental pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan. Angka capaian pada tahun 2022 hanya memperoleh 30,52% (tiga puluh koma lima puluh dua persen) dari pasangan usia subur yang menjadi peserta KB yang memilih menggunakan metode kontrasepsi MKJP. Angka ini menunjukkan penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2019 di angka 32,9 % (tiga puluh dua koma sembilan persen). Riwayat realisasi pencapaian penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP hanya melebihi target pada tahun 2020, dengan selisih 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari target 35,75% (tiga puluh lima koma tujuh puluh lima persen), yang tercapai sebesar 35,92% (tiga puluh lima koma sembilan puluh dua persen). Selain tahun tersebut, penggunaan metode MKJP selalu lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan.

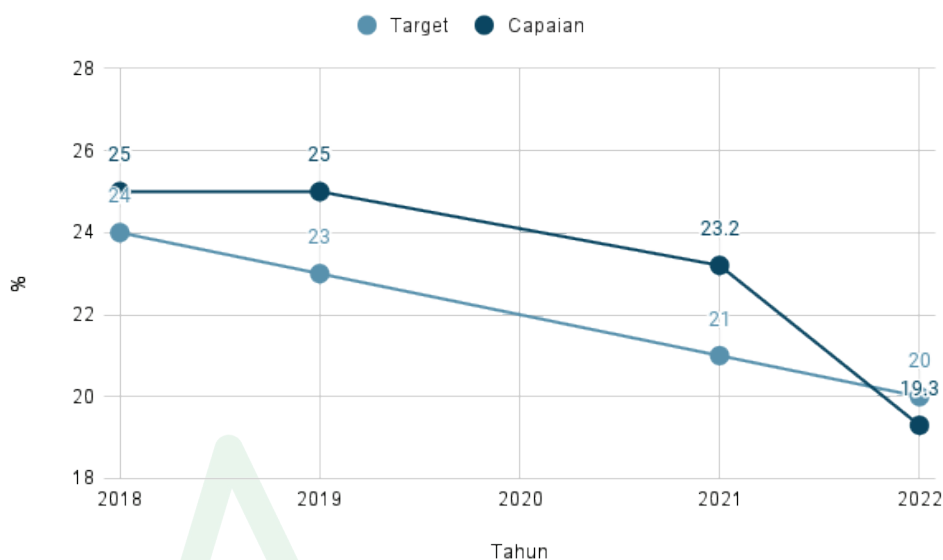
Gambar 2.3.5 Capaian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta



Sumber: Dinkes (2023), diolah

Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 (lima belas hingga sembilan belas) tahun mengalami tren capaian menurun. Pada tahun 2018 Age Specific Fertility Rate/ASFR di Provinsi DKI Jakarta mencapai 25% (dua puluh lima persen), dan terus menurun hingga tahun 2022 sebesar 19,3% (sembilan belas koma tiga persen). Angka tersebut telah mencapai target yang ditentukan dalam RAD TPB 2017-2022 sebesar 19,3% (sembilan belas koma tiga persen).

Gambar 2.3.6 Target dan Capaian Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta



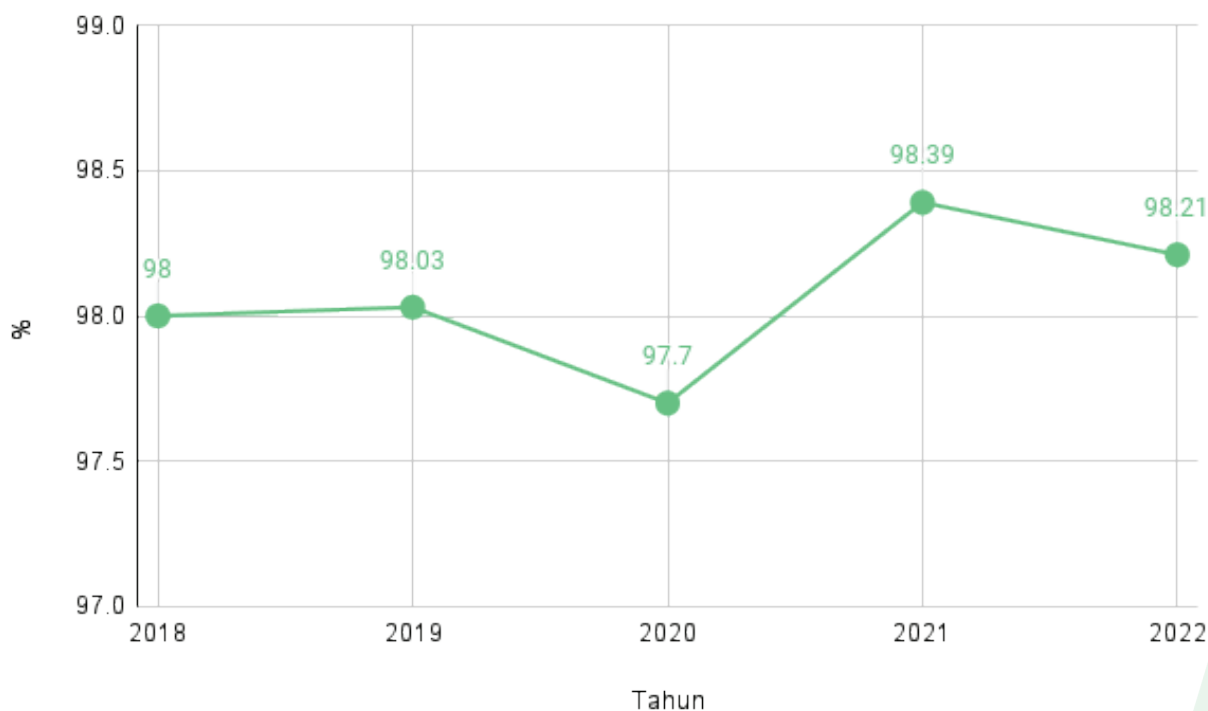
Sumber: Dinkes (2023), diolah

Jaminan Kesehatan Universal

Jaminan kesehatan universal sebagai perlindungan risiko keuangan dan memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat di DKI Jakarta, mencakup akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman. Persentase penduduk Provinsi DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan telah mencapai 98,21% (sembilan puluh delapan koma dua puluh satu persen) pada tahun 2022.

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 di angka 98% (sembilan puluh delapan persen). Meskipun demikian, tetap masih diperlukan peningkatan persentase penduduk di DKI Jakarta sehingga semua orang memiliki akses terhadap jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Gambar 2.3.7 Persentase Penduduk DKI Jakarta yang Memiliki Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan



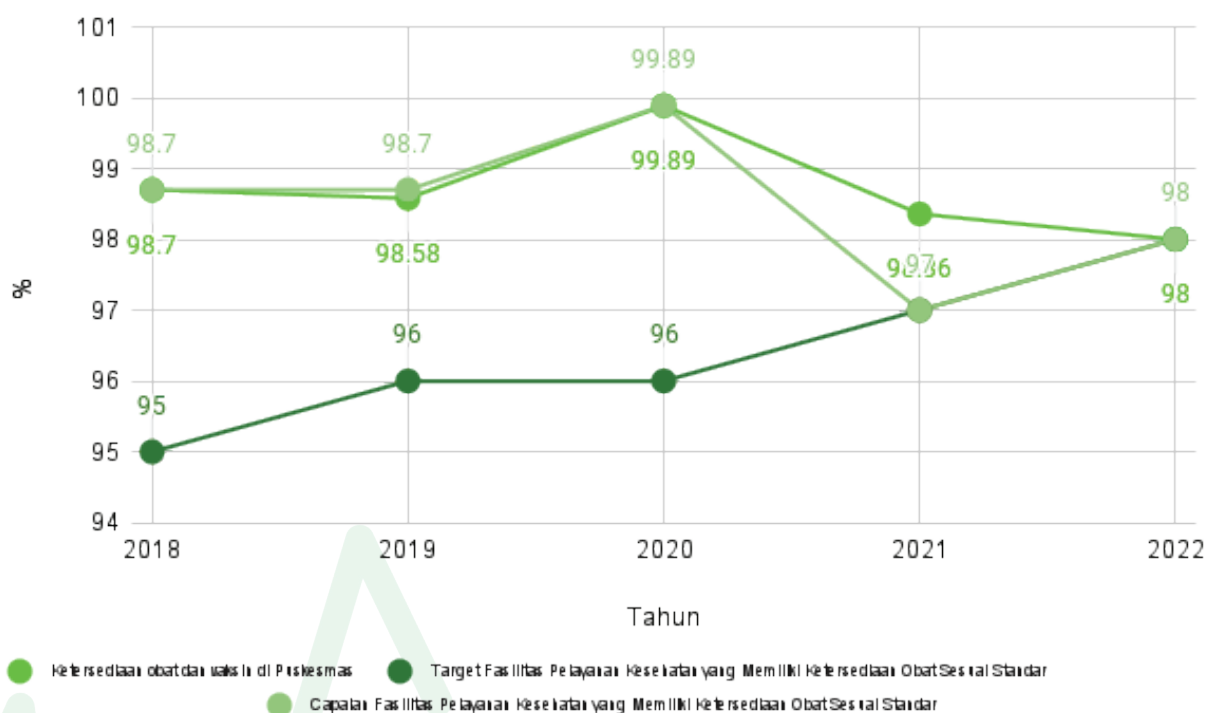
Sumber: Dinkes (2023), diolah

Akses Terhadap Obat & Vaksin

Kondisi penyediaan akses terhadap obat dan vaksin di puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah provinsi yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar menjadi salah satu indikator dalam tujuan TPB ini. Di Provinsi DKI Jakarta, persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas telah mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2022. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tetap stabil, berkisar antara 98-99% (sembilan puluh delapan hingga sembilan puluh sembilan persen) persen dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Upaya penyediaan akses obat dan vaksin juga diimbangi dengan ketercapaian target ketersediaan obat sesuai standar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 97% (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2021, setelah sebelumnya mencapai 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen) pada tahun 2020. Persentase kesesuaian standar ini meningkat kembali menjadi 98% (sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2022.

Gambar 2.3.8 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta



Sumber: Dinkes (2023), diolah

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera di DKI Jakarta selama periode 2017-2022. Salah satu tantangan utamanya adalah Pada tujuan 3 (tiga) tantangan yang dialami pada tahun sebelumnya akibat terjadi pandemi masih berlanjut pada semester I-2021. Masuknya varian Delta dari virus Covid-19 yang di Indonesia telah terinfeksi varian Alfa dan Beta, membuat lonjakan pasien terinfeksi di DKI Jakarta. Adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 memberikan beban tambahan pada fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan serta ketersediaan obat-obatan di masyarakat. Pada semester I-2021, penambahan kasus harian semakin meningkat dan menciptakan sebuah kurva yang sempat membuat kekhawatiran akan upaya penanggulangan pandemi ini.

DKI Jakarta mulai menghadapi situasi di mana masyarakat kesulitan menemukan tabung oksigen atau melakukan isi ulang. Rumah sakit pun sudah tidak seleluasa menerima pasien karena keterisian tempat tidur yang semakin tinggi. Vitamin dan obat-obatan yang dikhususkan untuk penyembuhan Covid-19 juga semakin langka dan berharga jual hingga 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali lipat dari harga normal.



MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT



Pemenuhan Akses Pendidikan yang Setara dan Merata

Mewujudkan akses pendidikan yang setara dan merata merupakan komitmen mendalam untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur hal ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Rata-rata lama sekolah.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk menunjukkan tingkat partisipasi/ daya serap penduduk usia sekolah di suatu tingkat pendidikan. Seluruh indikator APK menunjukkan capaian melebihi 100% (seratus persen), mencerminkan ketercapaian akses dalam pendidikan. Indikator ini terdiri dari APK tingkat SD/ sederajat yang mencapai 100,65% (seratus koma enam puluh lima persen), APK tingkat SMP/ sederajat mencapai 105,26% (seratus lima koma dua puluh enam persen), dan APK tingkat SMA/ SMK/ sederajat mencapai 101,49% (seratus satu koma empat puluh sembilan persen)

Indikator APK tingkat SMK juga digunakan untuk mengukur ketercapaian upaya dalam menjamin akses yang sama terhadap pendidikan teknik dan kejuruan. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DKI Jakarta pada masing-masing usia di tahun 2022 belum mencapai 100% (seratus persen), hal ini menunjukkan masih terdapat warga DKI Jakarta di usia 7-18 (tujuh hingga delapan belas) tahun yang tidak bersekolah. Usia partisipasi sekolah yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu pada usia 13-15 (tiga belas hingga lima belas) tahun sebesar 97,95% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen). Hal ini berarti usia 13-15 (tiga belas hingga lima belas) tahun mengalami peningkatan partisipasi bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2.4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK/ sederajat Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta

Indikator	Realisasi Capaian Per Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK SD/MI/ sederajat (%)	103,63	105,50	102,94	101,02	100,65
APK SMP/MTs/ sederajat (%)	104,33	104,52	104,98	102,22	105,26
APK SMA/SMK/MA/ sederajat (%)	104,03	104,55	104,82	101,89	101,49

Sumber: Kemdikbud dan Kemenag (2023), diolah

Tabel 2.4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta

Indikator	Realisasi Capaian Per Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun (%)	99,77	99,63	99,64	99,53	99,44
Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun (%)	99,77	98,33	98,34	98,68	97,95
Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun (%)	71,81	72,01	72,11	72,32	72,10

Sumber: Kemdikbud dan Kemenag (2023), diolah



Persentase APK tingkat PAUD 3-6 (tiga hingga enam) Tahun meningkat dari 19,02% (sembilan belas koma nol dua persen) pada tahun 2021 menjadi 28,36% (dua puluh delapan koma tiga puluh enam persen) pada tahun 2022. Persentase ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 66,32% (enam puluh enam koma tiga puluh dua persen). Terdapat perubahan dalam metode penghitungan angka partisipasi kasar PAUD. Jika sebelumnya Kemendikbud ristek memakai metode sampling, perhitungan APK PAUD berubah menggunakan populasi sehingga mengalami penurunan dan pencapaian yang sangat jauh dari target (Dinas Pendidikan, 2022). Di DKI Jakarta juga terdapat berbagai penyelenggara PAUD yang telah beroperasi namun belum memiliki izin sehingga belum terdata oleh pemerintah.

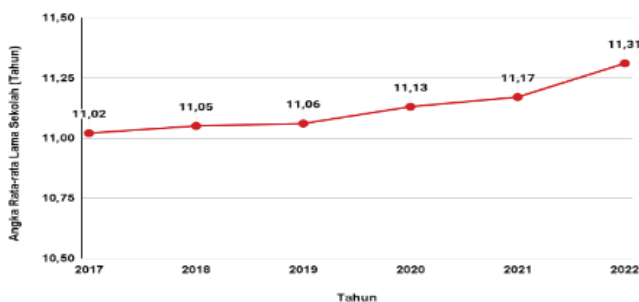
Tabel 2.4.3 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Usia 3-6 Tahun) Tahun 2017-2022 di DKI Jakarta

Keterangan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target (%)		86,35	89,63	92,91	96,19	99,5
Capaian (%)	66,32	24,9	20,35	20,53	19,02	28,36

Sumber: Kemdikbud dan Kemenag (2023), diolah

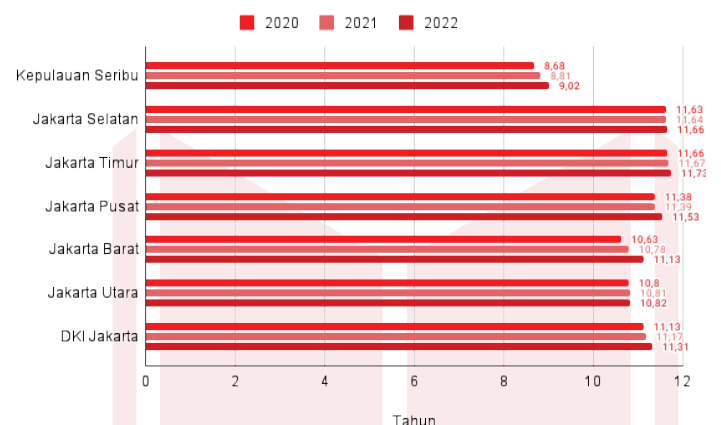
Selain itu, data BPS dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2022) menunjukkan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan selama tahun 2018-2022. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 (lima belas) tahun telah mencapai 11,31 (sebelas koma tiga puluh satu) tahun pada 2022, meningkat dari pencapaian tahun 2021 sebesar 11,17 (sebelas koma tujuh belas) tahun. Akan tetapi, masih terdapat perbedaan rata-rata lama tahun sekolah berdasarkan wilayah administrasi, dimana Kepulauan Seribu masih lebih rendah dibandingkan 5 (lima) kota administrasi lainnya (BPS, 2022).

Gambar 2.4.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Disdik dan BPS (2022), diolah

Gambar 2.4.2 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Kota/Kab Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

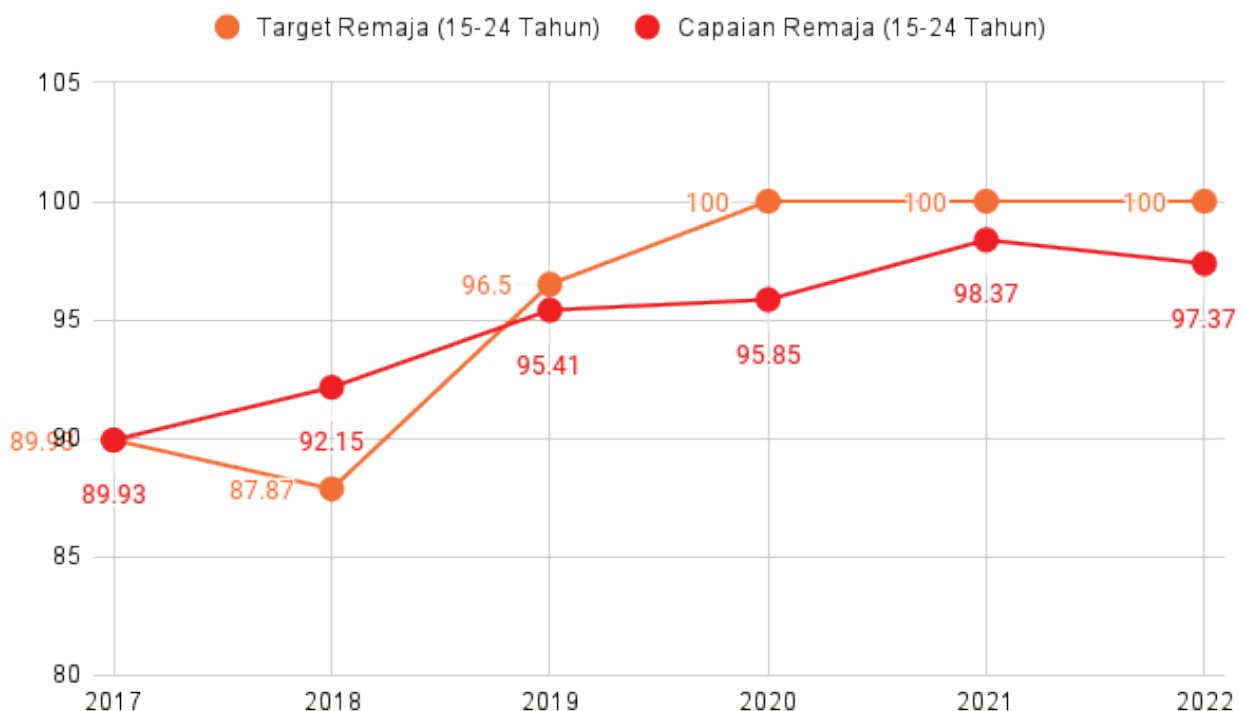


Sumber: BPS (2022), diolah

Salah satu indikator ditujuan ini adalah proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di Provinsi DKI Jakarta terlihat belum menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2019 hingga 2022. Meskipun demikian Provinsi DKI Jakarta memiliki riwayat tercapainya target pada tahun 2017 hingga 2018 dengan adanya peningkatan proporsi dari 89,98% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2017 menjadi 92,15% (sembilan puluh dua koma lima belas persen) pada tahun 2022. Walaupun terjadi peningkatan, sepanjang tahun 2017 hingga 2022 akan tetapi capaian proporsi remaja dengan keterampilan TIK masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan.

Pendidikan untuk Peningkatan Kebekerjaan

Gambar 2.4.3 Proporsi Remaja dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2017-2022 di DKI Jakarta



Sumber: Susenas (2023), diolah

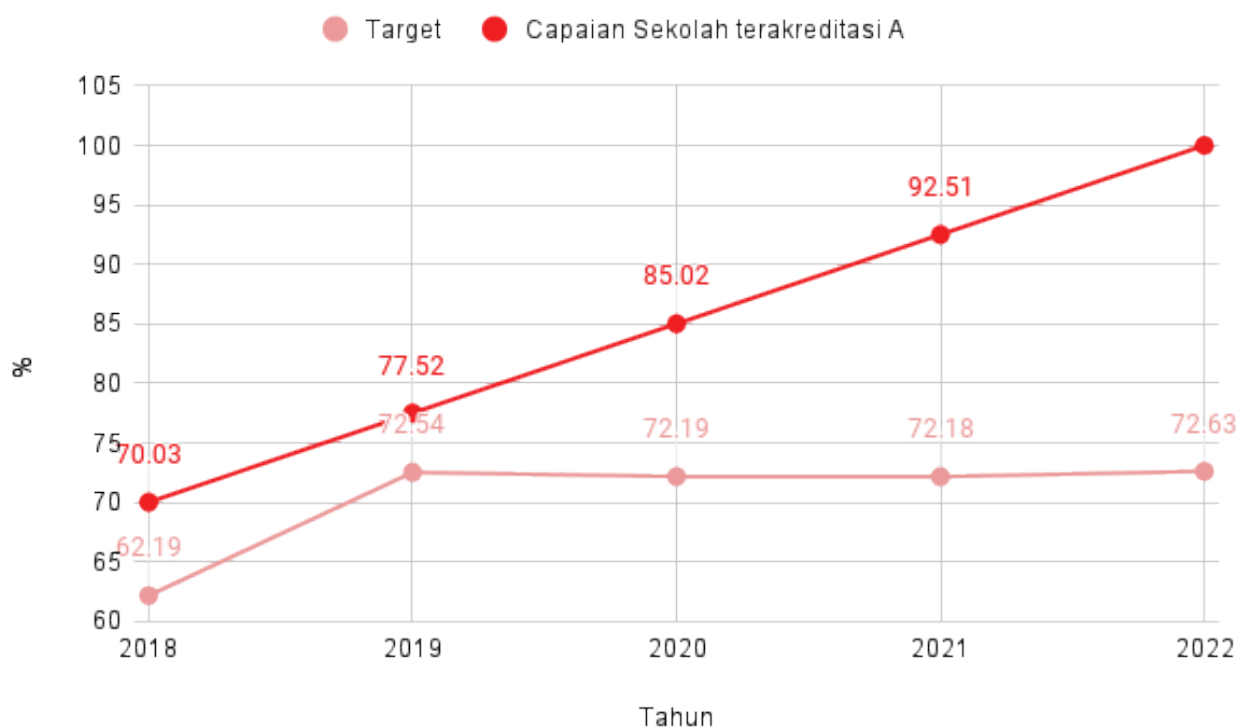
Data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 menyebutkan bahwa program revitalisasi SMK dalam meningkatkan penyerapan lulusan SMK di dunia usaha dan industri (DUDI) baru mencapai 22,54% (dua puluh dua koma lima puluh empat persen). Hal ini menunjukkan belum semua SMK memiliki kurikulum *link and match* dengan DUDI. Meskipun demikian di tahun 2022 upaya tersebut berhasil mengalami peningkatan sebesar 86,8% (delapan puluh enam koma delapan persen).



Pemerintah terus mendorong bertambahnya jumlah link and match SMK dengan DUDI, dengan target sebanyak dengan target sebanyak 20 (dua puluh) SMK pada tahun 2023, 25 (dua puluh lima) SMK pada tahun 2024, 30 (tiga puluh) SMK pada tahun 2025, dan 35 (tiga puluh lima) SMK pada tahun 2026. Selain itu dilakukan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan antara lain, membuat peta jalan pengembangan SMK; pengembangan dan penyelarasan kurikulum; kerja sama sekolah dengan DUDI dan perguruan tinggi; dan inovasi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan (Dinas Pendidikan DKI Jakarta, 2023).

Pada capaian proporsi dewasa dengan keterampilan TIK di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Walaupun terjadi peningkatan capaian, angka ini lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proporsi dewasa usia 15-59 (lima belas hingga lima puluh sembilan) tahun telah meningkat dari 85,17% (delapan puluh lima koma tujuh belas persen) pada tahun 2019 menjadi 92,36% (sembilan puluh dua koma tiga puluh enam persen) pada tahun 2022.

Gambar 2.4.4 Proporsi Dewasa dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2019-2022 di DKI Jakarta



Sumber: Susenas (2023), diolah

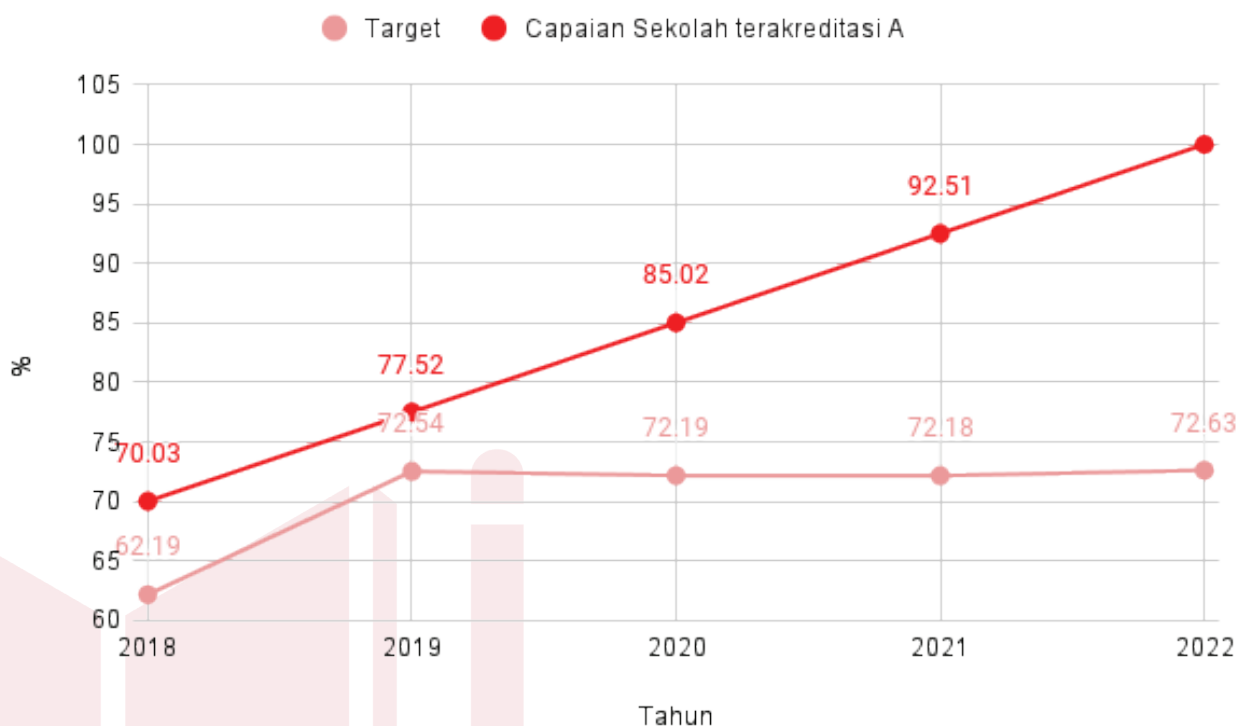
Outcome dalam melihat kualitas pengajaran dalam pembelajaran di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada capaian PISA. *Programme for International Student Assessment* (PISA) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 (tujuh puluh) negara di seluruh dunia. Setiap 3 (tiga) tahun, murid-murid berusia 15 (lima belas) tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.

Peningkatan Fasilitas dan Kualitas Pengajaran dalam Pembelajaran

Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000 (Kemendikbudristek, 2023).

Akreditasi sekolah juga memiliki peran dalam menjamin standar pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Jumlah sekolah yang telah terakreditasi A telah mencapai 72,63% (tujuh puluh dua koma enam puluh tiga persen) pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 di angka 62,19% (enam puluh dua koma sembilan belas persen). Meskipun terdapat peningkatan, pencapaian tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Diperlukan peningkatan dalam berbagai faktor, seperti fasilitas dan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, metode pengajaran, kualitas staf pengajar, manajemen sekolah, hingga pencapaian siswa.

Gambar 2.4.5 Persentase Sekolah Terakreditasi A di DKI Jakarta

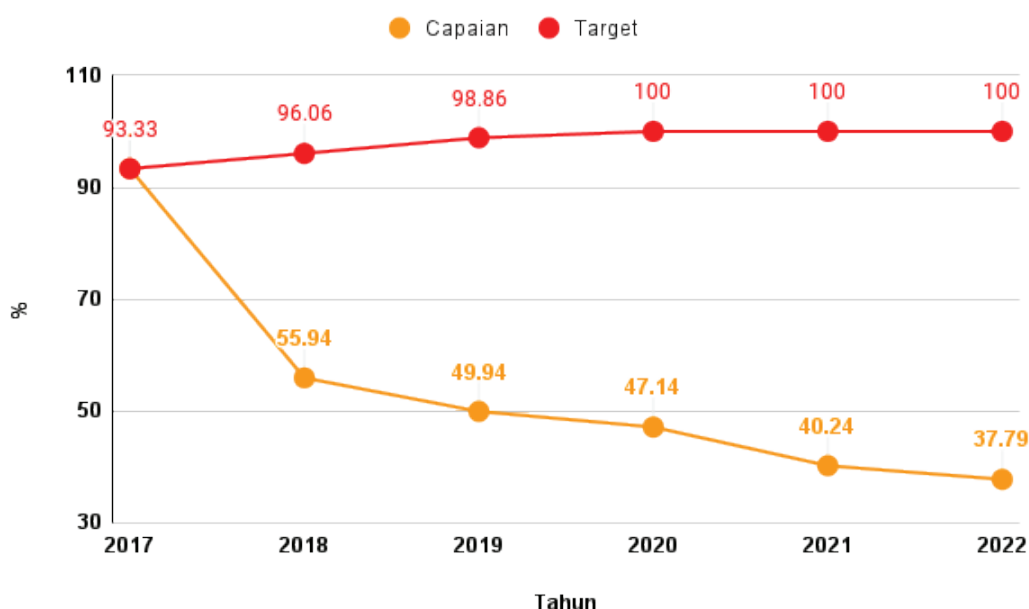


Sumber: RPJMD (2023), diolah



Selain akreditasi sekolah, ketersediaan guru yang berkualitas juga dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2017, terdapat 93,33% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) guru yang bersertifikat pendidik dan semakin menurun hingga sampai 37,94% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen) pada tahun 2022. Jumlah guru yang berkualitas juga menunjang proses kegiatan pembelajaran. Kualitas guru ini menjadi satu-satunya indikator yang membutuhkan perhatian khusus karena menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017, terdapat 93,33% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) guru yang bersertifikat pendidik dan semakin menurun hingga sampai 37,94% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen) 2022. Pada capaian tahun 2022 menunjukkan tren penurunan persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.4.6 Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang Bersertifikat Pendidik di DKI Jakarta



Sumber: BPS (2023), diolah

Dalam upaya mencapai Tujuan 4 (empat) Pendidikan Berkualitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan metode pembelajaran jarak jauh melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2020. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan membawa masalah baru, terutama terkait efektivitas proses pembelajaran dan pengurangan. Kesenjangan yang terjadi selama PJJ berpotensi menyebabkan beberapa anak putus sekolah, terutama karena mereka harus terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di saat ekonomi sedang lesu dan terjadi pemutusan hubungan kerja (*layoff*) dari sebagian perusahaan.

Kesenjangan juga tercermin dari kurangnya pemahaman dan akses keluarga peserta didik terhadap teknologi pendukung selama PJJ. Selain itu, PJJ juga dapat berdampak terhadap perkembangan anak, baik berdasarkan standar kemampuan minimum maupun dalam hal perkembangan karakter dan aspek psikososial.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari empat Menteri, pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan seratus persen. Tantangan utama setelah penghapusan PJJ adalah bagaimana memastikan siswa dapat mengejar ketertinggalan dalam pembelajaran (learning loss) yang mereka alami. Hal ini akan membutuhkan adaptasi kembali dari setiap lembaga pendidikan. Tantangan lain yang dihadapi termasuk masalah pemerataan distribusi peserta didik dan sekolah, akses ke perguruan tinggi, serta perbaikan kualitas dan fasilitas pendidikan secara umum.

MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN



Kebijakan yang Mendorong dan Memantau Kesetaraan Gender

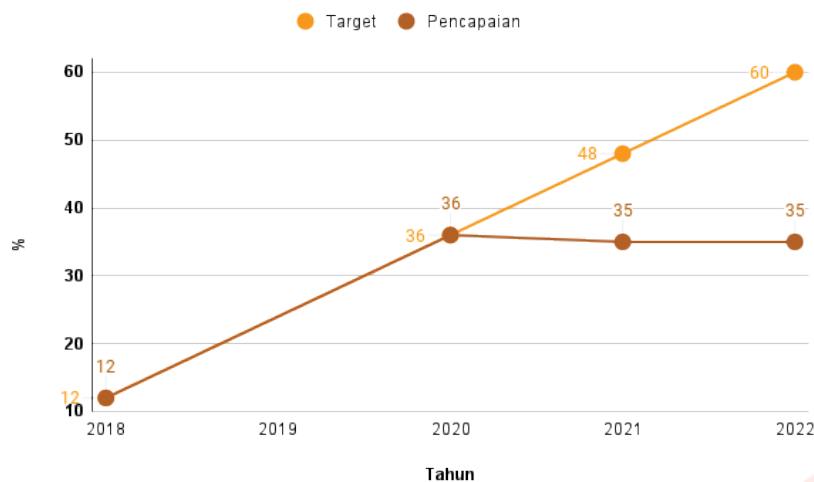
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang responsif terhadap isu gender, dengan tujuan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan layanan publik. Hingga tahun 2022, Pemprov telah mengimplementasikan 7 (tujuh) Peraturan Daerah; 13 (tiga belas) Peraturan Gubernur; 1 (satu) Keputusan Gubernur; dan 2 (dua) Instruksi Gubernur yang mendukung tujuan tersebut. Jumlah kebijakan responsif gender tersebut tetap konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.5.1 Capaian dan Realisasi Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender

Indikator	Realisasi Pencapaian 2022
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	- 7 Peraturan Daerah; - 13 Peraturan Gubernur; - 1 Keputusan Gubernur; - 2 Instruksi Gubernur

Sumber: DPPAPP (2023), diolah

Gambar 2.5.1 Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta



Sumber: DPPAPP (2023), diolah

Kebijakan responsif gender ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Pada tahun 2022, hanya sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dari Perangkat Daerah yang menjalankan PPRG, lebih rendah pencapaiannya dari tahun 2020 sebesar 36% (tiga puluh enam persen). Angka tersebut juga belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sebesar 60% (enam puluh persen).

Laporan kasus kekerasan yang dialami perempuan mengalami peningkatan di DKI Jakarta. Pelaporan tingkat kekerasan yang dialami perempuan dewasa dan anak umur 15-64 (lima belas hingga enam puluh empat tahun) oleh pasangan atau mantan pasangan mengalami kenaikan signifikan, meningkat dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) kasus pada tahun 2021 menjadi 494 (empat ratus sembilan puluh empat) kasus pada tahun 2022. Hal ini juga sebanding dengan peningkatan pelaporan kasus perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan, yang meningkat dari 134 (seratus tiga puluh empat) kasus pada tahun 2021 menjadi 155 (seratus lima puluh lima) kasus pada 2022.

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Peningkatan ini dapat diartikan terjadi peningkatan kasus kekerasan atau terjadi peningkatan kesadaran atas kasus yang terjadi. Jenis kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Walaupun jumlah kasus ini hanya sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari total populasi perempuan usia 15-64 (lima belas hingga enam puluh empat) tahun di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah tetap memastikan komitmennya untuk memberikan layanan. Hal tersebut tercermin dari persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif yang mencapai 100% (seratus persen).

Tabel 2.5.2 Realisasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Kaum Perempuan Tahun 2021-2022 di DKI Jakarta

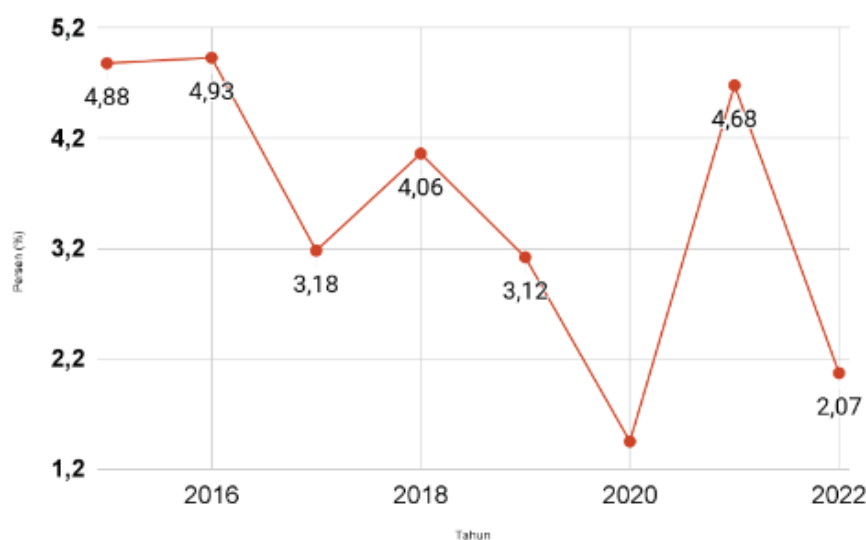
Indikator	Realisasi	
	2021	2022
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir (%)	0,0075	0,0013
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (%)	0,0035	0,0041
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (%)	100	100

Sumber: DPPAPP (2023), diolah

Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur

Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur, terdapat indikator proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 (delapan belas) tahun. Terlihat tren penurunan yang signifikan tahun 2022 sebesar 2,07% (dua koma nol tujuh persen) dari tahun sebelumnya sebesar 4,68% (empat koma enam puluh delapan persen). Hal ini menunjukkan pada usia kawin pertama pada perempuan semakin baik untuk mengurangi fenomena pernikahan dini.

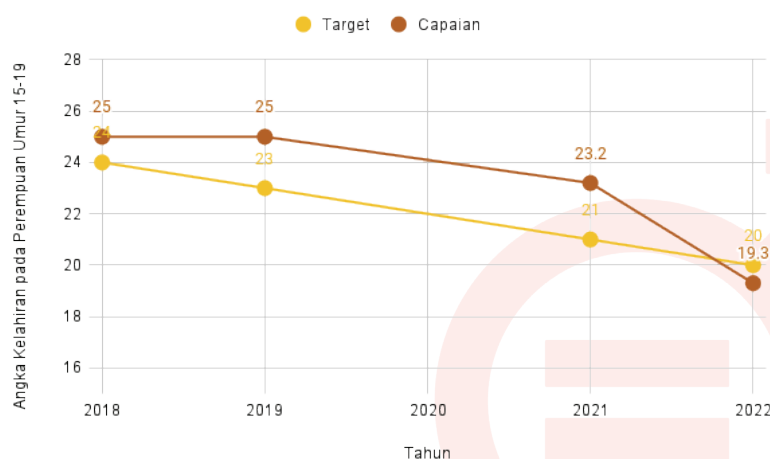
Gambar 2.5.2 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun



Sumber: DPPAPP (2023), diolah

Angka pernikahan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun berkaitan dengan angka kelahiran perempuan umur 15-19 (lima belas hingga sembilan belas) tahun. Penurunan angka kelahiran tercatat dari tahun 2019 hingga tahun 2022, sebesar 23 (dua puluh tiga) menjadi 19,3 (sembilan belas koma tiga) kelahiran per 1.000 (seribu) perempuan di kelompok usia umur yang sama pada tahun 2022. Angka tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam RAD TPB Tahun 2017-2022 yang sebesar 20 (dua puluh) kelahiran per 1.000 (seribu) perempuan.

Gambar 2.5.3 Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15 -19 Tahun di DKI Jakarta selama Tahun 2018-2022



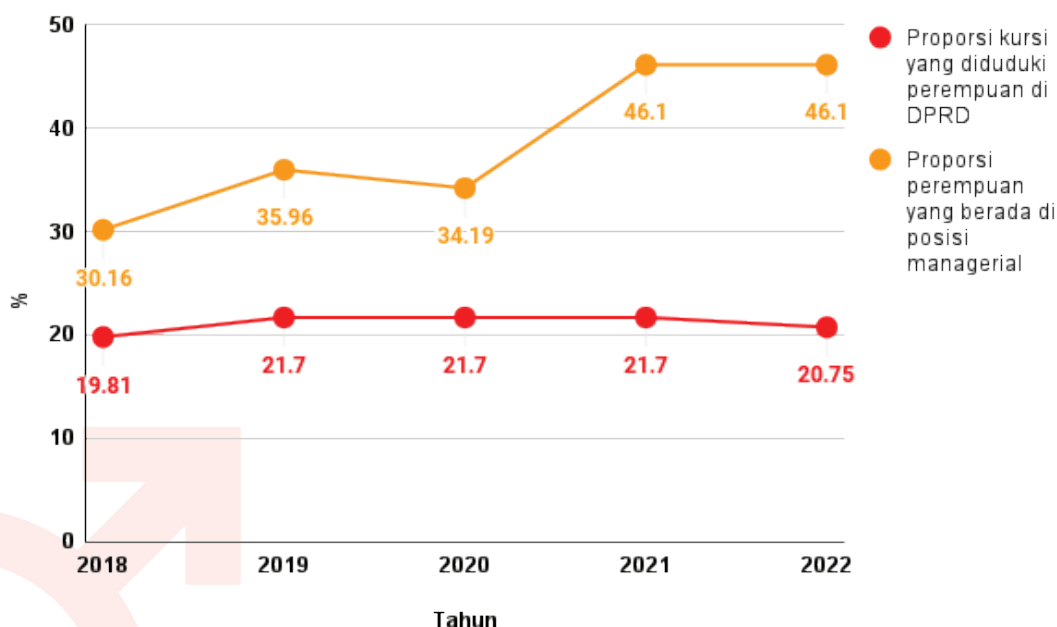
Sumber: RPJMD, 2023 (diolah)

Upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di parlemen DPRD dan posisi manajerial di perusahaan. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 19,81% (sembilan belas koma delapan puluh satu persen), kemudian meningkat menjadi 21,7% (dua puluh satu koma tujuh persen) pada tahun 2019-2020. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 20,7% (dua puluh koma tujuh persen) pada tahun 2022 karena adanya pemberhentian dan penggantian antar waktu (PAW).

Partisipasi Aktif dan Kesempatan Setara Bagi Perempuan

Sementara itu, proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial tetap pada tahun 2021 dan 2022 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 angka tersebut mencapai 30,16% (tiga puluh koma enam belas persen) dan mencapai level tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 dengan masing-masing sebesar 46,1% (empat puluh enam koma satu persen).

Gambar 2.5.4 Proporsi Partisipasi dan Kesempatan Perempuan untuk Memimpin Tahun 2018-2022 di DKI Jakarta



Sumber: BPS (2023), diolah

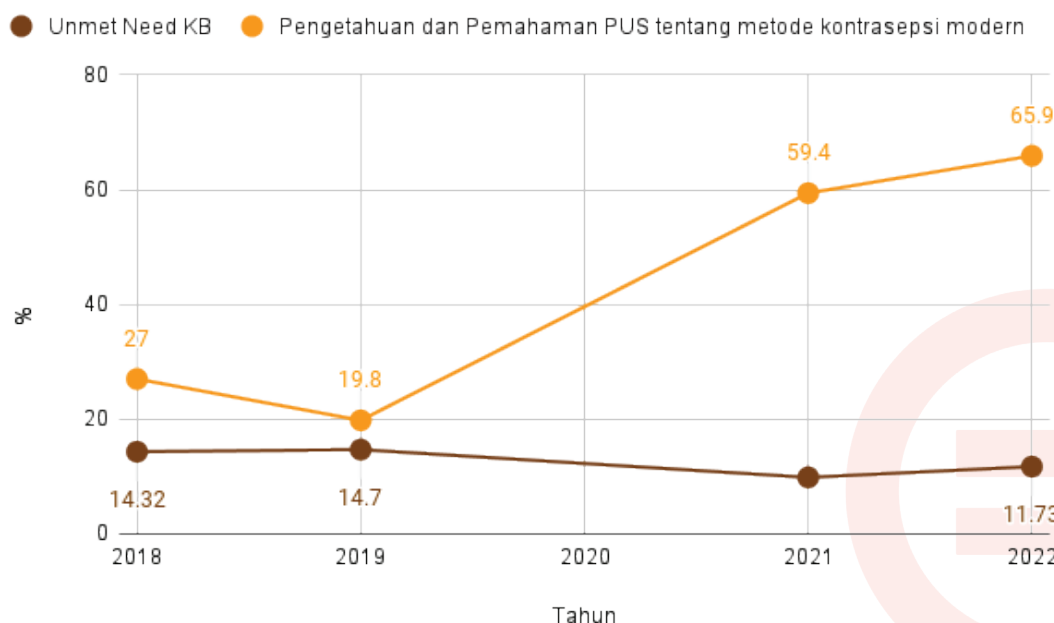
Akses Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan

Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen meningkatkan akses kesehatan seksual dan reproduksi di DKI Jakarta, beberapa indikator menunjukkan capaian yang membaik. Berkaitan dengan jaminan untuk perempuan, untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang sejalan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

Berdasarkan Proporsi pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern juga telah menunjukkan peningkatan dari 59,4% (lima puluh sembilan koma empat persen) di tahun 2021 menjadi 65,9% (enam puluh lima koma sembilan persen) di tahun 2022 (SKAP 2022).

Angka ini juga meningkat 2 (dua) kali lipat jika dibandingkan dengan angka 27% (dua puluh tujuh persen) pada tahun 2018. Pencapaian yang baik juga terlihat dari unmet need KB Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Walaupun mengalami peningkatan dari 9,85% (sembilan koma delapan puluh lima persen) pada tahun 2021 menjadi 11,73% (sebelas koma tujuh puluh tiga persen) pada tahun 2022, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2018 di angka 14,32% (empat belas koma tiga puluh dua persen).

Gambar 2.5.5 Persentase *Unmet-needs* KB dan Pengetahuan PUS tentang Metode Kontrasepsi Modern di DKI Jakarta



Sumber: BPS (2023), diolah

Pencapaian kesetaraan gender pada tahun 2018-2022 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Capaian pada indikator Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 (lima belas hingga enam puluh empat) tahun mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dan Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 (lima belas hingga enam puluh empat) tahun mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir didasarkan dari data yang masuk ke dalam laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dengan perhitungan jumlah korban kekerasan dibanding dengan jumlah penduduk.

Data-data tersebut dapat saja belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena adanya kebijakan pembatasan sosial yang membatasi gerak korban untuk mengungkapkan kekerasan di dalam keluarga, dan membatasi jangkauan layanan dari pemerintah dan nonpemerintah terhadap korban kekerasan.

Selain itu juga belum mencatat juga laporan yang langsung dilakukan ke instansi lainnya, misalnya Komnas Perempuan, pihak kepolisian ataupun dari nonpemerintah (misalnya lembaga advokasi atau lembaga bantuan hukum). Kondisi-kondisi ini menambah potensi tidak tercapainya target pada tujuan 5 (lima) jika tidak ada upaya atau strategi untuk mengatasinya. Sebagai salah satu rujukan atas apa yang menjadi tantangan pada kekerasan pada perempuan adalah dari CATAHU 20203 yang dikeluarkan pada 5 Maret 2021 oleh Komnas Perempuan.

Dinamika kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi, penurunan jumlah kasus dikarenakan korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi (PSBB); korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; persoalan literasi teknologi; dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online).

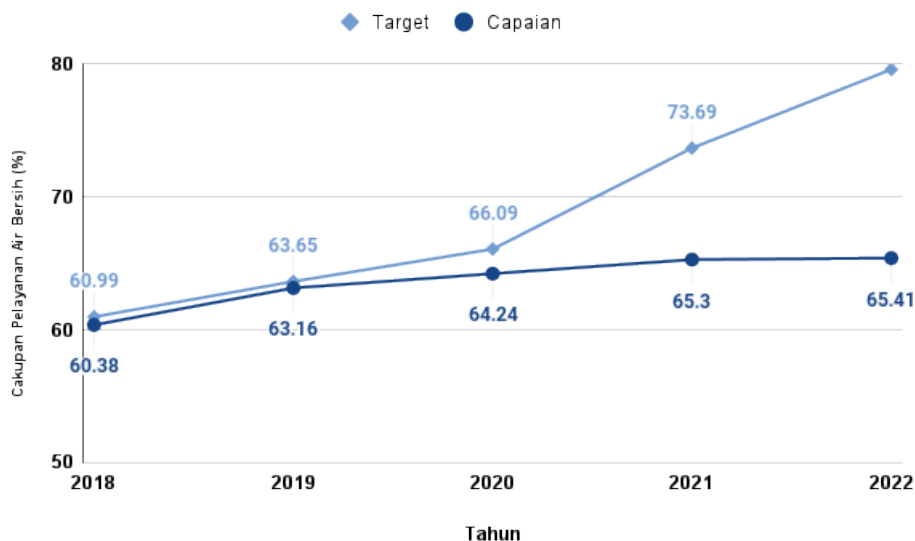


Tujuan 6 (enam) mendorong peningkatan akses yang aman dan layak terhadap air bersih dan sanitasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, air minum dianggap aman bagi kesehatan jika memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang termuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan dalam peraturan tersebut. Air minum rumah tangga juga dianggap aman apabila menggunakan sumber air yang layak, lokasi sumber berada di dalam atau di sekitar halaman rumah, tersedia setiap saat, dan memenuhi standar kualitas air minum.

Akses Air Minum dan Sanitasi Aman

Selain itu, waktu pengambilan air dapat dilakukan dalam waktu 30 menit atau kurang (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2021). Adapun sanitasi dalam rumah tangga dapat dianggap aman ketika memiliki fasilitas sanitasi yang mencakup kloset dengan leher angsa dan tangki septik yang disedot setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir, serta diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja atau tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Gambar 2.6.1 Cakupan Pelayanan Air Bersih

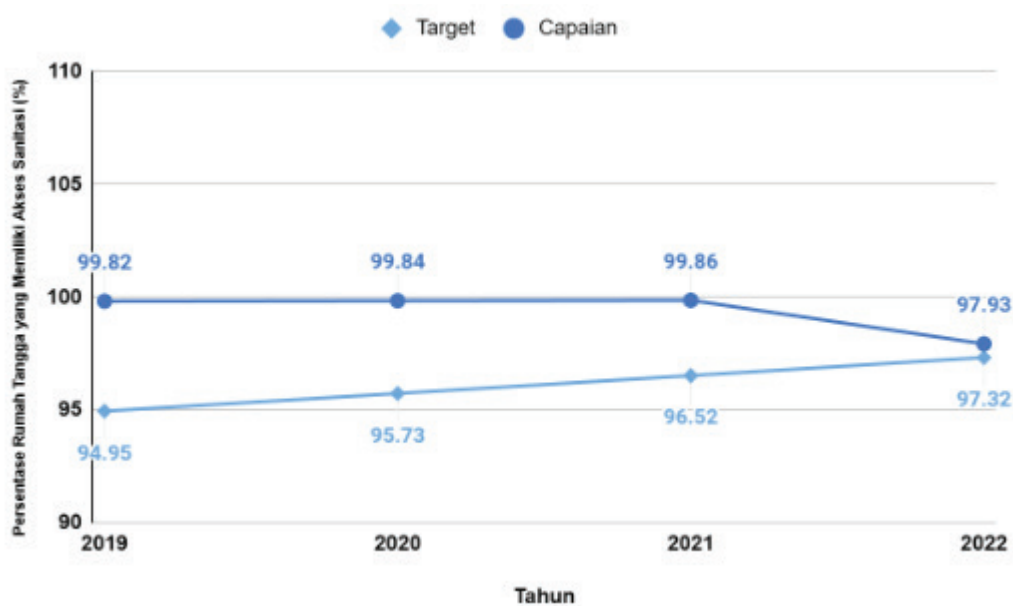


Sumber: BPS (2023), diolah

Pada tujuan 6 (enam), terdapat beberapa indikator utama yang diadopsi, diantaranya indikator proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan yang trennya terus membaik. Meskipun demikian, capaian indikator tersebut sempat mengalami penurunan dari 99,86 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh enam persen) pada tahun 2021 menjadi 97,93% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga persen) pada tahun 2022.

Selama periode 2018-2022, cakupan pelayanan air bersih di Jakarta secara konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, angka tersebut tercatat sebesar 60,38% (enam puluh koma tiga puluh delapan), dan terus meningkat hingga 65,41% (enam puluh lima koma empat puluh satu) pada tahun 2022. Meski demikian, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan akses air bersih bagi masyarakat Jakarta perlu diakselerasi lebih lanjut.

Gambar 2.6.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan



Sumber: BPS (2023), diolah

Hingga saat ini, penyediaan air bersih masih menjadi tantangan utama di Jakarta. Kebutuhan air bersih Jakarta utamanya ditopang oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yakni sebesar 62% (enam puluh dua persen), sementara sisanya dipenuhi dari pengambilan air tanah. Di sisi lain, pengambilan air tanah yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut di Jakarta.

¹Pendekatan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. STBM telah menjadi acuan nasional untuk program sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. STBM terdiri dari 5 pilar yaitu: (1) Tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan; (2) Mencuci tangan pakai sabun; (3) Mengelola air minum dan makanan yang aman; (4) Mengelola sampah dengan benar; dan (5) Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Selain tantangan air bersih, upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan juga menjadi tantangan di Jakarta. Untuk itu penting untuk mengupayakan seluruh kelurahan terkategori sebagai Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF). Kelurahan ODF merupakan daerah di mana semua penduduknya menggunakan jamban sehat dan tidak membuang air besar sembarangan, mencapai perubahan perilaku kolektif yang merupakan Pilar 1 (satu) dari 5 (lima) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)¹. Dengan harapan di masa depan, semua kelurahan di Jakarta dapat mencapai status Kelurahan ODF dan bahkan meningkatkan menjadi Kelurahan STBM.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan besar dalam hal pembangunan tanggul pengaman pantai di Pantai Kepulauan Seribu dan penyediaan akses air minum dan air limbah bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya target pencapaian pada ketiga indikator tersebut dengan rasio capaian masing-masing bernilai 0,8 (nol koma delapan) untuk pembangunan breakwater; 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) pada penyediaan air minum; dan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) pada dan penyediaan air limbah. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 dan *refocusing* anggaran pada kurun waktu 2019-2021 (Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2022).



Kualitas dan Kuantitas Air

Tingkat ketersediaan air di Jakarta pada 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama sebesar 283.250.615 m³/tahun (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus lima belas meter kubik per tahun) (4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen)). Sedangkan total kebutuhan air pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 1.650.486.049 m³/tahun (Satu miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat puluh sembilan meter kubik per tahun). Oleh karena itu, terjadi defisit sebesar -1.367.235.433 m³/tahun (minus satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga meter kubik per tahun) (Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup, 2019). Kondisi ini menuntut DKI Jakarta untuk mengimpor air dari luar daerah guna memenuhi



Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2023, kualitas air sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dikategorikan sebagai cemaran ringan, sedang dan berat, sehingga tidak layak digunakan sebagai sumber air baku. Pemenuhan sarana dan prasarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta tergantung pada ekosistem wilayah Bodetabekpunjur. Tingkat ketersediaan air di Jakarta dipengaruhi oleh lima wilayah DAS yang melintasi administrasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ketersediaan air di lima DAS utama di Jakarta adalah sebesar 6.042.870.443 m³/tahun (enam miliar empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh tiga meter kubik per tahun). Adapun rincian tingkat ketersediaan air di setiap DAS dapat dijabarkan sebagai berikut:

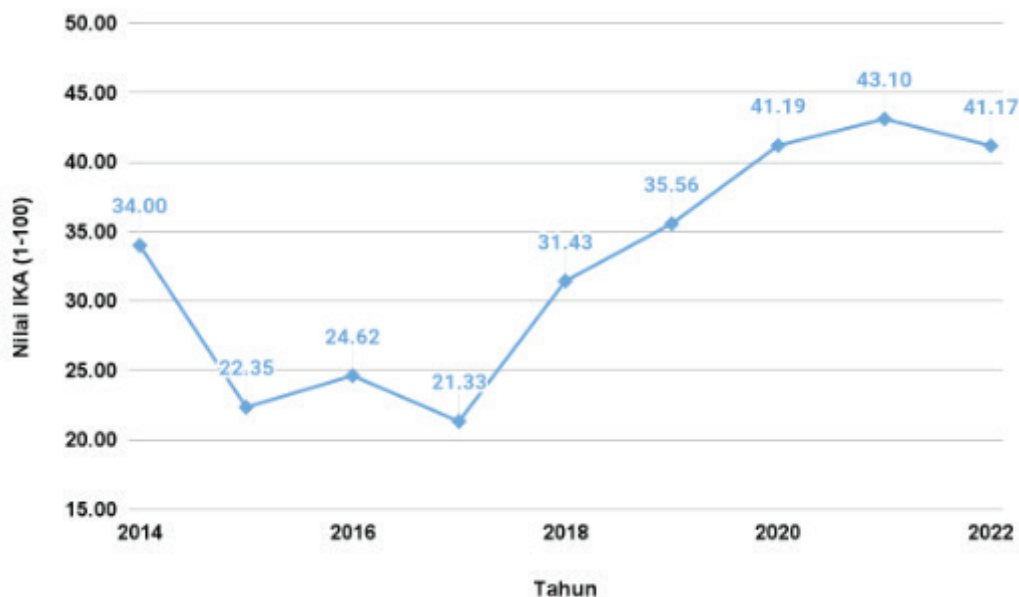
Tabel 2.6.1 Tingkat Ketersediaan Air di Setiap DAS

Wilayah DAS	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
Cisadane Hilir Bendung Pasar Baru	2.065.825.816
Citarum Hilir	1.890.981.644
Ciliwung	1.650.778.439
Cisadane Hulu Bendung Pasar Baru	432.605.843
Kepulauan Seribu	2.678.700
Total Ketersediaan Air 5 Wilayah DAS	6.042.870.443

Sumber: Dokumen Kajian Lingkungan Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2022-2042 (2022)

Dalam konteks kualitas air, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Parameter yang digunakan dalam pengukuran IKA disesuaikan dengan jenis badan air yang akan dipantau. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, KLHK telah mensosialisasikan parameter yang perlu dinilai dalam menghitung IKA untuk Air Sungai mencakup 8 (delapan) parameter, yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, *Fecal coli*, Total Fosfat, dan Nitrat dan untuk Danau/Waduk/Situ mencakup pH, DO, COD, TSS, BOD, *Fecal coli*, Total Fosfat, Kecerahan, klorofil- α , dan Total nitrogen.

Gambar 2.6.3 Indeks Kualitas Air Tahun 2014-2022



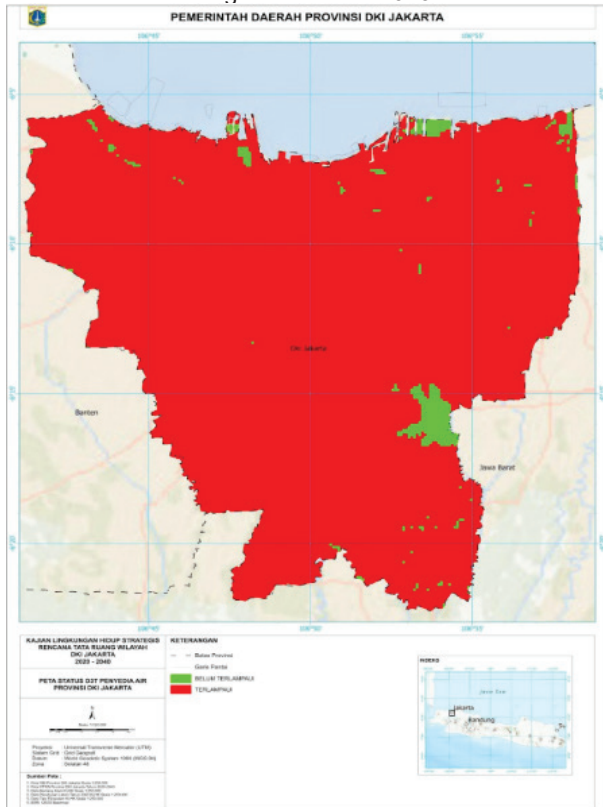
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Kualitas air di Jakarta tercatat mengalami fluktuasi selama periode 2014-2022. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sempat mengalami penurunan dari 34 (tiga puluh empat poin) pada tahun 2014 menjadi 21,33 pada 2017. Kemudian, nilai IKA Jakarta secara konsisten mengalami kenaikan hingga 4,31 (empat koma tiga puluh satu) pada 2021. Pada 2022, nilai IKA mengalami penurunan sebesar 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga poin) menjadi 41,17 (empat puluh satu koma tujuh belas poin). Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan adanya perbaikan badan air secara sistematis yang didukung dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran badan air.

Pasokan sumber air baku Provinsi DKI Jakarta sebagian besar berasal dari luar daerah. Hingga saat ini, 97% (sembilan puluh tujuh persen) pasokan air baku masih ditopang oleh daerah sekitar Jakarta, yakni 81% (delapan puluh satu persen) berasal dari Waduk Jatiluhur dan 16% (enam belas persen) dari Air Curah Olahan Tangerang. Sementara itu, 3% (tiga persen) pasokan berasal dari dalam wilayah Jakarta yakni dari Kali Krukut (Cilandak) dan Kali Pesanggrahan. Ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh tujuh Wilayah Daerah (WD) yang terletak dalam tiga wilayah sungai utama, yakni Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Sungai Ciliwung-Cisadane, dan Sungai Citarum. Wilayah-wilayah ini melintasi berbagai Provinsi, termasuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Dari 7 WD tersebut, 5 diantaranya berada di wilayah DKI Jakarta, yaitu WD Cidanau-Ciujung-Cidurian, WD Ciliwung-Cisadane, WD Ciliwung, WD Cisadane Hulu Bendung Pasar Baru, WD Citarum Tengah, dan WD Kepulauan Seribu. Menurut data debit air yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2016, WD Cisadane Hilir Bendung Pasar Baru memiliki ketersediaan air permukaan paling banyak (Dinas Lingkungan Hidup, 2022).

Gambar 2.6.4 Peta D3TLH Penyedia Air di Wilayah Fungsional Tahun 2019

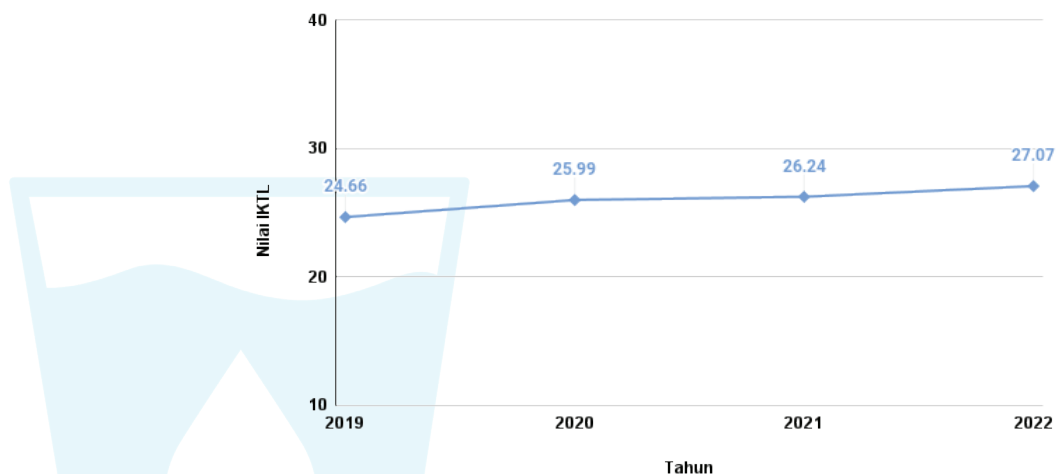


Sumber: SK MenLHK No. 297 Tahun 2019 dan Hasil Analisa Tim KLHS Tahun 2022

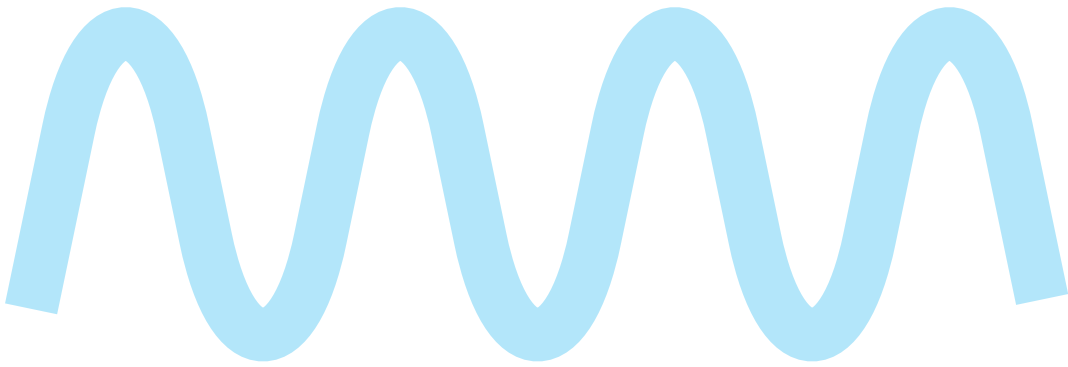
Peta di samping menunjukkan bahwa sebagian besar daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah fungsional Jakarta berstatus terlampaui. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut telah mengalami pembangunan atau digunakan untuk pertanian. Kita bisa melihat indikasi ini di wilayah Jakarta, di mana lebih dari 90 (sembilan puluh persen) persen dari total luasannya memiliki status terlampaui karena telah diubah menjadi lahan terbangun. Hal ini juga berkaitan dengan tingginya jumlah penduduk di Jakarta.

Masyarakat DKI Jakarta saat ini masih sangat bergantung pada sumber air tanah, dan pemakaiannya tergolong masif. Defisit air permukaan dan kurangnya pasokan air dari luar wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan masyarakat DKI Jakarta masih bergantung pada sumber air tanah. Pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus tanpa upaya *recharge*, dapat memicu terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*). Permukaan daerah Pantai Mutiara mengalami penurunan hingga 40 cm (empat puluh centimeter) sepanjang tahun 2007 hingga 2011. Di beberapa tempat lain, seperti Tanjung Priok dan daerah utara Jakarta lainnya tercatat penurunan tanah 1-15 cm (satu hingga lima belas centimeter) per tahunnya. Penurunan tanah terbesar tercatat berada di kawasan Cengkareng dan Kalideres (Barat Laut Jakarta), dan kawasan Kemayoran-Sunter, di Timur Laut Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Gambar 2.6.5 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan

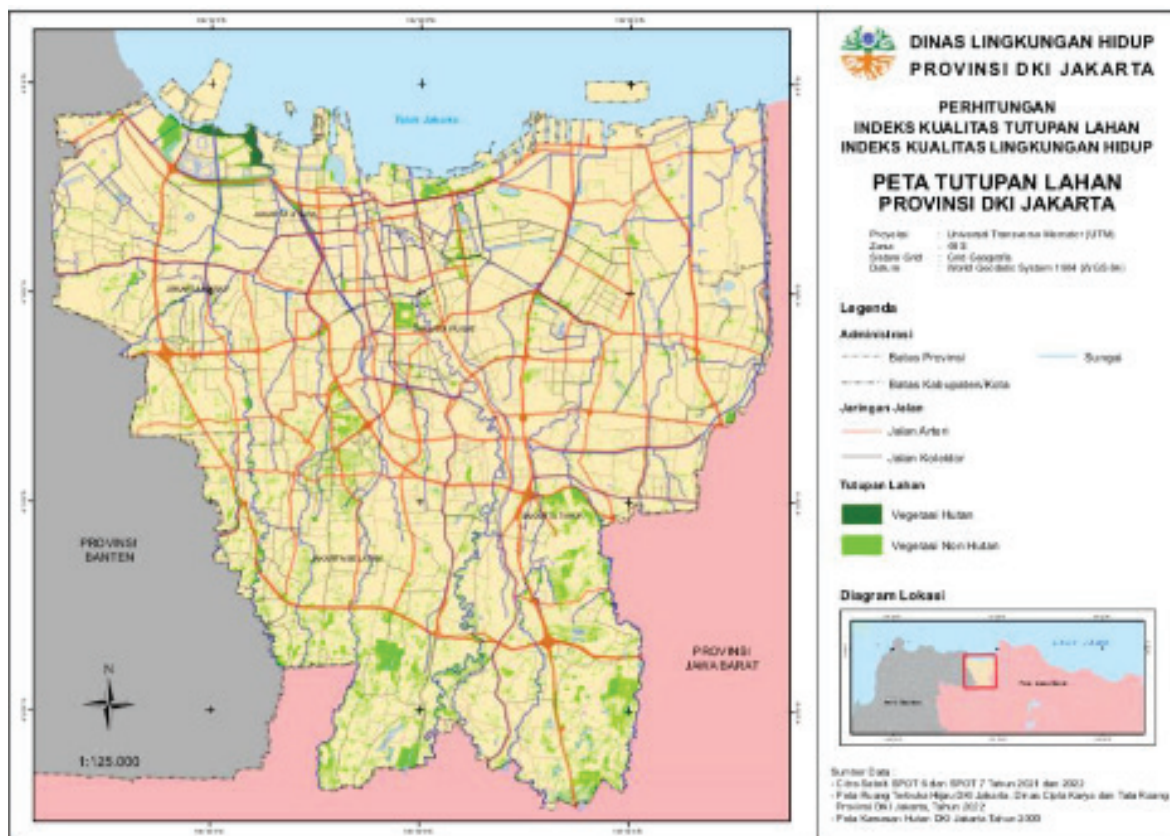


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2023), diolah



Selama periode 2019-2022, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, angka tersebut mencapai 24,66 (dua puluh empat koma enam puluh enam poin) dan terus meningkat hingga 27,07 (dua puluh tujuh koma nol tujuh poin) pada tahun 2022. Capaian ini mencerminkan upaya semua pihak dalam pengelolaan lahan untuk mencapai kondisi ekologis yang lebih baik (Dinas Lingkungan Hidup, 2022).

Gambar 2.6.6 Peta Tutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Untuk Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022



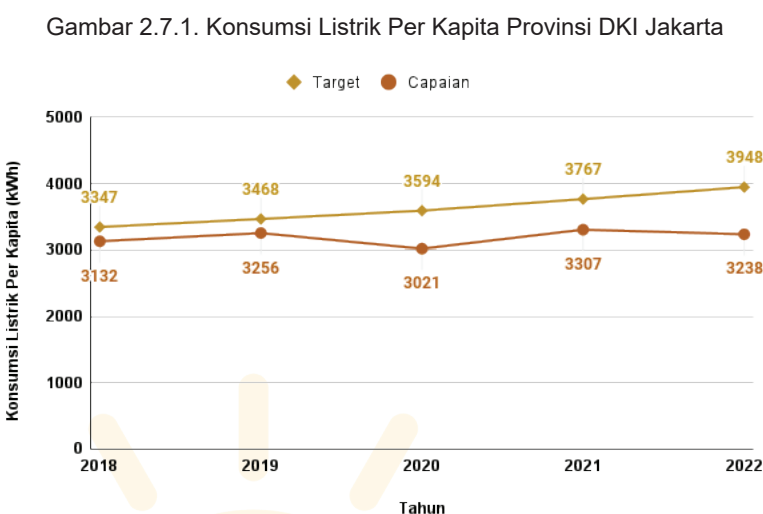
MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA



Konsumsi Listrik di Jakarta

Perkembangan konsumsi listrik di Jakarta dapat diamati melalui capaian indikator rasio elektrifikasi (RE). Sejak tahun 2018, Jakarta telah mencapai rasio elektrifikasi (RE) sebesar 100% (seratus persen), yang mengindikasikan bahwa seluruh penduduk Provinsi DKI Jakarta telah memiliki akses terhadap energi listrik sebagai sumber energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi.

Tren konsumsi listrik di Jakarta juga dapat dilihat dari tingkat konsumsi listrik per kapita. Secara umum, pada periode 2018-2022, konsumsi listrik per kapita di Jakarta mengalami peningkatan dari 3.132,00 kWh (tiga ribu seratus tiga puluh dua *kilowatt* per hour) pada tahun 2018 menjadi 3.237,68 kWh (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan *kilowatt* per hour) pada tahun 2022, atau meningkat rata-rata sebesar 1,03% (satu koma nol tiga persen) per tahun. Konsumsi listrik per kapita di Jakarta sempat mengalami penurunan cukup dalam pada tahun 2020, dari 3.256 kWh (tiga ribu dua ratus lima puluh enam *kilowatt* per hour) pada tahun 2019 menjadi 3.021 kWh (tiga ribu dua puluh satu *kilowatt* per hour) pada tahun 2020. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan dampak pandemi COVID-19 yang memaksa banyak sektor ekonomi dan sosial untuk melambat dan bahkan berhenti sementara. Pembatasan mobilitas dan aktivitas yang diberlakukan oleh pemerintah membuat permintaan listrik menurun, terutama dari sektor industri dan transportasi.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, 2023

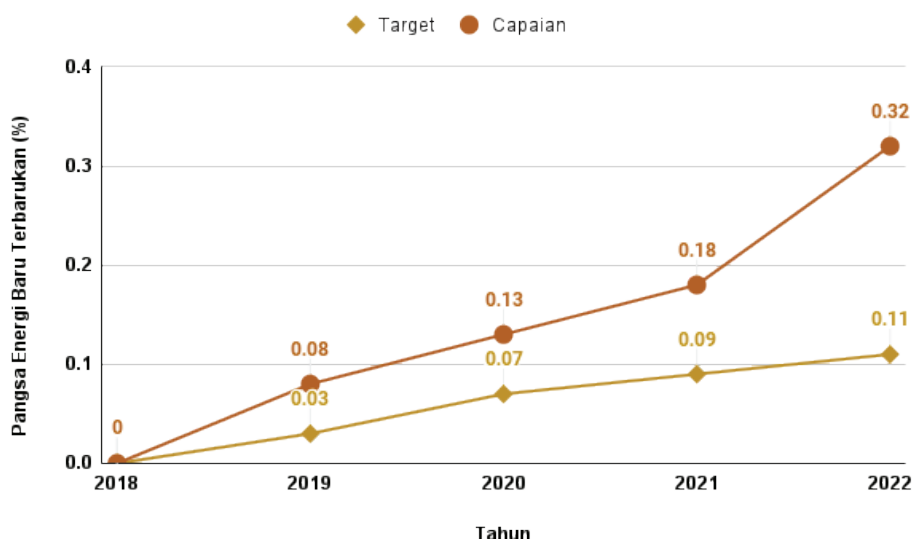
Kendati demikian, seiring dengan pulihnya ekonomi Jakarta pada dua tahun terakhir, tingkat konsumsi listrik masyarakat berangsur mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari tingkat konsumsi listrik per kapita yang meningkat menjadi 3.307 kWh (tiga ribu tiga ratus tujuh *kilowatt* per hour) dan 3.237,68 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan *kilowatt* per hour) pada tahun 2021 dan 2022. Pelonggaran kebijakan pembatasan sosial telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan listrik di Jakarta.



Bauran Energi Terbarukan

Dalam upaya mendukung pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan, sejumlah indikator telah menunjukkan hasil yang positif. Pangsa energi baru dan terbarukan (EBT) dalam pasokan energi primer di Jakarta mengalami kenaikan signifikan dari 0,04% (nol koma nol empat persen) pada tahun 2019 menjadi 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) pada tahun 2022. Angka tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam RAD TPB Jakarta tahun 2017-2022 sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen).

Gambar 2.7.2. Bauran Energi Terbarukan Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta (2023), diolah.

Tantangan yang dihadapi terkait dengan upaya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di Jakarta adalah masih minimnya infrastruktur untuk pengembangan sektor tersebut. Selain itu, Jakarta masih bergantung pada suplai energi nasional yang mayoritas ditopang oleh energi fosil. Transisi menuju sumber energi baru dan terbarukan juga membutuhkan upaya yang signifikan dalam peralihan bauran energi terbarukan di tingkat nasional.

Tabel 2.7.1. Capaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Indikator	Target Pencapaian 2022	Realisasi Pencapaian 2022
7.1.1* Rasio elektrifikasi (%)	100	100
7.1.1 (a) Konsumsi listrik per kapita (kWh)	3.948	3.237
7.2.1* Bauran energi terbarukan (%)	0,11	0,32

Sumber: Berbagai sumber, diolah

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN LAYAK UNTUK SEMUA



Tren pertumbuhan ekonomi Jakarta selama beberapa tahun terakhir mencerminkan sejumlah perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh kota ini. Pada dasarnya, Jakarta merupakan pusat bisnis dan ekonomi terbesar di Indonesia, sehingga pertumbuhannya memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi nasional secara

Pertumbuhan Ekonomi

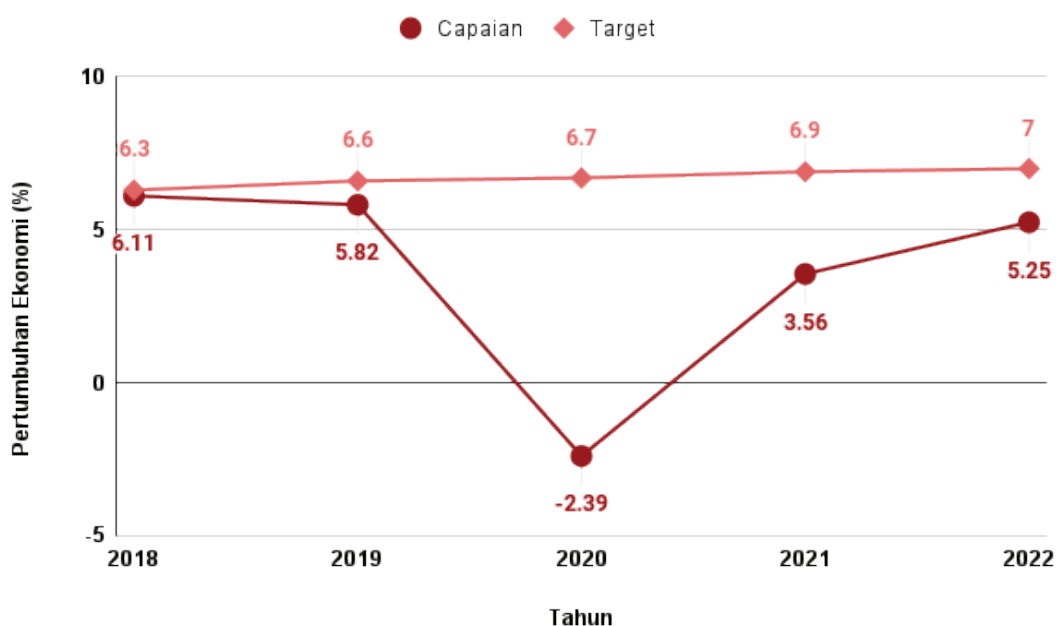
Selama periode tahun 2018-2019, Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 5,19% (lima koma sembilan belas persen) (yoy). Kondisi ini mencerminkan tangguhannya ekonomi Jakarta sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan keuangan utama di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Jakarta utamanya didorong oleh sektor perdagangan, jasa keuangan, teknologi informasi, dan sektor properti (Bank Indonesia, 2023).

Merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membawa dampak yang signifikan terhadap ekonomi Jakarta. Pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan penurunan daya beli konsumen mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang tajam, yakni sebesar -2,39% (minus dua koma tiga sembilan persen) (yoy) pada tahun 2020 (BPS, 2021). Beberapa sektor yang terdampak paling signifikan antara lain sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner. Sektor-sektor tersebut sangat bergantung pada mobilitas dan kehadiran wisatawan (Bank Indonesia, 2021; Adriana et al., 2021).

Seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19 dan terus berlangsungnya program pemulihan ekonomi, perekonomian Jakarta dapat kembali tumbuh positif pada tahun 2021, yakni sebesar 3,56% (tiga koma lima puluh enam persen) (yoy). Adapun kinerja pertumbuhan ekonomi Jakarta berada pada urutan ke lima jika dibandingkan dengan seluruh provinsi lain di wilayah Jawa (BPS, 2022).

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Jakarta kembali melanjutkan tren positif sebesar 5,25% (lima koma dua puluh lima persen). Pencapaian tersebut terutama didorong oleh peningkatan ekspor barang dan jasa serta pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM), seiring dengan mulai meningkatnya kegiatan partai politik menjelang pemilu pada 2024. Hal tersebut tentunya juga sejalan dengan terkendalinya kasus positif aktif COVID-19 dan terus berlangsungnya program vaksinasi booster.

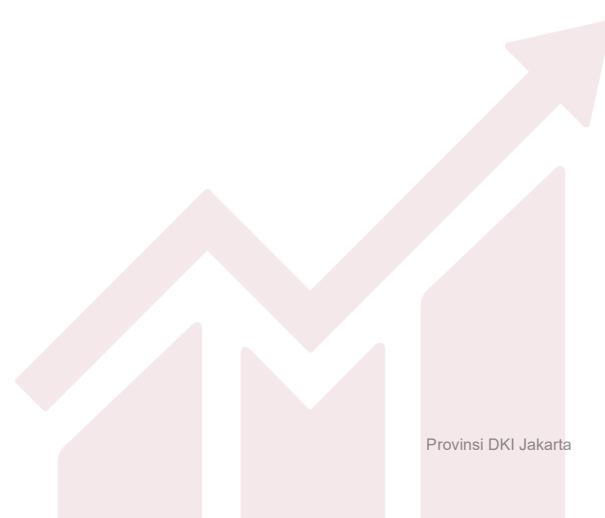
Gambar 2.8.1. Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



Sumber: BPS (2023), diolah

Tantangan yang dihadapi terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara umum berasal dari pembatasan mobilitas dan ruang gerak masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Pandemi berdampak sangat signifikan terhadap ekonomi Jakarta, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, serta penurunan daya beli konsumen menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara drastis. Sektor-sektor seperti perdagangan, pariwisata, perhotelan, dan kuliner mengalami penurunan pendapatan yang cukup tajam akibat penurunan permintaan dan pengetatan kebijakan pembatasan sosial.

Selain itu, tantangan lainnya adalah perkiraan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan resesi global pada tahun 2023 yang dipicu oleh pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan tekanan inflasi global (Lemhanas RI, 2022). Ketidakpastian dan ketegangan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa global ini telah membawa dampak signifikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Jakarta.

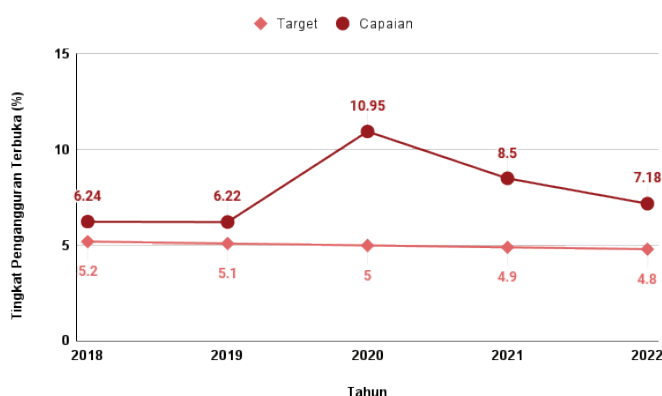


Perkembangan Sektor Ketenagakerjaan

Perkembangan sektor ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2018-2022 mencerminkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam pencapaian Tujuan 8 (delapan) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu indikator penting dalam mencerminkan perkembangan ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka, yang mengalami kenaikan dari 5,2% (lima koma dua persen) pada Agustus 2018 menjadi 7,18% (tujuh koma delapan belas persen) pada Agustus 2022. Pada periode tersebut, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2020, yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada sektor ketenagakerjaan. Kondisi tersebut terutama terjadi pada sektor-sektor yang secara langsung terdampak, seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi yang mengalami penurunan permintaan tenaga kerja akibat pembatasan perjalanan dan penutupan bisnis (Kemenko Perekonomian RI, 2021). Selain itu, pada periode tersebut, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menjaga keberlanjutan operasional mereka akibat ketidakpastian ekonomi yang tinggi (ILO, 2020).

Gambar 2.8.2. Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta

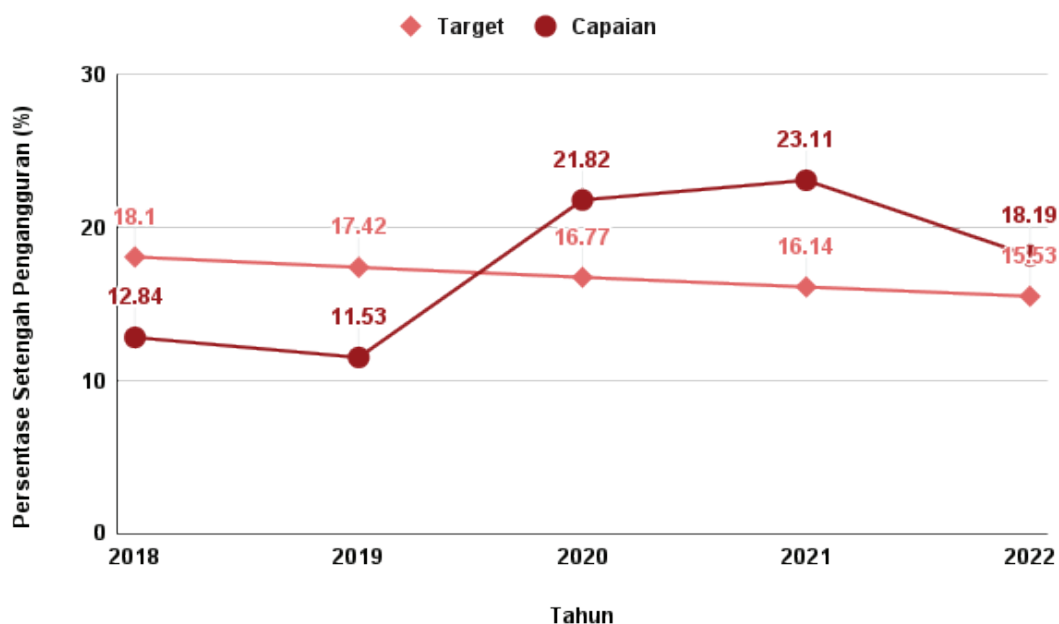


Sumber: BPS (2023), diolah

Selain tingkat pengangguran terbuka, indikator lain yang juga mencerminkan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta adalah persentase setengah pengangguran. Pada tahun 2018, tercatat bahwa persentase setengah pengangguran di Provinsi DKI Jakarta mencapai 12,84% (dua belas koma delapan puluh empat persen), kemudian berhasil turun menjadi 11,53% (sebelas koma lima puluh tiga persen) pada tahun 2019. Capaian kedua tahun tersebut telah memenuhi target tahun berjalan yang ditetapkan pada RAD TPB Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Namun, dampak pandemi pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan peningkatan persentase setengah pengangguran menjadi masing-masing sebesar 21,82% (dua puluh satu koma delapan puluh dua persen) dan 23,11% (dua puluh tiga koma sebelas persen). Pada tahun 2022, persentase ini kembali turun menjadi 18,19% (delapan belas koma sembilan belas persen), mengindikasikan adanya pemulihan dalam pasar tenaga kerja meskipun belum mencapai tingkat sebelum pandemi.

Gambar 2.8.3. Persentase Setengah Pengangguran Jakarta



Sumber: BPS (2023), diolah

Jika dilihat dari sektornya, kenaikan serapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 (Agustus) terutama terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan-minum (Bank Indonesia, 2023). Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 3.077.310 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) orang atau 63,12% (enam puluh tiga koma dua belas persen) dari total pekerja. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada Agustus 2021 yang sebesar 61,73% (enam puluh satu koma tujuh puluh tiga persen).

Tabel 2.8.1. Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta

Keadaan Ketenagakerjaan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	7,837.20	7,884.02	7,930.26	8,126.12	8,004.78	8,199.69	8,239.83	8,266.36	8,245.33	8,327.00
Angkatan Kerja (ribu orang)	5,429.20	5,041.62	5,447.51	5,192.35	5,438.99	5,232.03	5,365.77	5,177.31	5,134.13	5,252.40
Bekerja (ribu orang)	5,139.08	4,726.78	5,167.92	4,852.95	5,170.67	4,659.25	4,909.17	4,737.42	4,723.54	4,875.10
Pengangguran (ribu orang)	290.12	314.84	279.59	339.40	268.32	572.78	456.60	439.90	410.59	377.29
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2,408.00	2,842.40	2,482.75	2,933.77	2,565.78	2,967.66	2,874.05	3,089.04	3,111.20	3,074.61
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3,451.80	3,300.10	3,381.35	3,331.72	3,509.49	2,878.42	3,146.80	2,924.71	2,985.37	3,077.31
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1,687.29	1,426.68	1,786.57	1,521.23	1,661.18	1,780.83	1,762.38	1,812.71	1,738.17	1,797.80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69.27	63.95	68.69	63.90	67.95	63.81	65.12	62.63	62.27	63.08
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94.66	93.76	94.87	93.46	95.07	89.05	91.49	91.50	92.00	92.82
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.34	6.24	5.13	6.54	4.93	10.95	8.51	8.50	8.00	7.18

Sumber: BPS, 2023

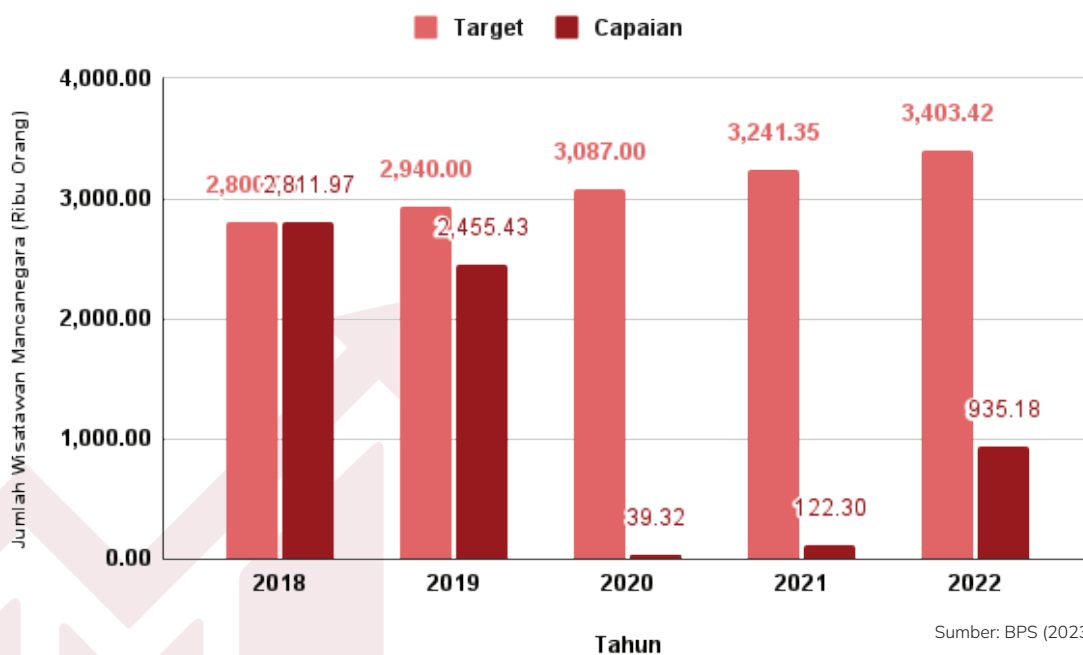
Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jakarta, baik dalam peningkatan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Namun pada saat pandemi COVID-19 merebak, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak paling dalam.

Peningkatan Peran Sektor Pariwisata

Penyebaran virus yang cepat dan kebijakan pembatasan perjalanan domestik dan internasional mengakibatkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan dan aktivitas pariwisata secara keseluruhan (Kemenparekraf RI, 2021). Banyak destinasi pariwisata di Jakarta, yang sebelumnya ramai dengan kunjungan wisatawan, mengalami penurunan tajam dalam tingkat kunjungan dan pendapatan.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, yang utamanya disebabkan oleh kebijakan pembatasan perjalanan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jakarta hanya mencapai 39,32 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh dua) ribu orang, jauh lebih rendah dari jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,45 (dua koma empat puluh lima) juta orang. Meskipun jumlah wisman mengalami peningkatan pada tahun 2022, angka tersebut masih lebih rendah dari level sebelum pandemi dan belum mencapai target yang ditetapkan pada RAD TPB Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022

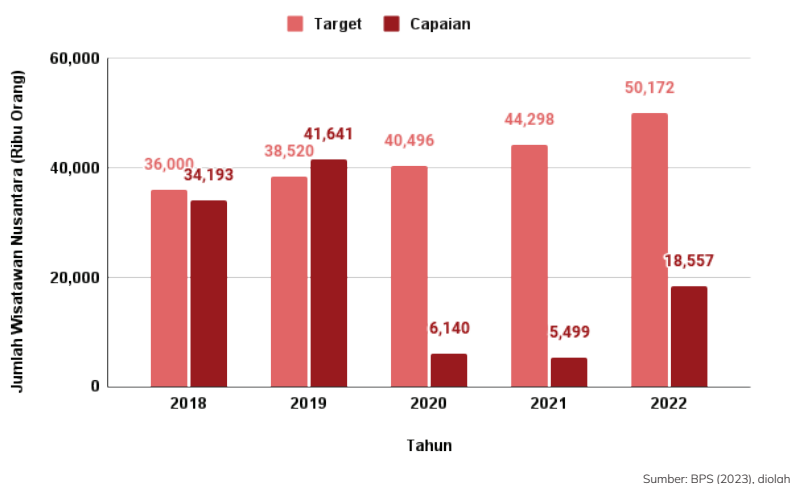
Gambar 2.8.4. Jumlah Wisatawan Mancanegara ke DKI Jakarta



Sumber: BPS (2023), diolah

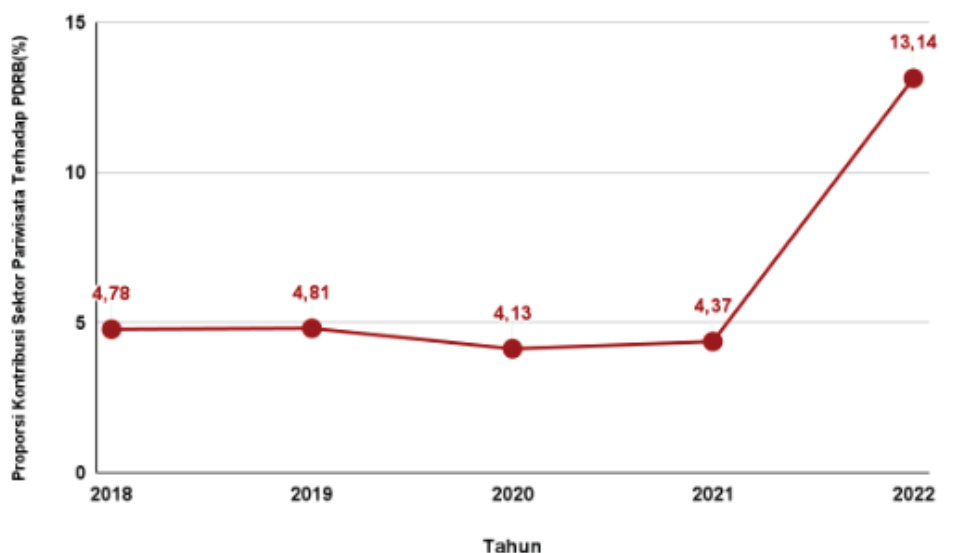
Di samping itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara juga menunjukkan tren penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Jakarta terkoreksi cukup dalam menjadi 6 (enam) juta orang pada tahun 2020 dan turun menjadi 5,4 (lima koma empat) juta orang pada tahun 2021. Jumlah wisatawan nusantara kembali naik pada tahun 2022 seiring dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat. Meski demikian, angka tersebut belum mencapai level sebelum pandemi dan belum mencapai target yang ditetapkan pada RAD TPB Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Gambar 2.8.5. Jumlah Wisatawan Nusantara ke Provinsi DKI Jakarta



Penurunan jumlah wisatawan tersebut pada akhirnya berdampak terhadap penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Pada tahun 2018, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) terhadap PDRB Jakarta. Namun, dampak pandemi mengakibatkan kontribusi sektor pariwisata turun menjadi 4,13% (empat koma tiga belas persen) pada tahun 2020. Meski demikian, seiring dengan terkendalinya kasus positif COVID-19 dan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat, kontribusi sektor pariwisata meningkat signifikan menjadi 13,14% (tiga belas koma empat belas persen) pada 2022.

Gambar 2.8.6. Proporsi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jakarta



Tabel 2.8.2. Capaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Target Pencapaian 2022	Realisasi Pencapaian 2022
8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita (%)	NA	4,55
8.2.1*. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun (%)	NA	2,27
8.3.1*. Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin (%)	17,57	36,82
8.5.1*. Upah rata-rata per jam pekerja (rupiah/jam)	72.881	32.000
8.5.2*. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (%)	4.80	7,18
8.5.2.(a)*. Persentase setengah pengangguran (%)	15,53	18,19
8.6.1*. Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (%)	13	17,19
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB (%)	NA	13,14
8.9.1.(a). Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	3.403.417	935.182
8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	44.298.000	5.499.040

Sumber: Berbagai sumber, diolah.

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI



Tren industri manufaktur selama beberapa tahun terakhir mencerminkan perubahan dan tantangan yang signifikan. Sebagai salah satu kontributor utama terhadap perekonomian Jakarta dengan proporsi sebesar 12,51% (dua belas koma lima puluh satu persen), sektor ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Ibu Kota.

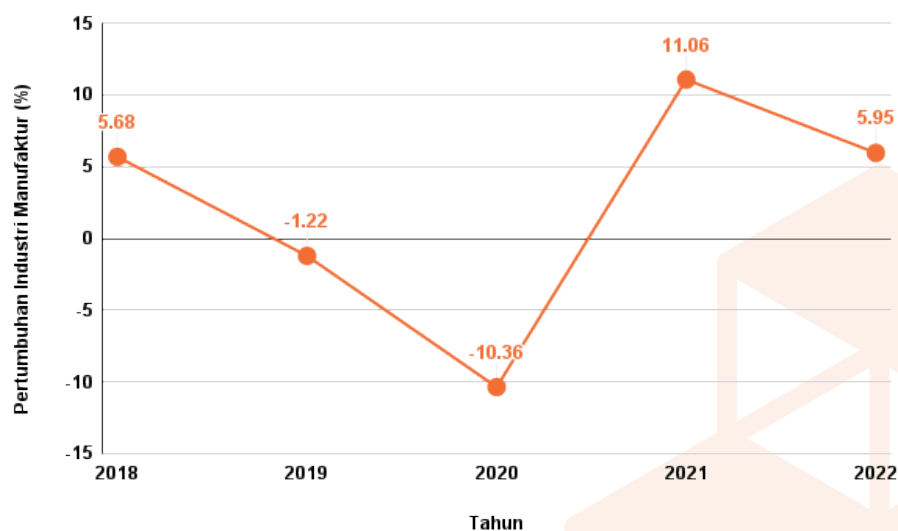
Kinerja Industri Manufaktur

Selama periode tahun 2018-2022, pertumbuhan industri manufaktur di DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019 dan 2020, sektor ini mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -1,22% (minus satu koma dua dua persen) dan -10,36% (minus sepuluh koma tiga enam persen). Kondisi ini secara langsung terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi permintaan global, rantai pasok, dan aktivitas produksi di sektor manufaktur. Pembatasan kegiatan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas produksi dan distribusi.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang dimulai pada tahun 2021, kinerja industri manufaktur mengalami perbaikan yang signifikan. Pada 2021, industri ini mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 11,06% (sebelas koma nol enam persen), dan melanjutkan tren pertumbuhan positif pada tahun 2022 sebesar 5,95% (lima koma sembilan puluh lima persen). Kuatnya kinerja industri pengolahan pada tahun-tahun tersebut didorong oleh pelonggaran status pembatasan sosial yang berdampak terhadap peningkatan permintaan domestik.

Selain itu, permintaan dari pasar global yang semakin pulih juga mendukung pertumbuhan ekspor produk manufaktur Jakarta. Dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang mengizinkan operasi penuh dengan persyaratan vaksinasi pekerja dan penerapan aplikasi Peduli Lindungi juga turut berperan dalam menjaga kapasitas industri manufaktur.

Gambar 2.9.1. Pertumbuhan Industri Manufaktur di Provinsi DKI Jakarta

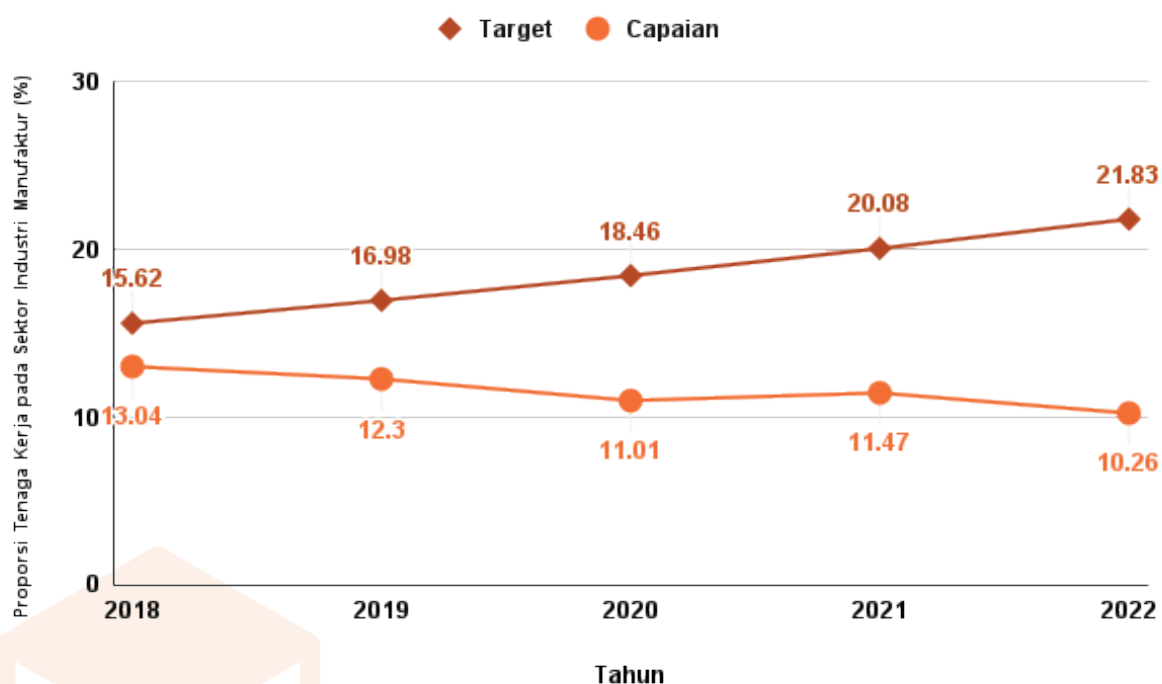


Sumber: BPS (2023), diolah

Kinerja industri manufaktur di Provinsi DKI Jakarta berkaitan erat dengan proporsi tenaga kerja pada sektor tersebut. Turunnya proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur pada tahun 2020 sejalan dengan penurunan kinerja sektor manufaktur pada tahun tersebut. Demikian juga, peningkatan performa industri manufaktur pada tahun 2021 sejalan dengan peningkatan proporsi tenaga kerja pada sektor tersebut.

Namun, jika dilihat dari tren selama periode tahun 2018-2022, terlihat bahwa proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur terus mengalami penurunan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa Jakarta sedang mengalami transformasi menuju kota berbasis jasa. Transformasi ini merupakan respons terhadap perubahan dalam dinamika ekonomi nasional dan preferensi konsumen yang berubah. Oleh karena itu, perhatian terhadap perubahan dalam struktur ketenagakerjaan di sektor manufaktur akan menjadi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi di masa depan.

Gambar 2.9.2. Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur



Sumber: BPS, 2023



Industri pengolahan di Provinsi DKI Jakarta menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan pada tahun 2022. Salah satu tantangan utama adalah implementasi kebijakan tapering yang diterapkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), bersama dengan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sebagai respons terhadap tekanan inflasi global. Kebijakan *tapering* berpotensi memperkuat nilai dolar terhadap rupiah, yang dapat memberikan tekanan pada industri yang bergantung pada bahan baku impor untuk produksi barang yang dikonsumsi di pasar domestik. Kenaikan suku bunga juga dapat meningkatkan beban keuangan yang harus ditanggung oleh industri, mengingat biaya pinjaman akan naik.

Selain itu, dampak dari Perang Rusia-Ukraina juga menjadi tantangan serius bagi industri dalam negeri. Konflik ini mengganggu rantai pasok beberapa komoditas yang menjadi kebutuhan industri, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pasokan bahan baku. Biaya produksi industri juga ikut meningkat akibat tren kenaikan harga bahan baku dan energi global, yang dapat mengurangi profitabilitas sektor manufaktur.

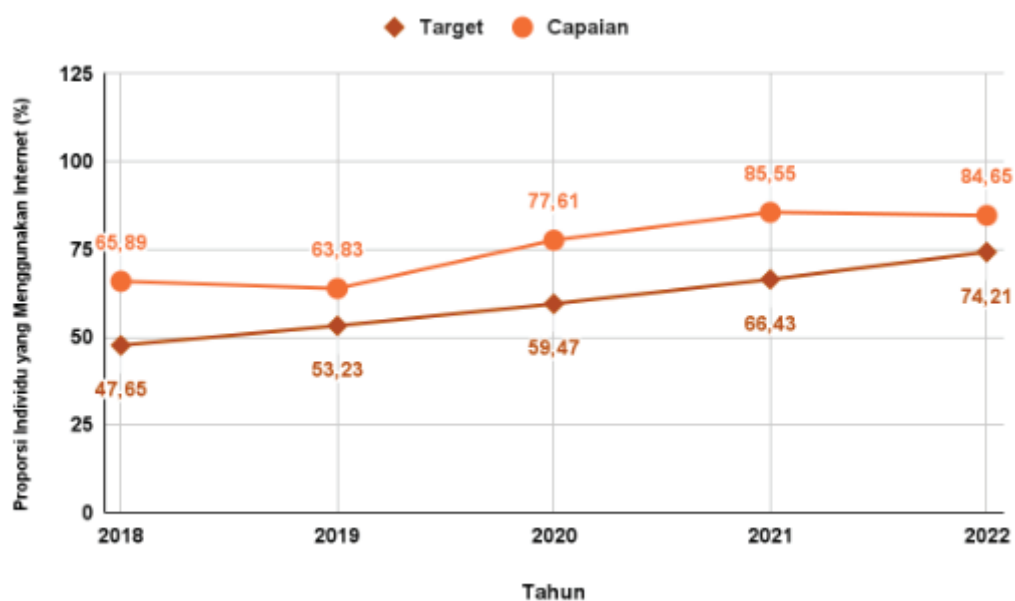
Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari negara mitra dagang utama Jakarta juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Perlambatan ekonomi global secara umum memiliki dampak pada *volume* ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan khususnya Provinsi DKI Jakarta. Tekanan terhadap volume perdagangan global secara keseluruhan juga berdampak pada volume ekspor dari sektor manufaktur Provinsi DKI Jakarta, yang tercermin dalam tren penurunan volume ekspor sejak kuartal II (dua) tahun 2021 (Bank Indonesia, 2023).

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Inovasi

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong kegiatan ekonomi terus dilakukan dengan berbagai kebijakan yang inovatif dan dukungan infrastruktur yang berkualitas. Tersedianya infrastruktur yang memadai di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari persentase kondisi jalan mantap sebesar 97,19% (sembilan puluh tujuh koma sembilan belas persen). Selain itu, hingga akhir tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki jumlah dermaga penyeberangan sebanyak 11 (sebelas) unit, dan jumlah terminal angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi standar pelayanan prima sebanyak 1 (satu) unit.

Untuk mendukung pengembangan inovasi, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercermin dalam penyediaan akses terhadap teknologi informasi dan internet. Proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi DKI Jakarta tercatat mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2022 dan telah mencapai target yang ditetapkan dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Gambar 2.9.3. Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023), diolah

Tabel 2.9.1. Capaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Indikator	Target Pencapaian 2022	Realisasi Pencapaian 2022
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB (%)	NA	11,72
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur (%)	NA	5,95
9.2.2.* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (%)	21,83	10,26

Sumber: Berbagai sumber, diolah

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

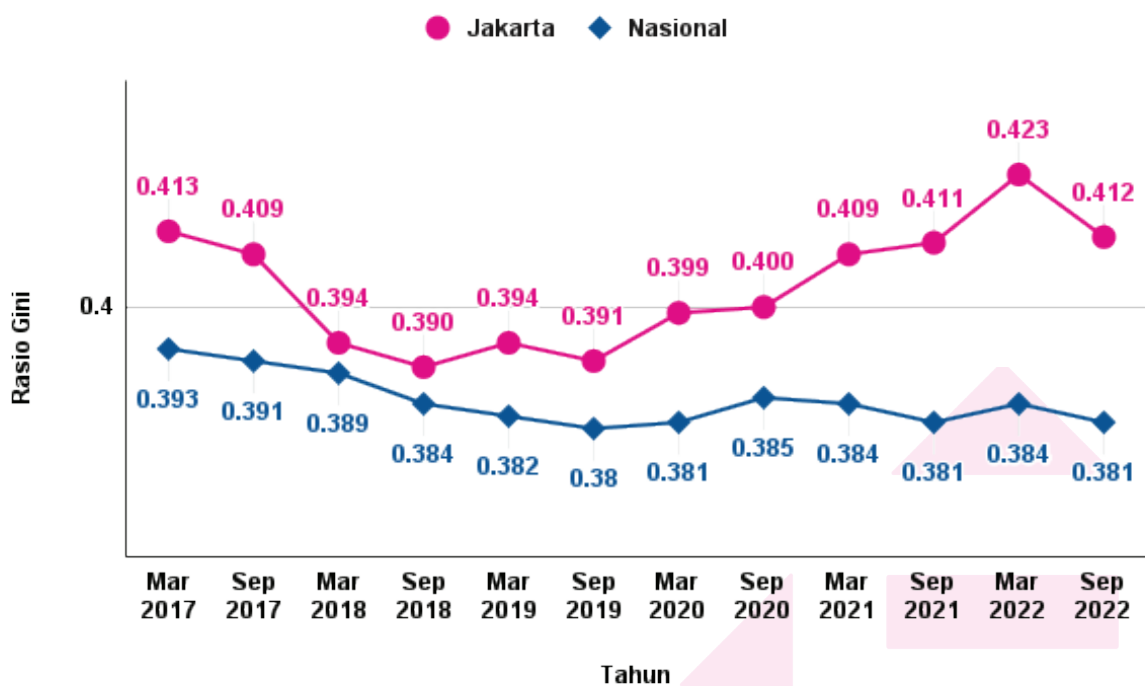


Kondisi Kesenjangan di Jakarta

Kesenjangan ekonomi di Jakarta masih menjadi masalah yang perlu diatasi dengan serius. Angka Koefisien Gini Provinsi DKI Jakarta telah mengalami fluktuasi yang signifikan sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Pada awal pandemi, pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi berdampak signifikan pada pendapatan masyarakat, terutama pada kelompok yang bekerja dalam sektor-sektor terdampak seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa. Hal ini mengakibatkan kenaikan tajam pada Rasio Gini, yang mengindikasikan meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan.

Puncak dari peningkatan Rasio Gini terjadi pada Maret 2022, yang menunjukkan bahwa efek ekonomi pandemi masih terasa kuat. Meskipun terjadi pemulihan ekonomi pada tahun 2021, penurunan Rasio Gini yang signifikan baru terjadi pada September 2022. Angka Koefisien Gini Provinsi DKI Jakarta pada bulan September 2022 mencapai 0,412 (nol koma empat ratus dua belas) yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan semester sebelumnya yang sebesar 0,423 (nol koma empat ratus dua puluh tiga). Meskipun telah terjadi penurunan, angka Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta masih belum kembali ke level sebelum pandemi, yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan di Jakarta masih relatif tinggi.

Gambar 2.10.1. Rasio Gini DKI Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS (2023), diolah

Dalam upaya menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan, dan praktik diskriminatif, beberapa indikator telah menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2022, skor Indeks Demokrasi DKI Jakarta mencapai 82,08 (delapan puluh dua koma nol delapan), melampaui target tahun berjalan yang ditetapkan pada RAD TPB Tahun 2017-2022 sebesar 75,35 (tujuh puluh lima koma tiga puluh lima). Selain itu, Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2022 mencapai 30 (tiga puluh) kasus, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 70 (tujuh puluh) kasus.

Namun, capaian indikator lainnya justru mengalami penurunan. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan menjadi 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) laporan, dari sebelumnya 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) laporan pada tahun 2021. Selain itu, jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 (dua belas) bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional juga meningkat pada tahun 2022, yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) aduan.

Tabel 2.10.1. Capaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Indikator	Target Pencapaian 2022	Realisasi Pencapaian 2022
10.1.1* Rasio Gini (nilai)	NA	0,411
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (%)	NA	4,67

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Upaya untuk mengurangi kesenjangan di Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan utama yang dihadapi adalah dampak pandemi COVID-19 yang masih belum sepenuhnya hilang. Pembatasan aktivitas dan mobilitas yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap perekonomian Jakarta. Banyak perusahaan dan usaha kecil menengah terpaksa menghentikan operasional atau mengurangi skala bisnisnya, yang kemudian berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan dan penghasilan masyarakat.

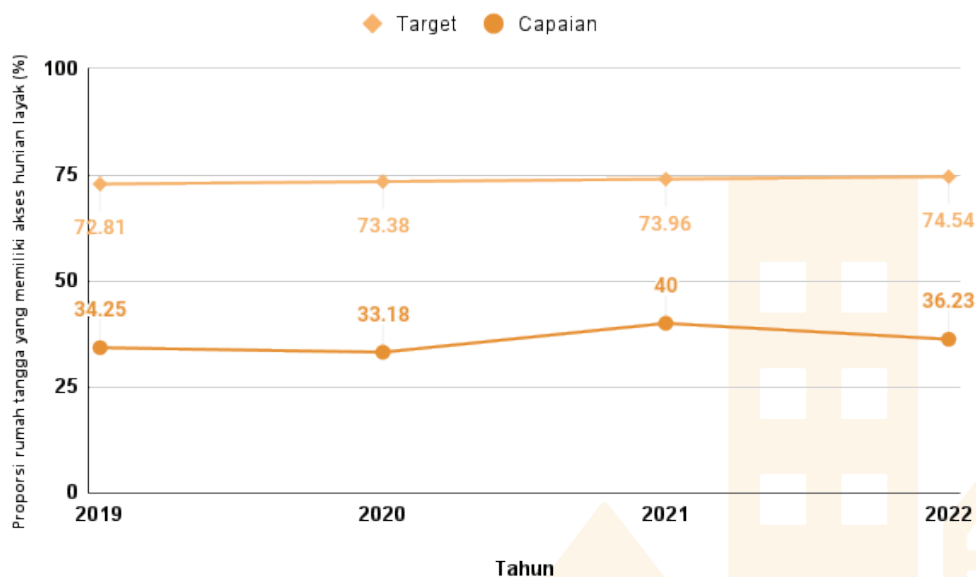
Kondisi ini semakin diperparah oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Hal ini terkait dengan gangguan pasokan dan produksi yang disebabkan oleh pandemi, serta meningkatnya permintaan atas barang-barang tersebut. Ketidakpastian dan kekhawatiran terkait pandemi juga membuat masyarakat lebih berhemat dan mengurangi pengeluaran, yang pada akhirnya dapat memperparah penurunan daya beli dan meningkatkan kesenjangan ekonomi.

Akses Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Terdapat 5 (lima) kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durable housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Pada tahun 2022, menurut kriteria BPS hanya 36,23% (tiga puluh enam koma dua puluh tiga persen) rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses hunian layak. Tren proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dari tahun 2018-2022 terlihat berfluktuasi. Dalam periode tersebut sempat terjadi perubahan metode perhitungan dimana kriteria untuk hunian layak menjadi lebih ketat. Pada konteks Jakarta, konsekuensi dari perubahan metode ini membuat capaian Provinsi DKI Jakarta turun signifikan karena komponen atap asbes yang tidak memenuhi standar kesehatan di DKI Jakarta masih mencapai 54,78% (lima puluh empat koma tujuh puluh delapan persen). Jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, atap yang terbuat dari asbes dengan material utamanya berupa karbon maka serat asbes yang terhirup dan masuk ke paru-paru bisa menyebabkan asbestosis (UPT Statistik DKI Jakarta, 2022). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta, mengingat sulitnya intervensi terhadap capaian hunian layak di lahan-lahan privat.

Gambar 2.11.1 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

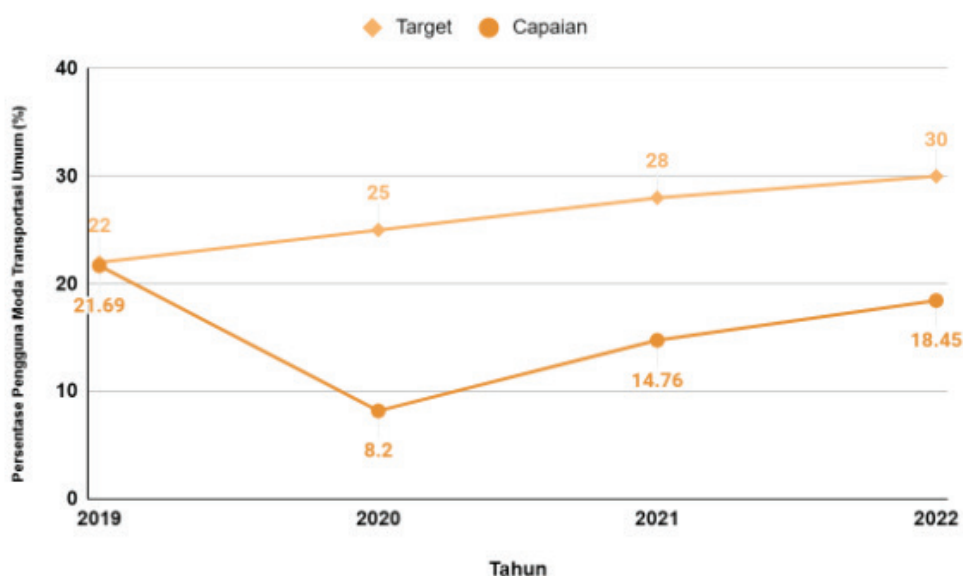


Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan tren persentase pengguna moda transportasi umum dari tahun 2019-2022 cukup fluktuatif, terlihat di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dalam capaian ini karena dampak dari pandemi COVID-19, bahkan capaian ini belum sepenuhnya pulih seperti capaian sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Berdasarkan target RAD TPB 2017-2022, dalam kurun waktu 2019-2022 tidak ada satupun target yang tercapai.

Akses Terhadap Transportasi Publik

Gambar 2.11.2 Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum



Sumber: BPS (2023), diolah

Pola mobilitas masyarakat di Jakarta masih didominasi oleh pengguna kendaraan pribadi. Selain itu, tingginya mobilitas di Provinsi DKI Jakarta juga disebabkan oleh penataan ruang dan wilayah yang kurang optimal karena minimnya penggunaan lahan campuran (*mixed use*) antara permukiman, *Central Business District* (CBD), sekolah, perkantoran, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong perubahan kebijakan dari *Car Oriented Development* (COD) menjadi *Transit Oriented Development* (TOD)/Kawasan Berorientasi Transit.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kawasan Berorientasi Transit adalah Kawasan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari pusat kawasan yang memiliki prinsip dasar dan kriteria perencanaan Kawasan Berorientasi Transit.

Target terkait warisan budaya diukur melalui pengeluaran per kapita untuk alokasi anggaran pemerintah untuk preservasi, perlindungan, dan konservasi warisan budaya. Provinsi DKI Jakarta merupakan kota bersejarah yang memiliki cagar budaya yang perlu dilestarikan. Pada titik-titik tertentu, terdapat peninggalan-peninggalan yang masih eksis terekam hingga saat ini yang kemudian menjadi warisan budaya. Perlindungan cagar budaya tidak hanya semata-mata melindungi monumen masa lampau untuk kepentingan sejarah tentang zaman keemasan yang sudah lampau, tetapi juga terhadap potensi adanya konflik kepentingan yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan cagar budaya. Perlu disadari bahwa kekayaan warisan budaya tidak dapat tergantikan dan memiliki potensi untuk hancur dan punah karena faktor alam, non alam maupun manusia (Dinas Kebudayaan, 2022).

Konservasi Warisan Budaya

Merujuk pada situs Warisan Budaya Tak Benda³ dari Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemdikbud Kemendikbud (2023), selain warisan budaya dalam bentuk cagar budaya, Provinsi DKI Jakarta juga kaya akan Warisan Budaya Tak Benda, yang mencakup:

1. 21 (dua puluh satu) Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda;
2. 15 (lima belas) Seni pertunjukan; Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
3. 1 (satu) Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
4. 28 (dua puluh delapan) Kemahiran dan kerajinan tradisional.

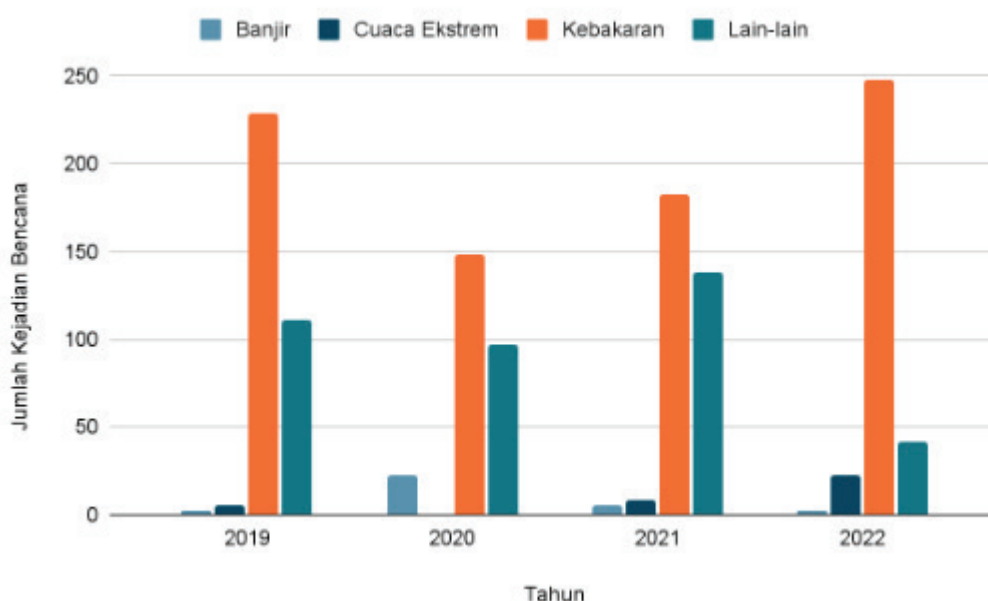
³Warisan Budaya Takbenda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (intangible/abstrak), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain (Edi Sedyawati (2002) dalam Kemendikbud (2023)).

Kebencanaan

Jakarta merupakan daerah dataran rendah, di mana sebagian wilayahnya terletak di bawah permukaan air laut, dan kota ini berada di muara dari beberapa sungai, dengan total 13 (tiga belas) sungai yang melintasinya. Kondisi geografis ini, ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta dampak dari pembangunan yang masif, menyebabkan Jakarta menghadapi kerentanan terhadap berbagai bencana yang kompleks, termasuk banjir, penurunan tanah, gempa bumi, kebakaran, dan ancaman sosial lainnya. Untuk menjadi kota yang berketahanan, Jakarta harus mengimplementasikan manajemen risiko bencana, dengan tujuan mengurangi jumlah korban jiwa, jumlah orang yang terdampak, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana. Upaya ini sejalan dengan prinsip yang diusung dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

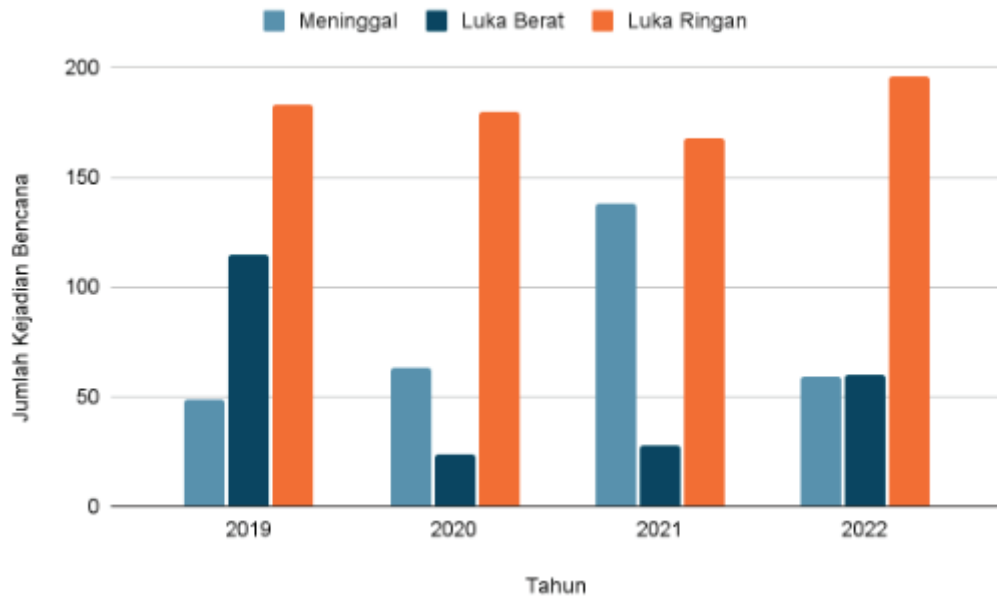
Dominasi risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta salah satunya disebabkan perubahan iklim, yang mengakibatkan cuaca ekstrem, meningkatkan risiko banjir di Jakarta. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan aliran air melebihi kapasitas sistem drainase perkotaan yang hanya mampu menampung 1.414 m³/detik (Seribu empat ratus empat belas meter kubik per detik). Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut secara global. Dalam situasi ini, ekstraksi air tanah yang tidak terkendali menyebabkan bagian utara Jakarta mengalami penurunan muka tanah dan rentan terhadap bencana banjir rob, sebagai gambaran tren bencana di DKI Jakarta berikut rekap data bencana dan data terkait bencana dan korban bencana di Jakarta yang terjadi selama tahun 2019-2022.

Gambar 2.11.3 Rekap Data Bencana di Jakarta Tahun 2019-2022



Sumber: BPBD, 2023

Gambar 2.11.4 Rekap Data Korban Bencana di Jakarta Tahun 2019-2022



Sumber: BPBD, 2023

Terdapat beberapa jenis ancaman bencana di Provinsi DKI Jakarta antara lain banjir, gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrem, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran wilayah perkotaan. Khusus ancaman bencana COVID-19, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka COVID-19 dikategorikan kedalam jenis ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022).

Pengurangan Resiko Bencana

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merilis Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2026. Berdasarkan hasil kajian tersebut, terdapat beberapa hasil kajian risiko dari sisi kerentanan, bahaya, kapasitas dan risiko. Berdasarkan analisis risiko bencana yang telah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, ditemukan bahwa tidak ada risiko bencana dalam kategori tinggi. Sementara itu, bencana-bencana yang terkategori risiko sedang diantaranya banjir, gempa bumi, gelombang ekstrem, abrasi, kekeringan, kegagalan teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran di wilayah perkotaan. Di sisi lain, risiko bencana dalam kategori rendah terdapat pada likuefaksi, tsunami, dan cuaca ekstrem. Klasifikasi risiko bencana ini didasarkan pada perhitungan risiko bencana. Informasi lebih lanjut mengenai rekapitulasi tingkat risiko bencana Provinsi DKI Jakarta berikut ini.

Tabel 2.11.1 Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Likuefaksi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah
4	Tsunami	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
6	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
7	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
8	Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
10	COVID-19 ⁴	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
11	Kebakaran Wilayah Perkotaan	Menggunakan Metode Kajian yang Berbeda			Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2026, 2022

Dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana terdapat beberapa rekomendasi tindakan penanggulangan bencana, sebagai berikut:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Penanganan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

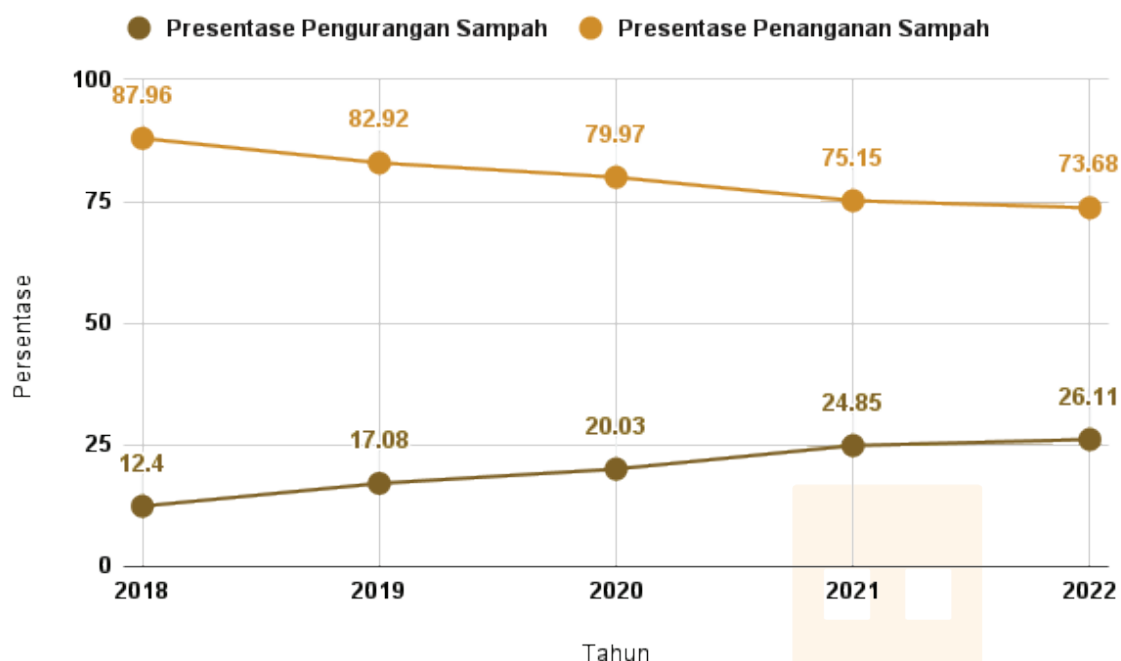
^{4*)} Sehubungan dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 maka jenis bahaya COVID-19 termasuk dalam jenis bahaya epidemi dan wabah penyakit”

Target 11.6⁵ yang menyoroti dampak lingkungan di wilayah perkotaan diterjemahkan ke dalam beberapa indikator, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah dan kualitas udara. Indikator-indikator yang diadopsi memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks perkotaan, sehingga arah pembangunan perkotaan seharusnya tidak lagi berdampak buruk bagi lingkungan, baik dalam hal pengelolaan limbah maupun kualitas udara.

Dampak Lingkungan Perkotaan

Indikator kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2022 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase pengurangan sampah, sedangkan sebaliknya pada indikator penanganan sampah trennya terlihat menurun, hingga tahun 2022 menjadi sebesar 73,68% (tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan persen) (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Gambar 2.11.5 Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah di DKI Jakarta



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

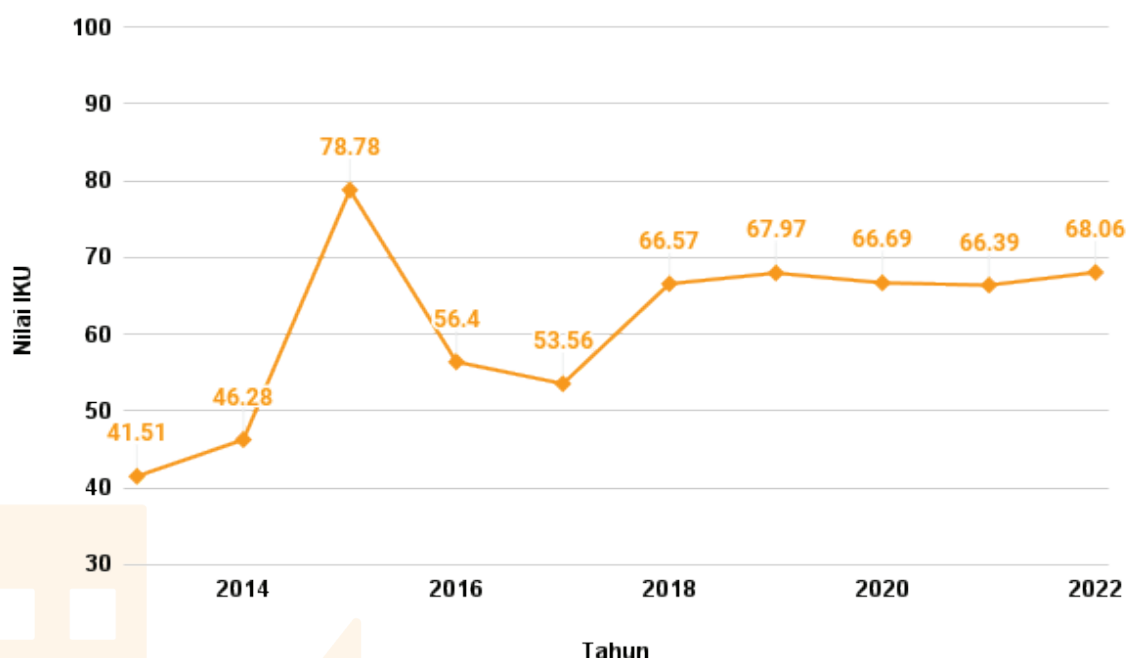
⁵Target 11.6 yakni pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Udara (IKU) DKI Jakarta mencapai 68,06 (enam puluh delapan koma nol enam poin) (kategori: Sedang). Hasil tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 67,36 (enam puluh tujuh koma tiga enam). (kategori: Sedang). Selain itu, dari tren perkembangan nilai IKU di Provinsi DKI Jakarta, terlihat bahwa grafik IKU menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dalam lima tahun terakhir, pencapaian nilai IKU menunjukkan tingkat kestabilan dengan peningkatan yang relatif signifikan. Perbaikan kualitas udara ini, terutama sejak tahun 2013, dapat diatribusikan kepada berbagai upaya, termasuk peningkatan infrastruktur transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan penerapan regulasi-regulasi lainnya yang bertujuan untuk mengendalikan mutu udara.

Kualitas Udara

Dalam indikator kualitas udara, pengukuran dilakukan dengan SO₂ dan NO₂ sebagai parameter. Namun, IKU belum mempertimbangkan parameter penting lainnya seperti PM_{2.5} dan PM₁₀.

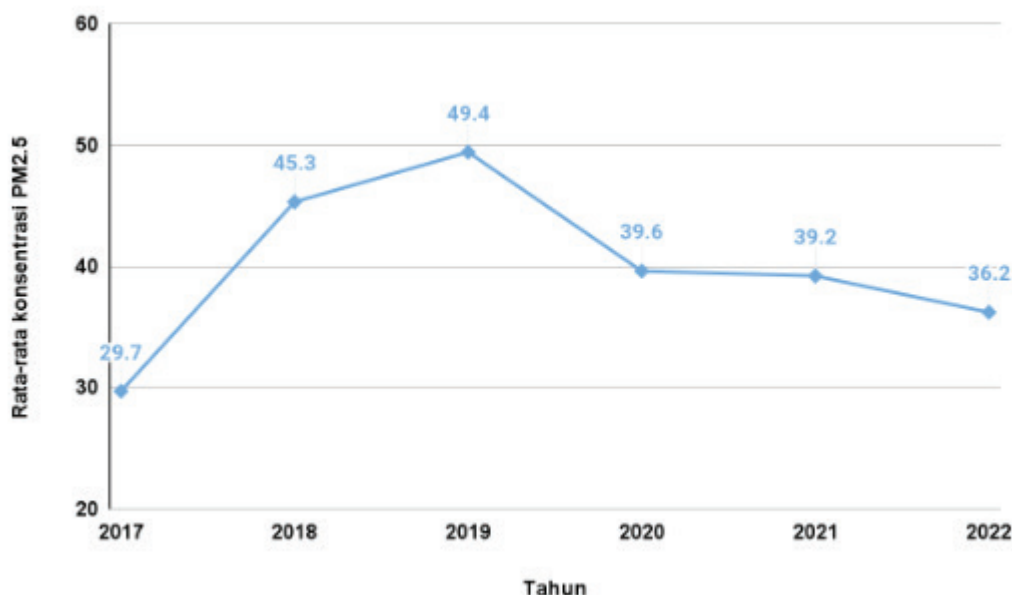
Gambar 2.11.6 Indeks Kualitas Udara di Jakarta Tahun 2013-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan IQAir, catatan tahunan rata-rata konsentrasi PM_{2.5} di Jakarta 7-10 (tujuh hingga sepuluh) kali lebih tinggi dari ambang batas yang disarankan WHO. Kadar PM_{2.5} yang disarankan WHO berada di kisaran 0-5 µg/m³ (nol hingga lima mikrogram per meter kubik).

Gambar 2.11.7 Rata-rata Konsentrasi PM_{2.5} di Jakarta



Sumber: IQAir, 2023

Pencemaran udara sendiri menjadi isu strategis yang mendesak dan harus segera ditangani di Jakarta. Masalah ini disebabkan oleh dua sektor utama, yaitu transportasi dan industri. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jakarta menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik milik warga Jakarta maupun penduduk komuter di sekitarnya, yang menyumbang signifikan terhadap pencemaran udara. Selain itu, industri juga menjadi penyumbang besar polusi udara karena mayoritas pabrik-pabrik di Jakarta dan sekitarnya menggunakan bensin dan solar sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan pemanas. Selain itu, pembangkit listrik juga menjadi kontributor lain dalam pencemaran udara. Sebagian besar pembangkit listrik di Jakarta menggunakan bahan bakar gas alam, hal ini berpotensi menyebabkan pencemaran lintas batas yang memerlukan penanganan lintas wilayah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai tindakan awal untuk mengendalikan pencemaran udara, Pemprov DKI Jakarta telah menyusun Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) yang merupakan perencanaan komprehensif untuk mengendalikan pencemaran udara secara terpadu dan memberikan arah serta fokus upaya lintas sektor dalam meningkatkan kualitas udara. SPPU ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi. Strategi dan rencana aksi untuk mengendalikan pencemaran udara bertujuan untuk mengatasi tekanan pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. SPPU ini sudah dirilis pada tahun 2023 dalam bentuk Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

Untuk mengurangi polusi udara, merujuk pada Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) terdapat beberapa strategi yang diturunkan menjadi beberapa program yang termuat dalam rencana aksi dalam Kepgub tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi dari SPPU ini.

Tabel 2.11.2 Rencana Aksi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara

Strategi	Program
Strategi 1 Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Inventarisasi Emisi (IE) yang berkelanjutan
	2) Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara
	3) Pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi
	4) Pembentukan timkerja lintas sektoral Pengendalian Pencemaran Udara
	5) Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara
	6) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara
Strategi 2 Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Bergerak	1) Peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah
	2) Penerapan uji emisi kendaraan bermotor
	3) Pengembangan kawasan rendah emisi
	4) Pengendalian emisi melalui pengurangan mobilitas dalam kerangka kerjasama pilar pemerinta-sektor swasta-masyarakat sipil
	5) Peningkatan infrastruktur penghubung ke sarana transportasi umum
	6) Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas
	7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara
Strategi 3 Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Tidak Bergerak	1) Peningkatan ruang terbuka dan bangunan hijau
	2) Peningkatan instalasi panel surya atap
	3) Pengendalian polusi udara dari kegiatan industri

Sumber: Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, 2023

Selama ini beberapa upaya pengendalian telah dilakukan, antara lain meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara; menerapkan uji emisi kendaraan bermotor; berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam penyediaan bahan bakar ramah lingkungan; serta mengembangkan transportasi umum yang ramah lingkungan. Semua langkah ini beserta rencana aksi ke depan diharapkan dapat mengatasi permasalahan pencemaran udara dan memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Bangunan & Material Berkelanjutan

Pada Target 11.c⁶ TPB terkait penggunaan dan material berkelanjutan diterjemahkan ke dalam indikator persentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan. Jakarta sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

Komitmen dan Peraturan Bangunan Gedung Hijau

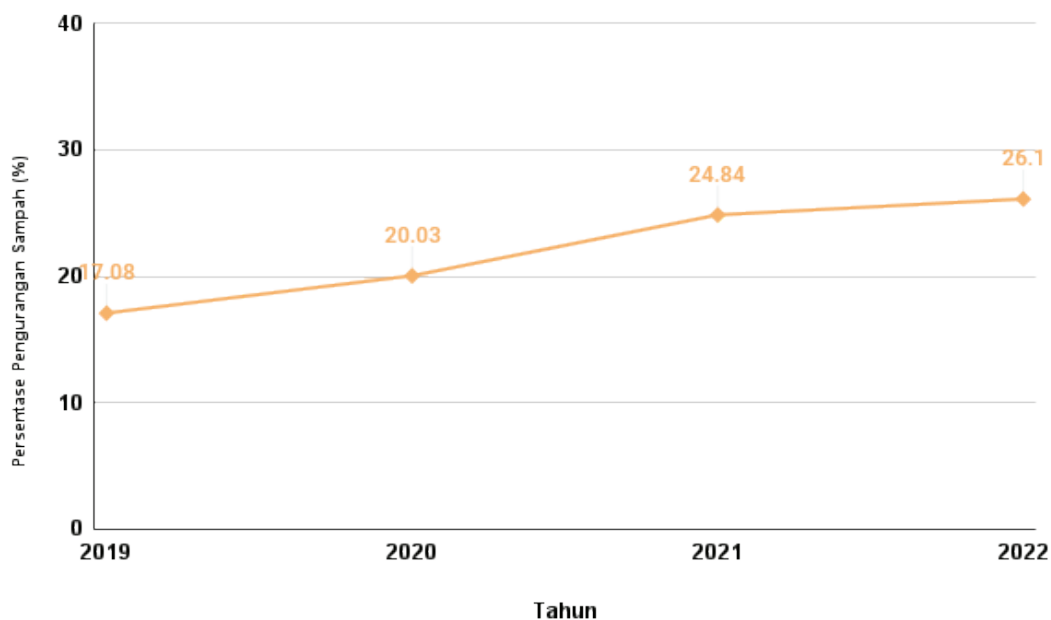
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 01/SE/M/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

⁶ Target 11.b menurut Metadata Edisi II yang dirilis Kementerian PPN/Bappenas berbunyi: Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi, sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Pengolahan Sampah di Kota

Indikator kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2019-2022 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase pengurangan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2019 persentase pengurangan sampah tercatat 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen), kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 26,1% (dua puluh enam koma satu persen).

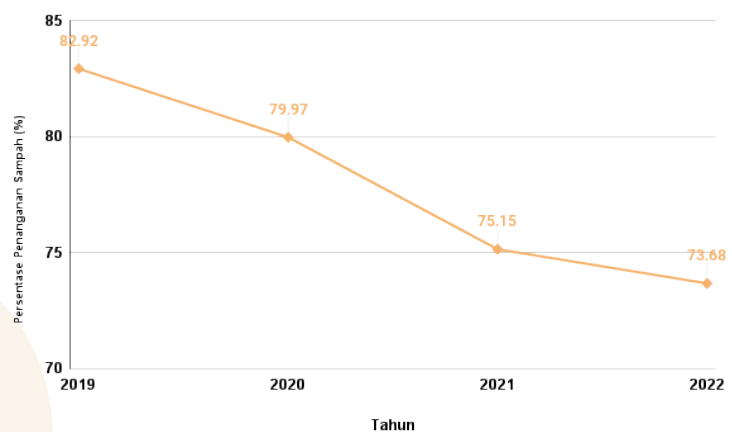
Gambar 2.12.1 Persentase Pengurangan Sampah (%)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2019-2022 menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2019 persentase penanganan sampah tercatat sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen), kemudian pada tahun berikutnya persentase penanganan sampah terus turun hingga tahun 2022 menjadi sebesar 73,68% (tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan persen).

Gambar 2.12.2 Persentase Penanganan Sampah (%)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat berbagai kebijakan/aksi yang dibuat untuk mendukung pengurangan sampah, diantaranya;

- Pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) di mal dan toko swalayan sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
- Pengurangan sampah di sumber menggunakan metode biokonversi *Black Soldier Fly* (BSF) yang dapat mengolah sampah sisa makanan dalam waktu relatif singkat dan dapat menampung lebih dari 480 kg sampah/hari (empat ratus delapan puluh kilogram sampah per hari);
- Pengangkutan sampah terjadwal di 147 (seratus empat puluh tujuh) RW percontohan;
- Pembinaan Bank Sampah yang dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
- Pengelolaan sampah hulu yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga serta Peraturan

Kegiatan dari penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022).

1. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
2. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
3. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
4. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Paradigma baru dalam pengelolaan sampah mengedepankan upaya pengurangan sampah dari hulu. Sampah organik, plastik, dan kertas dapat diolah dan dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan, sementara pengelolaan sampah juga menghasilkan nilai tambah berupa energi, pupuk, atau bahan baku industri.

Usaha pengurangan sampah melibatkan langkah-langkah seperti pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau mudah terurai oleh proses alam. Provinsi DKI Jakarta mencatat tren penurunan indikator pengurangan sampah dari tahun 2018 hingga 2022, mencapai 26,11% (dua puluh enam koma sebelas persen) pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 5.898 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dan sektor swasta. Jenis fasilitas kesehatan ini mencakup Rumah Sakit Kelas A, Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit Kelas C, Rumah Sakit Kelas D, Puskesmas Kecamatan (yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan), Klinik Utama, Klinik Pratama, Laboratorium, dan Apotik. Namun, hingga saat ini, hanya 320 (tiga ratus dua puluh) fasilitas kesehatan yang tercatat dalam data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan data mengenai penarikan peralatan medis bermerkuri di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22-23 November 2022.

Data ini telah disesuaikan dengan fasilitas kesehatan DKI Jakarta yang telah menerima penghargaan sebagai bebas merkuri pada tahun 2022 (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Pengelolaan Bahan Kimia dan Semua Jenis Limbah yang Ramah Lingkungan: Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Dari 320 (tiga ratus dua puluh) fasilitas kesehatan tersebut, jumlah peralatan medis bermerkuri terbagi sebagai berikut:

- 46.038 (empat puluh enam ribu tiga puluh delapan) unit termometer bermerkuri, 82,49% (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan persen) tersedia di Apotek;
- 59.838 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan) unit sfigmomanometer bermerkuri, 18,08% (delapan belas koma nol delapan persen) ditemukan di Klinik Utama;
- Dental Amalgam sebanyak 10.528 gr (sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan gram), 72,12% (tujuh puluh dua koma dua belas persen) tersedia di Puskesmas.

Data historis mengenai volume limbah medis yang diolah oleh fasilitas insinerator di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan variasi dalam jumlah limbah yang dihasilkan setiap tahun di berbagai rumah sakit. Jumlah limbah ini bisa mengalami kenaikan atau penurunan pada tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 24.381,07 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu koma nol tujuh) ton limbah medis dihasilkan, tahun 2018 sebanyak 657,70 (enam ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh) ton, tahun 2019 mencapai 27.851,85 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan lima) ton, tahun 2020 mencapai 69.241,33 (enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu koma tiga puluh tiga) ton, dan pada tahun 2021 sebanyak 1.104,39 (seribu seratus empat koma tiga puluh sembilan) ton. Pada tahun 2017, 2019, dan 2020, RSPI Sulianti Suroso menjadi rumah sakit penghasil limbah medis terbesar di Provinsi DKI Jakarta, dengan jumlah limbah mencapai 69.241,33 (enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu koma tiga puluh tiga) ton pada tahun 2020.



Pengelolaan Limbah B3

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Adapun pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Salah satu jenis limbah B3 adalah limbah elektronik (*e-waste*). Limbah elektronik adalah barang atau peralatan elektrik dan elektronik yang sudah usang, telah berakhir daur hidupnya, dan/atau tidak lagi memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Limbah elektronik termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), antara lain disebabkan *printed circuit board* (PCB) di dalam limbah ini mengandung logam-logam berat. Mengingat kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat perkotaan akan berbagai macam peralatan elektronik sangat tinggi dan barang tersebut mempunyai masa pakai terbatas, maka volume dan jenis limbah elektronik juga sangat tinggi.

Pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) di Provinsi DKI Jakarta telah berjalan sejak tahun 2018, namun belum dilengkapi dengan kebijakan kepala daerah serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat potensi limbah elektronik di Provinsi DKI Jakarta yang tinggi dan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengelolaan limbah elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya didorong oleh peran aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sehingga kegiatan pengumpulan limbah elektronik rumah tangga dapat dilaksanakan secara optimal dan juga perlunya pelibatan produsen barang elektronik melalui mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR) yang belum dapat terlaksana secara optimal dikarenakan belum adanya aturan teknis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pada tabel 2.12.1, terlihat data sampah yang mengandung B3, bersumber dari rumah tangga selama tahun 2018 sampai dengan 2021. Pada tabel 2.12.1, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah sampah yang mengandung limbah B3 bersumber dari rumah tangga. Untuk jenis limbah medis, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini sebagai dampak kondisi pandemi COVID-19 dimana terjadi peningkatan jumlah pemakaian masker di level masyarakat sebagai bentuk preventif dalam penyebaran COVID-19 dan juga dari warga yang menjadi pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Tabel 2.12.1 Data Limbah B3 Cair, Padat dan Elektronik (e-waste) yang Dikelola Tahun 2018 sampai 2021

Jenis Limbah B3	Tahun (dalam kg)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Limbah Cair (Oli Bekas) (Liter)	-	1.000	1.000	-	-
Limbah Padat (Kg)	-	2.663	7.758,23	20.000	28.145.50
Limbah Medis (Kg)	-	93,35	1.538,77	1.647,44	6.670,94
Limbah Elektronik (e-waste) (Kg)	11.132	15.191	31.106	33.184,78	30.785,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Pengurangan Produksi Sampah: Pengelolaan Sampah

Untuk mengatasi masalah sampah di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan usaha dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Sistem ini mencakup pengurangan sampah dari sumber, penanganan di Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan pengelolaan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sampah di DKI Jakarta berasal dari rumah tangga dan kegiatan usaha. Permasalahan utama terkait sampah dari sumber adalah kurang optimalnya penanganan sampah dan belum sepenuhnya diterapkan sistem pemilahan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Sistem pengelolaan sampah juga melibatkan pengelolaan di TPS. Dengan meningkatnya jumlah sampah dari rumah tangga, dunia usaha, dan industri, kebutuhan akan tempat penampungan sampah juga meningkat. Namun, jumlah TPS tidak mengalami peningkatan sebanding dengan produksi sampah karena terbatasnya lahan dan resistensi masyarakat terhadap kehadiran TPS. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan manajemen pengelolaan di TPS dan mendukung penggunaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) untuk mengatasi masalah ini, selain mendukung kebijakan Tata Ruang yang lebih mengakomodasi bidang Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang juga perlu ditingkatkan karena kapasitasnya semakin berkurang. Dalam mengatasi tingginya volume sampah dibandingkan dengan kapasitas daya tampung TPST Bantar Gebang, diperlukan upaya peningkatan pengolahan sampah secara optimal. Salah satu cara efektif adalah dengan mengolah sampah menjadi energi terbarukan melalui kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak serta upaya kreatif lainnya. Hal ini akan membantu mengurangi beban TPST Bantar Gebang dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut.



Implementasi peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai tingkat optimal. Meskipun terdapat peraturan dan kebijakan terkait, penegakan hukumnya masih lemah dan pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Dinas Lingkungan Hidup perlu menghadapi tantangan ini dengan melakukan upaya yang lebih tepat dan konsisten, serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak pemangku kepentingan agar peraturan dan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal.

Kapasitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) semakin berkurang karena terus meningkatnya produksi sampah dari masyarakat dan dunia usaha, sedangkan lahan dan kapasitas TPST terbatas. Dinas Lingkungan Hidup perlu mengambil langkah maksimal dalam mengatasi masalah ini, termasuk percepatan pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) dan pendekatan inovatif lainnya untuk mengatasi masalah sampah di tingkat masyarakat dan dunia usaha.

Sarana pengangkutan sampah yang digunakan saat ini masih belum ramah lingkungan, seperti masih menimbulkan bau sampah dan belum dilakukan kompresi sampah. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan kualitas dan jenis sarana pengangkutan sampah agar lebih ramah lingkungan.

Kapasitas sarana prasarana pengolahan sampah, seperti TPS dan TPS 3R, masih belum memadai untuk menangani peningkatan produksi sampah dari masyarakat, dunia usaha, dan industri. Diperlukan peningkatan kapasitas TPS untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Hasil pemantauan kualitas lingkungan belum sepenuhnya mencerminkan seluruh kondisi di Provinsi DKI Jakarta dan belum menjadi umpan balik bagi perbaikan kualitas lingkungan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup masih belum optimal, baik terhadap kegiatan usaha yang sudah memiliki izin maupun yang belum. Diperlukan peningkatan pengawasan dalam menghadapi masalah lingkungan yang merupakan permasalahan lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki dimensi yang kompleks.

Penerapan insentif dan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan dan kebersihan belum optimal dan perlu ditingkatkan agar memiliki efek yang lebih signifikan dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan lingkungan hidup.

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PENANGGULANGAN KEBENCANAAN



Penguatan Kapasitas Ketahanan dan Adaptasi terhadap Bahaya terkait Iklim dan Dampak Perubahan Iklim

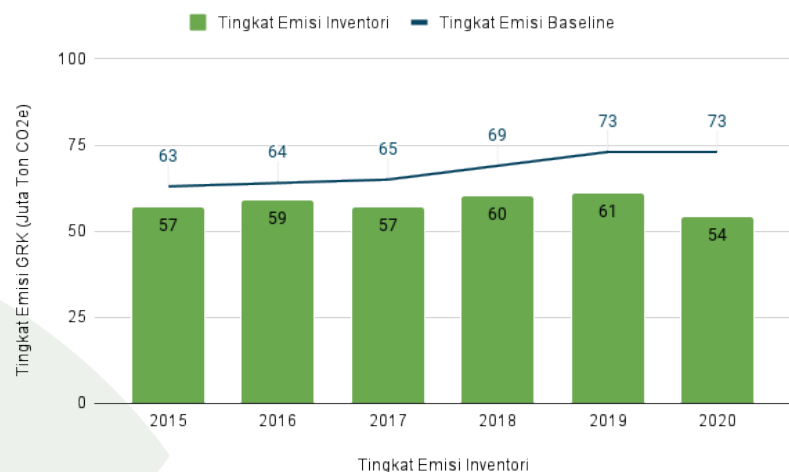
Sebagai respon terhadap perubahan iklim global, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini berkaitan dengan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Jakarta sudah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang sudah memuat aksi mitigasi dan adaptasi.

Capaian reduksi emisi GRK dari kegiatan mitigasi di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2015 hingga 2020 disajikan dalam dua pendekatan. Pertama, reduksi emisi GRK diukur sebagai selisih antara tingkat emisi GRK baseline dengan tingkat emisi GRK inventori (setelah implementasi kegiatan mitigasi) pada tahun berjalan. Tingkat emisi GRK baseline dihitung berdasarkan tingkat emisi GRK pada tahun 2010 sebagai tahun dasar dengan asumsi tidak adanya aksi mitigasi dan kebijakan yang mengakibatkan pengurangan emisi. Hasil inventarisir tersebut menunjukkan bahwa capaian reduksi emisi GRK pada periode 2015-2020 adalah 26% (dua puluh enam persen).

Integrasi Antisipasi Perubahan Iklim dalam Kebijakan, Strategi dan Perencanaan

Beberapa kegiatan yang menyumbang pada reduksi emisi GRK tersebut mencakup penurunan konsumsi energi sebagai akibat berkurangnya aktivitas di berbagai sektor (seperti transportasi, perdagangan, industri manufaktur, komersial, dll) akibat pandemi COVID-19 dan penurunan ekonomi.

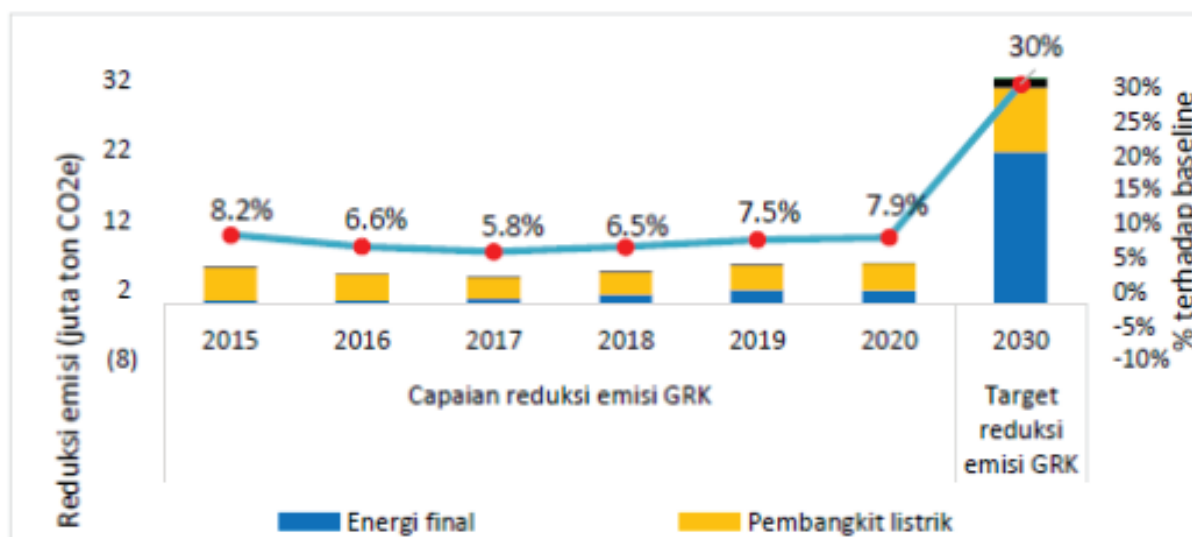
Gambar 2.13.1. Capaian Reduksi Emisi GRK dari Perbandingan Tingkat Emisi Baseline dan Inventori di DKI Jakarta Periode 2015-2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Capaian reduksi emisi GRK dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, namun capaian tersebut masih relatif kecil 7,9% (tujuh koma sembilan persen). Jika dibandingkan dengan target reduksi emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 30% (tiga puluh persen) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim. Pencapaian ini dianggap masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersebut. Untuk mencapai target tahun 2030, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memiliki komitmen yang tinggi agar target tersebut dapat tercapai.

Gambar 2.13.2. Capaian Reduksi Emisi GRK Dibandingkan Target Reduksi Emisi GRK pada Tahun 2030 (Pergub Nomor 90 Tahun 2021)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2022)

Banjir di Jakarta

Provinsi DKI Jakarta menghadapi permasalahan utama berupa banjir dan genangan air. Berdasarkan penyebabnya, banjir di wilayah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Pertama, banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu sungai, yang menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi permukiman di Jakarta. Kedua, banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta dengan topografi rendah. Ketiga, banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob). DKI Jakarta berada di muara dari 13 (tiga belas) sungai yang berhulu di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Di antara sungai-sungai tersebut, ada Kali Mookewart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kalibaru Barat, Kali Ciliwung, Kalibaru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikramat, dan Kali Cakung.

Selain sungai-sungai yang berhulu di luar wilayah Jakarta, ada juga sungai-sungai yang berhulu di dalam wilayah tersebut, seperti Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Surabaya, dan Kali Gresik.

Banjir terjadi di Jakarta karena berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai akibat perubahan tata guna lahan yang tidak terkontrol. Air hujan masuk lebih banyak daripada kapasitas dan daya tampung sungai yang dangkal dan menyempit. Pendangkalan dan penyempitan sungai di sepanjang aliran sungai juga meningkatkan potensi banjir. Perilaku masyarakat yang belum sadar terhadap lingkungan dengan membuang sampah di selokan dan sungai juga dapat menghambat aliran air serta menyebabkan sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai dan saluran. Banjir akibat curah hujan yang tinggi terjadi ketika volume air hujan tidak dapat ditampung oleh sungai dan saluran drainase kota yang ada.

Wilayah Jakarta sebagian besar berada di dataran rendah, yang menjadikannya lebih rentan terhadap banjir akibat tingginya intensitas curah hujan. Selain itu, banjir rob terjadi di Pantai Utara Jakarta akibat perubahan angin barat saat musim penghujan. Dampak banjir rob di pesisir pantai utara semakin parah karena penurunan tanah (*land subsidence*).

Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah penyangga di sekitarnya mengalami pembangunan pesat. Hal ini menyebabkan peningkatan kegiatan masyarakat, termasuk emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi dan lainnya, yang berkontribusi pada perubahan iklim. Pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, dan pulau-pulau kecil di wilayah ini belum optimal, sehingga menambah kompleksitas masalah dampak perubahan iklim.

Perubahan iklim menyebabkan kenaikan muka air laut, intensitas hujan yang tinggi, cuaca ekstrim, serta peningkatan muka air laut dan abrasi. Karakteristik wilayah Teluk Jakarta sebagai dataran banjir dengan kemiringan rendah, serta berada di muara 13 (tiga belas) sungai, menyebabkan kejadian banjir, banjir rob, dan genangan semakin sering terjadi baik di pesisir maupun dataran.

Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi isu strategis yang harus ditangani secara multi-sektor di DKI Jakarta. Implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencakup pengelolaan sampah limbah padat dan cair, penggunaan energi terbarukan dan konversi energi, budi daya pertanian rendah emisi gas rumah kaca, peningkatan tutupan vegetasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan berbagai upaya lainnya.

Untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim di DKI Jakarta, diperlukan pendekatan multi-sektor, perubahan perilaku masyarakat dan infrastruktur pendukung. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara efektif.

Dalam konteks menghadapi mitigasi dan adaptasi di DKI Jakarta memiliki Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (RPRKD). RPRKD adalah dokumen rencana kerja Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan berbagai aksi menuju pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim. Terbitnya Pergub ini merupakan bentuk komitmen DKI Jakarta untuk berkontribusi dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) Indonesia dan Paris Agreement, yang berkontribusi pada visi global Net Zero Emission pada 2050, penurunan 30% (tiga puluh persen) emisi GRK di 2030 dan penurunan emisi GRK langsung sebesar 50% (lima puluh persen) pada 2030.

Peraturan ini memuat beberapa aspek untuk dipertimbangkan. Penentuan pembangunan untuk menurunkan tingkat kerentanan dan potensi dampak di DKI Jakarta memperhatikan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan dan TPB 13 Aksi Iklim. Peraturan ini juga sudah menggabungkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan untuk tidak adanya area yang termasuk sebagai area sangat rentan dan rentan bencana perubahan iklim pada tahun 2030.

Merujuk pada peraturan gubernur tersebut, RPRKD mencakup kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan mitigasi perubahan iklim bertujuan untuk mengurangi emisi GRK yang dihasilkan dan meningkatkan serapan GRK. Sedangkan kegiatan adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim yang diukur melalui penurunan tingkat keterpaparan dan sensitivitas masyarakat terhadap ancaman yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim, peningkatan kesiapsiagaan dan respon juga peningkatan kemampuan adaptif.

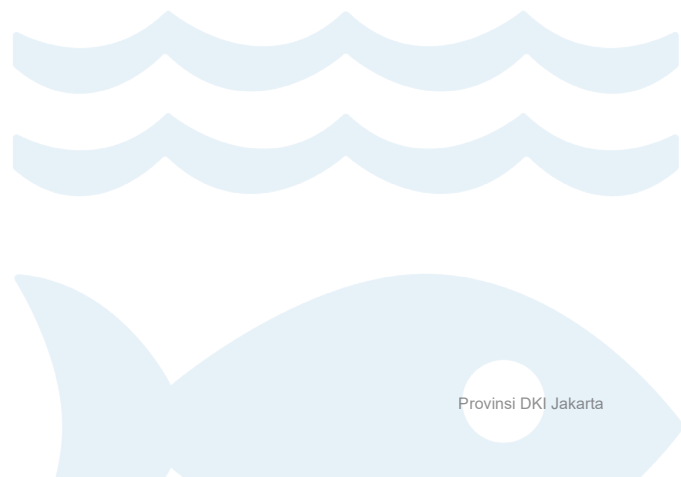
Tabel 2.13.1 Aksi dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021

Sektor	Aksi
5 Sektor dan 11 Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	
Sektor Energi	<ul style="list-style-type: none"> ● Efisiensi energi ● Perluasan penggunaan energi terbarukan ● penggantian bahan bakar ramah lingkungan ● peralihan penggunaan transportasi publik ● pengarusutamaan pejalan kaki dan pesepeda
Sektor AFOLU	Perluasan serapan emisi GRK
Sektor IPPU	Penggunaan energi ramah lingkungan bagi industri
Sektor lainnya	Diplomasi perubahan iklim
7 Sektor dan 11 Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Ketahanan Pangan	Upaya peningkatan ketahanan pangan
Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan ● Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
Pengelolaan Energi	Pengelolaan energi
Infrastruktur Berketahanan Iklim	Pembangunan infrastruktur berketahanan iklim
Peisisir dan Pulau-pulau kecil	Pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengelolaan sosialisasi program kesehatan pada masyarakat ● Pengelolaan air limbah domestik ● Pengelolaan air resapan tanah ● Pelaksanaan upaya pengendalian banjir

Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir

Upaya peningkatan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan tidak berhenti di darat namun juga melingkupi kawasan perairan dan kepulauan Jakarta, dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi ekologi. Pengelolaan kelautan dan perikanan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sebuah rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penataan terhadap wilayah kelautan diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan laut dan menghindari adanya konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, dengan memberikan batas yang jelas antara zona yang satu dengan zona yang lain. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) atau yang saat ini menjadi Materi Teknis Perairan Pesisir menjadi salah satu bentuk perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jakarta. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan juga tidak terlepas dari fungsi konservasinya; upaya monitoring dan pengelolaan yang efektif mampu menjamin potensi sumber daya laut tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari dengan tetap menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.



Kawasan Konservasi Perairan Laut

Sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, upaya konservasi dan rehabilitasi dilakukan antara lain melalui penyusunan peta jalan konservasi ekologi Kepulauan Seribu, penenggelaman fish shelter, transplantasi karang, penanaman mangrove, pelatihan selam,

penangkaran biota laut, sarana konservasi, kajian konservasi, dan rehabilitasi serta pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) juga dilakukan melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan dan daratan, pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) SDKP, peningkatan sarana prasarana pengawasan SDKP, dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Upaya pelestarian yang dilaksanakan akan menjamin kebermanfaatan sumber daya kelautan dalam pembangunan dan pengembangan potensi perikanan mulai dari proses pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan yang berkelanjutan. Adapun luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi s.d. tahun 2023 adalah seluas 255,3 ha (dua ratus lima puluh lima koma tiga hektar). Upaya peningkatan keberlanjutan usaha perikanan meliputi, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan produk/olahan kelautan dan perikanan.

Selain itu, perubahan iklim juga memberi berbagai dampak terhadap kehidupan. Salah satunya adalah terkait kenaikan permukaan air laut. Muka permukaan tanah di pesisir DKI Jakarta mengalami penurunan dari tahun 1925-2015 sebesar 0-4 m (nol hingga empat meter). Penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim akan dapat menenggelamkan pulau-pulau dan daratan di pesisir Jakarta. Penanaman mangrove sangat penting untuk menghindarkan bibir pantai dari gelombang laut yang dapat mengikis pesisir. Tegakan mangrove dapat menjadi penghalang abrasi dengan mengurangi laju gelombang air laut sebagai salah satu dampak kenaikan permukaan air laut. Pembibitan dan penanaman mangrove pada tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) pohon.

Tantangan pada kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi (Kawasan Suaka Marga Satwa Laut Marine Wildlife Reserve Pulau Rambut dan Perairan seluas 90 ha (sembilan puluh hektar) dan Taman Nasional Laut Marine National Park Kepulauan Seribu seluas 107.489 ha (seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan hektare) terutama terkait dengan ancaman dampak perubahan iklim seperti coral bleaching dan naiknya suhu air laut yang dapat menjadi ancaman terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati biota laut. Ancaman ini berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati di Kawasan Kepulauan Seribu.

Kepatuhan Pelaku Usaha pada Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap di Jakarta saat ini masih didominasi oleh nelayan skala kecil yang menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan dalam menjalankan usahanya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan berupa sarana produksi seperti kapal perikanan, alat tangkap, alat bantu tangkap, mesin kapal, dan GPS serta peningkatan keahlian dan keterampilan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menciptakan sentra-sentra perikanan yang memberdayakan dan mendukung nelayan kecil. Rencana pembangunan pelabuhan perikanan termasuk breakwater, dermaga, perumahan nelayan, docking kapal, *cold storage*, kolam labuh, dan fasilitas penunjang lainnya juga diintegrasikan dengan pembangunan tanggul sepanjang pesisir Teluk Jakarta.

Keterbatasan lahan di Jakarta menyebabkan perikanan budidaya laut memiliki peran lebih besar daripada perikanan budidaya air tawar. Perairan Kepulauan Seribu masih memiliki kapasitas yang memadai untuk budidaya komoditas seperti kerapu, bawal bintang, udang vannamei, dan ikan hias laut. Saat ini, penggunaan Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi sarana yang sangat diandalkan. Teknologi KJA mempermudah proses penyortiran ikan dan panen, meningkatkan produksi, serta memanfaatkan lahan budi daya secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, program urban fish farming di masyarakat juga dapat meningkatkan perikanan budidaya air tawar. Jakarta memiliki beberapa balai benih ikan yang tersertifikasi dan siap menyediakan benih ikan laut, benih ikan air tawar, dan benih ikan hias, sebagai insentif bagi masyarakat yang berusaha di bidang budidaya ikan.

Pengolahan produk perikanan di Jakarta sebagian besar masih menggunakan pengolahan tradisional dengan teknologi sederhana untuk mencapai nilai tambah. Meskipun demikian, pemerintah berupaya melakukan intervensi dengan meningkatkan kualitas sanitasi, kebersihan dan pengemasan produk. Bantuan sarana pengolahan yang sesuai standar terus diberikan kepada pengolah tradisional untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka. Pemerintah juga mencari akses modal dan jaringan pemasaran guna mendukung kelancaran usaha di sektor perikanan.

Selain terbatasnya kemampuan nelayan kecil untuk menerapkan teknologi tinggi bidang kelautan dan perikanan yang memadai tantangan lainnya yakni terjadinya penangkapan ikan ilegal, salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang. Selain itu belum optimal dan belum efektifnya penerapan sanksi bagi Ilegal *Unregulation, Unreported (IUU) Fishing*

Regulasi terkait Perlindungan Nelayan

Terdapat beberapa regulasi pada program perlindungan nelayan pada tahun 2022 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam Rakyat Yang Terkena Bencana Alam;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (naik ke nomor 2 sesuai urutan perundangan);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20); dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun Anggaran 2022

PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN

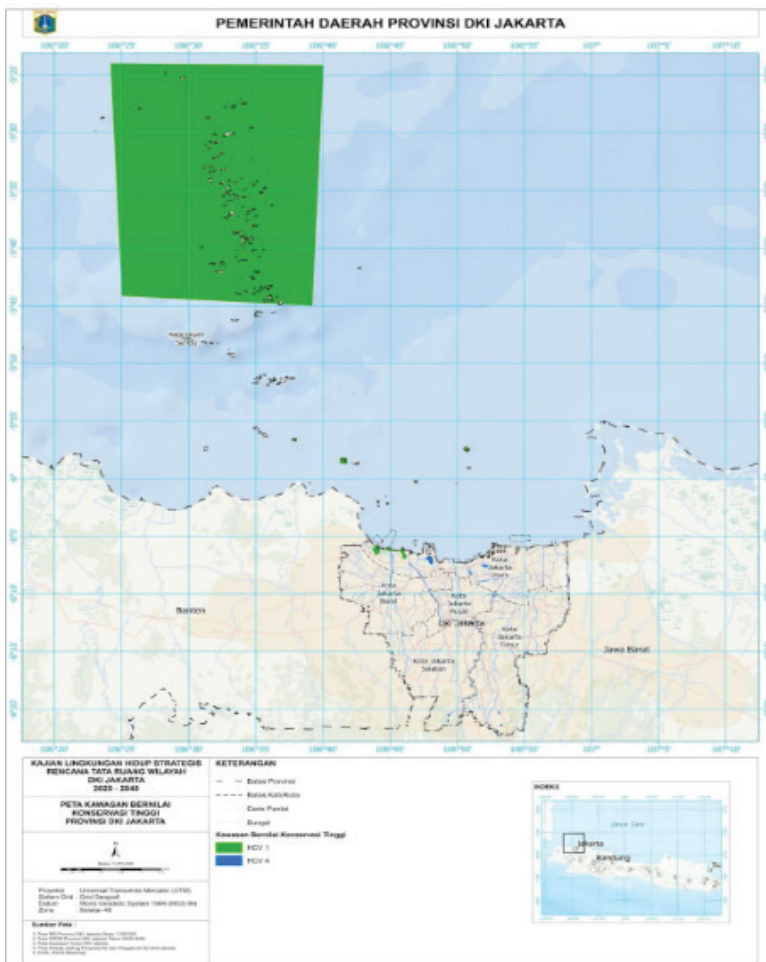


Konservasi Keanekaragaman Hayati:

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT)

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terdapat area-area dengan nilai konservasi tinggi (NKT). Wilayah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu NKT 1, yang dikenal sebagai area dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, dan NKT 4, yang merupakan wilayah dengan kinerja lingkungan yang sangat baik. Area NKT 1 di DKI Jakarta adalah wilayah yang memiliki status sebagai kawasan konservasi dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di ekosistem darat maupun di ekosistem laut. Ini mencakup beberapa kawasan seperti Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Muara Angke, Suaka Margasatwa Pulau Rambut, dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk, dengan total luas mencapai 104,702.3 ha (seratus empat ribu tujuh ratus dua koma tiga hektar). Sementara itu, area NKT 4 di DKI Jakarta adalah wilayah yang memberikan kontribusi tinggi dalam penyediaan dan pengaturan air, dengan luas total mencapai 309 ha (tiga ratus sembilan hektar) (Dinas

Gambar 2.15.1 Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi DKI Jakarta



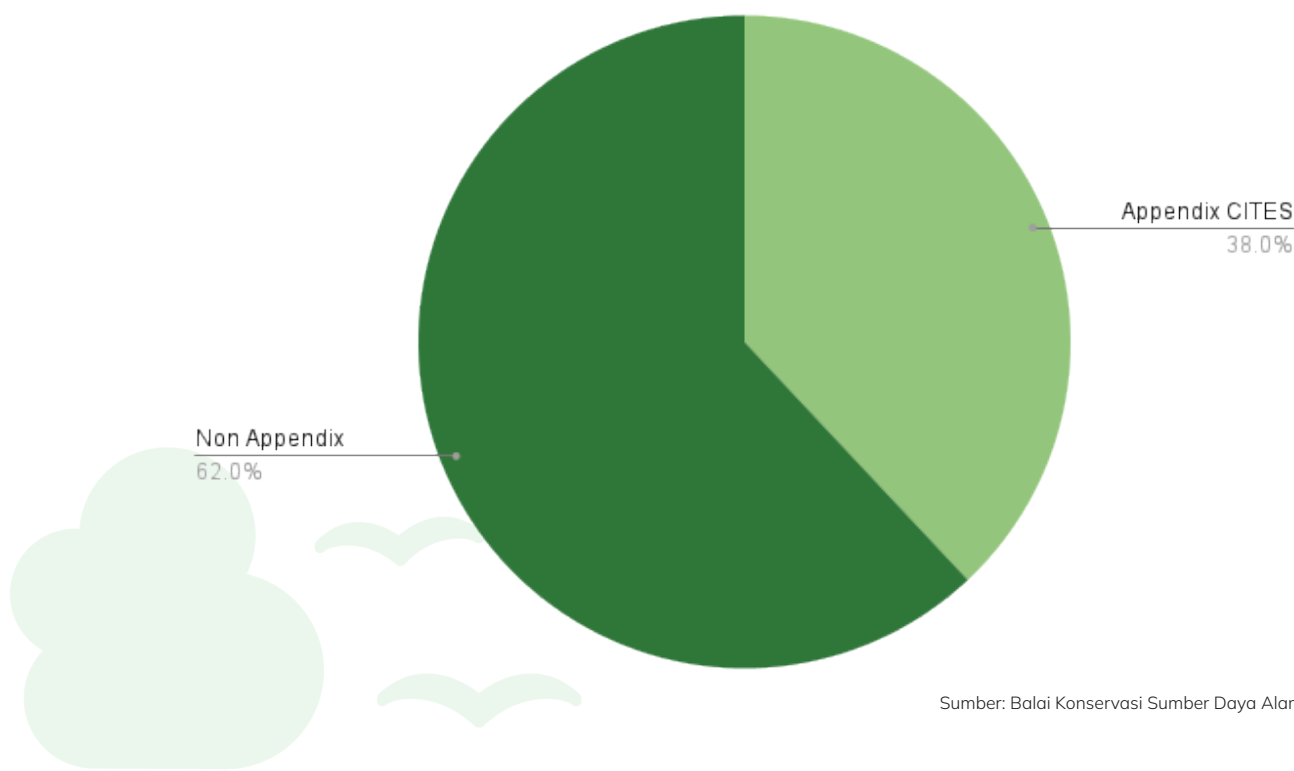
Berdasarkan data DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) tahun 2020, wilayah-wilayah yang termasuk dalam kategori NKT 1 di DKI Jakarta memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Potensi tersebut mencakup beberapa aspek, termasuk kehadiran 71 (tujuh puluh satu) spesies yang mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan 36 (tiga puluh enam) spesies yang dilindungi menurut The International Union for Conservation of Nature (IUCN). Selain itu, area-area NKT 1 juga berperan sebagai titik persinggahan bagi spesies migrasi yang bermigrasi dari Asia Timur menuju Australia, serta berfungsi sebagai koridor alami untuk berbagai jenis ekosistem (Dinas Lingkungan Hidup, 2022).

Sumber: KLHS RTRW DKI Jakarta 2022-2042, 2022

Pada tanggal 15 Desember 1978, Pemerintah Indonesia secara resmi menyetujui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang telah ditandatangani di Washington Pada Tanggal 3 Maret 1973, yang berkaitan dengan Konvensi Perdagangan Internasional atas Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam Punah (CITES). Artinya, Indonesia secara resmi telah mengesahkan CITES yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 di Washington. CITES telah menetapkan lebih dari 33.000 (tiga puluh tiga ribu) spesies yang terancam punah dan memberikan berbagai tingkat perlindungan untuk spesies-spesies ini. Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah telah melakukan pencatatan perdagangan satwa dan tumbuhan yang merujuk pada daftar spesies yang dilindungi dalam appendiks CITES. Hasilnya pada tahun 2021, dari total 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) spesies yang diperdagangkan, sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) di antaranya termasuk dalam appendiks CITES (DIKPLHD, 2022).

Flora dan Fauna yang Dikonservasi

Gambar 2.15.2 Perdagangan Satwa dan Tumbuhan yang Termasuk Appendix CITES



Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2020

Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati

Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati 2020-2024 di Jakarta sudah mempertimbangkan *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)*. Pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan adalah usaha atau kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tantangan pemanfaatan keanekaragaman Hayati berdasarkan hasil penelaahan dari IBSAP 2015-2020 yang dikutip dari Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta.

- Keanekaragaman hayati belum memberi dampak kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat, padahal banyak kekayaan hayati Indonesia yang bisa digunakan sebagai bahan pangan, farmasi, obat dan kosmetika, akan tetapi masih belum tergalai dan dipetakan secara maksimal.
- Pemanfaatan kehati yang tidak bertanggung jawab akan sangat merusak keberadaan kehati dan merugikan manfaat kehati yang seharusnya berguna bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Tiga jenis tantangan pemanfaatan yang tidak bertanggungjawab adalah: (i) “penambangan” kehati dari habitatnya yang melebihi daya tumbuh (regenerasi) kehati; (ii) perdagangan kehati tidak bertanggungjawab; dan (iii) pola pemanfaatan yang “mengerosi” kegiatan masyarakat berbasis kearifan lokal.
- Pengembangan teknologi pemanfaatan kehati yang berkelanjutan
- Kelemahan kebijakan memungkinkan terjadinya perambahan hayati atau biopirasi, yaitu perambahan bahan hayati dan pengetahuan yang melekat pada bahan hayati tanpa persetujuan dari masyarakat maupun negara sedang berkembang setelah pihak-pihaknya mendapatkan informasi yang memadai.

Akibat masih lemahnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum, maka berdampak pada munculnya semua faktor penekan status keanekaragaman hayati, seperti ekspansi ruang terbangun, pencemaran, munculnya spesies invasif, perburuan, dan pemanfaatan yang berlebihan.



Flora dan Fauna yang Dikonservasi

Dalam kinerja urusan kehutanan pada periode 2017-2022, pembebasan lahan RTH dengan peningkatan tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2018, di mana terdapat hingga 55,17 ha (lima puluh lima koma tujuh belas hektar) luas RTH yang dibebaskan. Persentase penambahan rasio RTH hutan, taman, makam dihitung dari pembebasan lahan RTH hutan, taman, makam setiap tahun dibagi dengan luas daratan Provinsi DKI Jakarta (RPD Jakarta 2023-2026, 2022).

Tabel 2.15.1 Persentase Penambahan Rasio RTH Hutan, Taman, dan Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penambahan rasio RTH hutan (persen)	0,0256	0,0029	0	0	0
2	Penambahan rasio RTH taman (persen)	0,0392	0,0257	0,0296	0,0206	0,0049
3	Penambahan rasio RTH makam (persen)	0,007	0,004	0,0052	0	0
Total		0,0718	0,0326	0,0346	0,0206	0,0049

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2020

Pada periode 2017-2022 terdapat tren pembangunan RTH Taman dan Makam yang berfluktuasi. Peningkatan tahunan terluas terjadi pada tahun 2019, di mana telah terbangun RTH Taman dan Makam seluas 34,37 ha (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh hektar). Namun, akibat adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah, pada tahun 2020 tidak dilakukan pembangunan RTH Taman dan Makam.

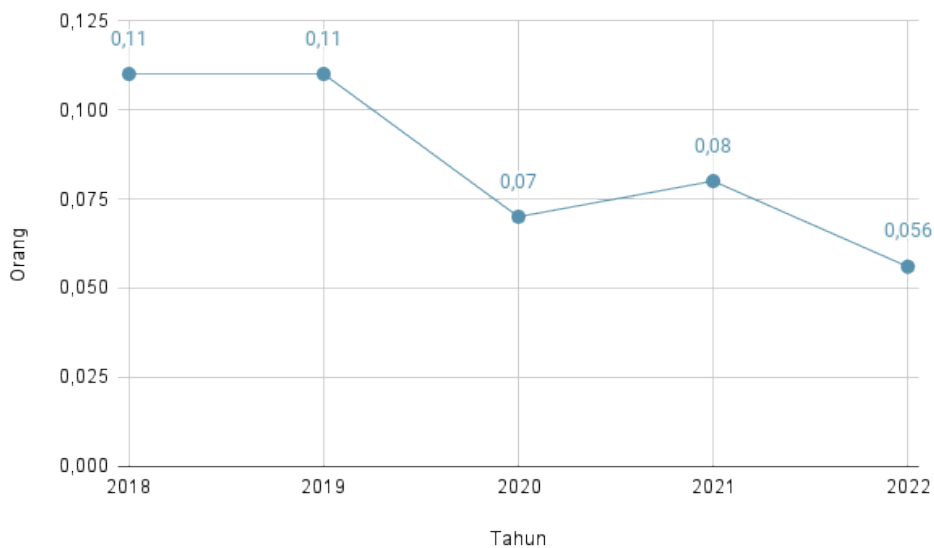
Peningkatan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau masih menjadi tantangan untuk DKI Jakarta. Ketersediaan RTH di perkotaan DKI Jakarta belum memenuhi 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah kota, begitu juga ketersediaan RTH hutan di DKI Jakarta belum memenuhi 10% (sepuluh persen) dari luasan wilayah kota. Total keseluruhan penambahan luasan RTH taman pada tahun 2022 adalah sebesar 3,19 ha (tiga koma sembilan belas hektar). Selain itu, Indeks Kualitas Lahan di Jakarta juga masih tergolong rendah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala peningkatan jumlah RTH diantaranya adalah tingginya tingkat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Ruang Terbangun maupun tingginya nilai tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berdampak terhadap kemampuan APBD yang terbatas dalam mengakomodir pengadaan lahan untuk RTH.

⁸ Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Untuk itu 10 (sepuluh) persen sisanya dapat diperoleh dari RTH dari sektor privat.

Keamanan

Tren keamanan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2022 secara umum terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan penurunan angka kematian yang disebabkan konflik per 100.000 (seratus ribu) penduduk dari angka 0,11 (nol koma sebelas) pada tahun 2018 ke angka 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) pada tahun 2022. Kemudian, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang dikutip dari data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, juga mengalami penurunan, dari angka 0,12 (nol koma dua belas) pada tahun 2018 ke angka 0,05 (nol koma nol lima) pada tahun 2021. Namun, jumlah kasus kejahatan pembunuhan mengalami peningkatan tertinggi sejak empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat terjadi 77 (tujuh puluh tujuh) kasus pembunuhan, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kasus, tahun 2019 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus, dan tahun 2020 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus.

Gambar 2.16.1 Grafik Angka Kematian Disebabkan Konflik per 100.000 Penduduk



Sumber: Bakesbangpol, 2022

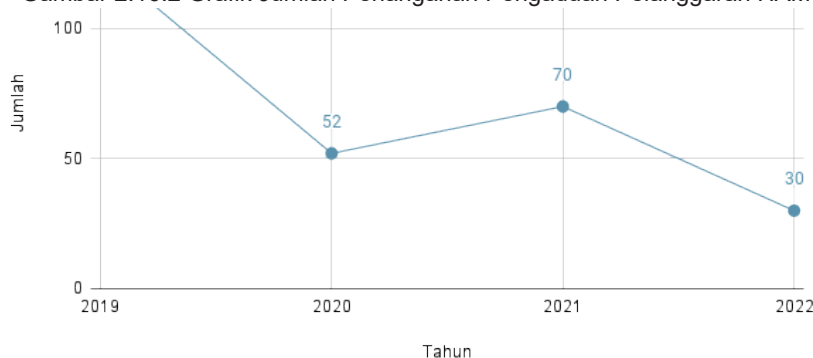
Angka kematian disebabkan konflik per 100.000 (seratus ribu) penduduk di Provinsi DKI Jakarta cenderung menurun. Meski demikian, berdasarkan Safe Cities Index yang diterbitkan *Economist Intelligence Unit* (EIU) (*The Economist*, 2021) pada tahun 2021, Jakarta saat ini menempati peringkat ke-46 (ke empat puluh enam) dengan skor keseluruhan 56,4 (lima puluh enam koma empat) yang berada di bawah rata-rata 66,1 (enam puluh enam koma satu) poin. Dalam posisi ini, Provinsi DKI Jakarta masih di bawah Kuala Lumpur, Malaysia, yang berada di peringkat 32 (tiga puluh dua).

Tantangan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam menekan angka konflik cukup beragam. Salah satu tantangan utamanya adalah tingginya kepadatan penduduk di wilayah sehingga sulit untuk memantau dan mengendalikan kegiatan kriminal (Sheykhi MT, n.d.). Urbanisasi yang pesat dan kepadatan penduduk yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan angka kejahatan. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi telah lama dianggap sebagai faktor penentu kejahatan (Kang, 2016). Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan beberapa langkah untuk mengurangi tingkat kejahatan, seperti upaya peningkatan infrastruktur dan teknologi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kegiatan kriminal dengan lebih baik seperti Jakarta Aman.

Aspek kekerasan terhadap perempuan masih memerlukan perhatian khusus. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, terutama kekerasan terhadap perempuan. Meskipun terdapat fluktuasi selama empat tahun terakhir, secara umum angkanya masih relatif tinggi. Pada tahun 2018 terdapat 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) aduan kasus, menurun ke angka 529 (lima ratus dua puluh sembilan) aduan kasus di tahun 2019, kemudian turun kembali ke angka 510 (lima ratus sepuluh) aduan kasus di tahun 2020. Setelah itu, angkanya terus naik menjadi 518 (lima ratus delapan belas) aduan kasus di tahun 2021 dan meningkat ke angka 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) aduan kasus pada tahun 2022. Selain itu, akses pada keadilan juga menunjukkan tren yang menurun, terlihat pada data penanganan pengaduan pelanggaran HAM tercatat pada tahun 2017 sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pengaduan, kemudian menurun menjadi 52 (lima puluh dua) pengaduan di tahun 2020. Pada 2021, jumlah pengaduan meningkat menjadi 70 (tujuh puluh) dan kembali menurun menjadi 30 (tiga puluh) pengaduan di tahun 2022

Perlindungan Kelompok Miskin-Rentan

Gambar 2.16.2 Grafik Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM



Sumber: Komnas HAM (2022), diolah

Tantangan dalam mengoptimalkan perlindungan pada kelompok miskin-rentan utamanya terletak pada akses, tata kelola layanan, dan komitmen anggaran. Dalam hal akses, sejak pandemi COVID-19 masyarakat terdampak kebijakan PPKM dan pelayanan publik mengalami transisi ke layanan daring. Hal ini tentu memberi pengaruh pada akses masyarakat dalam memberikan aduan maupun keluhan, karena tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap

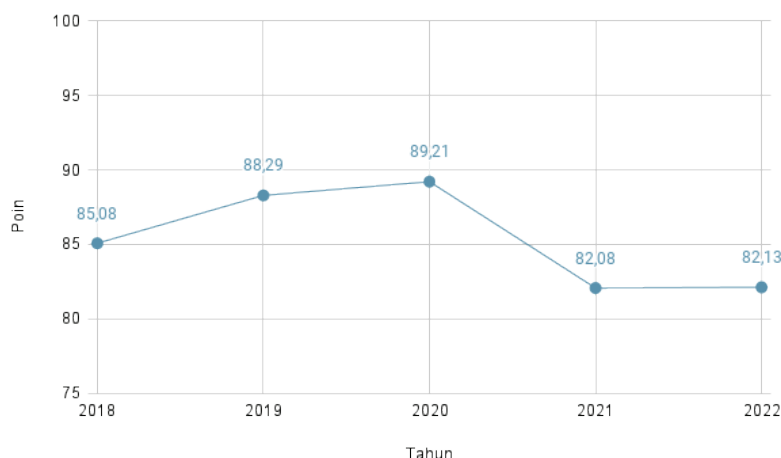
gawai atau alat telekomunikasi lain untuk mengakses layanan pengaduan berbasis daring. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan masa transisi untuk beradaptasi ke arah pelayanan daring, termasuk membangun tata kelola pelayanan secara daring.

Tantangan lainnya terkait dengan perubahan porsi dan alokasi anggaran yang lebih difokuskan pada penanganan dan pemulihan pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan berbagai program dan kegiatan perangkat daerah mengalami penundaan.

Tata Kelola

Pada periode tahun 2017-2022, Provinsi DKI Jakarta mengalami penguatan tata kelola yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik menjadi semakin optimal. Beberapa indikator menunjukkan capaian yang meningkat. Opini laporan keuangan daerah berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak tahun 2019. Kemudian, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah terus meningkat dari predikat BB ke predikat A pada tahun 2021.

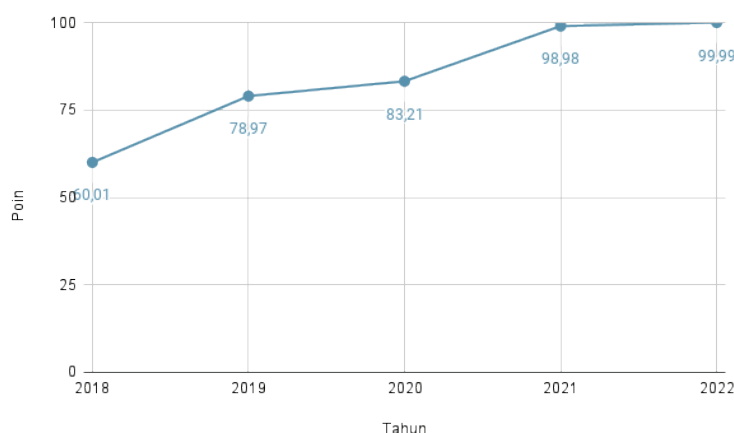
Gambar 2.16.3 Grafik Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta



Sumber: BPS (2023), diolah

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi DKI Jakarta juga terus meningkat sejak tahun 2018. Angka IDI Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 mencapai 85,08 (delapan puluh lima koma nol delapan). Angka tersebut terus meningkat menjadi 88,29 (delapan puluh delapan koma dua sembilan) di tahun 2019 dan 89,21 (delapan puluh sembilan koma dua puluh satu) di tahun 2020. Namun, capaian IDI Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan angka capaian yang konsisten pada poin 82,08 (delapan puluh dua koma nol delapan) pada tahun 2021 dan 82,13 (delapan puluh dua koma tiga belas) pada tahun 2022.

Gambar 2.16.4 Grafik Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan



Sumber: Disdukcapil (2023), diolah.

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tercatat sebesar 60,01% (enam puluh koma nol satu persen), kemudian meningkat menjadi 78,97% (tujuh puluh delapan koma sembilan tujuh persen) di tahun 2019 dan 83,21% (delapan puluh tiga koma dua puluh satu persen) di tahun 2020. Cakupan tersebut terus meningkat pada tahun 2021 sebesar

98,87% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) dan 2022 sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen). Peningkatan signifikan tersebut mencerminkan penguatan tata kelola pelayanan publik dan tata kelola data di lingkungan pemerintahan yang baik, khususnya terkait data administrasi dan pencatatan kependudukan.

Peningkatan capaian tata kelola disertai sejumlah tantangan yang terjadi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain terkait dengan data-data pendukung kebijakan perlindungan sosial (subsidi, bantuan tunai, dan bantuan nontunai) dan pengawasannya.

Tabel 2.16.1 Capaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Indikator	Target Pencapaian 2022	Realisasi Pencapaian 2022
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	NA	0,02
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (data per tiga tahun)	51,5	41,17 (2020) NA (2022)
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (indikator baru)	NA	NA
16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi (%) (indikator baru)	NA	NA
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi (%)	80	54,08
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi (orang)	NA	655
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) (Data Survei Penilaian Integritas) (skor)	NA	73,3

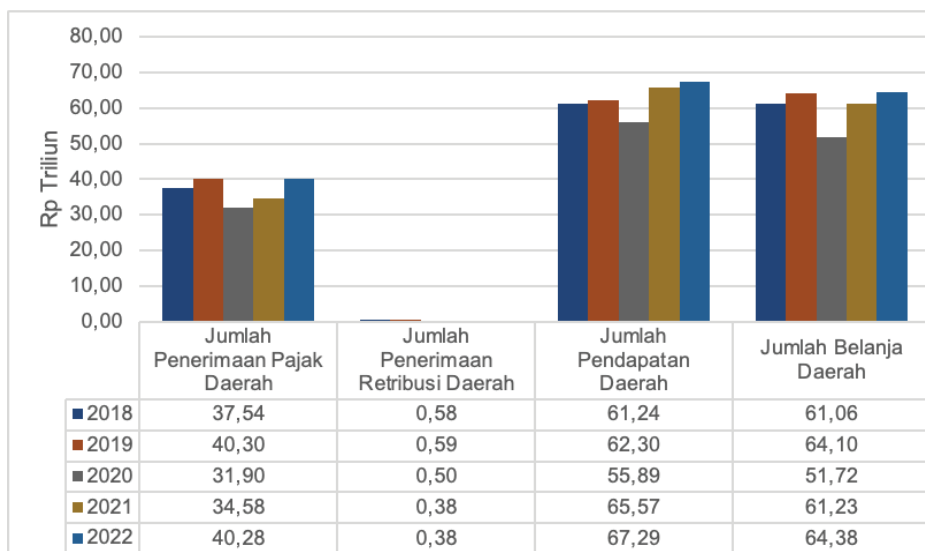


16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (%)	NA	NA
16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (predikat)	NA	WTP
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B (predikat)	NA	A
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B (%)	NA	78,98
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (%)	NA	81,86
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (%)	Meningkat	26,19
16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai)	NA	73,12
16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan (nilai)	NA	87,39
16.7.2.(c) Indeks Kesenjangan (nilai)	NA	85,34
16.8.1.(a) Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional (jumlah) (indikator baru)	NA	NA
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (%)	NA	100
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (%)	NA	100
16.10.1.(a) Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media (nilai) (indikator baru)	NA	NA
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan (jumlah)	NA	687
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif (persentase)	1	1
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi (persentase)	NA	16
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional (kebijakan/dokumen)	NA	0

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL

Selama periode tahun 2018-2022, realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, jumlah Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp65,81 (enam puluh lima koma delapan puluh satu) triliun, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 62,30 triliun (enam puluh dua koma tiga puluh triliun rupiah) dan Rp 51,71 triliun (lima puluh satu koma tujuh puluh satu triliun rupiah) pada tahun 2019 dan 2020. Meski demikian, pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2021 dan 2022 berdampak positif terhadap kinerja fiskal Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp65,60 triliun (enam puluh lima koma enam puluh triliun rupiah) dan Rp67 triliun (enam puluh tujuh triliun rupiah) pada tahun 2021 dan 2022.

Gambar 2.17.1. Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta

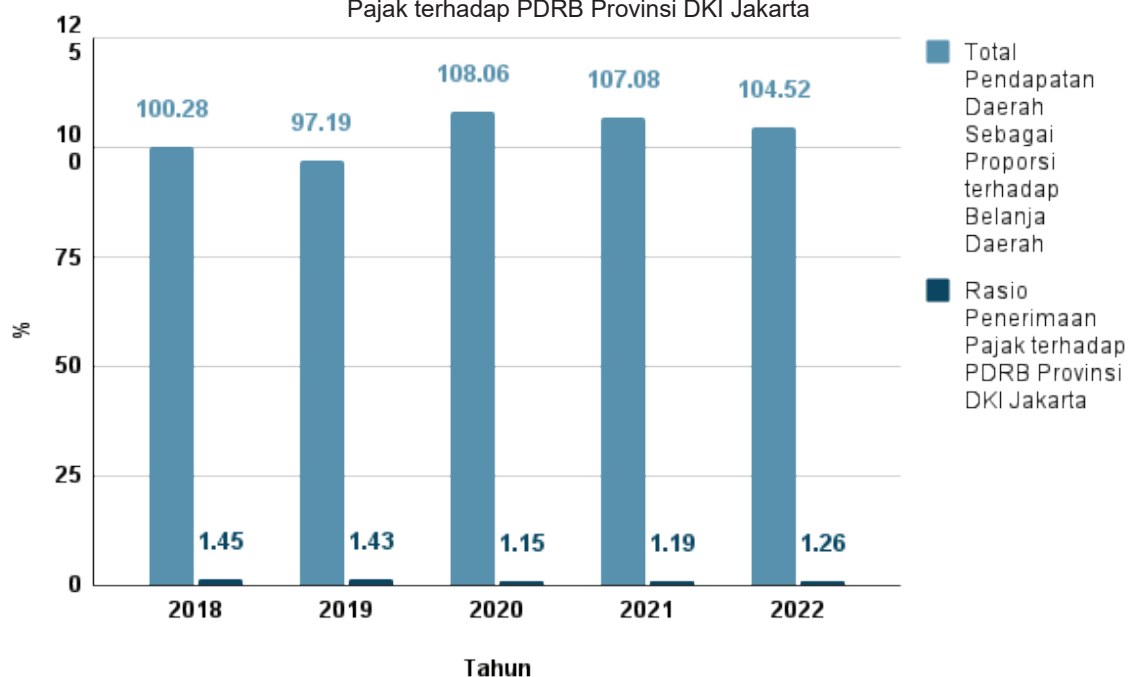


Pada tahun 2021, peningkatan pendapatan daerah utamanya ditopang oleh realisasi penerimaan pajak daerah yang mencapai RpRp34,58 triliun (tiga puluh empat koma lima puluh delapan triliun rupiah), atau tumbuh 8,40 (delapan koma empat puluh) persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp31,90 triliun (tiga puluh satu koma sembilan puluh triliun rupiah). Adapun pada tahun 2022, peningkatan pendapatan daerah ditopang oleh realisasi penerimaan pajak daerah yang mencapai Rp40,28 triliun (empat puluh koma dua puluh delapan triliun rupiah), atau 59,86% (lima puluh sembilan koma delapan puluh enam persen) dari total pendapatan daerah.

Dari sisi belanja daerah, realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2018-2023 secara umum mengalami tren penurunan. Pada tahun 2018, realisasi belanja daerah mencapai Rp75,09 triliun (tujuh puluh lima koma nol sembilan triliun rupiah), kemudian mengalami penurunan menjadi Rp65,05 (enam puluh lima koma nol lima triliun rupiah) dan Rp44,51 triliun (empat puluh empat koma lima puluh satu triliun rupiah) pada tahun 2019 dan 2020. Meski mengalami peningkatan menjadi Rp61,35 (enam puluh satu koma tiga puluh lima triliun rupiah) dan Rp 64,84 triliun (enam puluh empat koma delapan empat triliun rupiah) pada tahun 2021 dan 2022, angka tersebut masih lebih rendah dari capaian pada tahun 2018 yang sebesar Rp75,09 triliun (tujuh puluh lima koma nol sembilan triliun rupiah).

Dengan capaian penerimaan pajak dan belanja daerah tersebut, total pendapatan daerah sebagai proporsi terhadap belanja daerah pada tahun 2022 mencapai 104,52% (seratus empat koma lima puluh dua persen). Adapun rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB DKI Jakarta mencapai 1,26% (satu koma dua puluh enam persen).

Gambar 2.17.2. Total Pendapatan Daerah Sebagai Proporsi terhadap Belanja Daerah dan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta



Sumber: BPKD (2023) dan BPS (2023), diolah

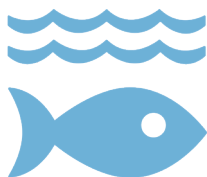
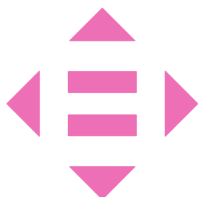
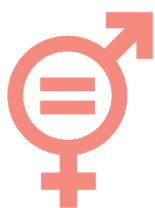
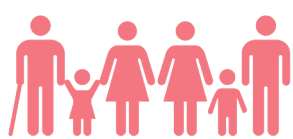
Tabel 2.17.1. Capaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Indikator	Target Pencapaian 2022	Realisasi Pencapaian 2022
17.1.1*#(1). Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp51,25 T	Rp40,28 T
17.1.1*#(2). Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rp0,75 T	Rp0,38 T
17.1.1*#(2.1). Jumlah pendapatan daerah	Rp101,47 T	Rp67,29 T
17.1.1*#(2.2). Jumlah belanja daerah	Rp108,86 T	Rp64,84 T
17.1.1*#(3). Total pendapatan daerah sebagai proporsi terhadap belanja daerah	93,20%	103,78%
17.1.1.(a)#. Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	1,85%	1,26%

BAB 3 TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Bab 3 menjelaskan tentang target dan arah kebijakan dalam pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta. Arah kebijakan yang ditulis merupakan arah pelaksanaan yang akan dilakukan pada masing-masing tujuan dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, dan dukungan nonpemerintah (*non state actors/NSA*) yang turut mendukung capaian TPB di Provinsi DKI Jakarta. Target setiap indikator ditampilkan pada matriks 1 serta rincian alokasi anggaran kegiatan pada matriks 2 (terlampir). Target dan indikator setiap Tujuan merupakan hasil adaptasi yang disesuaikan dengan konteks wilayah dan kewenangan Provinsi DKI Jakarta





Tujuan 1

Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Tujuan ini menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan ekstrem, perlindungan sosial, akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar, ketahanan masyarakat miskin terhadap bencana, serta mobilisasi sumber daya untuk program kemiskinan.

Target dan arah kebijakan pencapaian TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, mengacu kepada panduan Metadata Edisi II serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi. Terdapat 5 (lima) Target dan 12 (dua belas) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 (satu koma dua puluh lima) dolar amerika per hari;
- 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional;
- 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan;
- 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro;
- 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.



Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Tujuan 1 (satu) Tanpa Kemiskinan telah menjadi salah satu prioritas nasional. Hal ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang menetapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024. Provinsi DKI Jakarta juga telah menindaklanjuti hal ini dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (TKPK) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018. TKPK berperan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyusun Grand Design Pengembangan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2022 tentang Tim Teknis Pengembangan Pengelolaan (Pemukakhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Keputusan ini menjadi acuan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengelolaan data terpadu di tingkat nasional.

Program dan kebijakan utama yang diadopsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengentasan kemiskinan ekstrem mengacu kepada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam upaya mewujudkan Tujuan 1 (satu) tanpa kemiskinan pemerintah DKI Jakarta berfokus pada menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin, dan mengurangi wilayah kantong-kantong

Menurunkan Beban Pengeluaran Penduduk Miskin

Pemprov DKI Jakarta berusaha memastikan penurunan beban pengeluaran penduduk miskin melalui bantuan di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pangan, dan subsidi untuk mengakses infrastruktur dasar lainnya. Bantuan-bantuan ini berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik Penyandang Disabilitas, Jaminan Kesehatan Daerah, Subsidi Pangan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan upaya bantuan langsung ini, pemerintah memastikan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala, penguatan monitoring, dan evaluasi pelayanan untuk memperkuat perlindungan dan jaminan sosial yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga akan mendorong kepemilikan identitas digital (digital ID) bagi seluruh penerima program bantuan dan jaminan sosial di Jakarta. Pemutakhiran yang dimaksud juga termasuk pepadanan data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Data Carik Jakarta.

Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Penduduk Miskin

Peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dijalankan melalui berbagai strategi program kegiatan. Hal ini sejalan dengan tujuan “Pembangunan Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan” pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Aksi yang dilakukan berupa layanan pelatihan keterampilan kerja di Pusat Pelatihan Kerja Daerah, program kerja paket A,B,C, revitalisasi SMK, pelatihan pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan terpadu melalui platform Jakpreneur. Pelatihan keterampilan kerja ini dapat berupa pelatihan kerja mandiri seperti kewirausahaan, pelatihan satpam, dan mengemudi SIM A.

Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan potensi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga strategi yang dilakukan berupa peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata DKI Jakarta serta kerjasama dan pemberdayaan serta fasilitasi pelaku ekonomi kreatif. Semua aksi yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan koperasi dan UMKM.

Mengurangi Wilayah Kantong-kantong Kemiskinan

Pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan akan dilakukan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui penataan kawasan permukiman terpadu (CAP/CIP atau *Community Action Plan/ Collaborative Implementation Plan*), penataan kampung dan masyarakat, penyediaan rusunawa (rumah susun sederhana sewa), penyediaan kios air, penyambungan dan pemakaian air minum khusus, subsidi penyediaan dan pelayanan air minum, subsidi tangki septik, dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Berkaitan dengan penataan kampung deret dan rusunawa, pemerintah melalui DPRKP memastikan bahwa lantai yang dibangun telah sesuai standar. Pada aspek bahan bakar yang dipakai rumah tangga, pemerintah melalui DTKTE turut melakukan pemantauan pada ketersediaan LPG 3 kg (tiga kilogram). Selain itu, Pemerintah juga akan selalu memastikan penanganan bencana yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana, meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya yang responsif terhadap bencana, serta mengingatkan masyarakat yang terdampak bencana sangat rawan untuk jatuh kedalam kemiskinan.

Tabel 3.1.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.								
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	BPS Susenas Kor - Sept	%	1,37 (2021)	1,06	0,88	0,83	0,68
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS Susenas Kor	%	4,61 (September 2022)	4,13	3,79	3,25	2,91
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
	1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan	BPS Susenas Kor	%	68,03 (2018)	68	71	73	76
	2. Gizi : <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi)	BPS Susenas Kor	%	3,42	2,5	2,5	2,5	2,5
	3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	BPS Susenas Kor	%	4,31	N/A	N/A	N/A	N/A
	5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS Susenas Kor	%	9,8	0	0	0	0
	6. Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	BPS Susenas Kor	%	0	0	0	0	0
	7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak	BPS Susenas Kor	%	5,1	5,1	5,0	4,9	4,8

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	1. Formal	BPJS Ketenagakerjaan	%	112,04 (2021)	112,04	112,04	112,04	112,04
	2. Informal	BPJS Ketenagakerjaan	%	20,25 (2021)	30,43	32,51	34,73	37,11
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	BPS Susenas Kor	%	N/A	99,86	99,86	99,86	99,86
	2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi	BPS Susenas Kor	%	95,1	95,19	95,96	96,73	97,51
	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	BPS Susenas Kor	%	79,5	79,64	80,19	80,64	81,19
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1. Proporsi rumah tangga dengan Rumah milik	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	48,48	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. Proporsi rumah tangga dengan Rumah Sewa/Kontrak	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	34,62	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BNPB DIBI; Pusat Data, Informasi dan Komunikasi	per 100.000 jiwa	N/A	0	0	0	0

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ²	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	12. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	BPS Susenas Kor	%	2,17	1,5	1,4	1,3	1,2
	14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BDT dan BPJS Kesehatan	%	98,39 (2021)	98	98	98	98
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan (PBI); Dewan Jaminan Sosial Nasional	%	2204 (2021)	2237,56	2255,40	2273,24	2291,08
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.							

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
		Bencana						
	1. Jumlah korban meninggal	BNPB DIBI; Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana	per 100.000 jiwa	N/A	0	0	0	0
	2. Jumlah korban hilang	BNPB DIBI; Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana	per 100.000 jiwa	N/A	0	0	0	0
	3. Jumlah korban terkena dampak	BNPB DIBI; Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana	per 100.000 jiwa	N/A	0	0	0	0
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	BNPB (Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	%	5,06 (2021)	0	0	0	0
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030							
	1. Rencana	BNPB	Dokumen	2	5	5	3	1
	2. Implementasi	BNPB (Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana)	Dokumen	2	5	5	3	1
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BNPB dan Bappenas	%	100	100	100	100	100



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025	2026							
(1)		(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)			
Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.													
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)													
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi													
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	4217671527348	APBD	Jakarta	DINSOS
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	17105630198	APBD	Jakarta	
7.02.02.6.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi													
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	156000000	APBD	Jakarta	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	23616000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Barat

7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	1040000000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	17280000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	92820000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	25729704	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara

2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	Jakarta	DTKTE
--------------	--	-----------------	----------------------------	--	-------	------	------	------	------	--------------	------	---------	-------

Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	450	630	810	990	2322000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi													
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	4217671527348	APBD	Jakarta	DINSOS
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	17105630198	APBD	Jakarta	
7.02.02.6.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi													
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	156000000	APBD	Jakarta	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	23616000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Barat

7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	92820000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	25729704	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	1040000000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	17280000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan													
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	2	1	88021956325	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	0	0	0	5697447891	APBD	Jakarta	
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota													

2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	Jakarta	DTKTE
2.17.07.1.01													
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	358051167878	APBD	Jakarta	DPPKUM
2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	4	4	4	4	4109989161003	APBD	Jakarta	DKPKP
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan													
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	0	0	1	0	385875000	APBD	Jakarta	Bappeda
1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													

2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	682227000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi													
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	4217671527348	APBD	Jakarta	Dinsos
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	17105630198	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	114765932119	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	3	3	3	35255474626	APBD	Jakarta	

1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	11	11	1214639092	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	53346	53346	53346	53346	1364476320000	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	54116706813	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	162350120439	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	18690220745	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14	14	66908440805	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus													
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1051	1051	1051	1051	3879405600	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	2573314071284	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	265580877393	APBD	Jakarta	

		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	5564929440000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	29895793452	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	423495142052	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	6	4	4	62432529208	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	252821	252822	252823	252824	4091978400000	APBD	Jakarta	
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	Jakarta	DTKTE
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	15706139799	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4	4	4	4	379485489	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685.696	685.696	685.696	685.696	5145427365	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	879045	896626	914559	932850	205013548	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	295296	301202	307226	313371	1140568048	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	18261	18615	18989	19168	754291117	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	107032	107974	108924	109883	4744504785	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	------------	----	----	----	----	----------------	------	---------	--------

Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.

1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	4217671527348	APBD	Jakarta	DINSOS
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	17105630198	APBD	Jakarta	

1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1591	1586	1596	1606	15038324016	APBD	Jakarta	Dinsos
--------------	--	-----------------	-----------------------	---	-------	------	------	------	------	-------------	------	---------	--------

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	53346	53346	53346	53346	1364476320000	APBD	Jakarta	Disdik
--------------	--	-----------------	---	---	---------------	-------	-------	-------	-------	---------------	------	---------	--------

1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	4574711544000	APBD	Jakarta	Disdik
--------------	--	-----------------	---	---	---------------	--------	--------	--------	--------	---------------	------	---------	--------

1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus

1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1051	1051	1051	1051	3879405600	APBD	Jakarta	Disdik
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	9706415744800	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													

2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	4	4	4	4	4109989161003	APBD	Jakarta	DKPKP
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.													
2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)													
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	200	200	200	200	1896869520	APBD	Jakarta	DTKTE
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.													
1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.													
1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	3	3	2	1750000000	APBD	Jakarta	DPRKP
1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1100	0	6461	8432574352107	APBD	Jakarta	DPRKP

1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	7495	7445	7472	8935	2322981325275	APBD	Jakarta	DPRKP
		1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Lokasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Lokasi	3	1	1	3	500000000	APBD	Jakarta	DPRKP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	11452856857	APBD	Jakarta	Dinkes
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	2532500000	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
	Pengelolaan dan	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	2	1	1	1	1414000000	APBD	Jakarta	DSDA

1.03.03.1.01	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	6.4	7.5	7.5	7.5	38000000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit	16	16	18	16	1227802219655	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen	5	5	5	5	26116000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	0	0	0	23	3077496000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	2	3	3	3	15000000000	APBD	Jakarta	DSDA
3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi													
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1600000000	APBD	Jakarta	DSDA
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	62168000000	APBD	Jakarta	DSDA

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	7	5	3	3	4500000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	1106	1900	2727	3361	95644300000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2000	2000	2000	2000	80000000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	67	84	101	118	130166399239	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	6	6	6	6	29000000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	9850	9800	9800	9800	594276527694	APBD	Jakarta	DSDA
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.													
1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													

1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	3	3	2	1750000000	APBD	Jakarta	DPRKP
1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1100	0	6461	8432574352107	APBD	Jakarta	DPRKP
		1.04.02.1.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	7495	7445	7472	8935	2322981325275	APBD	Jakarta	DPRKP
		1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Lokasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Lokasi	3	1	1	3	500000000	APBD	Jakarta	DPRKP
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	395	382	3400	3786	791279140863	APBD	Jakarta	DPRKP
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.													
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.													
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													

2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	3784256700	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	265664	266067	266067	266067	64153511231	APBD	Jakarta	Dinsos
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130400	136650	136650	136650	312380116562	APBD	Jakarta	
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	68000000	APBD	Jakarta	
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	437084453	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752	APBD	Jakarta	BPBD
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	Dokumen	0	0	0	1	529809752	APBD	Jakarta	BPBD
		1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1	57000000	APBD	Jakarta	

1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	831740000	APBD	Jakarta	BPBD
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	20480000000	APBD	Jakarta	BPBD
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	3784256700	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752	APBD	Jakarta	BPBD
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1	529809752	APBD	Jakarta	BPBD
		1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1	57000000	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													

1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	20480000000	APBD	Jakarta	BPBD
1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030													
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	3784256700	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	265664	266067	266067	266067	64153511231	APBD	Jakarta	Dinsos
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130400	136650	136650	136650	312380116562	APBD	Jakarta	
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	68000000	APBD	Jakarta	

		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	437084453	APBD	Jakarta	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	2200650900	APBD	Jakarta	Dinsos
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	23474574818	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752	APBD	Jakarta	BPBD
		1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	4027661736	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1	529809752	APBD	Jakarta	BPBD
		1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1	57000000	APBD	Jakarta	

	Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	119440000	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60	314070000	APBD	Jakarta	BPBD
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi													
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	1	1	1	2199600000	APBD	Jakarta	Diskominfotik
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	2532500000	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	2	1	1	1	1414000000	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	6.4	7.5	7.5	7.5	38000000000	APBD	Jakarta	DSDA

1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit	16	16	18	16	1227802219655	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen	5	5	5	5	26116000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	0	0	0	23	3077496000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	2	3	3	3	15000000000	APBD	Jakarta	DSDA
3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi													
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1600000000	APBD	Jakarta	DSDA
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	62168000000	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	7	5	3	3	4500000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	1106	1900	2727	3361	95644300000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2000	2000	2000	2000	80000000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	67	84	101	118	130166399239	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	6	6	6	6	29000000000	APBD	Jakarta	DSDA
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	9850	9800	9800	9800	594276527694	APBD	Jakarta	DSDA

1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana

2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	6859398000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	6	6	6	6	2927730000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	3784256700.00	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi													
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	265664	266067	266067	266067	64153511231	APBD	Jakarta	

1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130400	136650	136650	136650	312380116562	APBD	Jakarta	Dinsos
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	68000000	APBD	Jakarta	
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	437084453	APBD	Jakarta	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	2200650900	APBD	Jakarta	Dinsos
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	23474574818	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
		1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752	APBD	Jakarta	

Tujuan 2



Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 (dua) Tanpa Kelaparan berupaya untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya pemberian akses terhadap makanan aman, bergizi, dan cukup, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan, termasuk menjaga ketersediaan dan cadangan pangan.

Target dan arah kebijakan pencapaian TPB Tujuan 2 (dua) Tanpa Kelaparan mengacu kepada panduan Metadata II serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi. Terdapat 6 (enam) Target dan 12 (dua belas) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun;
- 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 (lima) tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula;
- 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian;
- 2.4 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional;
- 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang;
- 2.b Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.



Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Tujuan 2 (dua) Tanpa Kelaparan sejalan dengan isu pemerataan pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Beberapa strategi yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi terdiri dari peningkatan produksi pertanian, pengamanan ketersediaan pangan, dan pengentasan stunting

Peningkatan Produksi Pertanian

Dalam upaya peningkatan produksi pertanian, Pemprov DKI Jakarta akan mengimplementasikan berbagai strategi. Strategi tersebut meliputi peningkatan produksi pangan, peternakan, susu, daging dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan (urban farming). Pertanian perkotaan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat, secara ekonomi mampu mengurangi pengeluaran masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat, menambah nilai positif terhadap lahan yang kurang termanfaatkan, dan secara kesehatan produk yang dipanen juga berkualitas lebih tinggi. Pertanian perkotaan juga dapat membantu mengurangi kerawanan pangan, serta menambah konsumsi gizi masyarakat.

Produksi pangan berkelanjutan merupakan contoh dari strategi lain yang diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung produksi pangan berkelanjutan yang juga termasuk dalam target pada Tujuan 2 (dua) pada indikator 2.4.1 dan 2.4.1(a). Walau belum dapat ditargetkan berkenaan mengenai ketersediaan data, saat ini sudah terdapat upaya untuk mengencarkan sinkronisasi RZ (Rencana Zonasi) ke RTRW. Berkaitan dengan konteks Jakarta yang merupakan perkotaan, berbagai pot di ruang terbuka hijau serta lahan yang ditanami di-rooftop, serta area vertikal juga berpotensi untuk diidentifikasi dan dihitung sebagai tempat produksi pangan berkelanjutan.

Dalam rangka mengelola keragaman genetik benih atau Sumber Daya Genetik untuk konservasi yang tercantum dalam indikator 2.5.1*, Target 2.5, dalam Tujuan 2 (dua), DKI Jakarta melalui DKPKP bekerjasama dengan BPSIP (Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian) Kementerian pertanian. Upaya yang telah dilakukan DKPKP ialah berfokus untuk mengusulkan varietas dan jenis-jenis tanaman yang unggul untuk menjadi tanaman khas Jakarta. DKI Jakarta memiliki berbagai potensi tanaman lokal yang unggul, akan tetapi belum dilakukan pengembangan. Saat ini telah terdaftar beberapa tanaman seperti alpukat cipedak, sukun Pulau Seribu, pisang kepok Belanda, salak condet, dan duku condet. Tanaman-tanaman tersebut memiliki potensi manfaat walaupun belum diproduksi secara luas. Harapan kedepan, berbagai tanaman pangan tersebut dapat dikoleksi di kebun maupun dapat dikonsumsi menjadi tanaman pangan.



Ketahanan Pangan

Dalam upaya ketahanan pangan, terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan, yaitu ketersediaan, akses, serta pemanfaatan dari pangan itu sendiri. Ketersediaan dan akses pangan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengamanan stok pangan; pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran pangan; peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan; serta peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan.

Pada pemanfaatan pangan, pemerintah memastikan untuk selalu mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan dengan gizi lengkap. Pemenuhan gizi lengkap ini juga dilakukan melalui penyediaan makanan tambahan untuk pelajar. Pada tahun 2022 terdapat 201.110 (dua ratus satu ribu seratus sepuluh) siswa sebagai penerima manfaat dan 631 (enam ratus tiga puluh satu) sekolah dan/ komite sekolah terlibat sebagai kolaborator.

Kegiatan strategis lain yang dilakukan terkait ketahanan pangan adalah peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak; penyusunan peta jalan pangan; pembangunan 6 (enam) pasar terpadu di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga sedang menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2023-2026.

Pengentasan *Stunting*

Salah satu isu utama pada Tujuan 2 (dua) adalah *stunting*. Berbagai strategi intervensi telah dilakukan untuk mendukung upaya ini, seperti tablet penambah darah untuk ibu hamil dan remaja sebagai bentuk preventif, pemeriksaan kehamilan, serta promosi dan konseling menyusui ketika bayi telah lahir. Berbagai bentuk strategi lain juga turut dilakukan dari sisi ketahanan pangan dan gizi, lingkungan permukiman, dan lingkungan kesehatan. Berbagai upaya tersebut terus dilakukan untuk memberikan dukungan 1.000 (seribu) hari pertama kelahiran (HPK) agar *stunting* dapat segera dituntaskan. Pendataan *by name by address* pada anak-anak yang terindikasi *stunting*, juga dilakukan dengan pemanfaatan data terpadu dari Carik, DTKS, dan P3KE.



Tabel 3.2.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	BPS	%	3,42	2,5	2,5	2,5	2,5
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (FIES)	BPS	%	3,77	3,77	3,67	3,57	3,47
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendekan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	SSGI	%	14,8	13,7	13,2	12,7	12,2
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	SSGI	%	6,9	5,8	4,7	3,6	2,5
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Badan Pangan Nasional - Bapanas dan BPS	Skor 1-100	89,9 (2019)	90	90	90,5	91
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Riskesdas	%	6,12	6,0	5,5	5	4,5

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.								
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Biro Perencanaan, Kementan	USD PPP	22,15 / Rp 105.385	23,43	24,75	26,11	27,47
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	BPS	Rp. juta/tenaga kerja	72,45	74,43	76,42	78,41	80,41
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut sub sektor.	Biro Perencanaan, Kementan	USD PPP	498,77 / Rp 2.373.501	521,89	545,02	568,15	591,27
Target 2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.								
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Komnas Plasma Nuffah/BB Biogen, Balitbangtan, Kementan	Jumlah akses SDG tanaman	148 (2019)	148	149	150	151
Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.								
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Bappenas/ Kemenkeu	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.								
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	BPS	Nilai	-0,32	N/A	N/A	N/A	N/A

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025	2026							
(1)		(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)			
Tujuan 2 - Tanpa Kelaparan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.													
2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).													
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal													
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	80	80	80	80	739200000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (FIES)													
2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi													
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	7	7	7	7	830640000	APBD	Jakarta	DKPKP
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.													
2.2.1* Prevalensi stunting (pendekan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													

2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	682227000	APBD	Jakarta	DPPAPP
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4551	4551	4551	4551	187.424.044.192	APBD	Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1243	1243	1243	1243	332444845161	APBD	Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2770	2770	2770	2770	203288061392	APBD	Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10628	10628	10628	10628	473750085042	APBD	Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	192	192	192	192	7412291216	APBD	Jakarta	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	71517847095	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	3367826467	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685.696	685.696	685.696	685.696	5145427365	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													

1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	250	300	350	400	773250948	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	4	4	4	152560128	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													

2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	682227000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	71517847095	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	3367826467	APBD	Jakarta	Dinkes
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685.696	685.696	685.696	685.696	5145427365	APBD	Jakarta	Dinkes
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													

1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	250	300	350	400	773250948	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	4	4	4	152560128	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													

1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	682227000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi													
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekegaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekegaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	7	7	7	7	15507814660	APBD	Jakarta	DKPKP
2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.													
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													

2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	7	7	7	7	284000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	2	1	1	284562212906	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	2	2	2	2	7907699159	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	71517847095	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	206607	200610	194613	188616	4696946480	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1792705	1860831	1928957	1997082	4457741870	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	27500870926	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD											

1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.													
2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan													
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian													
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5	5	5	5	615000000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian													
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	0	0	1	1224498000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	8	8	8	8	24326875172	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	423103247656	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian													
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	45	45	45	1000000000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian													

3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	7	7	7	7	10990629147	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan													
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	7	7	7	7	2712500000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian													
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	4800000000	APBD	Jakarta	DKPKP
2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.													
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian													
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5	5	5	5	615000000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian													
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	0	0	1	1224498000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian													
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	4800000000	APBD	Jakarta	DKPKP
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut sub sektor.													
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian													

3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5	5	5	5	615000000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian													
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	0	0	1	1224498000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	8	8	8	8	24326875172	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian													
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	7	7	7	7	10990629147	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan													
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	7	7	7	7	2712500000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian													
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	4800000000	APBD	Jakarta	DKPKP
<p>Target 2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</p> <p>2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.</p>													
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian													

3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0	1	0	0	1200000000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	1	1	103000000000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi													
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	50	50	50	1572992565	APBD	Jakarta	DKPKP
Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.													
2.c.1* Indikator anomali harga pangan.													
2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi													
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	0	6	0	0	49740800000	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman													
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	12	12	12	12	891517545	APBD	Jakarta	DKPKP

Tujuan 3

Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tujuan ini menekankan pentingnya pengurangan rasio angka kematian ibu dan bayi, mengakhiri epidemi, mengurangi angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan obat, dan memberikan akses kesehatan universal untuk semua. Hal ini juga dicapai dengan memastikan dukungan penelitian dan pengembangan vaksin dan obat, serta pembiayaan kesehatan dan retensi tenaga kesehatan yang ada.

Target dan arah kebijakan pencapaian TPB Tujuan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, mengacu kepada panduan Metadata Edisi II serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi. Terdapat 9 (Sembilan) Target dan 18 (delapan belas) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 (tujuh puluh) per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup;
- 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 (dua belas) per 1.000 (seribu) KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 (dua puluh lima) per 1.000 (seribu) KH;
- 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya;
- 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan;
- 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan;
- 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional;
- 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang;
- 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua;
- 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Tujuan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan (*urban health system*) dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dalam pencapaian Tujuan 3 (tiga), upaya Pemprov DKI Jakarta akan berfokus pada pelayanan kesehatan terintegrasi, penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, Jaminan Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pelayanan Kesehatan Terintegrasi

Dalam upaya transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi, pemerintah memastikan untuk berfokus pada standarisasi fasilitas kesehatan, transformasi organisasi, inovasi layanan, peningkatan kapasitas kegawatdaruratan klinis dan komunitas, serta digitalisasi dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam kerangka *urban health*. Transformasi pelayanan ini juga dipastikan dengan membangun kepercayaan dan pengalaman terbaik bagi penerima layanan melalui pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi *hospitality*. Hal ini juga didukung dengan Implementasi *masterplan* transformasi pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Pemprov DKI Jakarta.

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Penguatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dilakukan dengan memastikan keterlibatan aktif masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kader kesehatan, advokasi dan aksi lintas sektoral. UKBM juga dilakukan dengan didukung penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai. Keterlibatan mitra kerja dan stakeholders dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), advokasi, serta konvergensi lintas sektor dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi, pelayanan KB, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); serta Kampung KB juga digiatkan.

Jaminan Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Peningkatan akses terhadap kesehatan juga tampak dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS dan cakupan jaminan kesehatan Jakarta (jaminan di luar program JKN). Per 2022, cakupan UHC (*Universal Health Coverage*) di Provinsi DKI Jakarta mencapai 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima persen).

Selain peningkatan akses jaminan kesehatan, promosi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) juga dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan adanya 10 (sepuluh) indikator PHBS, diharapkan dapat menurunkan resiko penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan higiene/kebersihan, mendorong pengurangan prevalensi rokok terutama pada anak, meningkatkan konsumsi makanan sehat, serta mengurangi penggunaan napza. Pemerintah juga menyediakan layanan terapi dan rawat jalan yang dapat diakses gratis di puskesmas, rehabilitasi medis di rumah sakit dan BNN, serta layanan lainnya dalam penanggulangan penggunaan napza dan penyakit menular dan tidak menular. Koordinasi dan komitmen lintas sektor juga dibutuhkan untuk memastikan kehidupan sehat dan berkualitas dapat tercapai di DKI Jakarta.



Tabel 3.3.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) / Jumlah Kasus Kematian Ibu	Sensus Penduduk (SP); Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS)	Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup	76,49	76	74	72	70
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas	%	96,89 (2022)	97,27	98,77	98,80	98,84
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Perhitungan data program Dinkes	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	1,64	1,62	1,61	1,60	1,59
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Perhitungan data program Dinkes	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	1,33	1,31	1,30	1,29	1,28
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	6	6	6	6	6

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Kementerian Kesehatan: Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (Riskesmas)	%	0,48 (2018)	1	0,8	0,6	0,5
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Kusta.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	5	5	5	5	5
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas)	%	8.39 (2018)	8,8	8,7	8,6	8,5
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas)	%	33,43 (2018)	33,43	33,43	33,43	33,43
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas)	%	29,78 (2018)	29,8	29,3	28,7	28,0
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Kementerian Kesehatan: Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (Riskesmas)	%	0,48 (2018)	1	0,8	0,6	0,5
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Kusta.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	5	5	5	5	5
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas)	%	8.39 (2018)	8,8	8,7	8,6	8,5
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas)	%	33,43 (2018)	33,43	33,43	33,43	33,43
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas)	%	29,78 (2018)	29,8	29,3	28,7	28,0
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Laporan Tahunan P2MKJN, Ditjen P2P	Orang	1169	1227	1285	1343	1401
		BNN Provinsi DKI Jakarta	Orang	250	200	250	300	350
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	57,66	58,33	58,99	59,66	60,32
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	SDKI dalam laporan tahunan BKKBN	Kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	21,85	21,35	20,85	20,35	19,85
3.7.2.(a)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR)/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	SDKI (BPS dan BKKBN)	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,26 (2017)	2,25	2,23	2,22	2,21
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Kementerian Kesehatan- Profil kesehatan; BPJS Kesehatan	%	98,39	98	98	98	98

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1*	Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).	%	62,77	65	68	71	74
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Kementerian Kesehatan: Laporan rutin Farmalkes	%	99,69	100	100	100	100
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan							
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	%	86	90	93	95	100
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	%	97	97	97	100	100



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025	2026							
(1)		(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)			
Tujuan 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.													
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) / Jumlah Kasus Kematian Ibu													
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	7	7	7	7	284000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Kesehatan untuk UKM Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	37880024172	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1	1	15076866132	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	206607	200610	194613	188616	4696946480	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	197220	191496	185772	180048	4325542104	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	27500870926	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	879045	896626	914559	932850	205013548	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	295296	301202	307226	313371	1140568048	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	443935	447842	451783	455759	2188369640	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													

1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	206607	200610	194613	188616	4696946480	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	197220	191496	185772	180048	4325542104	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	3367826467	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													

1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.													
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.													
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	7	7	7	7	284000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	37880024172	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	3367826467	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685.696	685.696	685.696	685.696	5145427365	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													

1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	7	7	7	7	284000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	37880024172	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	3367826467	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													

1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.													
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	11452856857	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	15706139799	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	2	2	2	120794586316	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	2	1	1	284562212906	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	2	2	2	2	7907699159	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	15706139799	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	2	2	2	120794586316	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													

1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Kusta.													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	2	1	1	284562212906	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes

	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	2	2	2	2	7907699159	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	15706139799	APBD	Jakarta	Dinkes

	UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	2	2	2	120794586316	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.													
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	15706139799	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1792705	1860831	1928957	1997082	4457741870	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	27500870926	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	15706139799	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1792705	1860831	1928957	1997082	4457741870	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	27500870926	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	998691	1026337	1053982	1081628	25323542639	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	879045	896626	914559	932850	205013548	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	23229384250	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													

1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	------------	----	----	----	----	----------------	------	---------	--------

3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.

1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	15706139799	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	27500870926	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	998691	1026337	1053982	1081628	25323542639	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													

1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.													
3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.													
3.7.1* Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)													
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													

2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	84	84	84	84	233906400	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal													
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	80	80	80	80	739200000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	6	6	3337600000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	Laporan	4	4	4	4	812000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	2	2	684700000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969	3166372800	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	712393500	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	1007924796	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	754162500	APBD	Jakarta	DPPAPP

		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	4385565600	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	1715406420	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	95	98	102	292608000	105	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Dokumen	14	14	14	14	730493400	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	682227000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	10428750000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	835380000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
		2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	120	90	90	60	5040000000	APBD	Jakarta	DPPAPP

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	450	630	810	990	2322000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	6	6	6	2883600000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	1248893100	APBD	Jakarta	DPPAPP
3.7.2* Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama													
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	95	98	102	292608000	105	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	682227000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	10428750000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	835380000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	120	90	90	60	5040000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	450	630	810	990	2322000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	6	6	6	2883600000	APBD	Jakarta	DPPAPP
3.7.2.(a) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR)/TFR) per WUS usia 15-49 tahun													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
		2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	

2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.04	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen	38	40	42	44	1446102300	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.02.1.01.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Dokumen	14	14	14	14	730493400	APBD	Jakarta	
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	84	84	84	84	233906400	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal													
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	80	80	80	80	739200000	APBD	Jakarta	DPPAPP

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	6	6	3337600000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4	4	4	4	812000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969	3166372800	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
2.14.03.2.03	Pengendalian dan	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	712393500	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	1007924796	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	754162500	APBD	Jakarta	DPPAPP

2.14.03.2.03	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	1248893100	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	4385565600	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	1715406420	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	95	98	102	292608000	105	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	682227000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	10428750000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	835380000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	120	90	90	60	5040000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	450	630	810	990	2322000000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	6	6	6	2883600000	APBD	Jakarta	DPPAPP
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.													
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.													
3.b.1* Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	15706139799	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	68030891364	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	6629675041436	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													

1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes

		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	209181695422	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1371902954251	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	16459140649398	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.													
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	3193169182722	APBD	Jakarta	Dinkes

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	313992420570	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	54649032581	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	889959783060	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	153279484269	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	1678313008200	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	46352445227	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													

Tujuan 4

Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 (empat) Pendidikan Berkualitas berupaya untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dengan memiliki pendidikan berkualitas, masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal, memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan, serta meningkatkan taraf hidup mereka dalam berbagai aspek kehidupan manusia



Target dan indikator Tujuan 4 (empat) Pendidikan Berkualitas mengacu kepada panduan Metadata II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi. Terdapat 8 (Delapan) Target dan 13 (tiga belas) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
- 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
- 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
- 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan;
- 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan;
- 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi;
- 4.c Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua;
- 4.7 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Tujuan 4 (empat) Pendidikan Berkualitas menasar pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua dan disertai dengan edukasi pembelajaran sepanjang hayat. Beberapa strategi dilakukan untuk mendukung hal tersebut. Beberapa kegiatan strategis yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian Tujuan 4 (empat), terdiri dari:

1. Perluasan cakupan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan serta perguruan tinggi. KJMU yang dilakukan turut bekerjasama dengan perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta.
2. Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;
3. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dalam rangka meningkatkan akses pendidikan jenjang menengah;
4. Revitalisasi SMK, pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada SMK, serta kerjasama SMK dengan dunia usaha, industri dan perguruan tinggi;
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi;
6. Peningkatan akses dan kualitas PAUD, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan; Sebagai penunjang pemantauan tumbuh kembang anak usia dini, dilakuan deteksi tumbuh kembang anak atau Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) usia usia 0-60 (nol hingga dengan enam puluh) bulan di Posyandu serta Puskesmas;
7. Implementasi, peningkatan peserta, dan perluasan skema program kerjasama antar sekolah. Saat ini sudah berjalan program dengan tujuan memfasilitasi peer learning antar sekolah, baik swasta dan negeri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 mendorong arah pendidikan melalui peningkatan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas yang inklusif. Pembangunan pendidikan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan arah untuk peningkatan mutu dan relevansi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun kesiapan memasuki pasar kerja. Pembangunan pendidikan pada tahun 2025 diselenggarakan dengan arah untuk peningkatan kompetensi lulusan menuju berdaya saing global yang inklusif. Pembangunan pendidikan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan arah untuk Pemantapan menuju layanan pendidikan setara kota global yang inklusif.

Tabel 3.4.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	AKM	%	85,53	86,2	87,56	88,56	89,56
	(ii) matematika	AKM	%	67,84	69,05	72,4	74,5	77,1
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	AKM	%	85,29	86,2	87,4	88,5	89,3
	(ii) matematika	AKM	%	64,61	45,7	47,9	49,4	51,2
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	AKM	%	77,89	79,44	81,8	83,2	85,5
	(ii) matematika	AKM	%	65,88	69,4	71,7	74,6	77,9
	(iii) sains	PISA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat							
	(a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat	BPS RKP 2021	%	98,58	100	100	100	100
	(b) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan SMP/ sederajat	BPS RKP 2021	%	95,4	100	100	100	100
	(c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat	BPS RKP 2021	%	87,71	100	100	100	100
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang:							
	SD/ sederajat	Susenas, BPS	%	0,47	0	0	0	0

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	SMP/ sederajat	Susenas, BPS	%	4,6	0	0	0	0
	SMA/ sederajat	Susenas, BPS	%	16,4	0	0	0	0
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Riskesdas	%	89,44 (2018)	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas, BPS	%	89,09	100	100	100	100
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.							
	(1) usia 15-24 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	47,21	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2) usia 15-59 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor	%	39,56	39,86	40,16	40,46	40,76
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)							
	(1) usia 15-24 tahun	Susesnas Kor	%	97,37	100	100	100	100
	(2) usia 15-59 tahun	Susesnas Kor	%	92,36	91,99	92,09	92,19	92,29
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	SMP/ sederajat	Susenas, BPS	%	4,6	0	0	0	0
	SMA/ sederajat	Susenas, BPS	%	16,4	0	0	0	0
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Risikesdas	%	89,44 (2018)	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas, BPS	%	89,09	100	100	100	100
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.							
	(1) usia 15-24 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	47,21	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2) usia 15-59 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor	%	39,56	39,86	40,16	40,46	40,76
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)							
	(1) usia 15-24 tahun	Susesnas Kor	%	97,37	100	100	100	100
	(2) usia 15-59 tahun	Susesnas Kor	%	92,36	91,99	92,09	92,19	92,29
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas							
	(i.a) Rasio APM-SD Perempuan/ Laki-laki	Susesnas Kor	%	98,37	100	100	100	100
	(i.c) Rasio APM-SD Kuintil Terendah/ Kuintil Tertinggi	Susesnas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(i.d) Rasio APM-SD Disabilitas / Tanpa Disabilitas	Susesnas Kor / Disdik(Raport Pendidikan-Kemendikbudristek)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(ii) Rasio APK Perempuan / Laki-laki pada tingkat:							
	SMP/ Sederajat	Susesnas Kor	%	93,5	100	100	100	100
	SMA/ SMK/ Sederajat	Susesnas Kor	%	76,91	100	100	100	100
	(ii) Rasio APK Kuintil Terendah / Kuintil Tertinggi pada tingkat:							
	SMP/ Sederajat	Susesnas Kor	%	98,8	100	100	100	100
	SMA/ SMK/ Sederajat	Susesnas Kor	%	80,3	100	100	100	100
	(ii) Rasio APK Disabilitas/ Tanpa Disabilitas pada tingkat:							
	SMP/ Sederajat	Susesnas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SMA/ SMK/ Sederajat	Susesnas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Susesnas Kor	%	99,77	99,78	99,79	99,80	99,81
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)							
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik							

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	100	100	100	100	100
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	100	100	100	100	100
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	100	100	100	100	100
	(4) SLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	100	100	100	100	100
Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (b) internet untuk tujuan pengajaran								
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	99,4	100	100	100	100
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	98,7	100	100	100	100
	(3) SMA	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	99,5	100	100	100	100
	(4) SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	99,3	100	100	100	100
Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (c) komputer untuk tujuan pengajaran								
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	41,6	45	50	55	60
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	88,7	90	92	94	96
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	59,39	63	67	70	73
	(4) SLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	36,3	40	45	50	55
Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (d) air minum layak,								
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	74,9	79	84	89	92
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	78,1	83	85	87	90
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	78,5	82	85	88	90
	(4) SLB	Dapodik, PDSP	%	65,9	67	69	71	73

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
		Kemdikbud						
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin,							
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	65,32	68	71	74	76
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	68,05	71	73	75	77
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	66	68	70	72	74
	(4) SLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	50	53	56	59	62
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))							
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	86,8	89	92	93	94
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	86,3	89	92	93	94
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	86,1	89	92	93	94
	(4) SLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	84,4	87	89	90	91
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Kemdikbud, OECD (PISA)	%	9,85	0	0	0	0
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan							
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik							
	(i) TK/RA/BA	Dapodik (Kemdikbud)	%	7,27	10,3	14,2	17,5	20,1
	(ii) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	38,15	40,5	43,2	47,5	50,2
	(iii) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	46,29	49,2	52,6	55,7	58,8
	(iv) SMA	Dapodik	%	41,5	43,4	47,9	50,2	53,4

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
		(Kemdikbud)						
	(iv) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	35,11	39,5	43,5	47,9	50,3
	(v) PLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	44,02	47,5	49,8	50,5	51,2
Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan								
	(i) TK/RA/BA	Dapodik (Kemdikbud)	%	72,81	73,4	74,6	75,9	77
	(ii) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	96,5	97,1	97,6	98,1	98,5
	(iii) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	97,8	98,2	98,7	99,2	99,7
	(iv) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	98,7	99	99,3	99,5	99,7
	(iv) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	96,5	96,8	97,1	97,4	97,7
	(v) PLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	90,89	91,1	91,9	92,5	93



Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)		(2)			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.													
4.1.1(a) Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5, (b) di kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: membaca, matematika, dan sains													
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	103	103	103	103	1329251752000	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	19836	19836	19836	19836	30165449187	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	2314	2314	2314	2314	587108172560	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19350	19365	19770	19980	39161100939	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	20387	20127	20487	20127	52670959010	APBD	Jakarta	

1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	93	93	93	93	1241318958792	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	23845	23845	23845	23845	43140873931	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	2176	2176	2176	2176	552094807040	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus													
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	13	13	13	13	75897600000	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3595	3595	3595	3595	8715534896	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	391	391	391	391	99204535640	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1502	1552	1552	1552	4734734194	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													

1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	3275	3275	3275	3275	2915736604100	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	5764	5764	5764	5764	11263295768	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	53049	53114	52634	53114	106528441839	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	2240	2240	2240	2240	3051417139200	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	920	935	950	965	1759284842930	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	28904	28883	29068	29338	57586800968	APBD	Jakarta	
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
	Pengelolaan	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	3	3	3	35255474626	APBD	Jakarta	

1.01.02.1.01	Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	11	11	1214639092	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	54116706813	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	162350120439	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	18690220745	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14	14	66908440805	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	4574711544000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	2573314071284	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	265580877393	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	5564929440000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	29895793452	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	423495142052	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	6	4	4	62432529208	APBD	Jakarta	

		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	252821	252822	252823	252824	4091978400000	APBD	Jakarta	
4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	114765932119	APBD	Jakarta	Dsdik
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	54116706813	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	162350120439	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	18690220745	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14	14	66908440805	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	4574711544000	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	2573314071284	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	265580877393	APBD	Jakarta	

		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	5564929440000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	29895793452	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	423495142052	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	6	4	4	62432529208	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	252821	252822	252823	252824	4091978400000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	165308	165308	165308	165308	1447680000000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	8973	8973	8973	8973	8324907349	APBD	Jakarta	
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.													
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin													
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	139	151	153	155	5804469000	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	7033	7033	7033	7033	38296800000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19330	19964	20462	20954	27504155882	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4030	4030	4030	4030	198007692122	APBD	Jakarta	

4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin													
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	4	4	5	128997316188	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	3	1	0	19514245893	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6	7	8	9	180000000	APBD	Jakarta	
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.													
4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.04	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen	38	40	42	44	1446102300	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	4574711544000	APBD	Jakarta	Disdik
4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)													
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	53346	53346	53346	53346	1364476320000	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	19836	19836	19836	19836	30165449187	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan													
		1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	2	1	88021956325	APBD	Jakarta	

1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	0	0	0	5697447891	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	108	108	108	108	1445421292	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	4018	4018	4018	4018	57859200000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	484	484	484	484	122800499360	APBD	Jakarta	
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.													
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)													
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	14	14	14	14	254045342669	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	20387	20127	20487	20127	52670959010	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	577	577	577	577	2967200000	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus													
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	13	13	13	13	75897600000	APBD	Jakarta	

1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1502	1552	1552	1552	4734734194	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan													
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	7956	8354	8771	9210	22145547680	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan													
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	279	279	279	279	222931733351	APBD	Jakarta	Disdik
2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi													
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	259507944169	APBD	Jakarta	DTKTE
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.													
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521950000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	114765932119	APBD	Jakarta	

1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	3	3	3	35255474626	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	11	11	1214639092	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	379	379	379	379	1153298924869	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	53346	53346	53346	53346	1364476320000	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	576	576	576	576	1572020134427	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	4574711544000	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus													
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1051	1051	1051	1051	3879405600	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	89	89	97571188000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	2573314071284	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	265580877393	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	5564929440000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
		1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	29895793452	APBD	Jakarta	

1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	423495142052	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	29895793452	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	423495142052	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	6	4	4	62432529208	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	252821	252822	252823	252824	4091978400000	APBD	Jakarta	

4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	379	379	379	379	1153298924869	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	103	103	103	103	1329251752000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	19836	19836	19836	19836	30165449187	APBD	Jakarta	

1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	576	576	576	576	1572020134427	APBD	Jakarta	Disdik
--------------	--	-----------------	--	--	-------------------	-----	-----	-----	-----	---------------	------	---------	--------

1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus

1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3595	3595	3595	3595	8715534896	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	89	89	97571188000	APBD	Jakarta	

4.a.1.(a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	114765932119	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	3	3	3	35255474626	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	416	416	416	416	3388531568	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	1	1	6130829612	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	1	1	1	264292088	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	11	11	1214639092	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	379	379	379	379	1153298924869	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	103	103	103	103	1329251752000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	157	157	157	157	1989439558	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	162350120439	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	18690220745	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	18690220745	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	7	7	7	7	558570202	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	14	14	14	14	254045342669	APBD	Jakarta	

		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	196	196	196	196	3137574400	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	576	576	576	576	1572020134427	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14	14	66908440805	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus													
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3280	3280	3280	3280	17630816080	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	89	89	89	89	24273831600	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	89	89	97571188000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	2573314071284	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	265580877393	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	19.931	19.931	19.931	19.931	203742557568	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	5564929440000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	3.122	3.122	3.122	3.122	1178262744856	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	2240	2240	2240	2240	3051417139200	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	7979	5469	5469	5469	62891177476	APBD	Jakarta	

		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	920	935	950	965	1759284842930	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan													
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	279	279	279	279	222931733351	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	200	200	200	200	1018401938	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	4	4	5	128997316188	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	3	1	0	19514245893	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	1835	1835	1835	1835	21066900688	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	139	151	153	155	5804469000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	2474	2479	2479	2479	67668547114	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4030	4030	4030	4030	198007692122	APBD	Jakarta	
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.													
4.c.1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan dan Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan													
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	2314	2314	2314	2314	587108172560	APBD	Jakarta	

1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19350	19365	19770	19980	39161100939	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	20387	20127	20487	20127	52670959010	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	2176	2176	2176	2176	552094807040	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus													
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	391	391	391	391	99204535640	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	12544	12544	12544	12544	3182834546712	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	53049	53114	52634	53114	106528441839	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													

Tujuan 5

Kesetaraan Gender

Tujuan 5 (lima) Kesetaraan Gender bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki peluang yang setara dan memberdayakan perempuan, termasuk anak dan remaja, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan keadilan bagi semua. Tujuan ini menekankan pentingnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi, memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.



Target dan arah kebijakan pencapaian TPB Tujuan 5 (lima) Kesetaraan Gender mengacu kepada panduan Metadata Edisi II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi. Terdapat 5 (Lima) Target dan 7 (tujuh) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
- 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
- 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut;
- 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;
- 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;



Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Tujuan 5 Kesetaraan Gender sejalan dengan tujuan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu “Tercapainya Manusia Madani yang Berkesetaraan”. Terdapat beberapa kegiatan strategis yang dilakukan untuk menysar penurunan kesenjangan melalui pembangunan responsif gender.

Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, percepatan pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender) di Perangkat Daerah melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Kedua, peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha. Ketiga, peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan. Terakhir, peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; dan pengembangan inovasi dalam upaya pelaksanaan PUG dan

Perlindungan Perempuan

Dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO. Kedua, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan; koordinasi antar unit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KTP dan TPPO; serta penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum. Dua upaya ini juga diimbangi dengan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KTP dan TPPO.

Optimalisasi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terwujud melalui layanan dan perlindungan kekerasan, yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2 (dua) rumah aman, dan 32 (tiga puluh dua) layanan medis di RSUD. Selain itu, terdapat nomor 112 (satu satu dua) untuk Jakarta Siaga beserta 4 (empat) unit cepat tanggap. Akses pelaporan kekerasan juga dipermudah dengan adanya 19 (sembilan belas) pos pengaduan, 324 (tiga ratus dua puluh empat) POS SAPA di seluruh halte Transjakarta, stasiun MRT dan LRT, sertai 12 (dua belas) Perguruan Tinggi di Jakarta.

Pelayanan dan Sistem Data Gender dan Anak

Dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, advokasi dan pelayanan pada keluarga yang komprehensif dan terintegrasi pada lembaga/organisasi/kelompok/perorangan yang berperan mendampingi keluarga di Jakarta. Kedua, peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu, seperti pendataan berbasis aplikasi melalui Kader Dasawisma. Pada tahun 2022, 80% (delapan puluh persen) populasi DKI Jakarta berhasil di data melalui pendataan keluarga satu pintu.

Kedua usaha ini diperkuat melalui Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) berbasis digital. Puspa bertujuan untuk menjadi wadah pengintegrasian Data Keluarga Satu Pintu dan sinkronisasi pelayanan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (Kepsekda) Nomor 219 Tahun 2023, Dinkes juga melakukan kegiatan konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin. Hal ini dilakukan berkaitan dengan upaya edukasi yang menjamin akses setara pada perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.



Tabel 3.5.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kestaraan Gender

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.	Susenas Kor (BPS)	%	4,68 (2021)	4,32	3,96	3,6	3,24
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1	(b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota)							
	DPRD Provinsi	KPU	%	21,69 (2019)	N/A	N/A	N/A	N/A
5.5.2*	(a) Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial di pemerintahan							
	Gubernur dan Wakil Gubernur	Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri (diolah Bappenas)	%	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota	Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri (diolah Bappenas)	%	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Eselon I	BKD	%	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	Eselon II	BKD	%	23,95	N/A	N/A	N/A	N/A
	(b) Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan publik atau swasta	Sakernas BPS	%	33,15 (2021)	37,21	37,31	37,81	37,91
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1*	(1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)	SDKI (BKKBN dan BPS)	%	24,43 (2017)	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)	SDKI (BKKBN dan BPS)	%	39,15 (2017)	N/A	N/A	N/A	N/A
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	- Kemen PPPA - Kemenkumham - BKKBN - Kemenkes - Kemendikbud	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.								

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian;	SITASI (BPS)	%					
	Laki-laki			21,88	N/A	N/A	N/A	N/A
	Perempuan			3,54	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	SITASI (BPS)	%	11,47	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas Kor (BPS)	%	67,83 (2021)	68,83	69,83	70,83	71,83
	Laki-laki	Susenas Kor (BPS)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Perempuan	Susenas Kor (BPS)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025	2026							
(1)		(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)			
Tujuan 5 - Kesetaraan Gender													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.													
5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.													
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	1686880000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal													
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	6	6	3337600000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	2	2	684700000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969	3166372800	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
	Pengendalian dan Pendistribusian	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	712393500	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	1007924796	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	754162500	APBD	Jakarta	

2.14.03.2.03	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	1248893100	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	4385565600	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	1715406420	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	10428750000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaa Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	835380000	APBD	Jakarta	DPPAPP
--------------	--	-----------------	------------------------------	---	---------	----	----	----	----	-----------	------	---------	--------

Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

5.5.1 (b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota)

2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi

2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Organisasi	415	415	415	415	954446619000	APBD	Jakarta	DPPAPP
--------------	--	-----------------	---	---	------------	-----	-----	-----	-----	--------------	------	---------	--------

2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	30	35	40	45	196894425	APBD	Jakarta	DPPAPP
--------------	--	-----------------	--	--	---------	----	----	----	----	-----------	------	---------	--------

5.5.2* (a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan dan (b) Proporsi perempuan yang menduduki posisi managerial di perusahaan publik atau swasta

2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi

2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuptaen/Kota	Organisasi	415	415	415	415	Rp.954.446.619.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	30	35	40	45	196894425	APBD	Jakarta	DPPAPP
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut.													
5.6.1* (1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS) dan (2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)													
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1352	1367	1382	1397	37877941882	APBD	Jakarta	DPPAPP

	Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	2098429500	APBD	Jakarta	
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	6729888008	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	1686880000	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal													
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	6	6	3337600000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	2	2	684700000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969	3166372800	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	712393500	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	1007924796	APBD	Jakarta	

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	754162500	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	1248893100	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	4385565600	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	1715406420	APBD	Jakarta	
2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	13321963821	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	10428750000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	835380000	APBD	Jakarta	DPPAPP
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan													
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	0	0	1	0	385875000	APBD	Jakarta	Bappeda
5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.													
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1352	1367	1382	1397	37877941882	APBD	Jakarta	

2.08.03.1.02	memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	2098429500	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	6729888008	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	1686880000	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	2	2	684700000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969	3166372800	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	712393500	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	1007924796	APBD	Jakarta	

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	754162500	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	1248893100	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	4385565600	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	1715406420	APBD	Jakarta	

2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	10	11	12	13	18761240500	APBD	Jakarta	DPPAPP
--------------	--	-----------------	--	--	---------	----	----	----	----	-------------	------	---------	--------

Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; dan (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.

1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56250	56250	56250	56250	8432574352107	APBD	Jakarta	DPRKP
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi													
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	50	50	50	1572992565	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian													
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	4800000000	APBD	Jakarta	DKPKP
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.													
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.													
2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	1	1	1254766750	APBD	Jakarta	DPPAPP

Tujuan 6

Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

Tujuan 6 (enam) Air Bersih dan Sanitasi Layak berupaya untuk mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Tujuan ini menekankan pada pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak sebagai kebutuhan dasar manusia. Pada intinya berupaya untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.



Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 6 (enam) di Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata Edisi II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi, sehingga hanya terdapat 3 (tiga) target dan 3 (tiga) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

- 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua;
- 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan;
- 6.3 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan

Target ini sudah diarusutamakan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yaitu pada program prioritas daerah yang termanifestasikan dalam dimensi lingkungan-bangun (built-environment). Dimensi tersebut dielaborasi dalam tujuan “Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan” yang secara khusus masuk dalam sasaran “Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas; Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon”; dan “Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota”. Adapun beberapa strateginya mencakup “Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air; Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah minum, Melakukan inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS di Provinsi DKI Jakarta”; Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase; dan “Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian

Adapun turunan dari strategi di atas diterjemahkan kembali dalam rencana strategis Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakannya diterjemahkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas air minum melalui pembangunan instalasi pengolahan air minum komunal;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait peningkatan akses air minum melalui pembangunan sistem pengolahan air minum regional;
3. Pembangunan infrastruktur air limbah perkotaan yang diarahkan pada peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dengan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan peningkatan sambungan air limbah pada kawasan permukiman;
4. Pengembangan sistem pengolahan limbah setempat/lokal yang diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak dapat dilayani oleh sistem terpusat;
5. Menambah volume dan kapasitas tampungan melalui pembangunan waduk, situ, embung pengendali banjir dan konservasi, serta sistem polder pada highland dan *lowland* area yang berpedoman pada konsep Nature Based Solutions (NBS);

6. Penataan daerah aliran sungai dengan mengadopsi konsep NBS melalui upaya Naturalisasi dan Restorasi Kali/sungai;
7. Menyediakan sistem drainase perkotaan dan kelengkapannya;
8. Mengintegrasikan sistem drainase dengan infrastruktur NBS dan/atau sebaliknya;
9. Meningkatkan kapasitas sistem drainase melalui operasi, pemeliharaan, dan pengerukan sistem drainase;
10. Perlindungan ancaman banjir rob yang diakibatkan kenaikan permukaan air laut pada kawasan pesisir melalui pengembangan tanggul laut di pesisir pantai Jakarta;
11. Perlindungan abrasi pantai di Kepulauan Seribu melalui pembangunan breakwater dan bangunan pemecah gelombang



Kebijakan terkait pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 menitikberatkan pada penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan mengimplementasikan serangkaian strategi sebagai

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum yang layak dan aman;
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum agar mampu menyediakan pelayanan yang baik;
3. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efisien dan berkelanjutan;
4. Menyadarkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air dan memilih akses air minum dari sumber yang layak seperti menggunakan layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum yang aman dalam rumah tangga;
5. Meningkatkan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;
6. Mendapatkan komitmen kuat dari kepala daerah untuk menyediakan layanan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Mengembangkan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
8. Mengubah perilaku masyarakat agar mencapai akses sanitasi yang aman;
9. Mengembangkan kerja sama dan pola pendanaan yang efektif dalam hal pengelolaan air dan sanitasi;

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan berkualitas yang dimaksud mencakup akses air bersih, sanitasi yang layak, dan permukiman layak huni yang pendanaannya dapat bersumber dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah.

Upaya konservasi dan pengelolaan air secara berkelanjutan dilakukan dengan merehabilitasi sumber daya air, meminimalkan kebocoran air, mendorong penggunaan kembali air, dan menambah tempat penyimpanan dan penampungan air sebagai alternatif sumber air baku, dengan mempertimbangkan siklus air. Pada tahun 2021, akses layanan sumber air minum layak di Jakarta telah mencapai 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) namun demikian, untuk akses air minum perpipaan baru mencapai 65,3% (enam puluh lima koma tiga persen), dengan tingkat kebocoran sebesar 42% (empat puluh dua persen) NRW (*non-revenue water*). Ke depannya, pemerintah menyiapkan roadmap rencana aksi dalam rangka penyiapan transisi pengelolaan air bersih dari operator swasta kepada PAM Jaya untuk memastikan tidak terjadi gap layanan kepada pelanggan.

Pada tahun 2026, pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses air minum perpipaan hingga 89,02% (delapan puluh sembilan koma nol dua persen) dan menurunkan tingkat kebocoran NRW menjadi 40% (empat puluh persen). Diharapkan pada tahun 2030, akses ini dapat mencapai target 100% (seratus persen) sebagaimana amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melalui penurunan NRW baik fisik maupun komersial, pembangunan SPAM Regional (Jatiluhur, Karian-Serpong, Buaran III, dan lainnya), pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (Pesanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota, dan lainnya), serta peningkatan tata kelola air di Jakarta. Perhatian tersendiri juga diberikan kepada penyediaan layanan air bersih di daerah krisis air seperti kampung prioritas (diantaranya Rawa Timur, Guji Baru, Kali Sekretaris, Blok Empang, Enceng, dan Kerang Hijau) melalui pemberian subsidi yang memperhatikan keterjangkauan masyarakat dan keuangan daerah. Prioritas peningkatan layanan akses air bersih lainnya yaitu wilayah Kepulauan Seribu, khususnya pulau-pulau berpenduduk yang akan ditingkatkan kapasitas pengolahan air bersihnya dengan teknologi yang tidak terbatas pada teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) disertai peningkatan tata kelola dan alih kelola SWRO tersebut oleh PAM Jaya.

Pemerintah juga mengupayakan peningkatan sanitasi layak sebagai bentuk pemenuhan pelayanan dasar melalui peningkatan pengelolaan sektor air limbah dan persampahan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan cakupan layanan air limbah dari 21,26% (dua puluh satu koma dua puluh enam persen) menjadi 24,17% (dua puluh empat koma tujuh belas persen) pada tahun 2026. Peningkatan cakupan pelayanan ini diupayakan dengan mengakselerasi penetapan dan implementasi kebijakan pengelolaan limbah domestik. Kebijakan tersebut diantaranya; pembangunan 50 (lima puluh) SPALD komunal, peningkatan tata kelola dan alih kelola 12 (dua belas) SPALD komunal termasuk SPALD komunal di Kepulauan Seribu ke PD PAL Jaya, subsidi pengolahan air limbah, dan pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS) (Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta, 2022).

Tabel 3.6.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Susenas BPS	Persen	65,41	65,97	70,03	81,95	89,02
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan								
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun							
	a. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas BPS	Persen	79,13	80,37	82,45	84,53	86,60
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Susenas BPS	Persen	92,79	95,62	97,16	97,82	98,53
	c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	Susenas BPS	Persen	0,59	0,13	0,12	0,11	0,1
	d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T		Persen	21,40	23,09	25,25	26,59	28,01
	e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja		Persen	3,14	3,15	3,16	3,17	3,18
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	KLHK	Indeks	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25



Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.													
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.													
01:02:02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	JAKARTA	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	11452856857		JAKARTA	DINAS KESEHATAN
1:03:02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air	Dokumen	1	1	1	1	2532500000	APBD	Jakarta	DINAS SUMBER DAYA AIR
1:03:03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	2	1	1	1	1414000000	APBD	Jakarta	DINAS SUMBER DAYA AIR
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	6,4	7,5	7,5	7,5	38000000000		Jakarta	
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit	16	16	18	16	1227802219655		Jakarta	
3:29:02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air	Dokumen	1	1	1	1	1600000000	APBD	Jakarta	DINAS SUMBER DAYA AIR
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan	Laporan	1	1	1	1	62168000000		Jakarta	
02:11:02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen	7	6	6	6	13219823723	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap	Dokumen	9	9	9	9	70116713063	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

02:11:06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan	Dokumen	4	4	4	4	1598379480	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan,	Laporan	1631	1657	1688	1714	5848288382		Jakarta	
02:11:10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang	Dokumen	12	12	12	12	942038029	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan													
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun													
01:02:02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	415690000	APBD	JAKARTA	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	11452856857		JAKARTA	
1:03:05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen	5	5	5	5	26116000000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	0	0	0	23	3077496000000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	2	3	3	3	15000000000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	40	100	200	100	4477000000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	264	156	108	108	7933440000	APBD	Jakarta	

1.03.06.1.01	Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	120	120	120	120	1198214887182	APBD	Jakarta	DINAS SUMBER DAYA AIR
		1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	350	350	350	350	742634568298	APBD	Jakarta	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1600000000	APBD	Jakarta	
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	62168000000	APBD	Jakarta	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	7	5	3	3	4500000000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Pe	Jumlah penambahan	Rumah	1106	1900	2727	3361	95644300000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2000	2000	2000	2000	80000000000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok	22	29	33	40	12400000000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	67	84	101	118	130166399239	APBD	Jakarta	
		1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	6	6	6	6	29000000000	APBD	Jakarta	
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	9850	9800	9800	9800	594276527694	APBD	Jakarta	
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau													
6.6.1* Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu: Indeks Kualitas Lahan													
02:11:02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													

2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	7	6	6	6	13219823723	APBD	Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9	9	9	9	70116713063	APBD	Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	4	4	4	4	1598379480	APBD	Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Peretujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1631	1657	1688	1714	5848288382	APBD	Jakarta	
02:11:10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	12	12	12	12	942038029	APBD	Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka	Luas RTH yang Dikelola	Ha	1409	1421	1433	1445	7045016139706	APBD	Jakarta	DINAS
		2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	147	147	147	147	495588666657	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
03:28:03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan	Luas Hutan yang Dilakukan	Ha	202,86	202,86	202,86	202,86	864200000	APBD	Jakarta	DINAS
		3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	1680000000	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	4	3	3	3	189963160539	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
03:28:06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)													
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas	3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	600000000	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Tujuan 7

Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 (tujuh) Energi Bersih dan Terjangkau menekankan pentingnya pengembangan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak negatif pada lingkungan.

Berdasarkan Metadata Edisi II (dua) Tujuan 7 (tujuh) memiliki 1 (satu) target yang dapat dilaksanakan di level provinsi, yaitu memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern pada tahun 2030. 3 (tiga) indikator digunakan untuk mengukur capaian tersebut, yaitu:

7.1.1* Rasio elektrifikasi;

7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita; dan

7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.



Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan akan energi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mewujudkan sistem energi yang bersih, efisien, dan terjangkau. Untuk mencapai hal tersebut, strategi kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan memperluas pemanfaatan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan melakukan pemerataan terhadap akses energi.

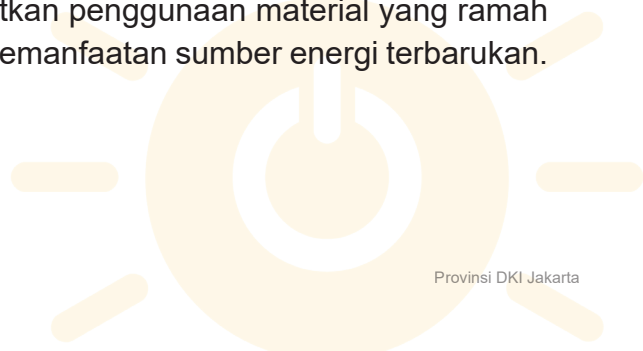
Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya akan menjadi salah satu fokus utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim, di mana di dalamnya terdapat rencana aksi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap bagi bangunan milik pemerintah dan swasta, serta pengembangan PLTS komunal bagi rumah tangga.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan upaya transisi menuju energi bersih dengan program elektrifikasi bus Transjakarta serta pembangunan sarana dan prasarana kendaraan listrik. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2022 tentang Pedoman Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Layanan Angkutan Transjakarta. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi menargetkan percepatan penggunaan 10.047 (sepuluh ribu empat puluh tujuh) kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam layanan angkutan Transjakarta sampai dengan tahun 2030 serta penyediaan infrastruktur pendukungnya.

Dalam rangka mendukung transisi menuju pemanfaatan energi bersih, Pemerintah Provinsi juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang mencerminkan dukungan Pemerintah Provinsi terhadap kebijakan nasional serta mendorong penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan.

Selanjutnya, dalam meningkatkan efisiensi energi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong penerapan prinsip bangunan gedung hijau dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau, yang mengatur persyaratan, insentif, pembinaan, dan pengawasan yang diperlukan dalam pelaksanaan program bangunan gedung hijau di Provinsi DKI Jakarta. Prinsip bangunan hijau melibatkan penggunaan material yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efisien, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan.



Dalam meningkatkan pemerataan akses terhadap energi bersih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan pengembangan energi dan ketenagalistrikan di wilayah Kepulauan Seribu (Bappeda, 2022). Hal ini juga terkait dengan visi menjadikan Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi unggulan wisata nasional, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru. Hingga 2022, dari 110 (seratus sepuluh) pulau dalam wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, baru 15 (lima belas) pulau yang sudah terhubung dengan jaringan kabel laut. Kapasitas listrik di Kepulauan Seribu direncanakan akan ditambah menjadi sebesar 16 MW (enam belas megawatt) yang diprioritaskan untuk memasok listrik di pulau-pulau yang berpenghuni.



Tabel 3.7.1. Target dan Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	1. PLN; 2. Dinas ESDM Provinsi; 3. BPS.	%	100	100	100	100	100
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	1. Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM; 2. BPS	kWh	3.237	3.406	3.508	3.614	3.722
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	<u>BPS</u>	%	95,59	100	100	100	100

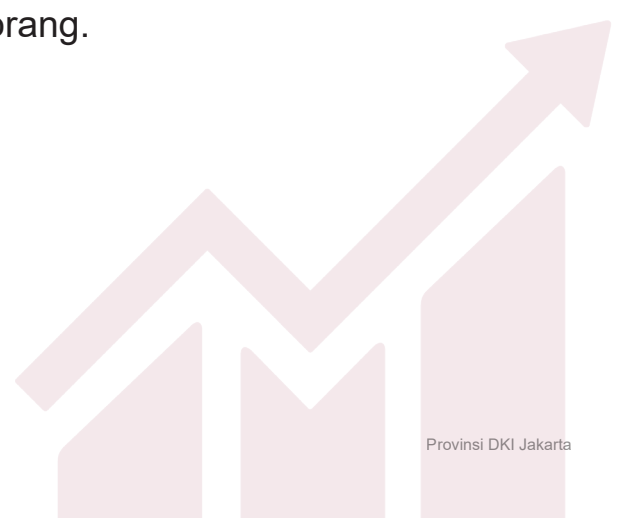


Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026						
(1)			(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Indikator 7.1.1* Rasio elektrifikasi													
03.29.06. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	1	2	2	2	18827000000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASIDAN ENERGI
Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita													
05.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	3207335340	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1111004916	APBD	DKI Jakarta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1033049035	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASIDAN ENERGI

Tujuan 8

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 8 (delapan) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendorong akses terhadap pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat. Tujuan ini menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak serta meningkatkan produktivitas ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor potensial. Selain itu, Tujuan 8 (delapan) juga menekankan pentingnya memperbaiki kondisi kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja, serta mendorong akses yang lebih luas terhadap peluang-peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Tujuan 8 (delapan) menjadi kunci penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua orang.



Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 8 (delapan) di Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata Edisi II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi, sehingga hanya terdapat 8 (delapan) target dan 12 (dua belas) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

- 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% (tujuh persen) pertumbuhan produk domestik brutoper tahun di negara kurang berkembang;
- 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya;
- 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan;
- 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya;
- 8.6 Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan;
- 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya;
- 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal;
- 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua

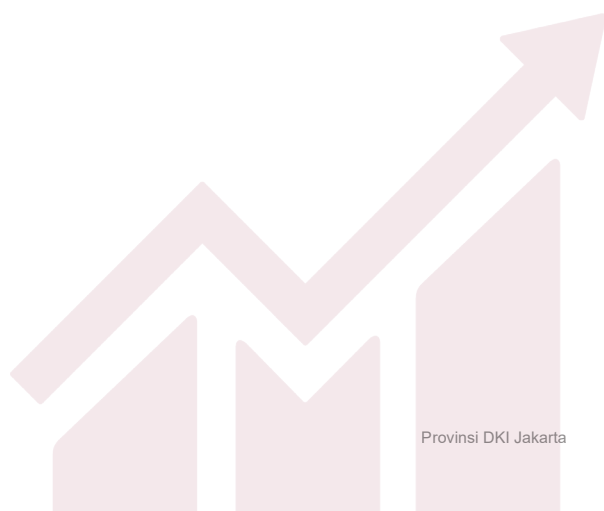
Dalam pencapaian Tujuan 8 (delapan), kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berfokus pada peningkatan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja dan memperluas akses terhadap kesempatan kerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memfasilitasi terlaksananya pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Pemerintah Provinsi akan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan dan industri untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya, untuk memastikan inklusivitas, Pemerintah Provinsi akan mengimplementasikan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghilangkan kesenjangan dalam akses terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi.

Dalam rangka memberdayakan ekonomi lokal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong inovasi dan kewirausahaan. Program dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi akan diperkuat, termasuk penyediaan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas, termasuk akses ke pasar global melalui program pengembangan ekspor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi di Provinsi DKI Jakarta serta menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berfokus pada pembangunan praktik bisnis yang berkelanjutan. Upaya ini melibatkan penerapan prinsip ekonomi sirkular, pengembangan perdagangan yang kompetitif, dan penciptaan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan bisnis dan inovasi berbasis pengalaman serta nilai tambah, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.



Untuk memperkuat peran sektor-sektor tersebut, Pemerintah Provinsi akan berfokus pada peningkatan manajemen dan pengelolaan destinasi pariwisata, termasuk pemeliharaan dan penyempurnaan infrastruktur yang mendukung pengalaman wisatawan. Selain itu, upaya akan difokuskan pada peningkatan mutu layanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengunjung. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pariwisata Jakarta sebagai tujuan wisata yang menarik dan berkualitas.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi akan meningkatkan upaya pemasaran dan promosi destinasi pariwisata Jakarta secara sinergis, inovatif, dan interaktif. Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses akan membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka dan merasakan pengalaman positif di Jakarta.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, penerapan sertifikasi untuk usaha pariwisata akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan standar pelayanan dan kualitas produk yang ditawarkan. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor ini juga akan didorong melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang andal dan siap menghadapi perkembangan industri.

Tabel 3.8.1. Target dan Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK)	BPS	%	4,55	4,45	4,68	4,72	4,76
8.1.1.(a)	PDRB per kapita (ADHB)	BPS; Bappenas	Rupiah	298.359.970	317.259.570	340.745.062	364.981.610	390.516.366
8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	2,27	2,14	2,31	2,67	2,68
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	%	36,82	39,30	39,82	40,36	40,90
	Laki-Laki		%	N/A	36,70	37,19	37,69	38,20
	Perempuan		%	N/A	43,48	44,06	44,65	45,25
	Pertanian		%	N/A	53,95	54,68	55,41	56,16
	Manufaktur		%	N/A	24,70	25,03	25,37	25,71
	Jasa-Jasa		%	N/A	42,14	42,71	43,28	43,86
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah/jam	32.685	33.743	35.219	36.606	37.906
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	7,18	7,00	7,07	6,54	6,12
	Laki-Laki		%	7,50	7,40	7,43	6,81	6,39
	Perempuan		%	6,65	6,50	6,60	6,23	5,78

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	Usia 15-24		%	27,57	28,03	28,77	29,41	29,98
	Usia 25+		%	3,75	5,65	5,76	5,85	5,94
8.5.2.(a)*	Persentase setengah pengangguran	BPS	%	2,71	2,42	2,36	2,31	2,26
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	17,19	17,09	17,00	16,86	16,69
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.								
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	0,61	0,80	1,10	1,08	1,03
	Laki-Laki		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Perempuan		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Usia 10-24		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Usia 13-14		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Usia 15-17		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS	orang	56.008.041	56.000.000	60.000.000	64.284.000	68.873.878
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia; Kemendagri	Unit	191	183	180	177	174
8.10.2*	Jumlah kantor bank per 100.000	Bank Indonesia	Unit	6	5	5	5	5



Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK)													
03.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	15	15	15	15	14400378365	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	250	250	250	250	14400378365	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	100	100	100	100	2320500000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	13060	13222	13393	13572	124817583478	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	7387500000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	20	25	30	35	1300000000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	70	70	80	80	3642061870	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
03.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	8	8	8	8	215391643784	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1	767773341	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	22	22	22	22	283893033565	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	13	13	13	42097957731	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	1	1	4524790161	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

03.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	100	100	100	100	1302295649	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	1940816961	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	8	8	8	8	18160943387	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	45584534404	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	45	45	45	45	307337336483	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	6	6	6	6	17181222967	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
04.01.06. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	2	2	2	640053563	APBD	DKI Jakarta	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA
02.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													

2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	22552006601	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB)													
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	70	70	80	80	3642061870	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	20	25	30	35	1300000000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	7387500000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	15	15	15	15	14400378365	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	250	250	250	250	14400378365	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	100	100	100	100	2320500000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	13060	13222	13393	13572	124817583478	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	100	100	100	100	1302295649	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	1940816961	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	8	8	8	8	18160943387	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	45584534404	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	45	45	45	45	307337336483	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	6	6	6	6	17181222967	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	8	8	8	8	215391643784	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1	767773341	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	22	22	22	22	283893033565	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	13	13	13	42097957731	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	1	1	4524790161	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
02.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													

2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	22552006601	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
04.01.06. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	2	2	2	640053563	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
8.2.1* Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.													
02.07.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	1	1	399600000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin													
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	1000	1000	1000	17032872944	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	1	908666833	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	259507944169	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja													
03.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													

3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	700	700	700	700	4927258396	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	100	100	100	100	703894057	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	100	100	100	226109520	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	2325368316	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	259507944169	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur													
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													

2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	100	100	100	218069452	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	500	500	500	500	440713583	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	1000	1000	1000	17032872944	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	1	908666833	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	1	1	399600000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	7387500000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	358051167878	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	259507944169	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													

2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	22552006601	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
8.5.2.(a)* Persentase setengah pengangguran													
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	100	100	100	218069452	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	1000	1000	1000	17032872944	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	1	908666833	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	1	1	399600000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													

2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	358051167878	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).													
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	500	500	500	500	440713583	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	1000	1000	1000	17032872944	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	1	908666833	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	259507944169	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur													
03.26.03. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN													
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	250	250	250	250	278460000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara													
03.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													

3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	8	8	8	8	215391643784	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1	767773341	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	22	22	22	22	283893033565	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	13	13	13	42097957731	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	100	100	100	100	1302295649	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	1940816961	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	8	8	8	8	18160943387	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	45584534404	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	Lokasi	45	45	45	45	307337336483	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	6	6	6	6	17181222967	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	1	1	4524790161	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
02.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	6	4	0	0	487305007230	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	3	1	3	1	22055494996	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	48795708628	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan 9

Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 (sembilan) berfokus pada industri, inovasi, dan infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur yang tangguh, promosi industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi untuk meningkatkan kinerja industri.



Berdasarkan Metadata Edisi II (dua) dan ketersediaan data di level daerah, terdapat 2 (dua) target dan 6 (enam) indikator yang akan digunakan dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua;
- 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Untuk mendorong pencapaian Tujuan 9 (sembilan), upaya Pemerintah Provinsi akan berfokus pada penyediaan infrastruktur mobilitas yang terintegrasi, pengembangan industri yang inklusif, serta pengembangan inovasi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengedepankan strategi proaktif dalam membangun infrastruktur mobilitas kota yang terintegrasi. Salah satu strategi kunci yang akan diterapkan adalah pengembangan kota berorientasi transit (*Transit-Oriented Development/TOD*). Pendekatan ini akan memainkan peran vital dalam merancang lingkungan perkotaan yang memungkinkan warga Jakarta untuk lebih bergantung pada sistem transportasi umum.

Selain itu, perluasan dan pemeliharaan jaringan transportasi, termasuk transportasi umum yang efisien dan berkelanjutan, akan menjadi prioritas dalam rangka mengurangi kemacetan dan memastikan mobilitas yang lancar bagi warga Jakarta. Pada 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) fase 2 (dua) yang membentang sepanjang 11,8 km (sebelas koma delapan kilometer) dari Bundaran HI hingga Ancol Barat (MRT Jakarta, n.d.). Di samping itu, pembangunan jalur *Light Rail Transit* (LRT) fase 2 (dua) juga akan dilakukan untuk menghubungkan Kelapa Gading dengan Jakarta International Stadium (LRT Jakarta, 2022), memberikan alternatif transportasi efisien di utara Jakarta. Integrasi *Bus Rapid Transit* (BRT), MRT dan LRT dapat menciptakan sistem transportasi massal yang terintegrasi, memperbaiki mobilitas dan meminimalkan dampak lingkungan. Hal ini merupakan langkah penting menuju masa depan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan di Jakarta.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan difokuskan pada koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri serta peran masyarakat. Selain itu, pembangunan sumber daya industri juga menjadi prioritas Pemerintah Provinsi dalam upaya mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan. Dengan kerja sama dan koordinasi yang kuat, Jakarta berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkelanjutan bagi perkembangan industri di DKI Jakarta.

Dalam upaya mendorong pengembangan inovasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan serangkaian program dukungan yang bertujuan untuk memajukan penelitian dan pengembangan, sekaligus menjalin kemitraan erat dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pengembangan pusat-pusat inovasi dan kerjasama seperti *Jakarta Future City Hub*, dan penyelenggaraan event apresiasi terhadap inovasi warga Jakarta seperti *Jakarta Innovation Days*. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama yang kuat untuk menghasilkan inovasi yang berdampak positif pada berbagai sektor ekonomi di Jakarta.

Tabel 3.9.1 Target dan Indikator Tujuan Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	
Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur									
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	1. Kementerian Perhubungan; 2. BPS							Dinas Perhubungan
	Jumlah Penumpang:								
	i. kendaraan penumpang (berbasis jalan)		orang	989.862.480	955.934.635	1.080.852.168	1.119.774.375	1.180.864.790	
	ii. kereta api (berbasis rel)		orang	331.114.860	319.713.720	372.320.454	394.353.665	419.078.035	
	iii. pesawat		orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	iv. kapal (angkutan perairan)		orang	1.070.545	805.920	870.348	934.765	1.006.670	
	Jumlah Barang:								
	i. kereta api		Kg	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ii. pesawat		Kg	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
iii. kapal	Kg	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	1. Kementerian Perhubungan; 2. BPS; 3. PT. Angkasa Pura	Bandara	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Unit	1	5	7	9	11	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Kementerian Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara ku									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	BPS	%	11,72	11,79	12,05	12,49	13,03	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	5,95	6,50	7,00	7,50	8,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026						
(1)			(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi													
02.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	2	1	2	1	15710455909	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	5064	5220	5370	5471	1223375297554	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	84	84	84	857059247028	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	60	60	60	60	862731429	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	610	324	324	280	67849456758	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
02.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													

2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	2	2	2	2	31453514584	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
02.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Laporan	12	12	12	12	41127798521	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	6957	8820	11021	10980	45475220894676	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
9.1.2.(b) Jumlah Pelabuhan penyebrangan													
02.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	6	4	0	0	487305007230	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	3	1	3	1	22055494996	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	48795708628	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	2	2	2	2	31453514584	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN

2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit	2	1	1	1	169506641134	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB													
03.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	104768806144	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	424251109392	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI													
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	30	30	30	255920984	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur													
03.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	104768806144	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	424251109392	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI													

3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	30	30	30	255920984	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
--------------	--	-----------------	---	--	---------	----	----	----	----	-----------	------	-------------	--

Tujuan 10

Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 (sepuluh) Berkurangnya Kesenjangan bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam berbagai aspek, baik di dalam maupun antar negara. Tujuan ini mengakui pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap peluang dan sumber daya, serta perlunya mengatasi disparitas yang ada untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil.

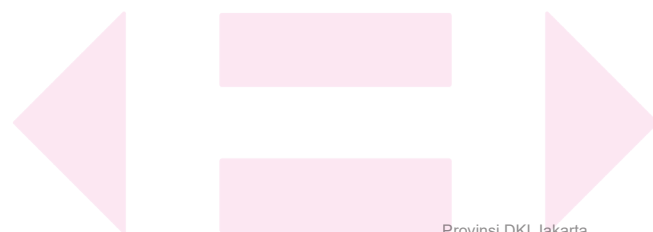
Target dan arah kebijakan pencapaian Tujuan 10 (sepuluh) di Provinsi DKI Jakarta mengikuti panduan Metadata Edisi II (dua) dan menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi, sehingga diputuskan hanya terdapat 4 (empat) target dan 7 (tujuh) indikator yang akan digunakan dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% (empat puluh persen) dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional;
- 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya;
- 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut;
- 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Dalam rangka mendorong capaian Tujuan 10 (sepuluh), upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berfokus pada peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial, peningkatan efektivitas perlindungan dan jaminan sosial, pembangunan berbasis inklusivitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga memiliki fokus pada pengurangan kesenjangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemutakhiran database dan penilaian secara berkala untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini terkait kelompok masyarakat rentan. Selain itu, pelatihan, bimbingan teknis, dan penghargaan akan diberikan kepada penyelenggara kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas mereka dalam memberikan pelayanan yang efektif (Bappeda, 2022).



Untuk memastikan efektivitas layanan perlindungan dan jaminan sosial, pemerintah akan berfokus pada peningkatan kualitas layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran berkala akan dilakukan untuk memastikan data yang lengkap dan akurat, sehingga layanan dapat diberikan kepada penerima manfaat dengan tepat sasaran. Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan juga akan diimplementasikan untuk menjamin efektivitas program tersebut.

Dalam rangka mendorong pembangunan berbasis inklusivitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan difokuskan pada pemerataan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kelompok tersebut. Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka, peluang akses terhadap pekerjaan yang layak dan produktif akan terbuka lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan dukungan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi melalui program pendampingan, pelatihan, dan akses terhadap pembiayaan (Bappeda, 2022). Hal tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh dan bersaing dalam pasar yang lebih luas.

Selanjutnya, dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memastikan bahwa wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi akan mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga kesenjangan antara daerah-daerah tersebut dengan wilayah lain dapat dikurangi.

Tabel 3.10.1 Target dan Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Rasio Gini	BPS	Nilai	0,412 (Sep)	0,411	0,410	0,410	0,409
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	BPS	%	4,61	4,13	3,79	3,25	2,91
10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	<u>Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).</u>	%	0,75	N/A	N/A	N/A	N/A
	Laki-Laki		%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Perempuan		%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Penyandang difabilitas		%	N/A	N/A	N/A	N/A	
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	Aduan	30	N/A	N/A	N/A	N/A
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kasus	687	N/A	N/A	N/A	N/A
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan / Dokumen	0	0	0	0	0
10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan; BPS	%					
	Formal				100	112,04	112,04	112,04
	Informal				30,43	32,51	34,73	37,11



Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026				
(1)					(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
10.1.1* Rasio Gini													
01.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	4217671527348	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	17105630198	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	7387500000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	358051167878	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	100	100	100	226109520	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	2325368316	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional													
01.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	17105630198	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	500	500	500	500	440713583	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	10	10	10	10	1783020912	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	100	100	100	226109520	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	2325368316	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	358051167878	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
07.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI													
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	1040000000	APBD	DKI Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	25729704	APBD	DKI Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	92820000	APBD	DKI Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas													
02.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	259507944169	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	8	8	8	8	352728971447	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	500	500	500	500	440713583	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	153977969762	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	200	200	200	200	1896869520	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	2325368316	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	100	100	100	226109520	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	7387500000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	358051167878	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	4217671527348	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	17105630198	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
01.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	51	33	43	43	53114174	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	20	20	297557736	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1591	1586	1596	1606	15038324016	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir													
02.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	11	11	11	15811406017	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
04.01.05. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	44	46	48	50	2846400000	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
07.03.02. PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN													
7.03.02.6.02	Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian	7.03.02.6.02.01	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Orang	350	350	400	400	257170960	APBD	DKI Jakarta	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
7.03.02.6.02	Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian	7.03.02.6.02.02	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Dokumen	2	2	2	2	39240000	APBD	DKI Jakarta	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir													
02.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	4005	4405	4845	5329	10204166700	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
02.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	275	280	285	290	1609614825	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1352	1367	1382	1397	37877941882	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	2098429500	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	6729888008	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	1686880000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	3784256700	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Tujuan 11

Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 (sebelas) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan bertujuan untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pada akses perumahan yang aman dan terjangkau serta memperbaiki permukiman kumuh. Termasuk juga di dalamnya memasukkan isu transportasi umum, ruang hijau untuk publik dan peningkatan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif.



Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 11 (sebelas) di DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata Edisi II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi, sehingga hanya terdapat 9 (sembilan) target dan 13 (tiga belas) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh;
- 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
- 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia;
- 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
- 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota;
- 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
- 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030;
- 11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.

Target-target ini sudah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu pada program prioritas daerah yang termanifestasikan dalam dimensi lingkungan-bangun (built-environment). Dimensi tersebut dielaborasikan dalam tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan yang secara khusus masuk dalam sasaran Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas; Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon; Peningkatan stabilitas dan ketahanan kota; dan Perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit.

Adapun untuk mencapai sasaran Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas terdapat beberapa strategi mencakup

1. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, dan;
3. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau;
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga;
5. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit;
6. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan;
7. Meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan;
8. Merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian; Memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik;
9. Memperkuat kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi;
10. Memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya;

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026



Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Dalam rangka memenuhi persyaratan hunian yang layak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah berperan sebagai penyedia dan fasilitator perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat. Hal ini dilakukan dengan berbasis kawasan dan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga membentuk tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan akses bagi semua orang terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta mendukung hak atas perumahan bagi kelompok rentan dan masyarakat dengan daya beli terbatas.

Kriteria hunian layak menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup 4 (empat) aspek, yaitu luas tempat tinggal minimal 7,2 m²/capita (tujuh koma dua meter persegi per kapita), akses terhadap air minum yang layak, akses terhadap sanitasi yang layak, dan ketahanan bangunan yang meliputi komponen atap, lantai, dan dinding. Pada tahun 2021, hanya 40% (empat puluh persen) rumah tangga di Jakarta yang memenuhi kriteria hunian layak menurut BPS. Salah satu tantangan adalah ketahanan bangunan yang masih rendah, terutama terkait penggunaan atap asbes yang belum memenuhi standar kesehatan.

Untuk meningkatkan hunian layak, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti mengelola rusunawa dan rusunami, memfasilitasi kepemilikan rumah susun melalui talangan uang muka, dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan prasarana dan sarana pada kawasan kumuh serta penerapan konsolidasi tanah vertikal. Pemerintah juga bertanggung jawab melindungi penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun yang layak, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Untuk membiayai penyediaan perumahan rakyat, pemerintah menggunakan beberapa potensi skema pendanaan, seperti APBD, APBN, instrumen perizinan pemanfaatan ruang, peran serta pihak swasta, dan skema pendanaan inovatif lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menargetkan penambahan unit rusunawa di beberapa lokasi, termasuk pembangunan rumah susun di kampung-kampung prioritas dan rumah susun terjangkau di Pantai Kita yang merupakan tanggung jawab pihak swasta. Pemerintah juga memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah melalui untuk masyarakat yang memenuhi persyaratan program tersebut.

Penataan kawasan kumuh perkotaan juga menjadi fokus dalam upaya perbaikan hunian. Pada tahun 2022, terdapat 225 (dua ratus dua puluh lima) RW kumuh atau 11,29% (sebelas koma dua puluh sembilan persen) dari total luas Jakarta. Pemerintah berupaya menangani masalah ini dengan melibatkan kolaborasi dengan warga dan stakeholders lainnya, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait perumahan kumuh dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dukungan sektor pertanahan juga menjadi penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan. Beberapa upaya pada sektor pertanahan yang dilakukan antara lain adalah peningkatan sertifikasi bidang tanah di kampung-kampung kota, inventarisasi dan penyelesaian administrasi pertanahan, penataan aset, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah oleh masyarakat (Rencana Strategis DPRKP, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka program prioritas tahun 2023-2026 yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Pengembangan Perumahan;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
6. Program Penatagunaan Tanah;

Transportasi Berkelanjutan

Salah satu akar penyebab kemacetan di Jakarta adalah pola pergerakan yang tidak efisien, pembangunan kota yang berorientasi pada kendaraan bermotor, dan kurangnya perhatian terhadap aksesibilitas dalam pengembangan hunian. Akibatnya, penduduk harus menghabiskan banyak waktu untuk bergerak menuju pusat-pusat aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, kota-kota besar lain di dunia telah mengadopsi konsep 15 minutes city tetapi di Jakarta, waktu rata-rata perjalanan untuk mencapai tempat dan kegiatan adalah 90 (sembilan puluh) menit dengan kecepatan kendaraan yang relatif rendah, yaitu 24,91 km/jam (dua puluh empat koma sembilan puluh satu kilometer per jam). Kemacetan ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi, dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta penurunan kualitas udara.

Untuk mengatasi kemacetan tersebut, pemerintah mengusulkan transformasi menyeluruh dengan menggeser paradigma penataan ruang yang lebih berorientasi pada transportasi publik dan selaras dengan rencana pengembangan sistem transportasi. Langkah-langkah yang diambil termasuk menyediakan infrastruktur transportasi publik terintegrasi yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua orang. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus mendorong mobilitas aktif dengan menyediakan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, dan prasarana lainnya yang mendorong masyarakat untuk berpindah dari kendaraan bermotor.

Pemerintah juga merestrukturisasi prioritas pengguna jalan dengan menempatkan pejalan kaki dan pesepeda sebagai prioritas utama, diikuti oleh angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi sebagai prioritas terakhir.

Konsep kota berbasis transit menjadi tujuan jangka panjang dalam penataan ruang Jakarta, seperti yang tercantum dalam RTRW Jakarta 2040 dan RDTR Jakarta 2022-2026, yang akan ditinjau kembali secara berkala. Sasaran ini didukung oleh kebijakan dan strategi di berbagai sektor untuk mencapai 70% (tujuh puluh persen) pemusatan kegiatan dan penduduk di sekitar titik transit, 55% (lima puluh lima persen) perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik, dan lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) penduduk Jakarta terlayani oleh rute angkutan umum yang terintegrasi.

Perwujudan kota berorientasi transit juga melibatkan penetapan sistem pusat pelayanan di simpul-simpul transportasi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan *transit oriented development* (TOD). Kawasan TOD ini memiliki karakteristik kawasan campuran dengan densitas tinggi, menyediakan fasilitas intermodal interchange, hunian, ruang hijau yang memadai, dan elemen lain yang mengutamakan integrasi tata ruang dan transportasi. Beberapa lokasi yang telah direncanakan untuk menjadi kawasan TOD adalah Kawasan Bundaran HI, Tanah Abang, Jakarta International Stadium, dan kawasan potensial lainnya. Pengembangan kawasan TOD ini akan mengacu pada Panduan Rancang Kota (PRK) dan akan dikelola oleh pihak pengelola kawasan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Blok M Dan Sisingamangaraja.

Pemerintah juga secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang serta implementasi program dan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dalam RDTR dan PRK untuk seluruh kawasan TOD dan kawasan prioritas, termasuk di kawasan baru di pesisir utara Jakarta seperti Pantai Kita dan Pantai Maju. Pemerintah berharap bahwa hingga tahun 2026, seluruh prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pengelola di kawasan tersebut telah berfungsi optimal dan mampu berkembang menjadi kawasan yang kompak, tertata baik, hijau, dan berkelanjutan sesuai dengan Panduan Rancang Kota yang telah ditetapkan.

Selain penataan ruang, pengembangan sistem transportasi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan kota berorientasi transit. Saat ini, penggunaan transportasi publik baru mencapai 14,76 persen, yang masih jauh dari target jangka panjang Jakarta. Untuk mencapai target peningkatan penggunaan transportasi publik sebesar 23,01% (dua puluh tiga koma nol satu persen) pada tahun 2026, pemerintah mengimplementasikan *Transportation Demand Management* (TDM) melalui kebijakan push dan *pull strategy*. *Push strategy* mencakup pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, sedangkan *pull strategy* mencakup upaya meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Untuk mendukung kebijakan *pull strategy*, pemerintah terus meningkatkan layanan angkutan umum dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik. Selain itu, program revitalisasi terminal juga dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan terminal dan memanfaatkan aset terminal untuk mendukung layanan transportasi publik massal. Salah satu terminal yang direvitalisasi adalah terminal Kampung Rambutan, yang direncanakan menjadi simpul integrasi transportasi dengan LRT Jabodebek dan rencana MRT Fatmawati-TMII.

Pemerintah juga terus mengembangkan infrastruktur transportasi dengan membangun koridor BRT, jalur MRT, dan jalur LRT untuk meningkatkan pelayanan angkutan publik di Jakarta. Selain itu, pemerintah juga melibatkan BUMD transportasi dalam upaya mendukung pengelolaan transportasi publik dengan dukungan pendanaan melalui subsidi atau *public service obligation* (PSO).

Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta mewujudkan kualitas *complete street*, pencahayaan di kota melalui Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi kebutuhan dasar, terutama untuk mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Dengan kemajuan teknologi, PJU tidak hanya memberikan manfaat pencahayaan, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Transformasi menggunakan lampu PJU berbasis *LED smart system* telah berhasil menghemat energi dan mengurangi emisi gas karbon. Keunggulan lain dari *LED smart system* yakni kemampuannya untuk memonitor lampu PJU secara efisien, akurat, dan real time melalui pusat data, sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan perbaikan. Pemerintah berencana melengkapi 365.700 (tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus) titik pencahayaan kota dengan lampu LED pada tahun 2026.

Selanjutnya, untuk mendukung Jakarta sebagai kota transit modern dan berkelanjutan, penataan jaringan utilitas menjadi prioritas karena perannya sebagai objek vital, prasarana strategis, dan infrastruktur kunci yang dapat mendorong percepatan sektor digital menuju Jakarta 4.0 (*four point zero*). Pemerintah telah mengambil langkah awal dengan menurunkan jaringan utilitas kabel udara ke bawah tanah di beberapa lokasi prioritas yang berkolaborasi dengan revitalisasi trotoar, seperti di Kawasan Kemang, Cikini, dan lainnya. Namun, secara umum, penempatan jaringan utilitas masih berada di permukaan jalan, yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan merusak estetika kawasan.

Maka dari itu, pemerintah terus berusaha melakukan penataan melalui pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang dapat digunakan untuk menempatkan berbagai utilitas kota, seperti kabel listrik, jaringan telekomunikasi, perpipaan air, gas, limbah, dan lain-lain. Hingga tahun 2026, rencananya akan dibangun SJUT sepanjang 617.250 m (enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana induk sektoral terkait. Penataan ini akan diselaraskan dan terintegrasi dengan rencana penataan jalur pejalan kaki untuk menciptakan kondisi ruang jalan yang ideal dan mendukung konsep *complete street* di Jakarta. Namun, mengingat kebutuhan pendanaan yang signifikan, pemerintah akan terus mendorong sumber pendanaan inovatif dan kolaboratif melalui *creative financing* dan pendanaan non-APBD.

Berdasarkan penjelasan di atas, program prioritas dalam RPD (2022) tahun 2023-2026 yang mendukung sasaran ini diantaranya; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Pengelolaan Pelayaran; Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Pelestarian Warisan Budaya

Pada isu cagar budaya, salah satu langkah yang dilakukan pemda adalah dengan pendayagunaan warisan budaya secara berkelanjutan yang dilakukan melalui revitalisasi dan aktivasi cagar budaya. Saat ini, Jakarta memiliki 256 (dua ratus lima puluh enam) objek budaya yang meliputi bangunan, struktur, tempat bersejarah, dan kawasan. Di samping itu, terdapat 40 (empat puluh) museum yang sudah memiliki nomor pendaftaran nasional. Tempat-tempat bersejarah ini memiliki potensi untuk direvitalisasi melalui pemakaian ulang yang adaptif (*adaptive reuse*), guna memunculkan aktivitas baru yang mendukung upaya pelestarian. Contoh dari pembaharuan yang telah dijalankan adalah perubahan eks gedung kodim menjadi Taman Benyamin Sueb.

Ketahanan Kota

Berdasarkan sejarah kebencanaan di Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa setidaknya terdapat 8 (delapan) jenis ancaman bencana, yaitu: Banjir; Kebakaran Gedung dan Pemukiman; Epidemik dan Wabah Penyakit; Konflik Sosial; Gelombang Ekstrem dan Abrasi; Kegagalan Teknologi; Cuaca Ekstrem; Gempa Bumi.

Merujuk pada penjelasan tentang pengarusutamaan TPB dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, pada isu kebencanaan (dilansir dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah), terdapat 3 (tiga) strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diantaranya:

Pertama, memaksimalkan dan mengintegrasikan upaya Pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana menjadi tolok ukur yang utama dalam mewujudkan kota dan masyarakat tangguh bencana. Pencapaian ini harus meningkatkan kapasitas masyarakat Jakarta terutama yang berada di wilayah rentan terhadap bencana, menyediakan fasilitas publik yang memadai, membentuk kelurahan tangguh bencana serta pemberdayaan masyarakat, sehingga arah kebijakan mencapai kota dan masyarakat yang berketahanan terhadap bencana adalah:

- Menyusun dan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara lintas sektoral dan terintegrasi (kolaborasi pentahelix);
- Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat;
- Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap risiko/ancaman bencana.

Ketahanan Kota

Kedua, optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana. Penanganan darurat bencana dan pasca bencana dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait melalui koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta yang diawali pelaksanaan asesmen untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana. Pada pengendalian pasca bencana juga dilaksanakan asesmen untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kerugian untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait, sehingga arah kebijakan adalah:

- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Meningkatkan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana;
- Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan logistik;
- Mengoptimalkannya pengendalian ketika terjadi bencana;
- Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana.

Ketiga, Peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu, arah kebijakan terkait juga termasuk dalam peningkatan ketahanan bencana melalui peningkatan kapasitas daerah terkait penanggulangan bencana dan meningkatkan edukasi masyarakat terkait perubahan iklim dan pencemaran.



Tabel 3.11.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS	Persen	40 (2021)	40,36	40,41	40,53	40,90
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik	BPS	Persen	N/A	88	90,3	92,6	95
11.2.1.(b)	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	BPS	Persen	18,45	18,78	20,97	21,87	23,01
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Dinas Kebudayaan	Milliar Rupiah	114,64	351,06	385,92	402,43	446,14
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan								
11.5.1*	1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB (DIB)	Per 100.000 orang	N/A	0	0	0	0
	2. Jumlah korban hilang akibat terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BNPB (DIBI)	Per 100.000 orang	N/A	0	0	0	0
	3. Jumlah korban terluka akibat terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BNPB (DIBI)	Per 100.000 orang	N/A	0	0	0	0

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	4. Jumlah korban mengungsi akibat terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BNPB (DIBI)	Per 100.000 orang	N/A	0	0	0	0
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	BNPB	Rasio	N/A	0	0	0	0
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Dinas Lingkungan Hidup	%	99	99	99	100	100
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM ₁₀	Dinas Lingkungan Hidup	µg/m ³	58,47	58,42	58,37	58,32	58,27
	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM _{2,5}	Dinas Lingkungan Hidup	µg/m ³	37,71	37,70	36,69	36,68	36,67
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	66,52	67,02	67,52	68,02	68,52
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Ha	1.409	1.421	1.433	1.445	1.457
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.								
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	DCKTRP	%	100	100	100	100	100

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	100	100	100	100
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.								
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	%	100	100	100	100	100



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026						
(1)			(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh													
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	3	3	2	1.750.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan	Jumlah Kajian Pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kajian	9	9	10	10	27.250.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
		1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan	Jumlah Sengketa Perumahan dan Rumah Susun diselesaikan	Perkara	18	20	22	24	27.250.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	7.495	7.445	7.472	8.935	2.322.981.325.275	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	395	382	3.400	3.786	791.279.140.863	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01:04:03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	453	0	0	150	500.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kajian Skema Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	0	1	0	0	500.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Lokasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Lokasi	3	1	1	3	500.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	0	1	0	500.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	1	1	0	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01:04:05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	29	26	15	0	25.774.714.650	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	Lokasi	48	72	53	35	3.249.178.845.396	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau	1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	395	382	3.400	3.786	791.279.140.863	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	2	2	2	2	10.298.506.604	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum													
01:03:10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Penambahan luas pejalan kaki	M2	1.368.594	1.483.594	1.633.594	1.808.594	7.177.467.300.433	APBD	DKI Jakarta	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Penambahan jumlah titik pencahayaan kota	titik	313.042	330.595	348.148	365.701	7.177.467.300.433	APBD	DKI Jakarta	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	30	30	30	30	440.895.000.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M ²	18.000	18.000	18.000	18.000	2.813.462.859.297	APBD	DKI Jakarta	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	107	115	124	134	604.770.581.237	APBD	DKI Jakarta	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	48	51	55	58	1.006.746.357.115	APBD	DKI Jakarta	DINAS BINA MARGA
02:15:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
2.15.02.6.04	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	2.15.02.6.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	3	2	2	2	37.945.591.183	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.6.04	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	2.15.02.6.04.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A yang Dikembangkan	Unit	4	4	4	4	121.494.731.348	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit	14	14	14	14	29.043.956.023	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	7	7	7	7	41.513.000.948	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	12	12	12	12	41.127.798.521	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	6.957	8.820	11.021	10.980	45.475.220.894.676	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
02:15:03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit	2	1	1	1	169.506.641.134	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.													
11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)													
02:22:02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	235	335	435	535	695.375.311.159	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	16	16	17	18	178.629.628.478	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	35	40	45	50	55.920.654.384	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	18	24	30	36	29.678.722.975	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	2.000	2.000	2.000	2.500	52.999.419.237	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2:22:05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	199	223	247	271	7.519.527.758	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	266	276	286	296	2.496.687.500	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	250	300	350	400	28.591.817.971	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	40	50	60	70	290.379.305.989	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	30	35	40	45	21.580.127.949	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	70	70	70	70	12.152.671.382	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2:22:06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	3.910	4.497	5.171	5.947	23.385.552.916	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	342	342	342	342	8.718.859.424	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	38	38	38	38	51.268.797.445	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	3	3	3	3	53.622.029.262	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	2	1	1	2	26.811.500.000	APBD	Jakarta	DINAS KEBUDAYAAN
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan													
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang													
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026						
(1)			(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	4027661736.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	2427600000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	83323076284.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	1634186400.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	1238400000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	6130800000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	1761114000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	831740000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	1634186400.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94.978	94.978	94.978	94.978	32438003111.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	461440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	40071972800.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1	78000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60	314070000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	20480000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	1.200	1.200	1.200	1.200	2.614.960.400	APBD	JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026				
(1)					(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	500	500	500	500	2.800.000.000	APBD	JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
07:01:02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN													
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	6.144.317.540	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	45.014.302.830	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	24.292.202.018	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	10.029.772.645	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	9.681.931.912	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	2.311.520.924	APBD	JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
01:06:04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2.945	2.945	2.945	2.945	235.439.446.632	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	2.945	2.945	2.945	2.945	26.912.994.426	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	68.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	437.084.453	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	144.166.664.064	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1.100	0	6.461	8.432.574.352.107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56.250	56.250	56.250	56.250	8.432.574.352.107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB													
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	4027661736.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	2427600000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	83323076284.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	1634186400.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	1238400000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	6130800000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	1761114000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	831740000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	1634186400.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94.978	94.978	94.978	94.978	32438003111.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	461440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026						
(1)			(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	40071972800.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1	78000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60	314070000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	20480000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	144.166.664.064	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1.100	0	6.461	8.432.574.352.107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56.250	56.250	56.250	56.250	8.432.574.352.107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.													
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya													
02:11:08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	378.000	404.000	429.500	444.000	8.368.297.993	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	2.578.092	2.578.092	2.578.092	2.578.092	8.598.544.897.561	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	10	10	10	14	1.069.937.722.126	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	18	17	17	22	49.222.433.649	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	7	7	7	7	86.863.526.017	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	500	750	1.000	1.250	1.622.980.138	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM10													
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9	9	9	9	70.116.713.063	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	4	4	74.205.495.326	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.2.(b) Indeks kualitas udara													
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9	9	9	9	70.116.713.063	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	4	4	74.205.495.326	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas													
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua													
Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi													
02:11:04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	3	3	4	4	113.428.673.158	APBD	Jakarta	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026						
(1)				(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1.409	1.421	1.433	1.445	7.045.016.139.706	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	147	147	147	147	495.588.666.657	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.													
11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS													
01:03:12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Dokumen	4	5	5	5	15.246.100.000	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	6	6	6	6	19.431.200.000	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	1	2.400.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	8	9	10	11	329.371.289.319	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.													
11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana													
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	4027661736.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	2427600000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	83323076284.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	1634186400.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	1238400000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	6130800000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	1761114000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	831740000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	1634186400.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94.978	94.978	94.978	94.978	32438003111.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	461440000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	40071972800.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1	78000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60	314070000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	20480000000.00	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01:06:04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2.945	2.945	2.945	2.945	235.439.446.632	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	2.945	2.945	2.945	2.945	26.912.994.426	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	68.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	437.084.453	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	2.200.650.900	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	23.474.574.818	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	144.166.664.064	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1.100	0	6.461	8.432.574.352.107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56.250	56.250	56.250	56.250	8.432.574.352.107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.													
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal													
01:03:08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.6.01.08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	120	120	120	120	2.170.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	6.000	6.000	6.000	6.000	100.000.000.000	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Tujuan 12

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 (dua belas) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab bertujuan untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pada upaya untuk mengurangi jejak ekologi dengan melakukan pengelolaan yang efisien dalam sumber daya yang dimiliki bersama.



Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 12 (dua belas) di DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi, sehingga hanya terdapat 4 (empat) target dan 4 (empat) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen;
- 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
- 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali;
- 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Target-target ini sudah diurutkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu pada program prioritas daerah yang termanifestasikan dalam dimensi lingkungan-bangun (built-environment). Dimensi tersebut dielaborasi dalam tujuan “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan” yang secara khusus masuk dalam sasaran pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas dan tercapainya pemulihan ekosistem kota dan pembangunan rendah karbon. Adapun strategi yang termasuk dalam sasaran tersebut diantaranya; optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi.

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Adapun turunan dari strategi di atas diterjemahkan kembali dalam rencana strategis di Perangkat Daerah, pada strategi optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan arah kebijakannya diterjemahkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara/ *Intermediate Treatment Facility*;
2. Optimalisasi pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan prasarana dan sarana pengangkutan sampah;
4. Meningkatkan standar operasional prosedur untuk pengangkutan sampah;
5. Meningkatkan fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai tempat pengolahan sampah terpadu

Kemudian pada strategi pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi, pada rencana strategis perangkat daerah arah kebijakannya diterjemahkan sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan dan kebijakan terkait pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) melalui pengintegrasian TPS 3R
3. Implementasi dan pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3

Pemerintah berusaha mendorong peningkatan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta mengubah sampah menjadi energi alternatif. Namun, kendala seperti kurang optimalnya pengurangan sampah di sumber dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam pemilahan sampah menyebabkan volume sampah yang tinggi. Sehingga, kapasitas tampung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang melebihi batasnya. Untuk mengatasi masalah ini, ada dua strategi utama, yaitu pengurangan sampah sebanyak 30 persen dan penanganan sampah sebanyak 70 persen.



Untuk mencapai pengurangan sampah, beberapa langkah yang diambil meliputi kerjasama pentahelix untuk mengurangi sampah, penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang lebih optimal, pendistribusian makanan berlebih dari hotel, restoran, dan katering, peningkatan efisiensi bank sampah, penerapan Jakarta Recycle Center (JRC), serta pemantauan aliran sampah dari setiap titik hingga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPST. Selain itu, di Kepulauan Seribu, akan diimplementasikan “*Pulauku Nol Sampah.*”

Sementara itu, untuk penanganan sampah, langkah-langkahnya mencakup penjadwalan pengelolaan sampah rumah tangga di seluruh RW, peningkatan penanganan sampah organik di pasar tradisional, pelayanan pengelolaan sampah pada kawasan mandiri sebesar 80% (delapan puluh persen) pada tahun 2026, pembangunan dan operasionalisasi saringan sampah di perbatasan wilayah Jakarta, pendirian 15 (lima belas) unit Tempat Penampungan Sementara (TPS) skala kecamatan, pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA)/Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, percepatan pembangunan FPSA/ITF di Wilayah Layanan Barat, Timur, dan Selatan, serta optimalisasi TPST Bantargebang melalui operasionalisasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), fasilitas pengolahan bahan bakar dari sampah refused derived fuel (RDF) fase 1 (satu) dan 2 (dua), dan landfill mining guna memperpanjang usia pakai TPST Bantargebang. Target tingkat pengelolaan sampah di TPST Bantargebang sebanyak 2.200 ton/hari (dua ribu dua ratus ton per hari) pada tahun 2026, dengan 50% (lima puluh persen) dari output landfill mining dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan 100% (seratus persen) RDF terserap oleh offtaker (Rencana Pembangunan Daerah, 2022, hlm. 365-366).

Adapun daftar peraturan yang mendukung target dalam tujuan 12 (dua belas) konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, diuraikan sebagai berikut;

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang Berketahanan Iklim;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Penanganan Sampah;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan dan Perusahaan.

Tabel 3.12.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen								
12.3.1.(a)	Persentase Sisa makanan	Dinas Lingkungan Hidup	%	49,87	N/A	N/A	N/A	N/A
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	%					
	Persentase pengurangan emisi merkuri dan lepasan merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	%	0 (25,5 kg)	N/A	2 (0,5 kg)	7 (1,8 kg)	13 (3,3 kg)
	Persentase penghapusan alat kesehatan bermerkuri	Dinas Kesehatan	%	0	25	50	100	N/A
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	26,10	27	28	30	30

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Dinas Pendidikan	Unit	573	673	773	873	973



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025	2026							
(1)		(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)			
Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan													
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri													
02:11:05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	14	14	14	14	19229089840	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali													
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang													
02:11:08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	378000	404000	429500	444000	8368297993	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	12	12	12	12	942038029	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	2578092	2578092	2578092	2578092	8598544897561	APBD	Jakarta	
		2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	10	10	10	14	1069937722126	APBD	Jakarta	

2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	18	17	17	22	49222433649	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	7	7	7	7	86863526017	APBD	Jakarta	
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	500	750	1000	1250	1622980138	APBD	Jakarta	
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.													
12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup													
02:11:08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	335	425	515	605	7677300000	APBD	Jakarta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan 13

Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 12 (dua belas) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab bertujuan untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pada upaya untuk mengurangi jejak ekologi dengan melakukan pengelolaan yang efisien dalam sumber daya yang dimiliki bersama.



Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 13 (tiga belas) di DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata Edisi II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi, sehingga hanya terdapat 3 (tiga) target dan 6 (enam) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.
- 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

Target-target ini sudah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu pada program prioritas daerah yang termanifestasikan dalam dimensi lingkungan-bangun (*built-environment*). Dimensi tersebut dielaborasi dalam tujuan “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan” yang secara khusus masuk dalam sasaran pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas dan tercapainya pemulihan ekosistem kota dan pembangunan rendah karbon. Adapun strategi yang termasuk dalam sasaran tersebut diantaranya; optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi.

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Arah kebijakan yang terkait dengan Tujuan 13 (tiga belas) Penanganan Perubahan Iklim dalam RPD 2023-2026 khususnya terkait dengan program prioritas daerah untuk mewujudkan regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan dengan tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.



Jakarta, sebagai kota global, turut berkontribusi dalam mencapai target perubahan iklim yang tertera dalam Perjanjian Paris. Komitmen Jakarta untuk hal ini diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Tujuan dari rencana ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2030 dan mencapai nol emisi pada tahun 2050 di sektor energi, limbah, dan AFOLU (*agriculture, forestry, and other land use*). Selain itu, pemerintah juga bertekad untuk memulihkan ekosistem perkotaan dengan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencakup kualitas air, udara, air laut, dan lahan melalui kerjasama dengan berbagai sektor pendukung, termasuk sumber pendanaan dari APBD, APBN, dan sumber lain yang sah.

Salah satu dampak perubahan iklim di kawasan perkotaan adalah fenomena *Urban Heat Island* (UHI) yang menyebabkan kawasan pusat kota memiliki suhu yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Untuk mengatasi ancaman bencana akibat perubahan iklim, dilaksanakan berbagai tindakan mitigasi dan adaptasi yang merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah

- Mitigasi sektor energi, seperti kampanye penggunaan kendaraan listrik secara bertahap pada armada bus Transjakarta hingga tahun 2026, penyediaan SPKLU, penerbitan regulasi insentif untuk penggunaan dan penyediaan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya), serta pembangunan PLTS *rooftop* pada aset Pemprov DKI Jakarta melalui APBD atau sumber pendanaan lainnya;
- Mitigasi sektor AFOLU, meliputi ekspansi penyerapan emisi gas rumah kaca dengan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), hutan bakau, dan pertanian kota;
- Mitigasi sektor limbah, dengan mengurangi sampah di sumber, meningkatkan pengolahan air limbah, dan mengembangkan sistem pengolahan sampah yang lebih baik;
- Mitigasi sektor industri, dengan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan beralih ke bahan bakar dan gas yang lebih ramah lingkungan;
- Mitigasi sektor lainnya, termasuk menyediakan, mempublikasikan, dan menyosialisasikan hasil perhitungan dan inventarisasi emisi gas rumah kaca, kerjasama dengan sektor swasta, serta kerjasama dengan wilayah sekitar Jakarta dalam mengendalikan polusi udara yang melintasi batas wilayah. Juga, penerapan anggaran iklim (*climate budget tagging*) untuk perencanaan pembangunan rendah karbon;
- Adaptasi, meliputi penyediaan, peningkatan fasilitas, dan manajemen pelayanan kesehatan; sosialisasi program kesehatan di masyarakat; pengelolaan air limbah domestik; pengelolaan air resapan tanah; pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengelolaan energi; peningkatan ketahanan pangan; perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.

Beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Tujuan 15 (lima belas) antara lain:

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012 Tentang Penghematan Energi Dan Air;
- Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim;
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019;
- Instruksi Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pembinaan Program Kampung Iklim;
- Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (di dalamnya disampaikan salah satu kegiatan strategis yang disampaikan yakni mitigasi dan adaptasi bencana iklim);
- Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 terkait Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;



Tabel 3.13.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.2 *	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	BPBD	Dokumen	2	5	5	3	1
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	BPBD	Persen	100	100	100	100	100
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communications</i>	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	1	1
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Dinas Lingkungan Hidup	MTon CO ₂ e	63,732	68,267	70,632	73,111	73,436
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	17,90	19,30	20,00	20,50	22,30
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim								
	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup							

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
13.3.1.(a)	i. Jumlah peserta Sekolah Adiwiyata	KLHK	Peserta	75	150	225	300	375
	ii. Jumlah kampung iklim	KLHK	Titik	170	185	200	215	230
	iii. Jumlah peserta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	BPBD	Peserta	12.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	iv. Jumlah peserta yang ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	BPBD	Peserta	5.760	1.600	1.600	1.600	1.600



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2023	2024	2025	2026					
(1)		(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim											
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara											
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	4027661736.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	2427600000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	83323076284.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	1634186400.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	1238400000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	6130800000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	1761114000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	831740000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	1634186400.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	Bencana	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94978	94978	94978	94978	32438003111.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	461440000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	40071972800.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1	78000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60	314070000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	20480000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
03:25:02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	50	50	50	50	400000000			DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
01:06:04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2945	2945	2945	2945	235439446632			DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	2945	2945	2945	2945	26912994426			DINAS SOSIAL
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	68000000	APBD		DINAS SOSIAL
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	437084453	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	2200650900	APBD		DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	23474574818	APBD		DINAS SOSIAL

01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	144166664064	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1100	0	6461	8432574352107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56250	56250	56250	56250	8432574352107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional													
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01		1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	4027661736.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	Dokumen	0	0	0	1	529809752.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	2427600000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	83323076284.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	1634186400.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	1238400000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	6130800000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	1761114000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	119440000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	831740000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	1634186400.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94978	94978	94978	94978	32438003111.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	461440000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	57000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	40071972800.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1	78000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60	314070000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	20480000000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	23474574818	APBD		DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	2200650900	APBD		DINAS SOSIAL
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	144166664064	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1100	0	6461	8432574352107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56250	56250	56250	56250	8432574352107	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional													
13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications													
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													

2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	3	3	6073232500			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun													
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	3	3	6073232500			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)													
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	3	3	6073232500			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
03:25:02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	1	1	1	1	44746201620			DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim													
13.3.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup													
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	2427600000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
02:11:08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	335	425	515	605	7677300000	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan 14

Ekosistem Lautan

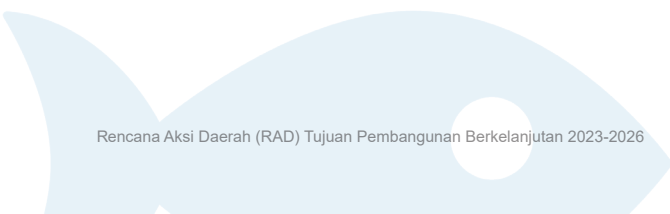
Tujuan 14 (empat belas) Ekosistem Lautan bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.



Tujuan 14 (empat belas) Ekosistem Lautan bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 14 (empat belas) di DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi, sehingga hanya terdapat 3 (tiga) target dan 6 (enam) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target-target tersebut adalah:

- 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% (sepuluh persen) dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia;
- 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization;
- 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.

Target-target ini sudah diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu pada program prioritas daerah yang termanifestasikan dalam dimensi lingkungan-bangun (built-environment). Dimensi tersebut dielaborasikan dalam tujuan “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan” yang secara khusus masuk dalam sasaran tercapainya pemulihan ekosistem kota dan pembangunan rendah karbon dan lebih spesifik lagi termasuk dalam strategi-strategi sebagai berikut: Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat; Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap; dan peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.



Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Adapun turunan dari strategi di atas diterjemahkan kembali dalam rencana strategis di Perangkat Daerah, pada Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir melalui Pengelolaan Yang Bertanggung Jawab pada Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir arah kebijakannya diterjemahkan sebagai berikut:

1. Pengesahan Perda RTRW yang terintegrasi dengan Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3K;
2. Melaksanakan rehabilitasi terumbu karang, lamun;
3. Penenggelaman fish shelter;
4. Penanaman mangrove;
5. Melaksanakan pembinaan masyarakat;
6. Melaksanakan patroli terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
7. Melaksanakan penindakan terhadap para pelanggar pemanfaatan sumberdaya.
8. Menerapkan teknologi budidaya perikanan dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
9. Membangun sarana dan prasarana perikanan;
10. Menerapkan teknologi dan diversifikasi olahan produk hasil perikanan;
11. Mengembangkan produksi benih ikan;
12. Mengembangkan sentra pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

(Rencana Strategis DKPKP, 2022)

Usaha untuk meningkatkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan di Jakarta tidak terbatas hanya di daratan, tetapi juga mencakup wilayah perairan dan kepulauan, terutama Kepulauan Seribu yang dijadikan sebagai pusat konservasi ekologi. Pengelolaan kelautan dan perikanan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penataan wilayah kelautan menjadi penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan laut dan mencegah konflik dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi instrumen perencanaan yang diterapkan untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jakarta. Pengelolaan yang berkelanjutan juga mencakup konservasi, pemantauan, dan pengelolaan yang efektif untuk memastikan sumber daya laut tetap tersedia dalam upaya mencapai kehidupan lestari dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Untuk mencapai tujuan pelestarian, berbagai upaya dilakukan, termasuk penyusunan peta jalan konservasi ekologi di Kepulauan Seribu, penenggelaman fish shelter, transplantasi karang, penanaman mangrove, pelatihan selam, penangkaran biota laut, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga ditingkatkan melalui pengawasan di wilayah perairan dan daratan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas, peningkatan sarana prasarana pengawasan, dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Upaya pelestarian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dalam pembangunan dan pengembangan potensi perikanan, mulai dari proses pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran, yang dijalankan dalam sistem bisnis perikanan yang berkelanjutan. Dalam upaya ini, pemerintah memberikan bantuan sarana produksi bagi nelayan skala kecil, seperti kapal perikanan, alat tangkap, dan alat bantu lainnya. Rencananya, pemerintah akan mendirikan sentra-sentra perikanan yang memberdayakan dan berpihak pada nelayan kecil. Selain itu, pengembangan perikanan budidaya dan produk/olahan kelautan juga dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan lahan di Jakarta, proporsi perikanan budidaya laut menjadi lebih besar dari budidaya air tawar. Perairan Kepulauan Seribu masih memiliki carrying capacity yang memadai untuk budidaya komoditas seperti kerapu, bawal bintang, udang vaname, dan ikan hias laut. Teknologi keramba jaring apung (KJA) menjadi sarana penting dalam budidaya ini karena mempermudah proses panen dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, program urban *fish farming* dikembangkan untuk meningkatkan budidaya air tawar di kalangan masyarakat dan menyediakan balai benih ikan.

Pengolahan produk perikanan di Jakarta masih didominasi oleh metode tradisional. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki kualitas sanitasi dan kebersihan, pengemasan yang lebih baik, dan penerapan prinsip penanganan ikan yang benar untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan pengolah tradisional. Akses modal dan jaringan pemasaran juga menjadi fokus untuk mendukung kelancaran usaha (Bappeda, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka program prioritas 2023-2026 yang mendukung sasaran ini yang terkait Tujuan 14 (empat belas) yakni:

- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Tabel 3.14.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	KKP	Hektare	107.496	107.496	107.496	107.496	108.579
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DKPKP	Persen	70,93	71	72	73	74
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	KKP	Dokumen kebijakan, regulasi, pedoman/ dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional	ada	ada	ada	ada	ada
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	DKPKP	Nelayan dan Pembudidaya Ikan	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025	2026							
(1)		(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)			
Tujuan 14 Ekosistem Lautan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.													
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut													
03:25:02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Hektare	200	200	100	100	2000000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	0	0	0	600000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Hektare	1	1	1	1	44746201620	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	2	2	2	2	9000000000			
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi													
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha													
03:25:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	1	1	1	1	877000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.09.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan	Dokumen	1	1	1	1	258416200	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1	1	1	226192960	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang	Rekomendasi	34	35	36	37	1354140572	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	4	4	4	4	9850000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	4	4	4	4	1000000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas	3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Dokumen	4	4	4	4	1000000000			

14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar													
14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil													
03:25:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	2	2	719584640	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi													
03:25:02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi	Orang	50	50	50	50	400000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		Kode Subkegiatan:	Nama Subkegiatan:	Indikator Subkegiatan:									
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	2	2	2	600000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		Kode Subkegiatan:	Nama Subkegiatan:	Indikator Subkegiatan:							APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	80	90	100	100	4450000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-	Kelompok	19	19	19	19	4335685785	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan	Orang	500	500	500	500	7000000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Kelompok	1	1	1	1	1400000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	7	7	1	1	17549719684	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2150	2150	2252	2252	5201877460	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	18	21	18	18	229902501167	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	305490150	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	5	7	9	10	2152862819	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	48	53	58	63	16401265853	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	6	6	6	6	864277952	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

		3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi	Jumlah Pembudidaya	Orang	68	70	72	74	1916825402	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila	Unit	161	138	172	176	15510659676	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	4	4	4	4	1000000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	15	15	15	15	1000000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	140	140	140	140	9886101076	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu)	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	31	31	31	31	21000000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	60	60	60	60	12000000000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Tujuan 15

Ekosistem Daratan

Tujuan 15 (lima belas) Ekosistem Daratan bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Hal ini termasuk juga mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati.



Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 15 (lima belas) di DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata Edisi II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data dan relevansinya di level provinsi, sehingga hanya terdapat 1 (satu) target dan 1 (satu) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target tersebut adalah:

- 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Target ini sudah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu pada program prioritas daerah yang termanifestasikan dalam dimensi lingkungan-bangun (built-environment). Dimensi tersebut dielaborasikan dalam tujuan “terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan” yang secara khusus masuk dalam sasaran tercapainya pemulihan ekosistem kota dan pembangunan rendah karbon dan lebih spesifik lagi termasuk dalam strategi melakukan Pembangunan/Penataan/Penghijauan Hutan untuk meningkatkan kualitas Hutan Kota dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau.

Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

Adapun turunan dari strategi di atas diterjemahkan kembali dalam rencana strategis di Perangkat Daerah, pada tujuan untuk peningkatan Tutupan lahan melalui perluasan ruang terbuka hijau hutan kota dan penyediaan ruang terbuka dan infrastruktur hijau yang inklusif dan berkualitas arah kebijakannya fokus pada terjaganya keberadaan, fungsi dan manfaat hutan yang berkelanjutan; dan juga optimalisasi sebaran RTH hutan, taman dan makam melalui penambahan luasan, pembangunan dan penataan RTH.

Selanjutnya, untuk mencatat aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup, dilakukan pengukuran dan pemantauan secara berkala. Pengukuran ini mencakup kualitas air, udara, air laut, dan lahan, yang berfungsi sebagai kontrol atas kontribusi dari program dan upaya lintas sektoral. Hasil pengukuran ini dipublikasikan dan dilaporkan untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan sektor lain. Selain itu, upaya lainnya dilakukan melalui implementasi peraturan yang relevan untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.

Pembangunan ruang hijau di kota bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara, menjaga keberlanjutan ekosistem alami, menciptakan kenyamanan termal, meningkatkan daya dukung lahan, area mitigasi bencana, dan meningkatkan kualitas serta identitas suatu kawasan. Pemerintah telah berkomitmen secara konsisten untuk mengoptimalkan fungsi ruang hijau di Jakarta, baik melalui penambahan jumlah ruang hijau maupun peningkatan kualitasnya di taman, jalur hijau, hutan kota, makam, dan juga dalam ruang, bangunan, dan infrastruktur lainnya. Beberapa pencapaian signifikan terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di Jakarta antara tahun 2018 hingga 2021, seperti pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau seluas 105 ha (seratus lima hektar) dengan rasio Ruang Terbuka Hijau yang telah ada mencapai 5,12% (lima koma dua belas persen), penambahan Taman dengan total 100 (seratus) taman baru dalam 5 (lima) tahun, dan revitalisasi beberapa taman kota seperti Taman Tebet, Taman Langsat, dan Taman Cempaka.

Selain itu, sinergi dilakukan dengan mengintegrasikan keterlibatan masyarakat dengan kegiatan fisik. Saat ini, Jakarta telah memiliki seperangkat peraturan yang menjadi pedoman dalam pengembangan ruang hijau, termasuk Master Plan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman, serta Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon. Di dalamnya terdapat substansi rinci mengenai pengembangan dan pengelolaan ruang hijau, termasuk kolaborasi dengan masyarakat. Upaya ini akan diintegrasikan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka biru, komponen hijau di bangunan, dan infrastruktur kota sehingga terpadu menjadi kesatuan ruang hijau kota yang berfungsi secara ekologis, estetis, dan sosial. Pendekatan ini sesuai dengan konsep Indeks Hijau Biru Indonesia yang diperkenalkan melalui Rancangan Peraturan Menteri ATR tentang Ruang Terbuka Hijau. Saat ini, integrasi hijau-biru telah diterapkan melalui pembangunan drainase vertikal dan kolam retensi/detensi di taman, hutan kota, dan area pemakaman, pembangunan bioswale, serta pembangunan rain garden di jalur-jalur hijau di hampir 25% (dua puluh lima persen) wilayah kelurahan di Jakarta. Kebijakan ini akan terus ditingkatkan di masa mendatang.

Selanjutnya, hingga tahun 2026, pemerintah masih akan memprioritaskan pengadaan tanah untuk mencapai target proporsi Ruang Terbuka Hijau publik, baik yang didanai dari APBD maupun dari penagihan kewajiban pemanfaatan ruang. Pembangunan taman terintegrasi hijau-biru akan direncanakan bersama masyarakat di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota, sesuai dengan tipologi wilayahnya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman. Peningkatan populasi tanaman dan pohon di ruang-ruang publik akan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan anggaran. Dalam beberapa tahun ke depan, akan direncanakan basis data pohon dan Ruang Terbuka Hijau yang semakin akurat, lengkap, dan mutakhir agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, jika kondisi pandemi membaik, pemerintah akan mendorong aktivasi taman kota melalui platform digital untuk meningkatkan kunjungan, serta melakukan publikasi dan sosialisasi bersama masyarakat. Diharapkan kepuasan warga Jakarta akan meningkat setelah memanfaatkan taman dan Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat berolahraga, rekreasi, pengembangan hobi, dan berinteraksi baik dalam aktivitas spontan maupun terorganisir bersama komunitas taman dan mitra terkait lainnya.

Selain itu, perbaikan lingkungan juga dapat dicapai melalui penghematan sumber daya secara efisien, terutama dalam pengendalian sektor bangunan yang memiliki kontribusi yang signifikan. Pengendalian tersebut berkaitan dengan efisiensi konsumsi air dan listrik, penambahan ruang hijau pribadi, serta manajemen limbah, sampah, dan pengendalian banjir. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat mendorong retrofitting bangunan sesuai dengan prinsip bangunan gedung hijau, pemasangan panel surya pada atap bangunan, serta pembentukan kampung iklim, sekaligus pengembangan pusat konsultasi warga untuk memudahkan penyampaian informasi, publikasi, dan berbagi pengetahuan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga berkomitmen untuk memenuhi prinsip bangunan hijau pada bangunan aset pemerintah, seperti gedung kantor, rumah susun, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya. Selain itu, hingga tahun 2026, diperlukan pengendalian yang lebih ketat untuk memastikan perizinan bangunan mematuhi prinsip bangunan hijau juga pengawasan (Rencana Pembangunan Daerah RPD, 2022, hlm. 387).

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) juga masuk dalam program prioritas 2023-2026. Pada Program Pengelolaan Hutan, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung KSD 44 (empat puluh empat) terkait peningkatan kuantitas dan kualitas hutan seperti pembangunan hutan, penataan hutan, pemeliharaan hutan dan penambahan luas RTH hutan. Sementara pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung KSD 44 (empat puluh empat) terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau lainnya seperti RTH taman, jalur hijau, kebun bibit, makam, serta Taman Margasatwa Ragunan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas RTH seperti pembangunan, penataan, pemeliharaan dan penambahan luas RTH (Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Kehutanan, 2022)



Tabel 3.15.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1*	Proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan)	KLHK	Persen	1,7 (2021)	1,7	1,7	1,7	1,7





Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 5 tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026						
(1)			(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 15 Ekosistem Daratan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah,													
15.1.1*. Proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan)													
03:28:03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan	3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektare	4	3	3	3	189963160539	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektare	202,86	202,86	202,86	202,86	864200000	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN
		3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi	Dokumen	12	12	12	12	1680000000	APBD	Jakarta	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN

Tujuan 16

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 (enam belas) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh menekankan pada penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan untuk semua, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.



Target dan arah kebijakan pencapaian Tujuan 16 (enam belas) di Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada Metadata Edisi II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data dan relevansinya di level provinsi, sehingga terdapat 10 (sepuluh) target dan 24 (dua puluh empat) indikator yang diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Target tersebut adalah:

- 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di manapun;
- 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak;
- 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua;
- 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya;
- 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat;
- 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan;
- 16.8. Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global;
- 16.9. Pada tahun 2030 memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran;
- 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional;
- 16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.



Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026

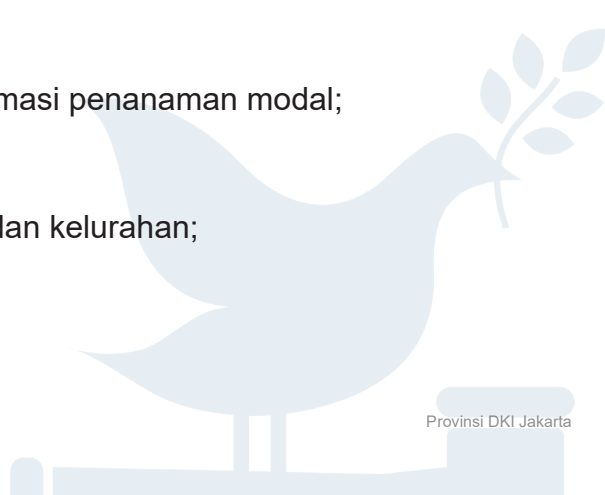
Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta tahun 2023-2026, Tujuan 16 (enam belas) berkaitan dengan arah kebijakan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan.

Arah kebijakan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan memiliki sasaran yang terkait yaitu menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat. Dalam upaya menjaga kebhinekaan serta proses demokrasi yang kondusif di Jakarta, diperlukan penguatan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan untuk warga Jakarta. Beberapa program prioritas yang akan dilakukan adalah:

- Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Arah kebijakan terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan memiliki beberapa sasaran. Sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat. Pelayanan publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa program prioritas yang akan dilakukan adalah:

- Program pendaftaran penduduk;
- Program pencatatan sipil;
- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Program pengelolaan profil kependudukan;
- Program Pelayanan penanaman modal;
- Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- Program pengelolaan arsip;
- Program pengelolaan kecamatan;
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;



Sasaran kedua yaitu terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas. Hal ini dicapai dengan memperkuat Jakarta Smart City, mengoptimalkan pelayanan daring yang telah ada di berbagai perangkat daerah, hingga memangkas kesenjangan digital (*digital divide*), melalui perluasan akses internet serta pembangunan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Selain itu, upaya ini juga harus sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa program prioritas yang akan dilakukan adalah:

- Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Program pengelolaan aplikasi informatika;
- Program penyelenggaraan statistik sektoral;

Sasaran ketiga adalah tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Perbaikan manajemen pemerintah perlu diiringi dengan peningkatan integritas birokrasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi. Beberapa strategi program prioritas yang akan dilakukan adalah

- Program penataan organisasi;
- Program fasilitasi dan koordinasi hukum;
- Program perekonomian dan pembangunan;
- Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- Program penyelenggaraan pengawasan;
- Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi.

Sasaran keempat adalah terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel. Dalam konteks transparansi, keterbukaan informasi diupayakan semakin optimal dengan memastikan adanya interkoneksi antar portal, pembaruan data secara rutin, serta seluruh kalangan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada penguatan sistem akuntabilitas pengelolaan anggaran yang digunakan agar dapat meminimalkan potensi maladministrasi dan memaksimalkan dampaknya pada masyarakat. Beberapa strategi program prioritas yang akan dilakukan adalah:

- Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa;
- Program pengelolaan keuangan daerah;
- Program pengelolaan barang milik daerah;
- Program pengelolaan pendapatan daerah;

Sasaran kelima adalah berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, setiap organisasi di berbagai sektor didorong mengimplementasikan tata kelola berbasis merit (pencapaian kinerja, prestasi, dan sejenisnya). Dukungan regulasi juga dibutuhkan, terutama memastikan sistem tersebut dapat terlaksana dan mendapatkan dukungan dari birokrasi. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan adalah:

- Program kepegawaian daerah;
- Program pengembangan sumber daya manusia.

Dengan demikian, seluruh perangkat daerah dalam kelompok kerja pilar hukum dan tata kelola didorong untuk menyesuaikan dan menyinergikan setiap program dan kegiatan guna mendukung pencapaian enam sasaran tersebut. Sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah lain maupun dengan aktor nonpemerintah diharapkan meningkatkan kinerja serta dampaknya semakin optimal, terutama dalam mendukung pencapaian Tujuan 16 (enam belas).



Tabel 3.16.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Biro Pengendalian Operasi, Polri	Orang	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	Statistik Kriminal, BPS	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)	Persentase	Indikator baru	N/A	N/A	N/A	N/A
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selaku Sekretariat Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Persentase	Indikator baru	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS	Persentase	787 (kasus)	N/A	N/A	N/A	N/A
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Persentase	749 orang	472 orang	583 orang	N/A	N/A

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Survei Perilaku Anti Korupsi, BPS	Indeks	73,3	70	75	80	85
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan	Persentase	75,11 (2020)	77,87	80,99	81,83	83,71
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase	80,51 (A)	82 (A)	84 (A)	87 (A)	90,5 (AA)
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase	78,98	82,00	83,00	84,00	85,00
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman	Persentase	81,86	82,00	82,3	82,5	82,7
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase	26,19	21,43	21,43	21,43	21,43
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kemenko Polhukam - Badan Pusat Statistik	Indeks	73,12	73,12	73	73,25	73,5
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kemenko Polhukam - Badan	Indeks					

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
		Pusat Statistik		87,39	87,3	87,25	87,50	87,75
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Kemenko Polhukam - Badan Pusat Statistik	Indeks	85,34	85,4	85,5	85,75	86,00
Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.								
16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Biro Kerja Sama Daerah	Jumlah lembaga/ forum/ program kerja sama	Indikator baru	5	6	7	8
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	99,59	98,5	98,6	98,7	98,8
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	100	98,5	98,6	98,7	98,8
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	Survei Indeks Kemerdekaan Pers, Dewan Pers	Indeks	79,42	N/A	N/A	N/A	N/A
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Jumlah	687	N/A	N/A	N/A	N/A
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi DKI Jakarta	Jumlah	1	20 BP	25 BP	30 BP	35 BP
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi	Komisi Informasi DKI Jakarta	Persentase	27 (kasus)	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	dan/atau ajudikasi nonlitigasi.							
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kebijakan/ dokumen	0	0	0	0	0



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026						
(1)			(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk													
8:01:06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	24.677.480.080	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	72.074.530.994	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	20	20	20	20	501.228.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	48	48	48	48	26.425.854.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	1.935.477.256	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya													
8:01:06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	24.677.480.080	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	72.074.530.994	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	20	20	20	20	501.228.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	48	48	48	48	26.425.854.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	1.935.477.256	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya													
2:08:07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	2568	2654	2740	2826	2.004.912.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	13.321.963.821	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi													
2:08:03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	11	11	11	15.811.406.017	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	2.098.429.500	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	6.729.888.008	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	1.686.880.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2:08:07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													

2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	2568	2654	2740	2826	2.004.912.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	13.321.963.821	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi													
2:08:03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	11	11	11	15.811.406.017	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	2.098.429.500	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	6.729.888.008	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	1.686.880.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2:08:07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	2568	2654	2740	2826	2.004.912.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	7	7	7	7	292.383.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi													
2:08:02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Organisasi	415	415	415	415	954.446.619	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2:08:07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													

2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	7	7	7	7	292.383.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)													
1:05:01 Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi													
1.05.01.1.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	986.904.242	APBD	Jakarta	POLISI PAMONG
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	110.533.295.808	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	14.121.884.954	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	2.965.834.488	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	244	244	244	244	286.066.669.247	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	29	33	37	37.403.369.015	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	40.595.425.021	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	2	2	2	37.502.955.672	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	277	277	277	277	22.993.840.980	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
7:02:02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI													

7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	245.000.000	APBD	Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	17.280.000	APBD	Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	108.000.000	APBD	Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	101.746.800	APBD	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	35.798.400	APBD	Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	114.400.000	APBD	Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7:03:02 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN													
7.03.02.6.02	Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian	7.03.02.6.02.11	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	1	1	1	1	138.530.730	APBD	Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	144.799.200	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	80.000.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1800	1800	1800	1800	16.218.849.885	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1000	1000	1000	1000	194.922.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)													
1:05:01 Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi													
1.05.01.1.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	986.904.242	APBD	Jakarta	POLISI PAMONG
6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	244	244	244	244	286.066.669.247	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2	2	2	2	20.865.598.512	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	4	4	3.864.960.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	29	33	37	37.403.369.015	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	40.595.425.021	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	277	277	277	277	22.993.840.980	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	144.799.200	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	110.533.295.808	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	14.121.884.954	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	2.965.834.488	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
07:02:02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI													
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	39.000.000	APBD	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥B													
1:05:01 Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi													
1.05.01.1.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	986.904.242	APBD	Jakarta	POLISI PAMONG
6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	244	244	244	244	286.066.669.247	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	29	33	37	37.403.369.015	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	40.595.425.021	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	277	277	277	277	22.993.840.980	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	144.799.200	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	110.533.295.808	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	14.121.884.954	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	2.965.834.488	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4:01:02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													

4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	1	1	1	130000000.00	APBD	Jakarta	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B													
1:05:01 Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi													
1.05.01.1.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	986.904.242	APBD	Jakarta	POLISI PAMONG
6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	244	244	244	244	286.066.669.247	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	29	33	37	37.403.369.015	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	40.595.425.021	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	277	277	277	277	22.993.840.980	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	144.799.200	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	110.533.295.808	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	14.121.884.954	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	2.965.834.488	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
07:02:02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI													
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	62.546.688	ABPD	Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat

7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	18.289.712	ABPD	Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	1.140.600	ABPD	Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	2.737.440	ABPD	Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	36.400.000	ABPD	Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	143.000.000	ABPD	Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	17.600.000	ABPD	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	44.200.000	ABPD	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	61.416.000	ABPD	Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	21.006.000	ABPD	Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	3.600.000	ABPD	Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	8.640.000	ABPD	Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

4:01:02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	2	2	2	1080239160.00	ABPD	Jakarta	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.													
4:01:02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	1	1	608380128.00	ABPD	Jakarta	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi													
8:01:02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	23.126.103.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	5000	5000	5000	5000	70.216.218.902	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	50	50	50	890.944.222	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													

8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	61.337.997.504	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	15	15	15	15	271.498.500	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	1	1	4.126.503.220	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	189.905.253.038	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	80.000.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1800	1800	1800	1800	16.218.849.885	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1000	1000	1000	1000	194.922.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													

8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	12	12	12	459.459.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	1.935.477.256	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan													
8:01:02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	23.126.103.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	5000	5000	5000	5000	70.216.218.902	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	50	50	50	890.944.222	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik													

8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	61.337.997.504	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	15	15	15	15	271.498.500	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	1	1	4.126.503.220	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	189.905.253.038	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	80.000.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1800	1800	1800	1800	16.218.849.885	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1000	1000	1000	1000	194.922.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	1.935.477.256	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan													
8:01:02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													

8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	23.126.103.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	5000	5000	5000	5000	70.216.218.902	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	50	50	50	890.944.222	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	61.337.997.504	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	15	15	15	15	271.498.500	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	1	1	4.126.503.220	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	189.905.253.038	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													

8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	80.000.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1800	1800	1800	1800	16.218.849.885	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1000	1000	1000	1000	194.922.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	12	12	12	459.459.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	1.935.477.256	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2:08:02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													

2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	146	155	166	176	918.350.359	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	518	518	518	518	545.403.173	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur													
2:12:02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	278.738.460	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	8.306.894.134	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	100	100	100	100	174.690.243	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	7.254.347.100	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	4	4	4	2.182.442.186	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL													

2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	20.703.668.916	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	6	6	6	6	1.784.878.075	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	970.134.008	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	3	3	3	332.916.538	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	50	50	50	50	158.258.100	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN													
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	1	1	1	1	416.759.076		Jakarta	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	6	6	6	6	394.337.332		Jakarta	
2:14:02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	521.950.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran													
2:12:02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	278.738.460	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	8.306.894.134	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	100	100	100	100	174.690.243	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	7.254.347.100	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	4	4	4	2.182.442.186	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL													

2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	20.703.668.916	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	6	6	6	6	1.784.878.075	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	970.134.008	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	3	3	3	332.916.538	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	50	50	50	50	158.258.100	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN													
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	1	1	1	1	416.759.076	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	6	6	6	6	394.337.332	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.													
2:08:02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	146	155	166	176	918.350.359	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	518	518	518	518	545.403.173	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	30	35	40	45	196.894.425	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2:08:03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	11	11	11	15.811.406.017	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	275	280	285	290	1.609.614.825	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1352	1367	1382	1397	37.877.941.882	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	2.098.429.500	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	6.729.888.008	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	1.686.880.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif													
2:16:02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													

2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	4	4	4	77.966.763.854	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	2	2	2	18.573.399.729	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	14.767.779.150	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	1	1	1	8.561.185.578	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2	2	2	2	17.535.606.455	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.													
2:16:02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	14.767.779.150	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional													
4:01:05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	100	95	90	85	1.953.600.000	APBD	Jakarta	BIRO HUKUM
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	1500	1500	1500	1500	386.400.000	APBD	Jakarta	BIRO HUKUM
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	150	200	250	300	3.379.984.056	APBD	Jakarta	BIRO HUKUM

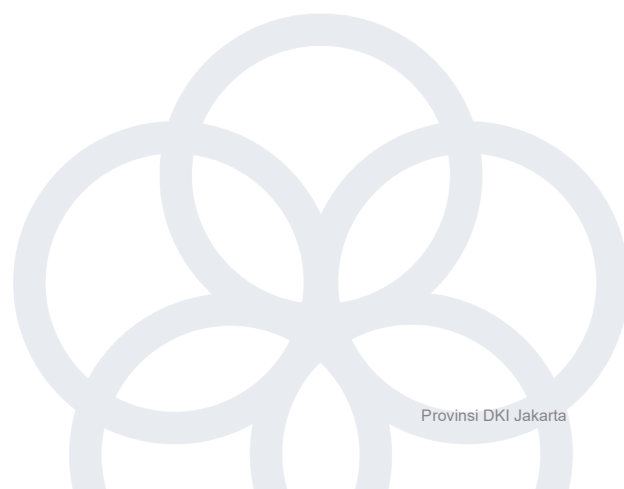
Tujuan 17

Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 (tujuh belas) menekankan pada pentingnya kerjasama di antara negara-negara dan juga di antara berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan TPB, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam hal transfer teknologi, kapasitas institusi, dan pembiayaan. Selain itu, tujuan ini juga berfokus pada peningkatan akses negara berkembang ke pasar utama, termasuk pasar untuk teknologi dan akses terhadap keahlian dan pengetahuan yang diperlukan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 17 (tujuh belas) di DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata II (dua) serta menyesuaikan dengan ketersediaan data di level provinsi, sehingga diputuskan terdapat 4 (empat) target dan 9 (sembilan) indikator yang digunakan dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

- 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- 17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
- 17.17. Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.
- 17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.



Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023-2026



Optimalisasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan peningkatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Bappeda, 2022).

Strategi intensifikasi pajak daerah dilakukan dengan pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah, pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, dan peningkatan koordinasi kelembagaan. Sementara itu, strategi ekstensifikasi pajak daerah dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pertumbuhan penjualan properti, stabilitas harga BBM, dan pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan lapangan melalui startup.

Untuk mengoptimalkan retribusi daerah, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik, menerapkan banking system dalam melakukan pembayaran retribusi daerah, dan menerapkan transaksi non tunai. Selain itu, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah, pemerintah akan menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis. Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan harmonisasi terhadap regulasi yang sudah ada dengan kajian akademis dan peraturan yang terkait di atas Perda.

Untuk meningkatkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, upaya Pemerintah Provinsi akan berfokus pada implementasi hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah juga akan mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *debt management* dan mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 3.17.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Asli Daerah	49.383.985.352.235	51.946.864.340.503	54.297.373.147.660	57.364.221.084.067
1.1	Pajak Daerah	43.635.908.169.329	45.890.257.545.736	47.895.882.416.542	50.443.011.871.827
1.2	Retribusi Daerah	508.457.000.000	483.034.000.000	507.186.000.000	532.545.000.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	523.000.000.000	623.000.000.000	774.000.000.000	957.000.000.000
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.716.620.182.906	4.950.572.794.767	5.120.304.731.118	5.431.664.212.240
2	Pendapatan Transfer	16.991.757.133.880	17.603.720.462.678	18.238.821.325.496	18.897.958.535.113
2.1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	13.628.309.306.000	14.173.441.678.240	14.740.379.345.370	15.329.994.519.184
2.2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.037.340.200	38.798.087.004	39.574.048.744	40.365.529.719
2.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	3.281.610.487.680	3.347.242.697.434	3.414.187.551.382	3.482.471.302.410
2.4	Dana Insentif Daerah	43.800.000.000	44.238.000.000	44.680.380.000	45.127.183.800
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.903.487.087.779	4.963.475.018.402	13.048.093.473	13.635.257.680
Total Pendapatan		72.279.229.573.894	74.514.059.821.583	72.549.242.566.629	76.275.814.876.860

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Kolaborasi/Kerjasama Pembangunan

Kerjasama merupakan salah satu contoh praktik budaya baik yang ingin dibangun di Jakarta. Gerakan yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan dapat menjadi tolok ukur kemapanan suatu bangsa. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan Jakarta yang partisipatif dan berkelanjutan, pemerintah perlu melibatkan secara aktif lembaga internasional, dunia usaha, dan masyarakat dengan paradigma dan sistem kolaborasi/kerjasama.

Dalam rangka menggerakkan kerjasama masyarakat domestik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan jumlah kolaborator dengan menyelenggarakan berbagai festival kolaborasi yang diselenggarakan melalui kerjasama antar perangkat daerah. Beberapa contoh festival kolaborasi yang telah diselenggarakan antara lain *Collaborative Summit*, *Jakpreneurfest*, *Jakarta Sadar Sampah*, serta *Jakarta Innovation Days*.

Selanjutnya, dalam upaya mendorong kerjasama yang lebih erat dengan masyarakat global, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang strategi yang melibatkan penyelenggaraan event internasional dan aktif berpartisipasi dalam organisasi regional dan global. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi telah secara konsisten menyelenggarakan *Jakarta Investment Forum* (JIF), sebuah forum bisnis dan investasi, sebagai platform untuk memfasilitasi potensi kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta yang tertarik untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Jakarta.

Selain itu, posisi strategis Jakarta di berbagai forum internasional juga menjadi sarana yang sangat berarti dalam mendorong kerja sama global. Partisipasi Jakarta dalam pertemuan seperti *Meeting of Governors and Mayors ASEAN Capitals* (MGMAC), *Asean Mayor Forums* (AMF), dan keanggotaannya dalam *United Cities and Local Governments Asia-Pacific* (UCLG-ASPAC) memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat internasional dalam upaya pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Di samping itu, peran Jakarta sebagai *sister city* dengan kota-kota lain juga memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat koneksi dan kerja sama internasional. Hingga saat ini, Jakarta telah menjalin kerja sama *sister city* dengan 22 (dua puluh dua) kota lain di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, kerja sama dengan 11 (sebelas) kota masih berstatus aktif. Kota-kota tersebut antara lain Beijing, Bangkok, Seoul, Shanghai, Tokyo, Berlin, Budapest, Rotterdam, dan Istanbul. Melalui kemitraan *sister city*, Jakarta dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam berbagai bidang, termasuk perekonomian, pendidikan, budaya, lingkungan, dan lainnya, dengan kota mitra di berbagai belahan dunia. Kemitraan ini membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan, kerja sama ekonomi, dan pengembangan inovasi yang saling menguntungkan antara Jakarta dan kota-kota mitra. Dengan cara ini, Jakarta dapat terus mengintensifkan interaksi global yang berkelanjutan dan berdampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayahnya.

Peningkatan Ekspor Produk Non-Migas

Dalam meningkatkan ekspor produk nonmigas, salah satu langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan promosi dagang. Upaya tersebut mencakup pameran dagang dan misi dagang khusus untuk produk ekspor unggulan yang berasal dari lebih dari satu daerah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Dengan upaya ini, produk-produk unggulan dari berbagai daerah akan memiliki kesempatan lebih besar untuk dikenal dan diperdagangkan baik di pasar ekspor maupun pasar domestik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan berfokus pada perluasan pasar produk kreatif, baik di pasar ekspor maupun pasar domestik. Produk-produk kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mengenalkan dan mengembangkan pasar bagi produk-produk ini akan menjadi bagian penting dari strategi ekspor DKI Jakarta. Dengan cara ini, pelaku usaha kreatif akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk berkembang dan bersaing di tingkat internasional.

Selain itu, Pemerintah akan berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha dengan memberikan pembinaan dan pendampingan. Upaya ini termasuk memberikan akses kepada pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas produk, memahami pasar global, serta memenuhi standar internasional. Dengan membina pelaku usaha

Peningkatan Ekspor Produk Non-Migas

Sensus Penduduk dan Perumahan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas statistik terkait kependudukan dan perumahan, salah satu langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memperkuat pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi. Dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan data sangat penting untuk menyediakan bantuan yang diperlukan dengan cepat. Melalui pendataan yang akurat, pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan program relokasi dengan lebih efisien, memastikan bahwa korban bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan segera.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga akan difokuskan pada koordinasi, penyediaan, dan pengolahan data kependudukan yang berbasis keluarga. Dengan mendata penduduk berdasarkan keluarga, pemerintah dapat mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Data ini menjadi dasar untuk merencanakan program pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur dasar dan fasilitas sosial. Pengolahan data yang teliti juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi tren demografis dan sosial, memberikan landasan untuk kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan penduduk dan perumahan.

Data Registrasi terkait Kelahiran dan Kematian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas statistik data registrasi terkait kelahiran dan kematian pada periode tahun 2022-2026. Pertama, pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional. Dengan konsistensi kebijakan antara tingkat nasional dan provinsi, data registrasi kelahiran dan kematian dapat diintegrasikan secara efisien, memastikan akurasi dan konsistensi dalam pelaporan.

Kedua, pemerintah akan melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Hal ini mencakup penduduk yang sering berpindah tempat tinggal atau memiliki kondisi administrasi yang kompleks. Dengan pendataan yang cermat, pemerintah dapat memahami kebutuhan khusus mereka dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pendaftaran penduduk. Hal ini mencakup layanan pendaftaran peristiwa kependudukan secara aktif, termasuk pencatatan kelahiran dan kematian yang akurat dan tepat waktu. Hal ini melibatkan solusi teknologi informasi dan sistem pendukung lainnya untuk memastikan bahwa data-data tersebut terekam dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang.

Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada aspek pelatihan dan konsultasi. Pemberian konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pegawai terkait, sehingga proses registrasi dan pencatatan penduduk dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat.

Terakhir, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar dan prosedur pendaftaran penduduk diikuti dengan ketat dan mengurangi potensi kesalahan. Selain itu, pemerintah akan melakukan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lainnya agar dapat menjadi landasan dalam perencanaan kebijakan yang lebih tepat dan relevan berdasarkan tren populasi yang teridentifikasi. Dengan serangkaian kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data registrasi kelahiran dan kematian serta memperkuat kapasitas statistik Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.17.2. Target dan Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya		%					
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPKD	Miliar Rupiah	45.608,38	52773,52	51.946,86	54.297,37	57.364,22
	i. Jumlah penerimaan pajak daerah	BPKD	Miliar Rupiah	40.275,14	43.600,00	45.890,26	47.895,88	50.443,01
	ii. Jumlah penerimaan retribusi daerah	BPKD	Miliar Rupiah	376,97	600	483,03	507,19	532,55
	iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	BPKD	Miliar Rupiah	402,42	542,50	623,00	774,00	957,00
	iv. Lain-lain PAD yang Sah	BPKD	Miliar Rupiah	4.553,85	8.031,02	4.950,57	5.120,30	5.431,66
	vi. Proporsi PAD terhadap PDRB	BPKD	%	1,43	1,53	1,39	1,35	1,32
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Bapenda	%	1,26	1,26	1,23	1,19	1,16
17.1.2*	Proporsi Anggaran Domestik Daerah yang didanai oleh PAD	BPKD	%	70,84	71,07	73,50	74,27	74,62
17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	2,03	2,81	3,01	3,16	3,28
17.17. Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.								
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPDBU (Daftar Rencana KPDBU/DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Bappeda	Dokumen	N/A	1	1	1	1
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).	Bappeda	Proyek	N/A	N/A	1	1	1
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPDBU berdasarkan tahap perencanaan,	Bappeda	Nilai investasi	N/A	>500	>500	>500	>500

Kode	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target Pencapaian			
					2023	2024	2025	2026
	penyiapan dan transaksi.		(Rp Milyar)					
17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	BPS	Sensus Penduduk (Terlaksana/ Tidak)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Kemendagri	Data Registrasi	N/A	1	1	1	1



Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
Tujuan 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
17.1.1* Pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya													
05.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	14.121.884.954	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	110.533.295.808	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2	2	2	2	17.535.606.455	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	6	6	6	6	12.861.255.810	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	166.027.239.576	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen LHP	1	1	1	1	2.965.834.488	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	2	2	2	2	62.585.287.677	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	6	6	6	6	29.083.370.612	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
05.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	1.042.962.202	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2	968.246.370	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB													
05.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	14.121.884.954	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	110.533.295.808	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2	2	2	2	17.535.606.455	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	6	6	6	6	12.861.255.810	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	166.027.239.576	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen LHP	1	1	1	1	2.965.834.488	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	2	2	2	2	62.585.287.677	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	6	6	6	6	29.083.370.612	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.2* Proporsi Anggaran Domestik Daerah yang didanai oleh PAD													
05.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													

5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	1.042.962.202	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2	968.246.370	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas													
03.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	15	15	15	15	14.400.378.365	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan	0	0	0	1	4.861.746.171	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
04.01.02. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	2	2	2	2	20.423.662.770	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	2	2	2	1.903.167.200	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPDBU (Daftar Rencana KPDBU/DRK) yang diterbitkan setiap tahun.													
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	2	2	2	2	20.423.662.770	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	2	2	2	1.903.167.200	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020													
01.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													

1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	3	3	2	1.750.000.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
02.14.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	2.14.02.1.02.02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen	1	1	1	1	27.567.540	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
17.19.2 (b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)													
02.12.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	278.738.460	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	590.625.528	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	8.306.894.134	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	179.606.700	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	100	100	100	100	174.690.243	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	12	12	12	12	155.395.991.717	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	4	4	4	2.182.442.186	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	20.703.668.916	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	6	6	6	6	1.784.878.075	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	112.858.446	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	970.134.008	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dukungan Aktor Non Pemerintah TPB/SDGs

Aktor non pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta. Mereka dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam implementasi kebijakan dan program-program pembangunan berkelanjutan. Organisasi non pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pengentasan kemiskinan.

Aktor non pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Melalui kampanye edukasi, workshop, dan kegiatan sosial lainnya, mereka dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan, kesehatan, dan keadilan sosial. Hal ini merupakan upaya penting untuk menciptakan kesadaran kolektif dan memobilisasi dukungan untuk mencapai TPB di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, aktor non pemerintah juga dapat membantu mempercepat pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta. Kemitraan pemerintah-swasta memungkinkan pertukaran informasi dan berbagi sumber daya dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini, diharapkan Jakarta dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dengan lebih efisien dan efektif.

Tabel 3.18 Tabel Dukungan *Non State Actors (NSA)* TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian				Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026					
Universitas Al Azhar Indonesia										
TUJUAN 1- TANPA KEMISKINAN										
Indikator TPB/SDGs : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivation jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi, Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan										
Nama Program: Peningkatan kecukupan Gizi										
Nama Kegiatan: Gizi dan kesehatan	Publikasi ilmiah Analisis masalah gizi dan kesehatan, serta intervensi	Dokumen	2	1	2	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
	Buku Analisis masalah gizi dan kesehatan, serta intervensi	Dokumen	N/A	1	1	N/A				
Indikator TPB/SDGs : Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivation jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.										
Nama Program: Finansial tingkat keluarga										
Nama Kegiatan: Indikator kesjahteraan	Publikasi Ilmiah Model pendapatan sebagai indikator kesejahteraan	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
Nama Kegiatan: Literasi keuangan keluarga	Publikasi Ilmiah Sustainable finance masyarakat melalui literasi keuangan dan pengukuran inklusivitas keuangan	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain		UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 2 - TANPA KELAPARAN										
Indikator TPB/SDGs : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment), Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (FIES)										
Belum ada Nama Program: Penguatan ketahanan pangan										
Nama Kegiatan: bioteknologi pertanian	Publikasi Ilmiah Internasional Pengembangan pupuk mikroba berbasis pada data omics dan nano teknologi	Dokumen	1	N/A	1	1	200	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
	HKI Pengembangan pupuk mikroba berbasis pada data omics dan nano teknologi	HKI	N/A	1	N/A	N/A				
Nama Kegiatan: Penguatan industri agro	Publikasi Nasional dan Internasional Analisis sistem rantai pasok industri agro	Dokumen	1	1	1	1	40	DKI	DKI	UAI dan Mitra UAI
Nama Kegiatan: Penguatan pangan alternatif	Publikasi Nasional dan Internasional Eksplorasi pangan lokal dan alga	Dokumen	2	2	2	2	40			UAI dan Mitra UAI
Indikator TPB/SDGs : Prevalensi stunting (pendekan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe, Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH), Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun										
Nama Program: Peningkatan Asupan Gizi										

Nama Kegiatan: Penguatan pangan alternatif	Publikasi Nasional dan Internasional Diversifikasi pangan produk kacang-kacangan tinggi protein	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
	HKI Diversifikasi pangan produk kacang-kacangan tinggi protein	Produk/HKI	N/A	1	1	N/A				
Nama Kegiatan: Bioteknologi pertanian	Publikasi Nasional dan Internasional Senyawa aktif tanaman dan teknologi rekayasanya	Dokumen	2	2	2	2	40		DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 3 - KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
Indikator TPB/SDGs : Prevalensi tekanan darah tinggi, Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.										
Nama Program: Gizi dan kesehatan										
Nama Kegiatan: Media edukasi gizi	Publikasi Nasional dan Internasional Pengembangan media edukasi gizi	Dokumen	1	2	2	2	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
Indikator TPB/SDGs : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.										
Nama Program: Membangun kesadaran keluarga tentang kesehatan reproduksi perempuan umur 15-49										
Nama Kegiatan: Kesadaran kesehatan perempuan	Publikasi Ilmiah Kesadaran tentang kesehatan perempuan umur 15-49: pangan, fisik, mental	Dokumen	1	1	1	1	50	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 4 - PENDIDIKAN BERKUALITAS										
Indikator TPB/SDGs : Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) .										
Nama Program : Bijak menggunakan TIK										
Nama Kegiatan: Cakap bermedia sosial	Publikasi Ilmiah Analisis online behavior dan interaksi sosial menuju kecakapan dan keamanan bermedia sosial	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
Indikator TPB/SDGs : Persentase guru pada jenjang (i) PAUD yang memiliki sertifikat pendidik										
Nama Program: Pengembangan keprofesian berkelanjutan										
Nama Kegiatan: Pengembangan Guru PAUD	Publikasi Ilmiah leveling kompetensi pendidik AUD	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
Indikator TPB/SDGs : Rasio APM-SD Disabilitas / Tanpa Disabilitas, Rasio APK Disabilitas/Tanpa Disabilitas pada tingkat: SMP/Sederajat, SMA/SMK/ Sederajat.										
Nama Program : Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus										
Nama Kegiatan: Inklusi ABK	Publikasi Ilmiah Iklim Sekolah dan Efikasi Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus	Dokumen	N/A	1	1	N/A	20	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 5 - KESETARAAN GENDER										
Indikator TPB/SDGs : Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan publik atau swasta										
Nama Program: Kesetaraan Perempuan dalam dunia usaha										

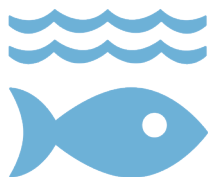
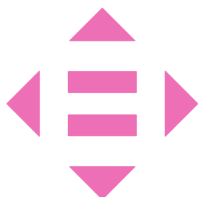
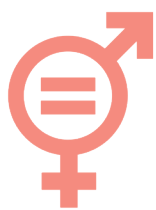
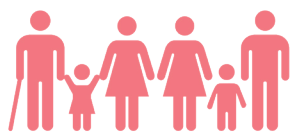
Nama Kegiatan: Womenpreneur	Publikasi Nasional dan Internasional Model Peningkatan performa usaha dan keberlangsungan usaha untuk pengusaha perempuan	Dokumen	1	1	1	1	100	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 6 - AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
Indikator TPB/SDGs : Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu										
Nama Program : Agen Bioremediasi										
Nama Kegiatan: Bioremediasi Ikan sapu-sapu	Publikasi Nasional dan Internasional Potensi ikan sapu sapu sebagai agen bioremediasi di perairan tercemar logam berat	Dokumen	1	1	1	1	100	UAI, DIKTI, sumber lain	Ciliwung, UAI, Batan Lebak Bulus	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 7 - ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU										
Indikator TPB/SDGs : Kapasitas terpasang energi listrik dari energi terbarukan										
Nama Program : Energi bersih dan terbarukan										
Nama Kegiatan: EBK mandiri	Publikasi Nasional dan Internasional Pengembangan dan pemanfaatan teknologi energi bersih dan terbarukan (EBK)	Dokumen	N/A	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 8 - PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
Indikator TPB/SDGs : Persentase setengah pengangguran										
Nama Program: Penguatan UMKM										
Nama Kegiatan: Akutansi dan UMKM	Publikasi Ilmiah Model Akutansi UMKM	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
Nama Kegiatan: sustainable UMKM	Publikasi Ilmiah UMKM kompetitif dan sustainable	Dokumen	1	1	1	1	60	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 9 - INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR										
Indikator TPB/SDGs : Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB										
Nama Program: Efisiensi dan manajemen resiko rantai pasok										
Nama Kegiatan: Penguatan industri	Publikasi Nasional dan Internasional Kajian dan pengembangan sistem rantai pasok	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 10 - BERKURANGNYA KESENJANGAN										
Indikator TPB/SDGs : Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir										
Nama Program: Peningkatan pemahaman hukum dan HAM										
Nama Kegiatan: Hukum dan ekonomi	Publikasi Ilmiah Perlindungan HAM dalam kegiatan perekonomian	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
Nama Kegiatan: Anti KDRT	Publikasi Ilmiah Analisis kekerasan di rumah tangga (verbal, emosional, fisik)	Dokumen	1	1	1	1	60	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 11 - KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN										

Indikator TPB/SDGs : Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).										
Nama Program: Preservasi dan Komodifikasi budaya										
Nama Kegiatan: Jakarta multi etnis	Publikasi Ilmiah Komodifikasi budaya multi etnis: custom, kuliner, desain, literatur	Dokumen	2	1	2	1	60	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 12 - KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
Indikator TPB/SDGs : Persentase Sisa makanan, Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang										
Nama Program: Pengolahan bernilai tambah										
Nama Kegiatan: Penguatan pangan alternatif	Publikasi Nasional dan Internasional Pemanfaatan limbah kulit buah	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
Nama Kegiatan: Pemanfaatan limbah plastik	Publikasi Nasional dan Internasional Pemanfaatan limbah plastik	Dokumen	1	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 13 - PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
Indikator TPB/SDGs : Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).										
Nama Program: Rendah emisi melalui integrasi dan kolaborasi										
Nama Kegiatan: Sustainable LEZ	Naskah Akademik Kolaborasi lintas sektor untuk Less emission zone (LEZ) di Kota Tua Jakarta	Dokumen	N/A	1	N/A	N/A	40	UAI, DIKTI, sumber lain	Kota Tua Jakarta	UAI dan Mitra UAI
	Publikasi Ilmiah Kolaborasi lintas sektor untuk Less emission zone (LEZ) di Kota Tua Jakarta	Dokumen	1	N/A	1	1				
TUJUAN 16 - PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
Indikator TPB/SDGs : Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)										
Nama Program: Anti Korupsi										
Nama Kegiatan: Penerapan Good Corporate Governance	Publikasi Ilmiah Penerapan Good Corporate Governance	Dokumen	N/A	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
Nama Kegiatan: syariah pada UMKM	Publikasi Ilmiah Penerapan syariah pada UMKM	Dokumen	N/A	N/A	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI
TUJUAN 17 - KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
Indikator TPB/SDGs : Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB										
Nama Program : Kepatuhan dan pajak berkeadilan										
Nama Kegiatan: Pajak berkeadilan	Publikasi Ilmiah Pendekatan pajak berkeadilan untuk peningkatan kepatuhan pajak	Dokumen	N/A	1	1	1	40	UAI, DIKTI, sumber lain	DKI	UAI dan Mitra UAI

BAB 4 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD TPB/SDGs

Bab 4 (empat) menjelaskan tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari Rencana Aksi Daerah. Proses dimulai dari mekanisme pemantauan dan evaluasi, jadwal pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta, dan publikasi hasil pemantauan dan evaluasi. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan voluntary self-assessment. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator.





Dalam rangka memastikan pencapaian TPB secara berkesinambungan, pemantauan dan evaluasi menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses pelaksanaan TPB. Berbagai target yang telah direncanakan serta strategi implementasinya sebagaimana tertuang dalam rencana aksi akan diawasi dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada pasal 3 ayat a dijelaskan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mengevaluasi pencapaian TPB bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam hal ini adalah dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, mengidentifikasi serta mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi maupun potensial dihadapi agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sementara itu, evaluasi berfungsi memberikan gambaran atas pencapaian TPB, sekaligus menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya. Hasilnya menjadi umpan balik untuk perbaikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait TPB.

Lingkup pemantauan dan evaluasi mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudian, masing-masing target tersebut diukur pencapaiannya melalui 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) indikator. Adapun pelaksanaan pencapaian indikator dan target dilaksanakan dan dikelola oleh institusi terkait. Seluruh program maupun kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator, baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, ataupun sumber-sumber lain yang sah, dipantau dan dievaluasi secara rutin.

Seluruh tujuan, target, dan indikator TPB dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola. Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) target dan 87 (delapan puluh tujuh) indikator digolongkan ke dalam pilar sosial. Kemudian, 54 (lima puluh empat) target dan 89 (delapan puluh sembilan) indikator dalam pilar ekonomi. Sementara, 56 (lima puluh enam) target dan 77 (tujuh puluh tujuh) indikator dalam pilar lingkungan. Terakhir, 12 (dua belas) target dan 36 (tiga puluh enam) indikator tergolong dalam pilar hukum dan tata kelola.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian target dan indikator dari tingkat nasional untuk menyesuaikan dengan agregasi data, kewenangan pemerintah daerah, maupun dengan karakteristik ibu kota. Provinsi DKI Jakarta menetapkan 85 (delapan puluh lima) target dan 151 (seratus lima puluh satu) indikator yang akan dicapai tahun 2023-2026. Dalam rangka memastikan pencapaian, tercatat sebanyak 1.428 kegiatan pemerintah daerah dan 24 (dua puluh empat) kegiatan nonpemerintah yang mendukung pencapaian RAD 2023-2026.

Mekanisme Pemantauan & Evaluasi

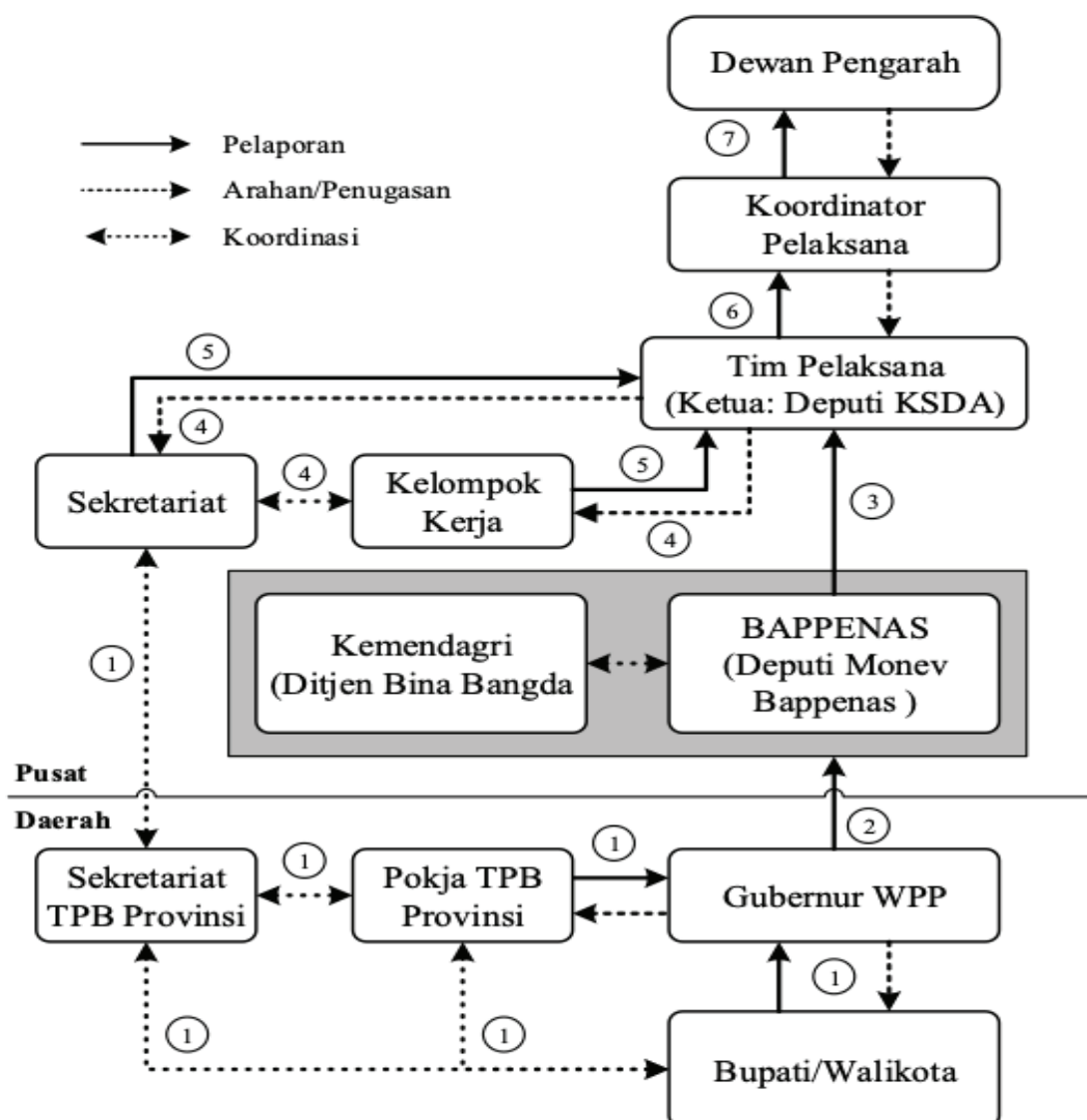
Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD

Alur pemantauan dan evaluasi RAD dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 15 Ayat 2 Perpres Nomor 111 Tahun 2022. Alur pelaporan pemantauan RAD TPB mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/subkegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB;
2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh Sekretariat TPB;
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana;
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB Nasional;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Gambar 4.1.1 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD



Sumber: Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB Edisi II

Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Nonpemerintah

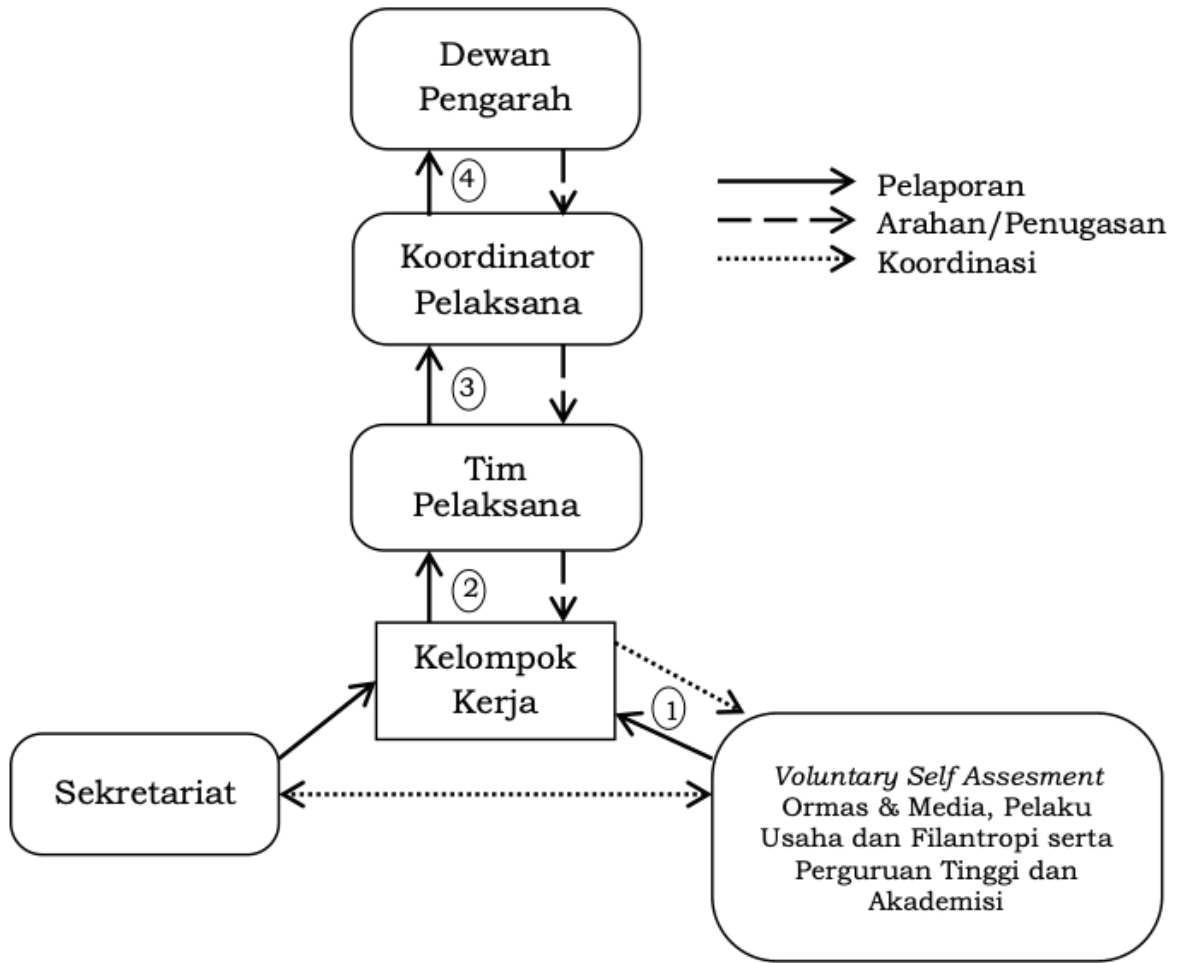
Sementara itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB bersifat sukarela (*voluntary*) dan mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggung jawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool (SAT)* yang disepakati.

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat TPB. Sekretariat TPB mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan;
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat TPB menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana;
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

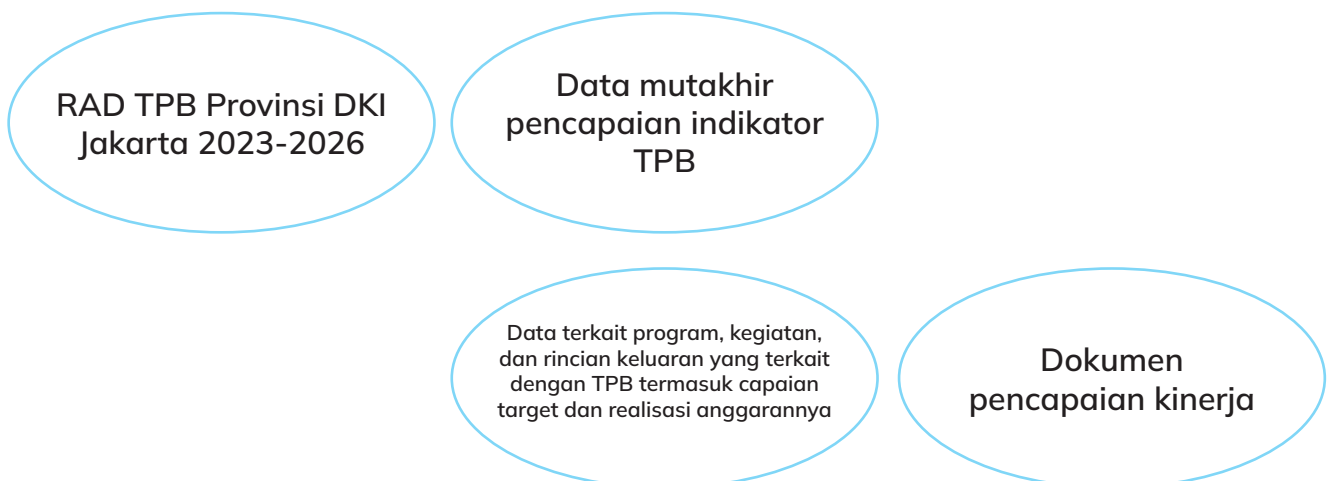
Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB yang merupakan panel independen dan nirkepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

Gambar 4.1.1 Bagan Struktur Organisasi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs



Sumber: Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB Edisi II

Bahan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian TPB



Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB seperti diatur dalam Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB Edisi II (dua) yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. Substansi laporan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Form 1 (Satu) (Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian TPB)

Form 1 (satu) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran seluruh indikator-indikator TPB di tingkat nasional (RAN) dan daerah (RAD) sesuai dengan Metadata Edisi II (dua). Di tingkat pusat (RAN), angka dasar dan capaian tahun berjalan menggunakan capaian nasional dengan target tahun berjalan diambil dari dokumen RPJMN, RKP atau Renstra Kementerian/Lembaga.

Berikut ini adalah contoh isian Form 1 (satu) yang memiliki informasi sebagai berikut: (1) nama tujuan TPB; (2) nama target TPB; (3) kode indikator TPB; (4) nama indikator TPB; (5) sumber data; (6) satuan; (7) angka dasar (baseline); (8) target tahun berjalan; (9) capaian tahun berjalan; dan (10) status pencapaian.

Tabel 4.3.1 Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian TPB

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN (1)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator TPB/SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) 2020 (7)	Target 2021 (8)	Capaian 2021 (9)	Status (10)
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)	BPS	%	5,12	4,8		
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. (2)							
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian	Rp. Juta/tenaga kerja	55,33	57,20		

Catatan:

- Nomor (9): diisi dengan capaian/realisasi tahun berjalan (tahun 2021) pada setiap indikator TPB yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber data yang tertulis pada tabel di atas (kolom nomor 5).
- Nomor (10) diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator TPB yang diukur dari perbandingan capaian indikator TPB tahun berjalan dengan target indikator TPB tahun berjalan. Simbol status pencapaian sebagai berikut:

Gambar 4.3.1 Keterangan Pencapaian TPB

Simbol	Keterangan
● : Tercapai (<i>achieved</i>)	Target tahun berjalan dapat tercapai.
▶ : Akan tercapai/membaik (<i>positive change</i>)	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
▼ : Perlu perhatian khusus (<i>negative change</i>)	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

Form 2 (Dua) (Formulir Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Pemerintah)

Form 2 (dua) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah yang mendukung pencapaian target setiap indikator TPB baik di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat (Form 2a), pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tataran rincian output (RO) K/L yang tercantum dalam RAN TPB dan dilakukan penandaan (tagging) TPB pada aplikasi KRISNA-Renja K/L. Sementara di tingkat daerah (Form 2b), pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap subkegiatan dari Renja OPD sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang tercantum dalam RAD TPB setiap provinsi.

Berikut ini adalah contoh isian Form 2a (dua a) untuk memantau perkembangan realisasi capaian RO K/L tahun anggaran 2021 termasuk realisasi anggarannya setiap semester. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 2a (dua a) antara lain: (1) nama program, kegiatan, dan RO K/L; (2) satuan dari RO K/L; (3) target tahun 2021 sesuai Renja dan RKA K/L tahun 2021; (4) realisasi target RO K/L pada semester I dan II tahun 2021; (5) alokasi anggaran RO K/L tahun 2021; (6) realisasi anggaran pada semester I dan II tahun 2021; (7) lokasi aktual di mana kegiatan RO dilaksanakan atau barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan (8) instansi pelaksana.

Tabel 4.3.2 Formulir Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Pemerintah

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN										
Program/Kegiatan/ Rincian Output (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Target Tahun 2021 (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (6)		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT										
Indikator TPB/SDGs:										
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita										
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe										
024.DD Program Kesehatan Masyarakat										
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080. QEA. 001	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Ibu Hamil KEK	238.000		63.265,09			Kemenikes
		2080. QEA. 003	Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	Balita	140.000		5.265,99			Kemenikes
059.GH Program Komunikasi Publik										
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494. QMB. 003	Diseminasi Informasi mengenai Stunting	Layanan	234		13.972,67			Kemen- kominfo

Form 3 (Tiga) (Formulir Self Assessments Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, dan Akademia)

Form 3 (tiga) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan akademia. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap output kegiatan dari setiap program yang menjadi target dari Lembaga Non Pemerintah yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian target setiap indikator TPB. Data yang digunakan mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.

Berikut ini adalah contoh isian Form 3 (tiga) untuk memantau perkembangan realisasi capaian tahun anggaran 2021 termasuk realisasi anggarannya setiap semester. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 3 (tiga) antara lain: (1) nama program, kegiatan, dan output kegiatan; (2) satuan dari output kegiatan; (3) target output kegiatan tahun 2021; (4) realisasi target semester I (satu) dan II (dua) tahun 2021; (5) alokasi anggaran untuk setiap atau seluruh output kegiatan tahun 2021; (6) realisasi anggaran pada semester I (satu) dan II (dua) tahun 2021 untuk setiap output kegiatan; (7) sumber pendanaan pelaksanaan setiap/ seluruh output kegiatan; (8) lokasi aktual di mana output kegiatan dilaksanakan; dan (9) nama organisasi/lembaga nonpemerintah yang melaksanakan program.

Tabel 4.3.3 Formulir Self Assessments Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, dan Akademia

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
Program/Kegiatan/ Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Target Tahun 2021 (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Lembaga Pelaksana (9)	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Indikator TPB/SDGs: 12.3.1.(a) Persentase Sisa makanan											
Nama Program: Dapur Pangan											
Kegiatan 1: Program Dapur Pangan adalah program mendekatkan akses pangan berbasis masyarakat.	1.1 Jumlah mitra Dapur Pangan	Mitra	115		35.120			Galang dana, mitra dunia usaha		Institusi Dapur Pangan Nasional	
	1.2 Jumlah penerima manfaat program Dapur Pangan	Orang	5.750							Institusi Dapur Pangan Nasional	
Kegiatan 2: Edukasi tentang pencegahan dan penanganan makanan berlebih melalui Dapur Pangan	2.1 Jumlah kegiatan edukasi yang terlaksana	Kegiatan	3								Institusi Dapur Pangan Nasional
	2.2 Jumlah mitra program yang mendapatkan edukasi	Edukasi	25								Institusi Dapur Pangan Nasional

Form 4 (Empat) (Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017)

Form 4 (empat) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan pelaku usaha. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan dari setiap program/kegiatan yang menjadi target dari pelaku usaha yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian target setiap indikator TPB. Data yang digunakan mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja pelaku usaha.

Berikut ini adalah contoh isian Form 4 (empat) untuk memantau perkembangan realisasi capaian pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 4 (empat) antara lain: (1) kode yang disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017; (2) kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL; (3) kode indikator TPB; (4) nama indikator TPB; (5) nomor urut kegiatan/proyek/program; (6) nama proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan; (7) nama indikator capaian yang menjadi ukuran keberhasilan proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan; (8) satuan untuk mengukur indikator capaian; (9) waktu (durasi) pelaksanaan usaha sampai mencapai target; (10) angka target yang akan dicapai;

Tabel 4.3.4 Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Evaluasi Target	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan	Waktu (Tahun)	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.6.c.2.b.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	1	Penerapan upah minimum sesuai peraturan pada pekerja	Upah minimum sesuai dengan regulasi	%	1	100	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	1	100	

Form 5 (Lima) (Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut)

Form ini ditujukan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target-target TPB antara lain sesuai kategori berikut ini: (a) sumber daya manusia; (b) kelembagaan; (c) keuangan; (d) regulasi; (e) operasional; (f) politik; dan (g) lainnya, serta rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan institusi pelaksananya baik pemerintah maupun nonpemerintah

Tabel 4.3.5 Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor dan Nama Tujuan Target	Sumber Daya Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya			

Form 6 (Enam) (Format Pelaporan Pembelajaran TPB)

Form 6 (enam) ditujukan untuk merekam informasi dan pengalaman baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, program dan kegiatan yang jelas, data yang akurat, dan dapat direplikasi di tempat lain. Pembelajaran dituliskan dalam box dan mencakup informasi

Tabel 4.3.6 Format Pelaporan Pembelajaran TPB

1.	Nama Tujuan dalam TPB
2.	Nama Institusi
3.	Nama Program
4.	Lokasi dan Waktu Kegiatan
5.	Latar Belakang
6.	Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7.	Hasil dan Dampak
8.	Tantangan dan Pembelajaran
9.	Peluang Replikasi

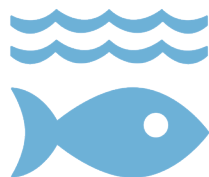
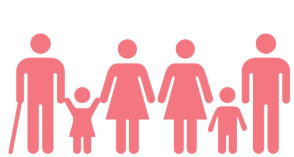
Waktu Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3, pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan Ayat 4 menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan pemantauan disampaikan 15 (lima belas) hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB disampaikan satu bulan

Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB mempublikasikan hasil pemantauan setiap semester dan hasil evaluasi pencapaian setiap tahun. Keduanya merupakan dokumen publik yang dapat diakses secara daring melalui portal resmi Provinsi DKI Jakarta <http://sdgs.jakarta.go.id>. Lebih lanjut, portal tersebut juga menyajikan informasi terkini mengenai kegiatan, program, dan kebijakan terkait pelaksanaan TPB



BAB 5 PENUTUP



Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB merupakan pedoman bersama seluruh aktor di Provinsi DKI Jakarta, baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Setiap target pencapaian TPB dalam dokumen ini telah melalui proses perumusan partisipatif. Setiap pemangku kepentingan berkontribusi sesuai dengan keunggulan dan sumber dayanya masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian TPB.

Berdasarkan prinsip dan semangat inklusivitas, sepanjang proses penyusunan dokumen RAD melibatkan berbagai pihak seluas mungkin. Berbagai kelompok rentan yang menjadi sasaran dari pembangunan juga dipastikan dapat terlibat secara aktif dan setara. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan, program, serta proses pemantauan dan evaluasi TPB juga diupayakan seoptimal mungkin agar dapat terlaksana secara inklusif.

Prinsip penting lain dalam pelaksanaan TPB adalah integrasi. Berbagai upaya pencapaian setiap indikator dan target TPB tidak berdiri sendiri dan terlepas dari indikator maupun target lain. Kegiatan dan program yang diorientasikan untuk mendukung pencapaian satu atau beberapa target memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian target-target lainnya. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam upayanya mencapai TPB.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan; (2) penguatan koordinasi; (3) peningkatan kapasitas; (4) perluasan pemanfaatan teknologi; (5) pemberian penghargaan pada pemangku kepentingan yang terlibat; dan (6) penguatan strategi kampanye.

Pencapaian TPB tidak dapat diupayakan oleh satu atau beberapa pihak. Kontribusi pemangku kepentingan-pemangku kepentingan secara lebih luas menjadi salah satu kunci untuk mencapai target hingga tahun 2030. Hal ini membutuhkan pengelolaan dan penguatan kolaborasi secara tepat hingga setiap pemangku kepentingan dapat saling menumbuhkan rasa saling percaya, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan mensinergikan program atau kegiatannya.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan juga penguatan kapasitas dari pemerintah maupun nonpemerintah. Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pelatihan, bimbingan, konsultasi, studi banding, seminar, lokakarya, dan lainnya. Melalui upaya-upaya tersebut, seluruh pemangku kepentingan diperkuat pemahamannya terhadap TPB, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Sejalan dengan itu, penting untuk pemberian penghargaan terhadap pemerintah dan nonpemerintah. Hal ini akan memberikan motivasi bagi pemangku kepentingan-pemangku kepentingan yang telah menunjukkan prestasi yang mendukung TPB. Bentuk penghargaan dapat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dengan tetap dalam kerangka mendukung upaya-upaya dalam memaksimalkan pencapaian TPB.

Upaya meluaskan dukungan publik terhadap pencapaian TPB juga menjadi hal penting lain yang sebaiknya dioptimalkan. Melalui strategi kampanye dan komunikasi yang tepat, TPB diharapkan dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Beragam materi kampanye dapat disampaikan baik secara daring maupun luring pada publik. Hal ini merupakan upaya penting untuk memastikan terbangunnya kesadaran dan motivasi untuk mendorong pencapaian TPB bersama-sama.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung ragam upaya tersebut, pemanfaatan teknologi informasi penting untuk dioptimalkan. Dalam konteks ini, pengolahan data dan informasi atas berbagai pencapaian TPB dapat dilakukan dengan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian, proses monitoring dan evaluasi yang secara rutin dilaksanakan akan cenderung lebih mudah. Selain itu, pemetaan dan monitoring ribuan kegiatan pemerintah yang relevan dengan pencapaian TPB juga dapat semakin mudah, transparan, dan komprehensif dengan bantuan teknologi informasi.

Akhir kata, RAD TPB Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya merupakan living document yang akan terus disempurnakan sesuai dengan dinamika yang ada. Dokumen ini berperan penting sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian indikator-indikator TPB di Provinsi DKI Jakarta

PJ GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

DAFTAR PUSTAKA

Adriana, N., Nurwahidin, N., & Huda, N. (2021). Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta. UI Scholars Hub. Retrieved October 3, 2023, from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=meis>

Bank Indonesia. (2021, February 17). Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari 2021. Bank Indonesia. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20DKI%20Jakarta%20Februari%202021.pdf>

Bank Indonesia. (2023, May 1). Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2023. Bank Indonesia. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20DKI%20Jakarta%20Mei%202023.pdf>

Bappeda. (2022). Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Bappeda. Retrieved October 20, 2023, from <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumen-rencana-pembangunan-daerah-tahun-2023-2026/>

Biznet. (2023). JAKARTA. Biznet Networks. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.biznetnetworks.com/company/network/city/place/jakarta>

BPS. (2021, February 5). BPS Provinsi DKI Jakarta. BPS Provinsi DKI Jakarta. Retrieved October 3, 2023, from <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/542/perekonomian-dki-jakarta-pada-triwulan-iv-2020-kembali-membaik.html>

BPS Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022. BPS Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2022). Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Dinkes DKI Jakarta. https://drive.google.com/file/d/1ouF8eYDreYu_8Tz2WlhbjJaYklw5NTm/view

Dinas Lingkungan Hidup. (2022). KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta 2022- 2042. Website Dinas Lingkungan Hidup. <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/publikasi/kajian>

- Dinas Lingkungan Hidup. (2022, Desember). Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup. Retrieved April 25, 2023, from <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/publikasi/iklh>
- Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. (2022). Laporan Akhir: Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2023, September 4). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Dinas Lingkungan Hidup. Retrieved Desember 12, 2023, from https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/files/dikplh/DIKPLHD_Jakarta_2023.pdf
- The Economist. (2021). Safe Cities Index 2021. file:///Users/user/Downloads/Safe-Cities-Index-2021_eng.pdf
- ILO. (2020). Hasil penelitian- Ketahanan hidup perusahaan hampir habis, pekerjaan semakin terancam. ILO. Retrieved October 3, 2023, from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_745054.pdf
- IQAir. (2023). World's most polluted cities. IQAir. Retrieved September 2, 2023, from <https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities?continent=&country=&state=&sort=-rank&page=1&perPage=50&cities=LembLiKtxzRZbDYP4>,
- Kang, S. (2016). Inequality and crime revisited: effects of local inequality and economic segregation on crime. *Journal of Population Economics*, 29, 593-626.
- Kemendikbud. (2023, Desember). Warisan Budaya Takbenda | Tentang. Warisan Budaya Kemdikbud. Retrieved Desember, 2023, from <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=pengertian%20dan%20domain%20warisan%20budaya%20takbenda>
- Kemenkeu RI. (n.d.). KPBU - Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? KPBU. Retrieved October 3, 2023, from <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini-publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana-dengan-pembangunan-infrastruktur>
- Kemenko Perekonomian RI. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.ekon.go.id/source/publikasi/Dampak%20Pandemi%20Covid-19%20terhadap%20Ketenagakerjaan%20Indonesia.pdf>
- Kemenparekraf RI. (2021, August 18). Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved October 3, 2023, from <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>

Kementerian Kesehatan RI. (2023, February 3). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Ayo Sehat. Retrieved January 11, 2024, from https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531._MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf

Lemhanas RI. (2022, July 18). IMF: Perang Ukraina Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Global. Lemhannas RI. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1626-imf-perang-ukraina-pengaruhi-pertumbuhan-ekonomi-global-2>

LRT Jakarta. (2022, July 26). Home Berita Pembangunan LRT Jakarta Fase 2 Kelapa Gading-JIS Segera Diwujudkan. LRT Jakarta. Retrieved October 3, 2023, from https://www.lrtjakarta.co.id/pembangunan_lrt_jakarta_fase_kelapa_gadingjis_segera_diwujudkan_berita565.html

MRT Jakarta. (n.d.). MRT Jakarta Fase 2. MRT Jakarta. Retrieved October 3, 2023, from <https://jakartamrt.co.id/id/proyek/fase-2>

Pemprov DKI Jakarta. (2019). Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta 2020-2024.

Pemprov DKI Jakarta. (2022, Juni). Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2026.

Sheykhi MT. (n.d.). Increasing Crimes vs. Population Density in Megacities. *Social Crimonol*, (4). 10.4172/2375-4435.1000136

Surge. (2021). Surge. Surge. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.surge.co.id/about-us>



Sukses Jakarta untuk Indonesia